

ISSN 2598-0548



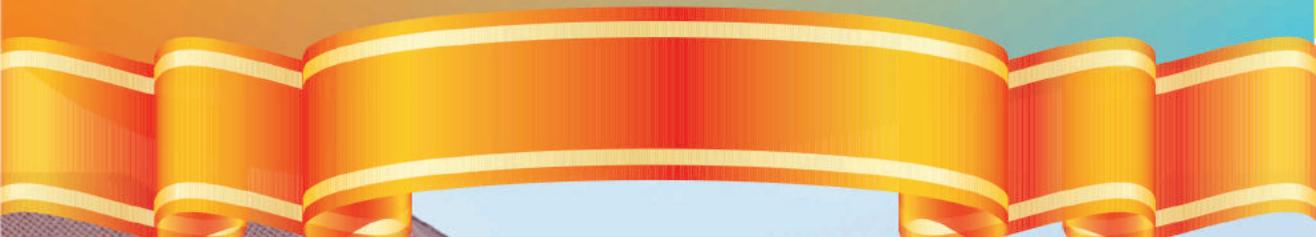
Globethics.net

PROCEEDING

Graduate Forum 2016

Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia

NAVIGATING YOUTH ACTIVISM AND FUTURE TRAJECTORY:
(Education, State and Identity)



BOOK 1

Editor : Muhamad Abdul Aziz

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 7-8 November 2016

ISSN 2598-0548

Proceeding Graduate Forum 2016
Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia
Navigating Youth Activism and Future
Trajectory: Education, State, and Identity

Editor: Muhamad Abdul Aziz



Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta



Proceeding Graduate Forum 2016 Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia
Navigating youth Activism and Future Trajectory : Education, State, and Identity.

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab : Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
(Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga)

Reviewer : Dr. Nina Mariana Noor, M.A

Redaktur : Muhamad Abdul Aziz

Desain & Layout : Arief Rifkiawan Hamzah

Penerbit : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
bekerjasama dengan IKMP
UIN dan Globethics.net

Alamat Penerbit : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Email : pps@uin-suka.ac.id

Frekwensi Terbit : 1 tahunan

Kontak : Muhamad Abdul Aziz, 085853383800

Alamat : Jl. Padma, Nayan, 108, Maguwoharjo,
Yogyakarta

ISSN : 2598-0548

Edisi pertama, September 2017

Copyright@2017 by Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
All Right reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

PENGANTAR DIREKTUR PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA
SAMBUTAN PRESIDEN IKATAN MAHASISWA PASCASARJANA (IKMP)
SAMBUTAN KETUA PANITIA GRADUATE FORUM

ISLAMIC YOUTH PARTICIPATION IN THE EMERGENCE OF LOCAL RITUAL:
ENCOUNTERING THE SPIRIT OF ISLAM IN THE LOCAL TRADITION

Taufiqurrohim ____1

PRIDE AND GRADE: MA'HAD ALY IN THE DILEMMA OF SINCERITY

Mochammad Maola____10

THE IMPORTANCE OF CULTURAL AWARENESS IN ENGLISH LANGUAGE
TEACHING

Khoirunnisa, Ummi Khoirunisya' Masyhudianti, Hanita Masithoh____21

PERAN GOOGLE DOCS DALAM KONTEKS *ASYNCHRONOUS PROBLEM-BASED E-
LEARNING (E-PBL)*

Irwanto____27

PENDIDIKAN BERDIKARI BAGI PEMUDA MENUJU PEMUDA UNGGUL
BERKEMAJUAN (*STUDI PADA KARANG TARUNA PONOROGO*)

Wahyudi Setiawan, Muh. Tajab, Katni____35

STUDI KRITIS UU NO.40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN (FILOSOFI DAN
IMPLEMENTASI)

Wildan Imaduddin Muhammad____41

STIMULASI PERKEMBANGAN BICARA ANAK USIA PRASEKOLAH MELALUI
METODE *STORYTELLING* DI SEKOLAH PAUD DAN TK (USIA 3-5 TAHUN) DI
KECAMATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG

Itryah dan Urfaa Fajarwati____53

PENTINGNYA KARANG TARUNA SEBAGAI SALAH SATU WADAH UNTUK
MENYIAPKAN GENERASI EMAS

Besti Usmafidini dan Okti Wilymafidini____63

STRATEGI PENINGKATAN OLAHAN TUNA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN
INDONESIA MENJADI DESTINASI WISATA HALAL DUNIA

Yasinta Zulaikha____71

RESISTENSI KULTURAL ORANG MUDA GALUR MANGGALA TERHADAP
SUPRASTRUKTUR KAPITALISME AKHIR

Rosyid Adiatma____79

PEMUDA DAN INISIATIF BARU FILANTROPI ISLAM DI YOGYAKARTA: STUDI
TERHADAP KOMUNITAS LASKAR SEDEKAH DAN YAYASAN SENYUM KITA

Azis____87

PEMUDA, PENDIDIKAN, DAN PERAN AKTIVIS KEPEMUDAAN DI PERBATASAN PULAU SEBATIK, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Choirul Fuadi dan Naufal Fitryansyah____99

PENDIDIKAN PERDAMAIAN UNTUK ORANG TUA DAN ANAK DALAM PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL
Laelatul Badriyah____107

PEMUDA DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS
Muhammad Anshori____117

PEMUDA SEBAGAI MOTIVATOR MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN POTENSI LOKAL DEMI MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Marta Dwi Ningrum____135

HAKIKAT PENDIDIK DALAM DIMENSI DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
Wahyudi____143

UTOPIA PERUBAHAN MENANTI LAHIRNYA PEMUDA EKSISTENSIALIS
Ridhatullah Assya'bani____155

KAMPANYE JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (*STUDI DESKRIPTIF TENTANG KAMPANYE SOSIAL YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA TASYAKUR DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015*)
Nurbayti____165

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM *VOCATIONAL EDUCATION (VE)* UNTUK MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC)*
Merriam Modeong____181

INOVASI PEMUDA DALAM MENGELOLA DESA WISATA DENGAN SEGALA KETERBATASAN
Ihsan Rahmat____189

TRADISI ISLAM DAN PENDIDIKAN HUMANISME: UPAYA TRANSINTERNALISASI NILAI KRAKTER DAN MULTIKULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA
Irwan Ledang____205

KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN *HEDONISME ISLAMI*: DARI PEMUDA UNTUK MASYARAKAT
Aufal Khima dan Ahmad Bakhrudin____221

PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN POKOK PERJUANGAN KEBUDAYAAN
Ardy Syihabuddin____235

RELIGIUSITAS SEBAGAI MEKANISME KONTROL PERILAKU DELINKUENSI REMAJA
Syarifan Nurjan dan Adang Darmawan Achmad____243

PENGANTAR

Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Alhamdulillah, atas hidayah dan inayah-Nya Graduate forum bisa diselenggarakan dengan lancar, tertib dan sesuai harapan. Shalawat dan do'a kita sampaikan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW, karena teladan dan pandangan serta berkat perjuangan beliau beserta sahabat dan keluarganya, sehingga Islam masih jaya hingga dewasa ini.

Acara Graduate forum ini terbilang sangat sukses, bahkan mengalahkan conference-conference yang lainnya. Karena mengingat begitu banyak antusias para presenter dari berbagai kampus di Indonesia. Eksistensi pemuda sebagai pembaru dan penerus bangsa dalam menghadapi situasi yang sangat cepat berubah, misalnya budaya pop (pop culture), sebagai sebuah sintesis yang secara kreatif dimunculkan oleh kaum muda, ketika dihadapkan dengan berbagai arus, mereka ingin tampil Islami tapi tidak tertinggal dengan perkembangan global, misalnya mereka membuat jilbab yang keren dan lain-lain. Namun, kita tahu bahwa ada banyak kelompok-kelompok kecil (small groups) pemuda yang masih bergeliat menyongsong perubahan demi perubahan di Indonesia. Kelompok ini tidak hanya minoritas di kalangan muda secara umum, tetapi juga tereksklusi di tengah lingkungan mereka sendiri (universitas/kampus). Secara dominan, hanya segelintir pemuda yang terlibat aktif di dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Sisanya adalah kalangan terdidik yang apatis terhadap realitas sosial.

Graduate Forum menjadi arena perkuat riset dikalangan mahasiswa pascasarjana S2 dan S3 di Indonesia yang mempertemukan dari berbagai disiplin ilmu, pemikiran dan keahlian. Graduate forum ini juga menjadi ajang mimbar bagi para mahasiswa pascasarjana guna menelorkan, pikiran, ide, dan temuan yang brilian dengan pelbagai topik yang bervariasi. Graduate Forum yang diselenggarakan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga merupakan yang pertama kali, yang diawali dari rihlah ilmiah Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) yang kemudian graduate forum ini dilaksanakan langsung oleh mahasiswa IKMP UIN Sunan Kalijaga.

Eksistensi pemuda sebagai pembaharu dan penerus generasi untuk masa mendatang kian lumpuh dan rapuh. Pandangan tersebut ditopang oleh kenyataan bahwa pemuda dominan terjerembap dalam perilaku yang tidak lagi produktif. Mereka cenderung konsumtif dalam segala hal. Nilai-nilai tradisi yang menjadi kebanggaan dan inspirasi pemersatu pemuda tahun 1928 terkikis. Kepedulian terhadap kondisi bangsa dan negara tidak lagi mewarnai perilaku pemuda. Akhirnya,

semangat Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatranen Bond nyaris hilang dari perilaku generasi muda Indonesia dewasa ini. Memang, ada kelompok-kelompok kecil (small groups) pemuda yang masih bergeliat menyongsong perubahan demi perubahan di Indonesia. Kelompok ini tidak hanya minoritas di kalangan muda secara umum, tetapi juga tereksklusi di tengah lingkungan mereka sendiri (universitas/kampus). Secara dominan, hanya segelintir pemuda yang terlibat aktif di dalam organisasi-organisasi kepemudaan. Sisanya adalah kalangan terdidik yang apatis terhadap realitas sosial.

Kegiatan Graduate forum ini berakhir dengan kesan bahwa kajian yang disampaikan oleh para pembicara mengungkapkan bagaimana eksistensi pemuda di tahun mendatang dengan segala tantangannya. Perkembangan dunia yang begitu cepat, pemuda membuktikan bahwa mereka adalah sosok terpenting dalam memunculkan solusi terbaik dan berperan penuh sebagai penentu bangkitnya peradaban yang lebih baik. Pergerakan pemuda memiliki kekuatan untuk mendobrak tatanan tradisional yang masih terdapat banyak problem dan memiliki kekuatan mengadvokasi sebuah kontrak sosial baru antara Negara dan Masyarakatnya. Gerakan pemuda sebagai *civil-society* akan terus menempatkan pemuda pada posisi pelatuk sekaligus pengawal perubahan. Posisi pemuda sangatlah strategis dalam menentukan arah politik, ekonomi, sosial suatu negara baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Sebagai penghargaan dan apresiasi yang tinggi terhadap hasil kajian dan karya para pemakalah Graduate forum, seluruh materi/makalah, baik sesi paralel, IKMP membuat proceeding dalam bentuk buku yang berisi sejumlah kumpulan materi/makalah yang dipresentasikan dalam forum Graduate Forum, dengan harapan agar bisa memberikan nilai tambah terutama bagi para penulis dan presenter, disamping juga sebagai laporan dokumentasi tentunya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam pembuatan proceeding Graduate Forum ini, semoga memberikan manfaat yang besar bagi semua kalangan.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, Januari 2017

SAMBUTAN

Presiden Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

M. Amursid

IKMP (Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana) adalah Organisasi Mahasiswa Pascasarjana S2 dan S3 yang berkedudukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. IKMP terbentuk tahun 2007, seiring berjalannya waktu setiap kepemimpinan mengalami pasang surut. Berawal dari kegelisahan Mahasiswa Pascasarjana untuk pentingnya sebuah wadah komunikasi lintas jurusan atau konsentrasi, sehingga menjadi media diskusi akademik yang berkelanjutan. Perbedaan konsentrasi mahasiswa memicu kajian-kajian ilmiah lebih *variative* dan wacana keilmuan lebih luas. Keterbatasan waktu pertemuan dosen di kelas membuat mahasiswa merasa tidak cukup, maka keberadaan organisasi IKMP menjadi ruang tidak terbatas untuk berdialektika lebih intensif.

Perguruan tinggi dituntut untuk melahirkan mahasiswa yang unggul dalam hal riset dan menghasilkan karya yang diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional. Pergeseran paradigma dalam perguruan tinggi sejatinya telah mengalami perubahan yang signifikan, yang awalnya hanya merupakan pusat pengetahuan dan mercusuar ide-ide normatif, menjadi pusat riset dan pengembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Inti dari pergeseran ini mengarah pada pengembangan riset (penelitian) untuk melahirkan, mengembangkan, merespon, mengoreksi, berbagai pengetahuan, fenomena, dan pembuatan-pembuatan terobosan baru bagi kompleksitas permasalahan manusia, karena tantangan masa depan adalah: *how to reach understanding as distinct from memorization and to view learning as the construction of personal meaning rather than reproduction of meaning.*

Maka dari itu, IKMP hadir untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan riset tersebut. Pada kepengurusan Periode 2016-2017 membentuk Sekolah Riset di bawah tanggung jawab pengurus Kementerian Riset, kegiatan Sekolah Riset didalamnya akan ada *Workshop* sebagai awal mendeteksi Mahasiswa Pascasarjana/Magister cenderung *library research* atau *field research*. Akan ada kelas-kelas riset sesuai kebutuhan mahasiswa yang akan meriset dan didukung oleh mentor-mentor (dosen) handal dibidangnya masing-masing, sehingga terbentuk lebih dalam skill riset. Outputnya melahirkan jurnal, tesis dan disertasi yang berkualitas.

Karya Ilmiah menjadi istimewa dan memiliki bargaining jika terpublikasi di jurnal. Ekspektasi ini agar bisa tercapai maka IKMP dibawah Kementerian Publikasi dan Jurnal, kegiatan pendukung dengan mengadakan rutin *review jurnal*, bedah tesis, bedah disertasi dan Buku. Tampil di ruang-ruang seminar sebagai kandidat *call paper* adalah harapan besar untuk Mahasiswa. Seperti kegiatan yang sudah dilaksanakan di Gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, tanggal 7-8 November 2016 yaitu **Gradute Forum (GF)** dengan tema **Menavigasi Aktivisme dan Trajektori Masa Depan Kaum Muda : (Negara, Pendidikan dan Identitas)**. Adalah ajang pertemuan Mahasiswa Pasca Se-Indonesia dengan mengirim paper terbaiknya sesuai tema yang ditawarkan. Harapannya kegiatan ini berkelanjutan setiap tahun.

Kepengurusan IKMP 2016-2017 yang baru berjalan 3 bulan, berusaha bersinergi dengan pihak kampus agar segala keresahan akademik mahasiswa bisa terakomodir terutama Riset/penelitian. Hal yang paling simple dengan adanya organisasi ini, saling mengingatkan

untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentu dengan segala kekurangan membutuhkan masukan-masukan dari Mahasiswa S2/S3 dan Dosen. Organisasi IKMP memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa S2/S3 untuk bergabung mengembangkan kegiatan-kegiatan dengan tujuan kepentingan akademik. Atas dukungan dari Bapak Rektor, Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas maka dengan penuh keyakinan kegiatan-kegiatan IKMP kedepan akan semakin sukses.

Yogyakarta, Januari 2017

Sambutan
Ketua Panitia Graduate Forum
Muhamad Abdul Aziz

Graduate Forum mahasiswa pascasarjana se-Indonesia kali ini bertemakan, **“Navigating Youth Activism and Future Trajectory : State, Education and Identity”** yang dihadiri oleh 63 presenter dan 60 partisipan dari berbagai kampus dan berbagai jurusan di Indonesia. Acara ini dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) sementara sebagai tuan rumah adalah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Yang bertempat di gedung Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun tujuan diadakan Graduate Forum guna merumuskan Islam ramah sebagai inspirasi peradaban dunia, mengembangkan kultur riset di kalangan mahasiswa pascasarjana se-Indonesia, dan menjawab problem pemuda dan pendidikan, pemuda dan negara, pemuda dan identitas di tengah masyarakat globalisasi. Keynoot speaker : Dr. Hj. Nihatul Wafiroh, MA, sedangkan sebagai narasumber : Prof. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D (Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), Dr. M. Najib Azka (Direktur Youth Studies Centre), Suhadi., MA., Ph.D.

Acara ini diselenggarakan selama dua hari Senin dan Selasa, tanggal 7 hingga tanggal 8 November 2016. Dengan rangkaian acara seremoni dibuka di gedung Convention Hall oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, namun berhalangan hadir, dan kemudian digantikan oleh direktur pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Kemudian dilanjutkan dengan keynot speaker, plenary session, pararel session, dan penutupan acara. Saya berharap bahwa dengan adanya graduate forum dikalangan mahasiswa pascasarjana di ruang akademik dan publik yang lebih terbuka dapat menjawab permasalahan yang ada pada generasi muda di Indonesia saat ini, dan dapat memberikan solusi agar pemuda Indoensia lebih cerdas, berpendirian, jujur, beretika, mencerahkan, dan punya komitmen yang tinggi terhadap masa depan bangsa dan negeri ini. saya pun berharap lagi agar Graduate forum ini tidak hanya sebatas tingkat nasional, akan tetapi setingkat international, dengan nama ASEAN GRADUATE FORUM di tahun 2017.

Saya menilai graduate forum merupakan suatu ajang dan mimbar akademik yang tepat untuk mendiskusikan ide gagasan, pikiran, dan temuan baru mahasiswa pascasarjana. Saya juga melihat bahwa graduate forum menjadi media membangun jejaring intelektual mahasiswa pasca. Ia pun menambahkan, bahwa Graduate Forum 2016 saat ini menyajikan tulisan-tulisan riset terpilih yang ditulis oleh mahasiswa pascasarjana S2 dan S3 se-Indonesia yang konsen dengan permasalahan kaum muda. Saya berharap dengan menghadirkan para penulis dari berbagai jurusan dan konsentrasi tersebut bisa memperkaya perspektif dan memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang permasalahan di kalangan kaum muda. Saya memandang bahwa problematika yang sudah menginfeksi kaum muda adalah fakta yang harus disikapi secara arif dan bijaksana. Dengan menyikapi seperti itu, maka kita bisa berfikir jernih, objektif, dan komprehensif untuk kemudian bisa mencari jalan keluar dari masalah ini. Bagaimanapun, generasi muda adalah aset bangsa yang harus kita jaga dengan sepenuhnya dan seserius mungkin. Oleh karenanya, berbagai tawaran tentang arah tujuan kaum muda dan penguatan pendidikan keagamaan serta pendidikan karakter bangsa dapat memberikan solusi.

Didorong oleh adanya beberapa pertimbangan tersebut, maka kebutuhan untuk melakukan sebuah perencanaan strategis untuk membentuk wajah pemuda Indonesia yang ramah, moderat dan toleran di masa sekarang dan di masa yang akan datang, menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan oleh para pemuda. Dalam hal ini, Graduate Forum yang mengangkat tema “**Menavigasi Aktivisme & Trajektori Masa Depan Kaum Muda : (Negara, Pendidikan dan Agama)**” Menjadi sangat relevan untuk diselenggarakan dalam rangka mencari beberapa solusi yang konkrit dari para akademisi bersangkutan. Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi : Pidato Ilmiah Keynote Speaker, dialog, presentasi Mahasiswa Pascasarjana S:2 dan S3 dan ramah tamah.

Dalam forum graduate forum, tema-tema penelitian pascasarjana konsen pada pemuda dan permasalahannya. Seperti : pertama, **Pemuda dan Masalah-Masalah Struktural** : Pemuda dan kemiskinan, Pemuda dan akses pendidikan yang tidak merata, Pemuda dan transnasional Islam, Membangun kerukunan umat beragama melalui pemberdayaan ekonomi, Perdamaian, harmony, dan keadilan social, Negara kesejahteraan dan demokrasi politik, Kapasitas dan krisis kepemimpinan (lokal dan nasional), Kekuatan pasar global dan liberalisasi ekonomi

Kedua, **Pemuda, Pendidikan dan Multikulturalisme** : Kapitalisme dan Pembangunan, Arah Pendidikan dan sumberdaya manusia. Pluralitas dan konflik keagamaan, Peran strategis kepemimpinan kaum muda, Masyarakat sipil dan demokrasi, Pemerintahan yang bersih dan baik dalam Islam, Multikulturalisme dan konflik sosial, Perempuan dan pemimpin nasional, Menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama melalui pendidikan, Menuju pendidikan kewarganegaraan dan multikulturalisme, Membangun harmoni dan perdamaian melalui pendidikan agama.

Pemuda, Sains dan Teknologi : Penguatan teknologi tepat guna, Sainteks berbasis sumberdaya lokal, Teknologi informasi dan komunikasi yang humanis, Sinergitas saintis, industri, pemerintahan masyarakat, Perencanaan tata ruang perkotaan yang berwawasan lingkungan, Deteriorisasi kualitas lingkungan dan kearifan lokal. **Pemuda dan Pengembangan Masyarakat** : Kedaulatan petani-nelayan dan pelestarian varietas lokal, Pekerjaan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Eksistensi dan prospek kesehatan masyarakat, Eksistensi dan prospek pengobatan tradisional, Agama dan pemberdayaan masyarakat. **Pemuda dan Kemaritiman** : Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan, Optimalisasi Indonesia sebagai poros maritim dunia, Diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan, Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, Produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan.

Pemuda dan Maqashid Al-Syariah : Membaca ulang konsep Maqashid al-syariah, Pemuda dan fenomena syariat Islam, Hukum kontemporer dan konflik isu kebebasan beragama, Pemuda dan Penegakan hukum Islam, Penilaian kebijakan keagamaan : studi perbandingan. **Pemuda, Teologi dan Pluralisme** : Al-Qur'an, perdamaian, dan resolusi konflik, Hadis dan hubungan manusia , Pemikiran Islam klasik pada dialog antar agama., Pemikiran Islam kontemporer tentang dialog antar agama, Perdamaian dan konflik di wilayah non Islam, Debat teologi dan pluralisme agama, Isu HAM dan konflik keagamaan., Tasawuf dan keberagaman agama dan Komodifikasi Agama.

Yogyakarta, Januari 2017



ISLAMIC YOUTH PARTICIPATION IN THE EMERGENCE OF LOCAL RITUAL: ENCOUNTERING THE SPIRIT OF ISLAM IN THE LOCAL TRADITION

Taufiqurrohim¹

¹*Center for Religious and Cross Cultural Studies*
Email: taufiqurrohim@yahoo.co.id

ABSTRACT

How Muslim youth encountering local festival is fascinating discourse in the age where the spirit of Islamic revivalism is going on. By this, Dieng Culture Festival is known as one of the popular annual ritual which performs the traditional cultural attraction in Central Java, especially in Banjarnegara and Wonosobo which is heavily rooted on Javanese Hindu tradition. The different perspective of the awareness in considering the Importance of the ritual comes from the diverse community and society to acknowledge this kind of the ritual. So, this paper tries to examine the participation of the youth in enduring the annual festival as one of the events which not only give the advantage for the sustainability of the ritual itself, but also influence to the society around the place economically, socially and spiritually. Through youth participation, this research would try to reveal how youth is significant resource to build multi-cultural community. Using the theory of the “spectacle attraction”, the writer tries to trace how useful the ritual effecting Dieng as one of the well-known place of the tourism and spiritually affecting to the way of religious life to see the ritual through the direct observation to the place, interview the practitioner of the ritual and the documentation review as the supporting data of the research. Here, I argue that encountering Islam and local tradition has shaped Muslim youth identity in understanding local community and multi-cultural society.

Keyword: Muslim Youth, Local Festival, Multi-culture, Spectacle Attraction

A. INTRODUCTION

The ritual repertoire is very diffuse which some people still question about the role with the religious belief. For some extends, ritual has the purpose as the therapeutic context especially in emotion and spiritual recovery unexceptionally in disaster order. Here, the religious belief plays a basic role in response of the existence of the rites due to its value is useless and contradicted with their belief. Again, the critics also come from the perspective ‘narcissism’ which assume ritual make people went wrong and lack of the disaster management (Post 2003: 6). Here, the writer tries to examine the position of the argument with the case of *ruwatan rambut gembel* as the basic point in order to find what is the role of the ritual connecting with the practitioner and inhabitant belief with this kind of festival. I argue that the religious sect and belief influenced to ritual repertoire in assuming its role for the society. Indeed, the significance of the ritual can reduce the disaster remembrance as the traumatic recovery and effected to the pattern of the society to see the ritual positively. Moreover, the attendance of the spirit of Islam among Youth Muslim gives a bridge in



finding a conducive situation and mutual understanding in the multiculturalism society due to the its diversity of the culture.

Therefore, this paper firstly tries to explain the myth of the ritual and its belief among the practitioner of the Dieng Culture Festival to find the emergences. Next, tracing the response of the ritual is the influential explanation that can be considered, regarding the situation of Dieng people which has multiculturalism society. The involvement of the youth is the last and the main discussion of this paper which encourage the motive of the youth to conserve the annual culture due to its influence to the society not only creating the public diversity consideration but also concerning to the development of the tourism affecting to economic, spiritual and other social matters.

B. THE MYTH OF RAMBUT GEMBEL IN DIENG CULTURE FESTIVAL

The Kids with *rambut gembel*¹ at Dieng Plateau, is a such phenomenon are interesting to be examined. The tangled hair grows in children, not because of genetic factors, or because they never wash your hair. This phenomenon cannot be explained biologically. Symptoms of hair grows tangled make his parents very concerned. This is what makes the parents Child with *rambut gembel*, trying to accept the fate that their child haired is tangled. Children's tangled hair favored by his family, because the tangled hair draws our attention to see their lives further. Therefore, at the time of his front teeth children are dated, tangled hair must be cut with a ritual. Time ritual child's request must be obeyed, and should be appropriate, there should be no less.

*Nyi Roro kidul*² is often associated with child tangled hair. but it is not just her that is associated with *rambut gembel*. There is also Kiai Kolodete, Dewi Laras Jinde Nini, Nini Legs and Robyong. Some of these figures correlate with the presence of the phenomenon of child tangled hair in the Dieng Plateau. The Javanese beliefs seen in how they are treated special in their family, and when the ritual cutting tangled hair. Children's tangled hair is believed to be a surrogate of natural supernatural, which must be treated well, all requests must be obeyed. The aim is to come to terms with the natural inhabitants of the supernatural, which believed to be the caretaker of children tangled hair. This is also a reception destiny that cannot be avoided, because the child's tangled hair cannot be held or denied by anyone. In a ritual, tangled haircuts seen an attempt to adjust to the supernatural realm, where there are offerings that no longer tangled hair back with her children.³

The phenomenon of children's hair tangled can be explained by the theory of connection between myth and ritual. Esposito (2006) stated the *myth* is a symbolic story of the human history which related to the ultimately govern the destiny and has particular power expected for them. The ritual explained as the action connecting to the sacralized story which has descended from one generations next so the festival held is basic periodical result of the myth and ritual embedded by the sacred of the human destiny (Esposito 2006: 8). But the conflict here, when The existence of two forms Different approach of the religious belief, which must always exist and cannot be united, distinguishing the sacred and the profane. This is to show that the child This tangled hair is sacralized to the people of the Dieng Plateau. Currently, children tangled hair into a main attraction for Dieng Plateau travelers.

¹ *Gembel* means dirty, tousled, or unlucky

² The mystical Queen of the South Coast of Java

³ Interviewed with Hartono (48) on 29 July 2016



When rituals are tangled haircut festival implemented, many people participated in this procession and profitable for tourist attraction. This is where looks faded hair sanctity of child beggars. Therefore, something sacralized is determined by the community, as well as when the value of something sacred fade and become profane, and the society is the one who make this decision. This paper tries to answer what is the meaning *ruwatan* ritual connecting with the disaster discourses and religious belief?

C. THE MEANING OF THE *RUWATAN* AND DISASTER INTERPRETATION

Ruwatan originally from the word Javanese Language *ruwat* with the additional *-an* in the last of the word. *Ruwat* means cleansing from the wholly about the bad luck and the dirty thing (spiritually) inside the people, community or such of thing as like land, village, animal or trees. *Ruwatan* is a usual Javanese practice to purify the bad thing inside which has particular requirement that should be obey as like taking bath with the seven flower, gamelan music, wayang and the other ritual. As like the kids who get *rambut gembel*, they should purify with such of the ceremony because of that gift but sometimes tangled hair known as the disaster for them.

To connecting ritual with the disaster discourses, I will start the next discussion with the question how categorization of disaster come from personal to the group of responsibility of the disaster? While, the definition of the disaster still debatable among scholars coming from the scientific or social view in defining disaster. as Kemkens (2013) cited from Oliver Smith said that there was no consensus to disaster definitions which set of the physical impact or social constructed perception.

The theory of Robert Stallings (2005) on “disaster, crisis, collective stress and Mass Deprivation” is the basic point I take here which *collective stress* as the main point. The “mandate” and “social system” from the Barton’s definitions of disaster can be typologies at the disaster repertoire (2005: 243). *Rambut gembel* can be seen as a mandate for every to help the people who the disaster. As the explanation above, the tangled hair is the personal disaster that make much people have a sympathy because they can purify the bad luck by particular ritual which spends a lot of money. The existence of the cutting of *rambut gembel* Festival can be said as the social system which in this ceremony.

Furthermore, in social field, I will agree with Kreps’s exploration (1998: 26) in disaster as systematic event and social catalyst

For some time now, sociologists have interpreted disasters as special types of societal phenomena, in part because they are dramatic historical happenings (events), and also because they compel collective reactions (social catalysts). By recognizing these key conceptual features of disasters, we are able to see how and why they can be distinguished from environmental hazards of various types, and an even broader range of societal concerns.

Interestingly, Kreps criticizes about that concept, because based on him, the disaster scope in natural disaster, physical harm and social disruption rather than categorized social issues on disaster as collective reaction. But here I will use the “traditionalist approach” had been used by Kreps because it caged on the reciprocal exploration, the future understanding of the disaster may spread around the socialists which interest in this kind of case. So the exploration of the disaster phenomenon, I think, not merely about the scientific explanation



but it should involve social issues. It causes the social catalyst during disaster as like politic, humanistic and also psychological approach.

In the other hand, examining the disaster in social issues is so very risk. Hence, its divisions reflect to the framing and locating the inhabitant religious interpretation to the meanings attached to catastrophic events by local populations (Kearnes 2012: 50). The very problematic approach around the disaster issues is clash of the religious belief with the role of the ritual. The assumption of the does not make sense and ritual is unappropriated with the religious teaching always rise in the surface. So the next, the will discuss about those explorations which connected with study case of Dieng.

D. THE CONNECTION RELIGIOUS BELIEF AND RITUAL

The functions and dysfunction of the religious belief is influence to the people who believe in of the disasters including the effect of the ritual to the disaster. Kemkens provides three considerations that should be mentioned when We talk about disaster. the first one is the religious belief is not come from suddenly response but it was from such of the process influencing the people who face the disaster. Furthermore, the religious belief and practice is not static but dynamic and the last is no conclusion can be drawn for the people who face disaster giving more benefit because of its religion (Kemkens 2013: 60).

The similar religious background will interpret with the same way and will take it as the simultaneously a tendency of the mutual interpretation due to the local culture (2013: 70). So automatically, it cannot be avoided that with the different of the religious background also has various interpretation to the ritual. The interview with Mbah Muji (68) one of the *sesepuh desa*⁴ describe that there are some Islamic sects which spread in the villages in Dieng Volcano Range, this kind of situation effected to the response with some ritual which had been existed in Dieng Plateau. Most of the People in Dieng followed Nahdhatul Ulama' (NU) as their religious sect, or as the traditionalist one who can embrace such of the cultural ritual as like *Ruwatan rambut gembel*. But for the first, the Muhammadiyah one which at the first of the ceremony, they did not join in this kind of the ritual. By the time, they join the ceremony without questioning the importance and the role of the ritual. The difference approach had been done by *Salafiyah* movement which try to ignore and did not acknowledge the ritual in their religious belief. Mbah Muji added that the existence of *Salafiyah* is only in two village, Pekasiran and Sumberrejo, one of the village in Batur Banjarnegara, which started rom ten years ago. The attendance of the *Salafiyah* is supported with headman who supported its teaching spreading. And by the time, the local cultural and religious ritual as like *sedekah bumi*, *tahlilan* and *maulidan* is lost from its village.

Salafiyah is known as the resurgence movement that tries to back the Islamic tradition and culture which happened in prophet Mohammad era. In his book 'The Making of Sufism: Islamic Reform in Twentieth Century', Henry Lauziere identified that *Salafism* as the reformist one which include the modernist perspective in twentieth century as like Al Afghani and Abduh talk as *salafy* through its writing. The next is *purist islam* means that Salafist as the most authentic and the purist one, unsullied by any innovation (*bida*), deviation (*inirf*), or accretion (*iyda*) and uncontaminated by exogenous influences. It is the pure Islam to which the pious ancestors of the first three generations conformed and the last

⁴ The old people which respect and honor by most of the people in the village and often ask to lead the ceremony and ritual. Interviewed on 30 July 2016



is “originalist” approach to the theologies means that they did not recognize about first *fitna*, or civil war, which split the Muslim community in the mid-seventh century. They find all of them including the Ashari and Maturidi doctrines followed by millions of Muslims today—to be misguided, heretical, or offensive to God in one way or another (Henry 2016: 6-7). It can be seen why most of the Salafism adherent refuse the religious and cultural ritual that had been existed before them. The assumption to purify as the “purist one” become a basic point for them. The resurgence to back and originalize the pure Islam that had been contaminated by perspective Ashari and Maturidi is the different issues for them.

Interestingly Dieng Volcano Range, specifically in Pekasiran and Sumberrejo has a long history with the big disaster happened in that place. The first one is the eruption of the poisonous Sinila Crater who killed 148 people in 1979 (Miller 1983: 15). The eruption is unpredictable which Sinila in that period was not acknowledged as the dangerous crater rather than Timbang crater, which no far from Sinila crater, known as the poisonous crater and has history of eruption in 1928 and 1939. Thus, the eruption of Sinila crater killed more than one hundred people in Sumberrejo village.

The second one is land slide which killed most of the people in a hamlet which one people leaved in this village and the rest is dead. The associated myth which connected with this disaster is about the story of Sodom and Gomorah of the prophet Luth.⁵ Named is the hamlet Lagetang, one part of the Pekasiran village, who lost only in one night when it happened in 16 April 1955. Long time before the landslide happened, Lagetang well-known with its crop that the inhabitant affluent but with those excess, the society did not be grateful with the God’s gift. There doing some attitude that forbidden by the religious role as like gambling, sexual deviate and lack of the religious practice. Every night, they organize an erotic dance and finished with the sexual orientation among them and in the night of the disaster, they do that forbidden religious activity. Thus, this disaster associated with the attitude of the Lagetang inhabitant as the punishment for them consequently.

From those two stories of disaster, the Pekasiran and Sumberrejo inhabitant has a past traumatic of the disaster. The appropriated religious belief that supported their psychological bad memories of the religious resurgence make them join with the sect of “*purist Islam*” which acknowledged the cultural ritual and unoriginal religious practice as *bid’ah* one. So it slowly diminished practice regarding this perspective. The distinguishing between sacred and profane is the big issues for them as the practice of Islamic purifying. However, Ekstrom (2007) said that ritual is cannot be separated from the sacred view and the sacred is also bond in profane so there is no possibility sacred without profane and conversely. Moreover, ritual is the sacramental action with the ordinary behavior, object and substance but it still retains the original and ordinaries from the realities (Ekstrom 2007: 234).

There are two kinds of the religious belief which effected to the victim of the disaster, internal and external factors (Kemkens 2013: 62). Internal factor can be seen on the concept of the suffering after the disaster where the religion plays a big role of feeling and psychological context. In this case, I agree with Kemkens’s perspective which the role of religion also can embed into the disaster discourse also. Because when the disaster comes, the role of the religion here could be come as the response of the human suffering. The concept of the suffering also can be debatable where it also cannot be feel for the religious

⁵ <http://daerah.sindonews.com/read/1086458/29/kisah-dusun-sodom-gomorah-di-banjarnegara-yang-dilaknat-tuhan-bagian-1-1455806276>. Retrieved in 15 August 2016



people. The panic situation when disaster surely with the less of his religiosity, the contradicted situation would be different faced by religious people because he would response as the God's order that should be respond calmly without his self-suffering but feels other suffering yet it level of the piety. It was happened after the disaster; it was happened in case of Pekasiran and Sumberrejo which has history of disaster indeed it added with the myth religious deviation which connected with the religious belief and practice.

The external factor here can be point of the consideration of the belief in disaster ritual. The social engagement that have been done by the disaster ritual contains the meaning of sharing empathy not only physically but also psychologically. The existence of the ritual gives a calmness for the victim in remembrance the disaster and also the ritual which packed by the festival likes give the power to forget what happen in the past. Conserving the culture is the next issues should be mentioned here cause with the different place also have different way of the rites and also the pride of the cultural ancestor that time by time slowly diminished with the more modernized society and reformed its religion without diminishing the local culture and practice.

E. THE PRESENT OF THE MUSLIM YOUTH IN MULTICULTURALISM SOCIETY

In the multiculturalism discourse, there were three step of the condition that happened in the society in negotiating the appropriated decision in various complexity of multiculturalism. The step does not concern on the suitable indication should be taken but rather than as the providable consideration in resonance of the people respond of diverse culture.

First, the "public reason" that mentioned by the John Rawls the basic standard of the human interaction among the other to find its mutuality of the understanding and tolerance in multicultural society. In his book "the law of the people, He stated:

The term "peoples," then, is meant to emphasize these singular features of peoples as distinct from states, as traditionally conceived, and to highlight their moral character and the reasonably just, or decent, nature of their regimes. It is significant that peoples' rights and duties in regard to their so-called sovereignty derive from the Law of Peoples itself, to which they would agree along with other peoples in suitable circumstances. As just or decent peoples, the reasons for their conduct accord with the corresponding principles (Rawls 1999: 27)

The explanation above indicate that every person has the distinction with the other, can be said multiculturalism, which differentiate from its character and morality in responding the other. Regarding those condition, the individual should obey the other people perspective as the "corresponding principle" for the public reason as the basic standard of decision. But when understanding the justice of the democracy, the idea of the public reason is still questionable cause it rises one sidedness of the decision. Moreover, this idea is also still utopist, can be seen on the term "public" that has created from individuality but it does not consider the present of personal matter.

It was different with Chantal Mouffe (2005) who criticized about the idea of public reason where it criticized about the conception of good is very different for every personality, hence it also potentially regulates a conflict among society. Here, Mouffe offers the theory of "agonistic pluralism" to differentiate between the agony and antagonism. The



deliberative democracy is can be advocated here where the consensus a basic stand of the practice (Mouffe 2013: 17).

The last is critics comes from Bikkhu Parekh in his Book “rethinking multiculturalism”. The Rawls pluralism which focused on the morality diversity rather than looking for the good sense of the solution (2000: 81). But when we see about the conception of the good, every religion has claimed the idea of good. So here, the differentiation between the good and right prioritization is influential matter arguing the political way of thinking rather than metaphysical way of conception.

Here, the role of the Muslim Youth in Dieng is as the capitalist of the multiculturalism society. There was no public reason of the of the existence of the annual cultural ceremony and the consensus of the people around the space. The different interpretation of ritual that happened in the diverse society indicate how the respond of the various way of thinking in multi identity place. The different sect of Islam which picturing in the three categorizations as like traditionalist, modernist and puritanism point out in this place but the diversity was still acknowledged in this tourism attraction place.

The direct response of the youth Muslim in conserving not only the cultural heritage of the Javanese but also the Islamic teaching. It can be seen from the arrangement of the agenda of Dieng Culture Festival which currently added with *pengajian*⁶ agenda and such program in the mosque although there was no the religious agenda schedule at the first time of the annual ceremony⁷.

The presence of the youth also creates a condusive multiculturalism society in the way of the conception of good for every people. The mutual understanding of good mark with its impact spiritually, economically and socially in relation. Spiritual affect provides from the cultural ceremony which advocate Javanese culture as the descendant of spiritual tradition. *Wayang*, *ruwatan* and *tahlilan* is the traditional way of religion for the Javanese conformist people who feel its religiosity from those jurisdictions. The economically influence can be seen on the tourism discourses approach which it can promote the place as the beautiful and suitable place for the spare time. The existences of the hostels, inn, the souvenir seller, the entrance payment for the hiking and other tourism seem give the positive efficacy of tourism potency. And the last is social effect of the tourism festival also tightening the relationship among the people in different area of the village. Dieng Culture Festival is multiarea and multiage ceremony which engage not only youth people and also the matured and old people to join the agenda. The fact that Dieng Volcano range admitted into two regencies, Banjarnegara and Wonosobo, also unite this two societies into the festivity.

The theory of “spectacle attraction” in the tourism place by McDaniel (2015) is suitable for this case of the multiculturalism society way of negotiation. The festival offers new ways of understanding architecture, leisure, entertainment, and religion in the region (McDaniel 2015: 3). The other approach also mentioned by Bremer (2015) which he gives three considerations of the tourist attraction.

The first is by promoting “calendar of the events” due to attract the huge tourist by showing musical, art and also the historical-architectural art which put educational mission behind those events by “calendar and guide” in promoting the tourism then after that, making

⁶ The religious speech from the religious people and reading the religiously text
Interview with Eko, a 25 years old Youth in 29 July 2016



fellowship as the last step of this guide. So unconsciously the step of teaching and fellowshiping have been done to the visitors because of their experiences in the site which influence in spiritual commitment.

The next one is how the money circulation and negotiation of preservation of the site. Maintaining the tourism zone by souvenir sealing and food service around the temple becomes a particular agenda of the tourism promotion. The last is the role of the authoritarian with the ownership which also includes resistance behind it as like missionaries. Controls of the management and presentation of the tourism place effected to the consumption object that has been received by visitors managed by organized people also. But here the resistance come from the Javanese cultural conservation through promoting festival which also supported by the management.

Therefore, the economic, social, theological and political orientations that constitute the meaning ascribed to tourism place can be approach in the analysis of these places as spaces contestation that are embedded in larger national and international contexts. Considering how the discourse and practices surrounding these sites is deployed in the construction and contestation of normative definitions of religion, returning to the question of how to define the practice of travel to places of religious import in the multiculturalism society.

F. CONCLUSION

Dieng Cultural festival is annual festival which arranged by the local people since 2006 at the first time to help the kids with *rambut gembel* regarding its myth of bad condition for them and mystical consideration. But by the time, it is become the popular annual festival in promoting the tourism place effecting to the society economically, spiritually and socially in relation. Regarding the multiculturalism society in the Dieng Volcano range, the diffuse response of the various sect of the identity also rise while the Dieng Cultural Festival and other ritual was held.

But the response of the Youth Muslim indicates the way of the multiculturalism negotiating the situation which started from the idea of the public reason by John Rawl then how to distinguish the definition of the agony and antagonym. And the last the idea of good and right reason in multiculturalism society by Bikkhu Parekh. Showing the youth participation in Dieng Cultural Festival which seem has the positive effect to the local inhabitant point out their spirit of engagement, development and also their spirituality of belief.

Moreover, as the last consideration, I will take Parekh understanding culture which started from the nature and structure of the culture itself. Then it will rise the dynamics of the interaction that the diversity of the culture as the way of thinking. Evaluating and respecting the culture that happened in the self and other identity could be the basic standard of the political interaction in the multiculturalism society.

REFERENCES

Bremer, Suzanne, (2001). *Tourism and Religion at Temple Square and Mission San Juan Capistrano*. The Journal of American Folklore, Vol. 113, No. 450, Holidays, Ritual, Festival, Celebration, and Public Display (Autumn, 2000), pp. 422-435



Ekstrom, Linda, Richard D. Hecht. (2007) *Ritual Performance and Ritual Practice: Teaching the Multiple form and dimensions of the Ritual in Teaching Ritual* edited by Catherine Bell, New York: Oxford University Press. Pp. 225-250

Esposito, John. L, Darrel B. Fasching, Todd Lewis. (2006). *World Religion Today: second edition*. New York: Oxford University Press.

Kearnes, Matthew, Klausner, Francisco, Lane, Stuart. (2012) *Critical Risk Research (Practices, Politics and Ethics): Religion and Disaster in Anthropological Research*. US: John Wiley and Son's Publisher

Kemkens, L. (2013). *On the Connection between Religion and Disaster: Literature Review*, Yogyakarta: CRCS UGM.

Kreps, Gary. A. (1998) Disaster as Systemic Event and Social Catalyst in E. Quarantelli, *What Is a Disaster: Perspectives on the Question* London: Routledge Publisher

Lauzerie, Henry. (2016). *The Making of Sufism: Islamic reform in Twentieth century*. US: Columbia University Press

McDaniel, Justin Thomas. (2015). *Spectacle Attractions and Buddhism in Southeast Asia*. In: DORISEA Working Paper Series, No. 15.

Miller C Dar, R. Sukhyar, Santoso, S Hamidi (1983). *Eruptive History of Dieng Mountain Region Central Java, and Potential Hazard for the future eruption*. United Stated Department of the Interior Geological Survey.

Mouffe, Chantal. (2005). The limits of John Rawls's pluralism", *Politics Philosophy Economics*. <http://www.sagepublications.com>

Mouffe, Chantal. (2013). What is Agonistic Politics", in *Agonistics – Thinking the World Politically*. UK: Verso Press

Rawls, John. (1999). *The Law of People: The Idea of Public Reason Revisited*. USA: Harvard University Press

Parekh, Bikkhu. (2000). *Rethinking Multiculturalism*. London: McMillan Press

Post, P. et. Al. (2003). *Disaster Ritual: Exploration of an Emerging Ritual Repertoire*. Leuven: Peeters.

Stallings, Robert. (2005). Disaster, Crisis, Collective Stress and Mass Deprivation in Ronald, W. Perry, E.L. Quarantelli: *What Is a Disaster*, Xlibris Corporation

Online Resources

<http://daerah.sindonews.com/read/1086458/29/kisah-dusun-sodom-gomora-dibanjarnegara-yang-dilaknat-tuhan-bagian-1-1455806276>



PRIDE AND GRADE: MA'HAD ALY IN THE DILEMMA OF SINCERITY

Mochammad Maola¹

¹CRCS UGM

Email: maolamochammad@yahoo.com

ABSTRACT

Ma'had Aly today have a big deal with government. In May 2016 the Ministry of Religion Affair legitimates 13 Ma'had Aly in Indonesia to be equivalent with undergraduate program at university. Meaning, Ma'had Aly graduates will have a degree (S.Ag / Sarjana Agama / Bachelor of Religion), equal with an undergraduate degree in particular Islamic universities. The question raised then addressed to the student of Ma'had Aly. Since the beginning of their enrollment in Ma'had Aly, they didn't have any intention to persuade degree or title from Ma'had Aly. Since Islam teaches it's follower that learning is obligatory, the Muslim should do that for the sake of God, not for obtaining degree or another profane. The questions will be adressed are; (1) What's the meaning of degree according to Ma'had Aly student? (2) What's the meaning of degree in Islamic literature? This study will examine student from legitimated Ma'had Aly and compared with student from Pesantren that have illegitimate Ma'had Aly. The research will be conducted qualitatively through observation, interviews, and supported by the literature related to the discourse. The results of this study supposed to be a guide of future direction of student in Islamic education.

Keywords: Ma'had Aly, Degree, Sincerity

A. INTRODUCTION

Pesantren is an Islamic institution that has a long history. Pesantren have done many things in educating and preparing a generation prepared with knowledge in science and faith. Pesantren oftenly identified and affiliated with Nahdlatul Ulama, an Islamic mass organization in Indonesia, although many other organizations that have a boarding or a similar system but in different name. Pesantren recognized as the best system compared to modern systems from the west, so that it becomes a characteristic that is identically belong to Nahdlatul Ulama which is engaged in cultural and traditional education. (Azra, Afrianty & Hefner, 2007). Nahdlatul Ulama, also known as a moderate organization that teaches its followers to belong and strengthening the country. It was realized by the proximity of Nahdlatul Ulama government. Indonesian president who was elected in 2014-2019 proved the connectedness of Nahdlatul Ulama in Indonesia with many ministers and cadres of Nahdlatul Ulama in the government and council. It makes the mission of Nahdlatul Ulama is further supported by the government, such as the establishment of the National Santri Day.

NU as moderate religious organizations trying to survive amid a siege of the fundamentals. One attempt campaigned is education. For organizations that have affiliates in many schools, Nahdlatul Ulama urge people to learn or send their children at the boarding school. The campaign started with the Ayo Mondok movement in 2014. In 2015, NU held a conference with the theme of Islam Nusantara (nu.or.id). Then in 2016, the state legalized the Ma'had Aly to give a degree in order to gain more interest from people to go to pesantren.



Pesantren could not be far away from modernity although they claim as traditional institution. Ma'had Aly is one of the way to modernize pesantren and adapt to public interest. Rosidin (2012) observing some important aspects of the modernity in pesantren, and some conclusions could be drawn up. First, pesantrens with their long and significant roles in Indonesia history face steadily growing challenges in negotiating with ongoing changes as the results of modernization, if not secularization, of national education system and of the growing demands of Muslim parents to have better as well as future promising education for their children. The role of state is very important. Many pesantrens, mostly small salafiyah typed ones, failing to encounter this continuing developments suffer and in many cases even bring about their total shutting down. The shift to survive is a new habit and adaptation through modernize in the system or the stakeholder. Second, the foundation of the Ma'had Aly by several pesantrens is one of the ways taken by the pesantrens to response to the current developments within Muslim communities, to define or even maintain their central roles as well as to preserve their tradition in producing kiyais in such a modernized and globalized Indonesia.

The state policy to authorize Ma'had Aly provide new discourse about the independence of the boarding school. It will have a large impact. For example, technically, it means teachers in Ma'had Aly must have minimum education level of master. Though many clerics or teachers at the school who never attended college. Then morally, it would change the orientation of intention for Ma'had Aly students which are supposed to study as a form of worship to God, sincerely without expecting to get a degree (Zakaria, 2010).

B. LITERATURE REVIEW

1. Pesantren

Indonesia as a Muslim majority expresses Islamic teaching in various method. Hefner (2009) said there are three types of Islamic education in Indonesia. First is pengajian Quran. It is basic teaching for all student to read Quran in arabic text through read and recite but not literally understand the meaning. Second is study at a pesantren or pondok, an Islamic boarding school for students aspiring for students usually in early childhood or youth to study deeper in Islamic teaching, doctrines, and rituals. Third is enrollment in a madrasa or modern day school which is similar with public school, using grades, certificates, textbooks, examination, and certain curriculum.

Pesantren is a knowledge-rooted tradition in the history of Indonesia. Pesantren, according Zamakhsyari Dhofier (1980), an Islamic education system which is growing since the early arrival of Islam in Indonesia. To browse the emergence of schools, closely related to the original search of the arrival of Islam in the archipelago. The process of commercial interaction led to the establishment of settlements in the beach and gave birth to boarding institutions that foster a sultanate's capital. It is certain that the scholars came accompanied the Muslim merchant or even the merchant were once scholars. Interaction maritime that was happened at that time not only commercial but also the interaction of science and propaganda (Pohl, 2006).

Dhofier (1980) mention at least five components into a pattern typical of Islamic tradition, there are: dormitory, mosque, students (Santri), cleric (Kyai) and the yellow book (kitab kuning / Islamic Traditional Literature). Dormitory for students is a hallmark of Islamic tradition, which distinguishes it from the traditional education system in mosques growing in most other Muslim countries. The education system called surau or dayah in



Minangkabau or Islamic boarding school in Aceh, basically the same as the dormitory system, just different names. The mosque is an element that can not be separated from the boarding school, and the most appropriate place to educate the students, perform prayers five times a day, the Friday prayer and studying Islamic teaching. Mosques function as an educational center of Islamic education system is a legacy of the Prophet Muhammad. The scholars are teaching books of classical Islam. Santri are students who came from various regions to study the religion from the scholars. They come and study in boarding schools with the aim of becoming a scholar. Typically, students are divided into two, Mukim students and kalong students. Mukim are students who come from areas far from the school and settled in quite a long time to learn the religion from the Kyai. While kalong is students who come from villages around the pesantren and follow the teaching in pesantren by means of alternating or do not live in boarding schools. While Kyai is the most essential component in the tradition of pesantren. Often kyai are so properly a founder of pesantren or his descendants and growth depends on the ability and person of the kyai. Although most kyai living in rural areas, they are part of an elite group within the social structure, political and economic in Indonesia. The kyai have strong influence in society, which is becoming an important force in the political life. The task of the kyai as teachers and advocates of Islamic teachings so that it has an important position in the community, while Yellow Book is the classic Islamic literature which became a reference in the science of religion (Dhofier, 1980).

Since its influence as getting bigger in the society, Porter (2001) observed that education in Indonesia experienced a dualism because it is managed by the Ministry of Religious Affairs (MORA) for religious education and the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) for public education. Besides the modernists of new order regime see there are two major obstacles in implementing the standardization of education in Indonesia, that is political Islam and traditional Islam. But in 1970, the Ministry of Religious Affairs issued a policy that is a major concern for so long, that is modernizing the system of religious education with an interdisciplinary curriculum from the west. Then in 1975, the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Education and Culture, and the Ministry of Internal Affairs to sign agreements with the religious education curriculum standardization. That means that religious education should not only study religion, but there must be science, social, and more. The new order business in carrying out national development and maintain stability in the country made new order run some policies that change the orientation of the national education system. Murtopo as one of the top officials in the new order has a mission to remove officials leaning of NU because it is considered not in line with the new order agenda. In addition, the centrist party, Golkar, the new order has a political maneuver to place his people in strategic positions, including in the ministry. People who are not in line with the new order as NU would be deposed. Many santri also doctined the knowledge of modern curriculum and schooled in the West to study such Islamic Studies at McGill University. After that, they returned to Indonesia to teach in moderate and modern way. They even sent back to boarding schools to bring a change in the orientation of religious education. The government's aim at that time was that religious people can support national development and avoid the possibility of the formation of an Islamic state that can potentially damage the inter-religious harmony. The first way is the standardization of curriculum religious education institutions to include a general curriculum as much as 70% and 30% for religious education. In addition, Harun Nasution elected as rector of IAIN Jakarta and brings new changes and brought the Shiite doctrine and Mu'tazilite teaching and



assessed by it strongly supports the advancement of the nation, is inversely proportional to understand Ash'ari-Syafiiyah and sunni which are represented by the NU.

2. Ma'had Aly

Ma'had 'Aly was established to maintain the tradition of academic boarding school increasingly faded. Ma'had 'Aly there to maintain the existence of the academic tradition of boarding schools for higher education or Ma'had 'Aly is one form of business institutionalization academic tradition forerunner boarding school with takhassus (specialization) study program that has been developed over time. Establishment of Ma'had 'Aly motivated by the need to improve the quality of education boarding school so it could produce a high level cleric in the middle of the advancement of science and technology. The education process in Ma'had 'Aly actually a merge between the model of pesantren and a model of university. In line with the directions and government policy in the development of higher education, Ma'had 'Aly seen as one alternative to higher education because of their special religion. Ma'had 'Aly is a typical form of higher education boarding school which is different from the university in general. Ma'had 'Aly intended as a forum for continued study of the level of education and teaching diniyah Ulya, Madrasah Aliah or equivalent (Ghazali & Malik. 2009).

3. Ministry of Religious Affair Legitimation

News of ma'had 'aly in kemenag.go.id begins on Tuesday, March 5, 2011. At that time, the ministry can not allow ma'had 'aly to issue the degree diploma level as in university. The reason, according to the Law on National Education System, the title can only be issued by the college as a university, college and high school. The Directorate General of Islamic Education, Mohammad Ali in Jakarta, Tuesday (15/3/2011) was responding to a request from pesantren which have ma'had 'aly, for the government to allow the provision of a college degree for students of ma'had' aly. Because of the educational process that has been taken is also equivalent to higher education. According to Mohammad Ali, it could be students ma'had 'aly obtain the official diploma, but issued by higher education institutions. For diploma level public school or madrasa, Director General said, pesantren students also have to follow the national exam. However, the composition of the subjects tested are not the same as formal educational institutions such as madrasas (kemenag.go.id).

On Thursday, August 18th, 2011, Minister of Religious Affairs Suryadharma Ali recognizes the need for standardization for Ma'had 'Aly, so the future to obtain clarity of education in higher education institutions of Islam stretcher. With standardization according to Suryadharma Ali, then the public will know the book and literature are studied. It also includes a curriculum of Ma'had 'Aly (kemenag.go.id).

On Wednesday, March 21, 2012, the Director General of Islamic Education Ministry of Religious Affairs, Nur Syam states for strengthening religious education and religion, it will perform the reconstruction of education schools, among other things by formalizing the education agency as ma'had 'aly. To that end, the arrangement will be done on ma'had 'aly existing ones, both in the curriculum, national standards and budget. The minister said the government seeks to formulate standardization ma'had 'aly. Mu`adalah or equalization process is being introduced. Thus, graduates have the competence mastery in ma'had besides religion and have a certificate in common with other university. Without losing the



characteristic of ma'had. For the development of ma'had, government is ready to provide support (kemenag.go.id).

On Friday, October 17, 2014, kemenag.go.id reported that the pesantren especially Ma'had 'Aly hopes and encourages the Ministry of Religious Affairs to immediately issue a regulation or Peraturan Menteri Agama (PMA) on Ma'had' Aly. This message is revealed in intense discussions on the forum of Ma'had 'Aly Administrative Arrangement Workshop organized by the Directorate of Education Diniyah and boarding school. The participants agreed that Ma'had 'Aly as Islamic religious educational institutions that produce a cadre of scholars needs to be given a strong regulatory base. This push back revealed considering publishing the PMA, has been through a long process of discussion and quite a long time, since the Minister of Religious Affairs chaired by Prof. KH. Tolchah Hasan. PMA Ma'had 'aly future is a derivative of the Government Regulation No. 55 Year 2007 on Religious Education, which also received the affirmation of the Regulation of the Minister of Religion No. 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education. Preparation of PMA have also been adjusted and synchronized with the Law No. 12 Year 2012 on Higher Education, Government Regulation No. 4 of 2014, even with the legal drafting the Draft Regulation on Higher Education of religious (kemenag.go.id).

Finally, on Saturday, May 28, 2016, after a long process, university-based Islamic religious schools are often called Ma'had 'Aly finally gained recognition from the Government. This recognition stems from the signing of the Regulation of the Minister of Religion No. 71/2015 on the organization Ma'had 'aly by the Minister of Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin. In this regard, the Director General of the Islamic Educational Kamaruddin Amin said the Minister of Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin will soon inaugurate 13 Ma'had 'aly by providing at the same time permit the establishment of statistics are numbers. Amin explained, Ma'had 'aly is the education unit was established and developed from and by the community and are in boarding schools. Even so, the presence of Ma'had 'aly not only for the benefit of the public schools, but also the needs of the Indonesian people. According to Kamaruddin, the presence of PMA 71/2015 not only ensure the legality Ma'had 'aly within the national education system. Moreover, this PMA clarify the Government's commitment to realize Ma'had 'aly equivalent of religious higher education institutions and public higher education institutions. Equality referred, both in the recognition, status, graduates, as well as the Government's attention to the sustainability and development. The presence of

PMA will also facilitate measures to realize the Ma'had 'aly as a permanent institutional instruments to address the fundamental problem of Indonesian Muslims as the scarcity of clerics-scholars of integrity, character, and nationality insight, he said. The inauguration of the 13th Ma'had 'aly is the first step in the revitalization process Ma'had 'aly by the Ministry of Religious Affairs. Looking ahead, continued Kamaruddin, MORA (Ministry of Religious Affairs) will be sought to educational services is expected to print undergraduate (S1) with qualified cadres-ulama clerics can be opened in every province throughout Indonesia. Not only mastered the yellow book from pesantren intellectual tradition, they are expected to contextualized in contemporary life, and capable to dialogue with the social sciences, humanities, and or the natural sciences to realize human life is fair, serious benefits, and dignity. In addition to being pesantren, Bachelor Ma'had 'aly can be a university professor, a professional teacher, head of KUA, religious judges, government officials in the field of religion, and Sharia Supervisory Board and other professions. In the



field of science, graduate Ma'had 'aly can also work as a writer, researcher, preacher, and academia. From there, it is expected the graduates of ma'had 'aly could fill the needs of the society against the clergy are qualified (kemenag.go.id).

On Monday, May 30, 2016, Ministry of Religious Affairs has issued a decree on the establishment license for 13 Ma'had 'aly following statistical numbers. This license granted by the Minister of Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin in Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Director General of the Islamic Educational Kamaruddin Amin said licensing is a form of recognition that ensures the legality Ma'had 'aly within the national education system. Looking ahead, the Ministry of Religious Affairs will continue to provide affirmation, not only on the regulatory aspects but also the facilitation in the form of a budget and more. MORA initially planned to allocate each Ma'had 'aly Rp 1 billion. But because there is a reduction in the budget, to 500 million. According to Kamaruddin, one of the monumental achievements of the Ministry of Religious Affairs under the chairmanship of Minister of Religious Affairs Lukman is to realize the revitalization process Ma'had 'aly as a formal educational institution. It aims to further mainstream the role of schools in the religious life of Muslims in Indonesia. As for the 13 Ma'had 'aly that have won permits the establishment of these statistics and numbers, namely: (1) Ma'had 'aly Saidusshiddiqiyah, Pondok Pesantren AsShiddiqiyah Kebon Jeruk (DKI Jakarta), (2) Ma'had 'aly Sheikh Ibrahim Al Jambi, Pondok Pesantren Al Asad Jambi, (3) Ma'had 'aly Parabek Thawalib Sumatra, Pondok Pesantren Parabek Thawalib Sumatra, Agam (West Sumatra), (4) Ma'had 'aly Mudi Mesjid Raya, Pondok Ulum Ad Diniyyah Mahadul pesantren Al Islamiyah (Mudi) Mesjid Raya, Bireuen (Aceh), (5) Ma'had 'aly Asadiyah, Pondok pesantren Asadiyah Sengkang (Sulawesi), (6) Ma'had 'aly Rashidiyeh Khalidiyah, Pondok Pesantren Rashidiyeh Khalidiyah Amuntai (Kalimantan), (7) Ma'had 'aly salafiyah Syafiiyah, Pondok Pesantren salafiyah Syafiiyah Situbondo (East Java), (8) Ma'had 'aly Hashim Al-Asyary, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang (East Java), (9) Ma 'had' aly At-Tarmasi, Pondok Pesantren Tremas (East Java), (10) Ma'had 'aly Maslakul Huda Pesantren fi Usul al-Fiqh, Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati (Central Java), (11) Ma'had 'aly PP IQNA ath-Thalibin, Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang (Central Java), (12) Ma'had 'aly Al Hikamussalafiyah, Pondok Pesantren Madrasah Hikamussalafiyah (MHS) Cirebon (West Java), and (13) Ma'had 'aly Miftahul Huda Pondok Pesantren Manonjaya Ciamis (West Java). Minister of Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin has given permission to the establishment of 13 Ma'had 'aly boarding school. In his speech, Minister of Religious Affairs affirmed that the existence Ma'had 'aly not just the interests of the public schools as such, but the need for Indonesia (kemenag.go.id).

According to MORA, the presence of Ma'had 'Aly is part of a larger scenario makes the implementation of Islamic education in Indonesia, especially schools, as an destination of educational world. Boarding school has an incredible power to become the mouthpiece to the world community. Islamic Boarding School institution is typically Indonesian and capable of producing moderate Muslim intellectual character. To maintain the quality of Ma'had 'Aly, MORA ensure that it only limits the courses for each Ma'had 'aly. It is thought that each Ma'had 'Aly focus steeped respective study programs as well make it as excellence and uniqueness. After five-ten years into the future, this policy will be reviewed so that study program can be added or revised (kemenag.go.id).

On Thursday, June 2, 2016, Minister for Religious Affairs Lukman Hakim Saifuddin confirms that Ma'had 'Aly not only educational institution that examines the science of



religion. Moreover, as an institution of higher education based religious schools, Ma'had 'Aly should be able to keep the tradition and develop national awareness taught predecessors. MORA hope Ma'had 'Aly can be trained leading clerical powerful and competence to the challenge of the times. He sees pesantren where Ma'had 'Aly is to have a role and responsibility in the face of the current global era. Therefore, the existence of Ma'had 'aly is an effort to answer this challenge. MORA ensure that despite giving decree of Establishment Permit, but it would not intervene in pesantren. Therefore, MORA consideration to the needs of the Board of Ma'had 'aly filled in pesantren to direct and ensure Ma'had 'aly still running on its primary purpose (kemenag.go.id).

4. Academic Degree

Indonesia is a society with a high power distance (Sumantri & Suharnomo, 2007). In a society with a high power distance such as Indonesia, status symbols accepted as a natural thing. Religious titles, academic and respect of others is seen as something important. A person's status is determined by formal titles, which shows who the person is (ascribed status) and not what has been achieved by the person (achieved status). Indonesian society, according to Mochtar Lubis (2001) is a society with characteristics that are less good is a weak character. The less powerful characters shown by the community less tenacious in defending or fighting for his beliefs. It is easy especially with a little coercion, in order to survive, a person change his beliefs. Intellectual prostitution such as the purchase of both the academic degree for master or doctoral level is usually done, even by officials such as uncovered a few times lately. The titles are perceived to raise the status of the holder, although obtained by the illegal and unlawful. Buying and selling of academic degree is a clear example of the bad side of the feminine nature of the society that less emphasis on achievement.

C. RESEARCH METHOD

This study uses a qualitative method. Data taken with observation and interviews. Informants there are two people from two pesantrens which has ma'had aly. The first is the informant who come from pesantren that have obtain ma;had aly legitimacy. The second is an informant of pesantren that do not obtain ma'had aly legitimacy. To support data, literature study was also conducted as additional information. The data that has been collected and analyzed to obtain the results and draw conclusions.

D. ANALYSIS

1. Interview

First informant said that the academic degree is something important. She has its own reasons.

"The degree is important, today those who have a degree are more acceptable in society. Because it is a scientific justification that we are recognized and have been qualified. Although it does not guarantee the quality, but the academic degree could be a motivation for students to be eager to complete his studies" (1st informant)

She also said that the academic degree was not against the rules of religion, as many Muslim scholars who have degree, whether academic or not.



"The title was common in the Islamic tradition. Most of the pupils are given to teachers as a form of respect. For example, title of Sayyid or Habib for the descendants of the Prophet Muhammad. Al-Muhaddith title for scholars in the field of hadith. Al-Faqih title for scholars in the field of jurisprudence. In addition, there are many scholars who have the title of professor such as Wahbah Zuhayli, Muhammad Al-Maliki, Saïd Ramadan Al-Buthi, Ali Gomaa, Yusuf Qaradawi and others. It made their credibility recognized, both in the Islamic world as well as in the western world." (1st informant)

While second informant has a different opinion. According to him, the degree should not be the orientation of students.

"In a lot of books, it is explained that the purpose of the study is to obtain the blessing of God. Additionally, intended to eliminate the ignorance so that we can pray properly. After eliminating ignorance, then intended to intisyarul ilmi, to spread knowledge with preaching or teaching. People who seek knowledge for other purposes, he will be mislead, even shirk because worship to other than Allah. Because learning is worship, as the Prophet Muhammad said that seeking knowledge is obligatory for every believer." (2nd informant)

Nonetheless, second informant not to blame if there is a boarding school that gives title to its graduates.

"If there is a boarding school that gives title to the graduates, the boarding school must be responsible for the policy. That is, schools should implement the ideal educational system and discipline since the administrators, teachers, and students." (2nd informant)

2. Literature Research

From the literatures, there are two classifications in discussing the meaning of academic degree in Islamic literature.

a. Heresy

According to Al-Ghazali (2004), studying is pure worship of God. Al-Ghazali rely on a hadith of the Prophet Muhammad who said that learning is the duty of every believer. If someone is looking for knowledge with a view to becoming famous, seeking praise, or to gather possessions, then he had walked to destroy religion, ruin himself, and has been sold to the world hereafter. From this it can be concluded that people who studied for other than Allah then he is heretic and stray from the straight path.

b. Intermediator

Some scholars say that studying for a degree are allowed, but the goal is the hope and the blessings of God. This is because a degree is something that can open many doors in the modern world. To be able to teach, one must have a bachelor's degree. With the title, the more trusted the public to convey their knowledge so that it can be a means of propaganda. The fiqh rule states that maa laa yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Obligations that can not be done for any reason, then the reason is obligation also (As-Suyuti, 2002).



Teaching is mandatory, preaching is mandatory, thus, an academic degree is required as intermediary in order to teach and preach.

E. CONCLUSION

Ma'had Aly as the highest educational institution in Pondok Pesantren should be the image of the institution could become a precedent in Islamic education discourse, whether traditional or modern. Students who study in Ma'had Aly is a reflection of Islamic students which are have high quality and could be an example. In this respect, sincerity is a prerequisite of a student in order to make God as the goal of learning. Ministry religions seek to attract people to learn in Pondok Pesantren. In order not to envy with universities outside, students in pondok pesantren will get a degree which is equal to particular universities. It can be useful to continue their education at a higher level, or to get a job that can guarantee a better life.

There are some who approved the plan of ma'had aly by religious ministries, some are refused. One of the main problems is about the concept of a degree. Is title important? From the results of this study concluded that there were two groups. The first is forbid studying for a degree because it is an act that leads to heresy, do something to other than Allah. It was based on a number of hadith of the Prophet Muhammad. In addition, many scholars busy studying without keen to get an academic degree.

The second group said that seeking a degree it is allowed, but as an intermediary, should not be the goal. It comes from the fiqh rules which allow it. In addition, many Islamic scholars who have an academic degree such as a doctorate or a professor. Having allowed a degree of origin used for good purposes, such as teaching, preaching, or others.

In the end, chose to seek a degree or not is something that is tolerated in Islam. This is refer to what the goal of ma'had aly itself. If ma'had aly goal is to produce graduates who are ready to teach in official institutions, or a place that need the title, then ma'had aly could support it. But if otherwise, ma'had aly could be a boarding school with a specialization (Takhasus) is not limited to age or time to learn, and do not recognize the term finished.

REFERENCES

- Al-Ghazali, A. H. 2004. *Ihya Ulumuddin*. Cairo: Dar al-Hadith.
- Al-Suyuthi, A. B. 2002. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. 2007. *Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia. Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*, 172-198.
- Dhofier, Z. 1980. *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*. Disertation: Australian National University.
- Gazali, H., & Malik, A. 2009. *Pesantren and the Freedom of Thinking: Study of Ma 'had Aly Pesantren Sukorejo Situbondo, East Java, Indonesia*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 47(2), 295-316.
- Hefner, R W. 2009. *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. USA: University of Hawai'i Press.
- Kemenag.go.id
- Lubis, M. 2001. *Manusia Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Nu.or.id



- Pohl, F. 2006. Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia. *Comparative Education Review*, 50(3), 389-409.
- Porter, D. J. 2001. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London: RoutledgeCurzon
- Rosidin, D. N. 2012. Pesantren And Modernity In Indonesia: Ma'had Aly Of Kuningan. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012: 219244.
- Sumantri, S. & Suharnomo. 2007. *Kajian Proposisi Hubungan Antara Dimensi Budaya Nasional dengan Motivasi dalam Suatu Organisasi Usaha*. Bandung: Fakultas Psikologi UNPAD.
- Zakaria, G. A. N. 2010. Pondok Pesantren: Changes and its Future. *JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education*, 2(2), 45-52.



THE IMPORTANCE OF CULTURAL AWARENESS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Khoirunnisa¹, Ummy Khoirunisya², Masyhudianti², Hanita Masithoh³

¹*English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education,
Sebelas Maret University, Surakarta, Central Java Indonesia
Email: annisanisa662@gmail.com*

²*English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education,
Sebelas Maret University, Surakarta, Central Java Indonesia
Email: ukhoirunisya@gmail.com*

³*English Education Department, Faculty of Teacher Training and Education,
Sebelas Maret University, Surakarta, Central Java Indonesia
Email: hanitamasithoh@yahoo.com*

ABSTRACT

Indonesia is one of the biggest multicultural countries in the world. It has various ethnics, languages, religions, and cultures. Between four, there are two elements; Language and Culture that have close relationship. Some social scientist maintain that culture would not possible without language. On the other hand, language is influenced and shaped by culture. Thus, language expresses culture, so learning a new language without familiarity with its culture remains incomplete understanding. The aim of this study is to describe the importance of cultural awareness in English Language Teaching. This is a literature review combining some sources of expert in the field of language and cultural awareness. The contribution of this study is to increase teacher and student understanding in cultural awareness especially in educational context in indonesia.

Keywords : Cultural Awareness, Language, English Language Teaching.

A. INTRODUCTION

Indonesia is one of the biggest multicultural countries in the world. It has various ethnics, languages, religions, and cultures. Interaction among them is possibly happened. Moreover, In today's globe environment, geographical borders and boundaries are becoming unified. As a result, Culture becomes a part of human life.

When talking about culture, it refers to differences. A group of people has each traditions, customs, beliefs, values, artifacts, and languages. It indicates that cultures truly reflect diversity. In International setting, cultural diversity is unavoidable. It is applied in many fields, such as education, language, business, tourism, public services, and etc.

One of the most recent issues that discussed all around the world is culture dealing with language. Language is influenced and shaped by culture. On the other hand, we can say that studying new language is also studying its culture. In order to build comprehensive understanding, cultural awareness in studying new language is needed.

For further information, English is the most widely spoken language in the world. Studying English is very important since English is considered as a international language. It



means, by studying English, all component of educational world should be aware in the culture of target language.

In the context of indonesia which applied English as their target language, understanding the culture of target language should be accompanied by understanding the culture of Indonesia. It will create cultural awareness, both in the target language and bahasa Indonesia.

Based on the explanation above, cultural awareness was very crucial in English Language Teaching (ELT). In conducting this study, the researchers combining some sources of expert in the field of language and cultural awareness. The discussion will be shown in the next chapter.

B. THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE

The concept of culture was firstly defined by E.B.Tylor in 1871 on printing. He was the first to provide a scientific definition of the term. According to Tylor (1924), culture is “That complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”. (E.B. Tylor : 1924). Accoring to Hudson, culture is knowledge that someone has by virtue of his being a member of a particular society. (Hudson : 1980)

The definition above is obvious that each culture belongs to each group. It means that each group has each rule of culture because culture in one group is different from others. The differences indicate the existences of different culture. In other words, Culture is the characteristics of a particular group of people, defined by everything from language, religion, social habits, music and arts.

In contrast with the word culture which has many different meanings, the definition of language are not difficult to find. According to Sapir, “language is a purely human and non-instintive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of voluntarily produced symbols”. (Sapir : 1921). In line with Sapir, Bloch & Trager define “ A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group co-operates”. (Bloch & Trager : 1942)

From those definition, we can conclude that by using language, someone could make statements, convey knowledge, explain or report something, and keep social relations among the language users. It means that people can express their ideas, feeling and information through communication. Of course, language plays an important role in human life.

Language and Culture have close relationship. Language is influenced and shaped by culture. Some social scientist maintain that culture would not possible without language. So, language is the product of culture.

C. CULTURAL AWARENESS

Tomlinson (2001) says that cultural awareness involves a gradually developing inner sense of the equality of cultures, an increased understanding of your own and other people’s cultures, and a positive interest in how cultures both connect and differ (cited in Tomlinson & Masuhara, 2004, p. 3). If we lack the culture awareness, we will get problem when we face cross culture interaction. It is simply that before we exactly want to know others, it is better for us to understand our culture first. It supports us to have deep understanding about culture where we belong including who we are, where we come from and how culture impact on us. As a result, by having self awareness we can know the norm which one is good and



which one is bad. It also encourages us to have broaden thinking, empathy and sensitivity to other culture. According to Tomalin and Stempleski (1993), cultural awareness encompasses three qualities: awareness of one's own culturally-induced behavior, awareness of the culturally-induced behavior of others, ability to explain one's own cultural standpoint .

To build cultural awareness and sensitivity, we need to recognize and explore the range of cultural influences that impact on us as individuals or group members, develop an awareness and understanding of our own basic values, attitudes, assumptions and behaviours ; learn to recognize our cultural 'red flags' - the labels we apply to people from different cultures when we are faced with unexpected or apparently inappropriate behavior ; learn to recognize our own personal and emotional reactions to ambiguity and uncertainty.

- a. Recognizing and exploring the range of cultural influences that impact on us as individuals or group members

Culture relates with the country in which individuals were born and raised. Anyhow, other social groups may also have different cultures that influence individual value, attitude and behavior. Other groups that depending on the context such as region, gender, age or generation, profession, job function, organization, religion and many other groups have an impact on who they are. Individuals can develop cultural sensitivity by identifying who they are, where they come from, what their religions are, what their professions are, etc. Individuals will know and have understanding about cultural affiliation that will influence their individual values, attitudes, beliefs and behaviors in any given situation.

- b. developing an awareness and understanding of our own basic values, attitudes, assumptions and behaviors

Cultural misunderstanding can occur based on our own unconscious core values and those of others. It is very important having our own basic beliefs , attitudes, assumptions and behaviors in order to compare our values with those that others have.

- c. Learning to recognize our cultural 'red flags' - the labels we apply to people from different cultures when we are faced with unexpected or apparently inappropriate behavior. It can be positive; such as they are so hospitable or negatives; such as they are rude and so on. They are called red flags because they should be warning us that culture may provide the best explanation for what we see. We need to conduct further analysis to really understand the situation we are in and the people we are with. Looking for parallels between our own culture and the culture we are dealing with is one useful strategy when detect a 'red flag'.

- d. Learning to recognize our own personal and emotional reactions to ambiguity and uncertainty. We will never know what exactly the culture is if we do not ever conduct investigation about the culture itself. Anyhow, we must prepare common emotional reaction such as stress and anxiety to the ambiguity present in cross-cultural situations. Learning our reactions to stress, and how to recognize these reactions in time to respond to them, are important elements in developing cultural sensitivity. We must aware Nevertheless, there are three questions that we apply can to balance the stressful situation. They are: How productive have these types of response been for us? How productive are they likely to be for us?, and How can we begin manage them effectively?



D. CULTURAL AWARENESS AND ELT

English as an international language has been taught in many countries such as Indonesia. Teaching English as the first foreign language faces many challenges such as culture. Most of the teachers consider that culture is one of the most challenging aspects in teaching language. Actually, the problem can be avoided if they place culture and language in a good proportion.

1. *Culture: a Bridge or a Barrier*

Culture and Teaching foreign language is not a new topic. There are many researchers that have studied about this topic for recent years. Teaching foreign language means facing two different cultures (culture from target language and culture from the student). In teaching process, it is appearing problem whether culture of target language should be used in communication. Whereas, in Indonesia, there are many teachers who are non native-speaker. They should have high professionalism in delivering the material of foreign language using target culture communication. It will be an obstacle for the student in learning foreign language because they will find many unfamiliar and uncomfortable aspects of target language. In contrast, if the non-native teacher applies students' culture background to build communication in learning process, the student will be easier to understand, but it will take risk in acquiring foreign language incompletely. (Jin and Cortazzi: 2010).

The solution of the problem above is the student should know the key concept of studying language. Studying language is studying culture because culture and language are two aspects that have close relationship. Culture can be a bridge or a barrier in teaching English as foreign language. It depends on what point we want to strengthen. In simply, the teacher should notice the culture of target language and the culture that learners bring.

2. *Teachers in Multicultural Education*

Multicultural education cannot be separated from Indonesia because Indonesia is one of the biggest multicultural countries in the world. This situation requires educators and administrators especially teachers to know more about diversity in unity. This concept was known as Indonesian identity for many years but the implementation in educational field has to be improved. The teachers as the role model of education should enhance the students' understanding about multicultural education. They can learn from what teachers do and what teachers say. This has bigger influence toward students' understanding about what multicultural education is.

Nito in Osturgut explained that diversity in culture has caused teachers to recognize and enhance their comprehension of multicultural education. As the effect, the need of multicultural education becomes very urgent (Osturgut: 2011). In line with Nito's explanation, Smith asserted that multicultural education can be successful if there is good collaboration between teachers and the administrators. The preparation of teaching and learning needs should be effective. They should pay attention to different needs of students. The student needs will vary depending on their cultural background (Osturgut: 2011).

"Teachers need to develop reflective cultural and national identifications if they are to function effectively in diverse classrooms and help students from different cultures and groups to construct clarified identifications" (Banks: 2001). In addition, Banks maintains that teacher should implement knowledge construction about cultural understanding. Students



have to understand “how knowledge is created and how it is influenced by the racial, ethnic, social-class, and gender positions of individuals and groups” (Banks: 2001).

It can be concluded that teachers are the practitioner of multicultural education. They should have good comprehension about multicultural education. They not only encourage the student to know their cultural identity but also understand what actually students need. In simply, teachers play important role in implementing multicultural education successfully.

3. The Importance of Cultural Awareness in ELT

According to Jin and Cortazzi, “learning a foreign language implies a degree of intercultural learning: student may be led to become more aware of their own culture in the process of learning about another and hence may be in a better position to develop intercultural skill” (Jin and Cortazzi: 2010)

Furthermore, cultural awareness that want to be emphasized in classroom activity is interpretive aspect such as behaviour and interaction (Jin and Cortazzi: 2010). It means that in the process of developing cultural awareness, students should build their willingness to learn the norm and the attitude of English. Then it will be a good synergy in intercultural learning.

Byram and Fleming state that “...without cultural awareness, a language cannot be properly understood” (Byram and Fleming: 2010). It is in line with Des’s statement. He said in Byram and Fleming that students should be aware with the people who speak the language because without cultural dimension, it will not be an successful communication. In addition, conveying the message of information will be failed because of the uncomprehensive understanding. (Byram and Fleming: 2010).

It can be conclude that cultural awareness plays an important to make a successful multicultural education. both of teacher and student should have the awareness of culture. Teacher can guide the student to understand the culture of target language, while student can open mind in receiving the new culture of target language without sided their background culture.

E. CONCLUSION

Language is the product of culture that has close relationship. It should be taught by teachers effectively. Teachers are the practitioner of education that should have good comprehension about multicultural education. They not only encourage the student to know their cultural identity but also understand what actually students need. Both of teacher and student should have cultural awareness because it plays important role in implementing multicultural education. Teacher can guide the student to understand the culture of target language, while student can open mind in receiving the new culture of target language without sided their background culture.

REFERENCES

- Banks, James A. (2001). *Citizenship Education and Diversity : Implications for Teacher Education*. Journal of Teacher Education. USA: Sage Publication.
- Bloch, B. & Trager, G.L (1942). *Outline of Linguistic Analysis*. Baltimore: Linguistic Society of America/Waverly Press.
- Byram, Michael & Fleming, Michael. Ed. (2010). *Language Learning in Intercultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hudson, R.A. (1980). *Sociolinguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.



- Ozturgut, Osman. (2011). *Understanding Multicultural Education*. Vol 14. No. 2. USA: Current issues in Education.
- Culturewise's Training Team. 2015. *Understanding Cultural Awareness and Cross Cultural Communication Skills*. a Free E-Book from Culturewise's Training Team
- Sapir, E. (1921). *Language*. New york: Harcourt Brace.
- Tylor, E. B. (1924). *Primitive Culture (7th, ed.)*. New York: Brentano.
- Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). *Cultural awareness*. Oxford: Oxford University Press.
- Tomlinson, B., & Musuhara, H. (2004). *Developing Cultural Awareness*. *MET*, 13(1), 1–7



PERAN GOOGLE DOCS DALAM KONTEKS ASYNCHRONOUS PROBLEM-BASED E-LEARNING (E-PBL)

Irwanto¹

¹Doktoral Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: Irwanto.2016@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi era global yang semakin pesat memberikan berbagai dampak positif terhadap pembelajaran kimia. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk memudahkan guru sekaligus menunjang proses pembelajaran jarak jauh adalah *asynchronous Problem-Based e-Learning (e-PBL)*. *e-PBL* merupakan metode pembelajaran elektronik yang mendorong pemahaman peserta didik secara mendalam dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam konteks *asynchronous e-learning*, peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lain, guru, dan berbagai jenis konten pembelajaran dalam memecahkan masalah menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasi pembelajaran yang memiliki fitur *asynchronous e-learning* adalah Google Docs. Google Docs merupakan aplikasi pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*) dalam lingkungan belajar kolaboratif. Google Docs mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar, kemampuan berkolaborasi dalam kelompok, dan menumbuhkan sikap positif terhadap kegiatan penulisan secara kolaboratif. Dengan kata lain, Google Docs memberikan berbagai keuntungan dalam proses pembelajaran kimia di era perkembangan teknologi abad 21.

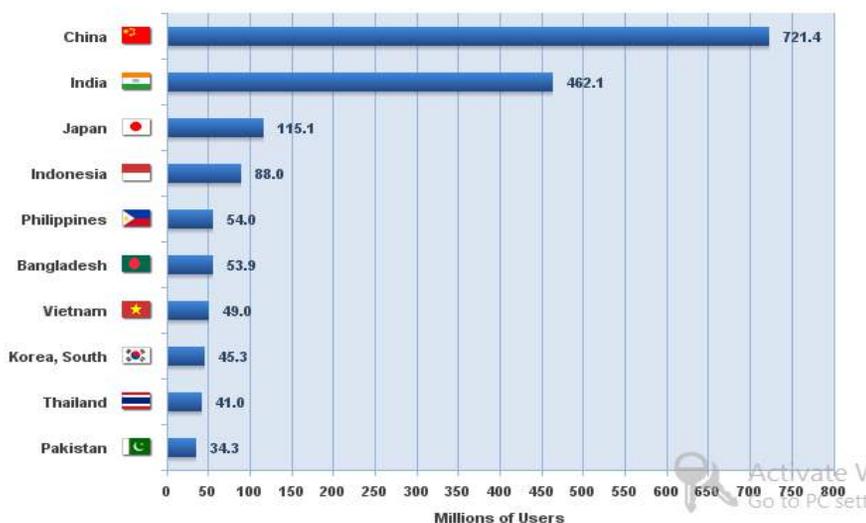
Kata Kunci: *Asynchronous, Google Docs, Problem-Based E-Learning*

A. PENDAHULUAN

Jumlah pengguna internet di Indonesia pada Juni 2016 mencapai 88 juta orang sekaligus menduduki peringkat 4 di Asia. Perkembangan tersebut cukup signifikan karena pada tahun 2000 jumlah pengguna internet hanya sekitar 2 juta orang [1]. Secara umum, data perkembangan jumlah pengguna internet di Asia ditunjukkan pada Gambar 1. Kemajuan teknologi era global yang semakin pesat memberikan berbagai dampak positif terhadap pembelajaran kimia. Dampak tersebut memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan kata lain, teknologi memberikan fleksibilitas kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.



Asia Top Internet Countries June 30, 2016



Gambar 1. Data Pengguna Internet di Asia

Internet memiliki peran penting dalam menunjang kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Penggunaan internet mempermudah proses komunikasi maupun pencarian informasi yang mendukung pembelajaran. Selain itu, penggunaan internet mampu merangsang pengembangan proses kognitif dan sosial budaya [2]. Berbagai kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai pembelajaran elektronik (*e-learning*) yang kreatif dan menyenangkan. *E-learning* memfasilitasi proses pembelajaran yang dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung. Dengan demikian, *e-learning* memberikan akses yang luas kepada guru maupun peserta didik untuk memperoleh informasi, saling berinteraksi, dan mengoptimalkan pembelajaran secara kolaborasi.

E-learning merupakan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. *E-learning* memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih personal, fleksibel, dan portabel tanpa batasan ruang dan waktu [3]. Dalam pelaksanaannya, *e-learning* membutuhkan sebuah *platform* yang aman dan mudah untuk digunakan dalam berkomunikasi maupun berkolaborasi. Salah satu jejaring pembelajaran sosial yang menyediakan fitur *e-learning* adalah Google Docs. Google Docs merupakan salah satu jenis *platform* pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada peserta didik dalam lingkungan belajar kolaboratif.

Pembelajaran berbasis masalah (PBL) memiliki karakteristik yang berbeda dengan model pembelajaran yang lainnya. PBL menekankan pada aktivitas peserta didik untuk menyelesaikan masalah [4] secara sistematis dan logis menggunakan penalaran tingkat tinggi. PBL bertujuan untuk melatih peserta didik belajar tentang konsep penelitian, diskusi dengan teman sebaya, dan secara aktif terlibat dalam aktivitas otentik [5]. Pada praktiknya, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan



melaksanakan penyelidikan untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Masalah yang diberikan bersumber dari gejala atau fenomena otentik dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan *e-learning* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, maka perlu dilakukan kajian tentang manfaat dan peran Google Docs dalam pembelajaran berbasis masalah menggunakan *e-learning* dalam konteks pendidikan jarak jauh.

B. METODE

Artikel ini berbentuk kajian pustaka yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu ide atau gagasan tentang suatu permasalahan yang disempurnakan dengan pengumpulan data dari kajian teori maupun asumsi-asumsi yang mendukung dalam penelitian. Penulisan artikel menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan eksplorasi yang menekankan pada aspek verbal daripada numerik dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh [6]. Penelitian kualitatif dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, buku harian, kuesioner terbuka, maupun jurnal [7]. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan data, peristiwa, maupun situasi yang berbeda, serta menafsirkan hasil yang telah diperoleh [8].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Problem-Based Learning* (PBL)

PBL merupakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan teori dan praktik, serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi dalam pemecahan masalah [9]. PBL merupakan suatu metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut berupa kegiatan menganalisis masalah, mendiskusikan berbagai cara pemecahan masalah, dan membuat keputusan untuk memecahkan masalah berdasarkan situasi yang otentik. PBL terdiri atas tiga fitur utama, yaitu adanya kasus yang menjadi permasalahan, masalah dalam pembelajaran, dan fasilitator berbasis masalah [10].

PBL merupakan metode pembelajaran yang mendorong pemahaman peserta didik secara mendalam dan berorientasi pada masalah. PBL tidak hanya melibatkan peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dasar, tetapi juga melibatkan mereka untuk menggunakan pengetahuan dalam memecahkan masalah [11]. Permasalahan dalam PBL harus berupa masalah otentik yang memiliki berbagai kemungkinan pemecahan masalah (solusi). Permasalahan tersebut dapat dituangkan melalui kertas (*paper-based*) maupun dalam bentuk multimedia yang lebih interaktif [12]. Selain itu, permasalahan tersebut harus didesain sedemikian rupa agar memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menggunakan berbagai perspektif, mencari solusi, menilai konsekuensi, dan merefleksikan keputusan yang diperoleh [10].

Lebih lanjut, De Graaff & Kolmos [13] menjelaskan bahwa terdapat 7 langkah yang perlu dikembangkan untuk membantu peserta didik dalam menganalisis masalah, yaitu:

- a. Memperjelas konsep;
- b. Mendefinisikan masalah;



- c. Menganalisis masalah;
- d. Menemukan penjelasan;
- e. Merumuskan tujuan pembelajaran;
- f. Pencarian informasi lebih lanjut; dan
- g. Laporan dan pengujian informasi baru.

PBL membutuhkan fasilitator yang mampu merencanakan pembelajaran melalui pemodelan, pembinaan, dan akhirnya mengurangi dominasi dalam proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru mengarahkan diskusi untuk tetap fokus pada tujuan yang akan dicapai sesuai kompetensi. Dalam hal ini, intervensi guru semakin berkurang karena dalam PBL peserta didik yang bertanggung jawab seluruhnya dalam proses pembelajaran. Karakteristik PBL memfasilitasi pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil dengan cara diskusi, pemecahan masalah, dan belajar dengan teman sebaya. Fasilitator memandu peserta didik dalam proses pembelajaran dan mendorong mereka untuk berpikir secara mendalam [14]. Temuan menunjukkan bahwa PBL berbasis teknologi mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial peserta didik dibandingkan dengan PBL tanpa menggunakan teknologi [15].

2. *E-Learning*

E-learning merupakan suatu pembelajaran dengan menggunakan teknologi telekomunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bidang pendidikan maupun pelatihan. Keuntungan penggunaan *e-learning* yaitu memungkinkan terjadinya interaksi antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru melalui model pembelajaran secara *asynchronous* [16]. Aplikasi *e-learning* meliputi pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, maupun pembelajaran virtual dan kolaborasi digital. Dalam konteks *asynchronous e-learning*, peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lain, guru, dan berbagai jenis konten pembelajaran. Interaksi secara *asynchronous* memungkinkan mereka untuk merencanakan program belajar yang sesuai dengan kebutuhan [17].

Berkaitan dengan *e-learning*, terdapat lima komponen utama yang perlu dikembangkan untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Komponen tersebut meliputi *audience* (peserta didik), *course structure* (struktur program pembelajaran), *page design* (desain halaman *online*), *content engagement* (keterlibatan konten), dan *usability* (ketergunaan) [18]. Setiap komponen tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam merancang sebuah sistem *e-learning*. Apabila seluruh komponen dalam sistem *e-learning* telah terpenuhi, maka proses pembelajaran elektronik akan berjalan sukses. Adapun keuntungan yang dimiliki oleh *e-learning* dalam bidang pendidikan, yaitu [19]:

- a. Fleksibilitas penggunaan waktu dan tempat untuk belajar;
- b. Efektivitas dan kemudahan akses informasi;
- c. Memotivasi peserta didik untuk berinteraksi tanpa rasa takut berbicara dengan peserta didik lainnya;
- d. Memudahkan komunikasi dalam pembelajaran;
- e. Menghemat biaya karena tidak memerlukan banyak ruang kelas;
- f. Potensi interaktivitas antara peserta didik dengan guru maupun antarpeserta didik; dan
- g. Peserta didik dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri.

E-learning dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu *synchronous* dan *asynchronous*. *Asynchronous e-learning* memungkinkan peserta didik untuk masuk ke lingkungan *e-learning* setiap saat dan men-*download* dokumen atau mengirim pesan ke guru



atau teman sebaya. Peserta didik memiliki lebih banyak waktu untuk meningkatkan refleksi, kemampuan untuk memproses informasi, dan menyempurnakan hasil pekerjaannya [20]. Dengan kata lain, *asynchronous e-learning* memungkinkan pembelajaran dilakukan secara mandiri menggunakan jaringan, intranet/ekstranet, internet, rekaman audio atau video, TV satelit, dan CD-ROM [18,21] tidak hanya untuk pengiriman konten, tapi juga untuk interaksi antara peserta didik. Hal ini menjadikan *asynchronous e-learning* lebih mampu memaksimalkan fleksibilitas dalam penggunaan waktu. Selain itu, *e-learning* memberikan efek positif yang cukup besar dalam hal keterlibatan peserta didik, sikap positif guru, serta interaksi keluarga dan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran [22]. Lebih lanjut, *e-learning* mampu meningkatkan hasil kognitif peserta didik secara signifikan [16].

3. **Problem-Based e-Learning (e-PBL)**

e-PBL merupakan metode pembelajaran elektronik yang mendorong pemahaman peserta didik secara mendalam dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dalam pendekatan PBL, masalah sering digunakan sebagai stimulus untuk mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah, mendorong strategi penalaran, dan memperoleh pengetahuan baru. Peserta didik diproyeksikan untuk mengeksplorasi dan menganalisis masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, kemudian mengembangkan hipotesis yang logis dan solutif. Melalui kegiatan mengeksplorasi, menganalisis, menalar, dan membuat keputusan, maka peserta didik dapat dikatakan telah berhasil mengembangkan pembelajaran mandiri [23].

Berkaitan dengan proses pembelajaran, karakteristik PBL ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut [24].

- a. Berpusat pada masalah;
- b. Kerja individu maupun kolaboratif;
- c. Bertujuan pada proses dan produk;
- d. Tersedianya sumber belajar;
- e. Adanya umpan balik; dan
- f. Refleksi.

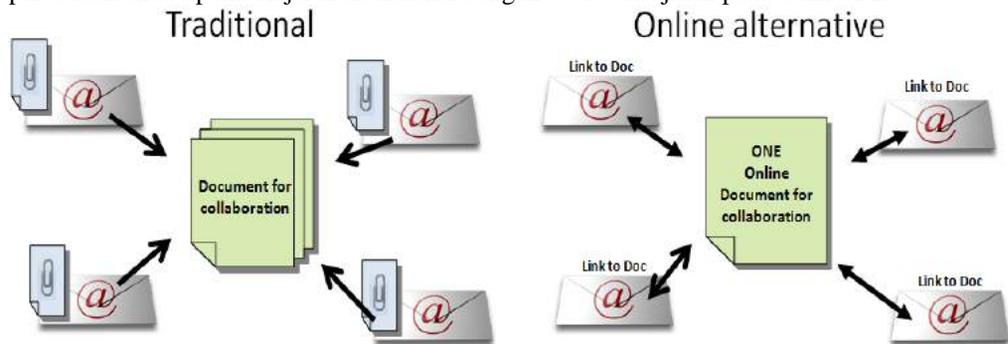
Di era modern, guru diharapkan lebih mengurangi peran tradisional (*teacher-centred*) dalam proses pembelajaran. Hal yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kerja tim, menganalisis dan mengambil keputusan dengan menyediakan sumber belajar yang berkualitas bagi peserta didik melalui teknologi *e-learning* [25]. Pembelajaran berbasis masalah memanfaatkan kemajuan teknologi memiliki berbagai keuntungan. *e-PBL* dapat mengaktifkan interaksi positif dan memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik [26]. Implementasi PBL menggunakan *e-learning* mampu meningkatkan kemampuan analisis dan transversal peserta didik dalam pemecahan masalah praktis [27]. Hasil lain menunjukkan bahwa *e-learning* membantu peserta didik memperoleh keterampilan dalam konteks pembelajaran berbasis masalah [25]. Selain itu, pembelajaran berbasis web mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pemecahan masalah dan mengintegrasikan sumber informasi untuk memperluas pengetahuan [23].

4. **Aplikasi Pembelajaran Berbasis Asyn-chronous e-Learning**

Salah satu aplikasi pembelajaran yang memiliki fitur *asynchronous e-learning* adalah Google Docs. Google Docs merupakan aplikasi pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered*

learning) dalam lingkungan belajar kolaboratif. Google Docs merupakan aplikasi gratis bagi pengguna untuk berbagi dan memperbaiki dokumen dengan orang lain, memberikan saran melalui komentar tulisan, atau mempublikasikan sebuah dokumen di web secara *online* [28]. Chinnery [29] menyatakan bahwa Google Docs merupakan alat yang produktif di mana kegiatan belajar dapat dirancang secara berbeda dan kreatif dengan menawarkan fitur pengolahan kata berbasis web secara kolaboratif.

Terdapat tiga jenis peserta dalam Google Docs, yaitu pemilik dokumen, *viewer*, dan kolaborator. Pemilik dokumen merupakan orang yang menciptakan sebuah dokumen. Ia dapat mengundang *viewer* untuk melihat dokumen. Ia juga dapat mengundang kolaborator untuk mengedit dokumen [30]. Lebih penting lagi, para pengguna Google Docs juga dapat mengedit dokumen tanpa koneksi internet. Dokumen yang telah direvisi kemudian disimpan ke browser dalam keadaan *offline*, kemudian akan tersimpan secara otomatis ketika dihubungkan ke internet [28]. Hal ini yang menyebabkan pembelajaran menggunakan Google Docs menjadi lebih efisien dibandingkan pembelajaran tradisional. Secara umum, perbedaan antara pembelajaran tradisional dengan *online* disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbedaan Antara Pembelajaran Tradisional dengan *Online*

Google Docs memberikan berbagai manfaat dalam proses pembelajaran kimia di era perkembangan teknologi abad 21. Keuntungan dari penggunaan Google Docs dibandingkan dengan pembelajaran secara tradisional adalah Google Docs memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi secara *online*. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Zhou, Simpson, & Domizi [31] yang menunjukkan bahwa Google Docs merupakan alat yang berguna untuk menunjang kegiatan kerja kelompok. Temuan lain dari Suwantarathip & Wichadee [32] menunjukkan bahwa peserta didik dalam kelompok Google Docs cenderung memperoleh rata-rata nilai yang lebih tinggi daripada peserta didik yang belajar dalam kelompok kelas tatap muka. Lebih lanjut, pembelajaran dengan menggunakan Google Docs mampu menumbuhkan sikap positif terhadap kegiatan menulis secara kolaboratif dan kolaborasi yang tinggi dalam kelompok. Selain itu, hampir semua menyatakan bahwa Google Docs mudah untuk digunakan.

D. KESIMPULAN

e-PBL merupakan metode pembelajaran elektronik yang mendorong pemahaman peserta didik secara mendalam dan berorientasi pada masalah. Dalam konteks *asynchronous e-learning*, peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lain, guru, dan berbagai jenis konten pembelajaran dalam memecahkan masalah menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasi pembelajaran yang memiliki fitur *asynchronous e-learning* adalah Google Docs. Google



Docs merupakan aplikasi pembelajaran yang membantu guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*) dalam lingkungan belajar kolaboratif. Google Docs mampu meningkatkan pencapaian hasil belajar, kemampuan berkolaborasi dalam tim, dan menumbuhkan sikap positif terhadap kegiatan penulisan secara kolaboratif. Dengan kata lain, Google Docs memberikan berbagai keuntungan dalam proses pembelajaran kimia di era perkembangan teknologi abad 21.

REFERENSI

- [1] Internetworldstats, 2016, Retrieved from <http://www.internetworldstats.com/>
- [2] Johnson, G. M., 2010, *Educational Technology & Society*, 13(1), 176–185.
- [3] Omer, M., Klomsri, T., Tedre, M., Popova, I., lingberg-Allvin, M., and Osman, F., 2015, *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 11(2), 267-279.
- [4] Hillman, W., 2003, *Australian Journal of Teacher Education*, 28(2), 1-10.
- [5] Elder, A.D., 2015, *Journal of University Teaching & Learning Practice*, 12(1), 1-12.
- [6] Bryman, A., 2004, *Social Research Methods*. New York: Oxford University Press.
- [7] Zohrabi, M., 2013, *Theory and Practice in Language Studies*, 3(2), 254-262.
- [8] Devetak, I., Glažar, S.A., and Vogrinc, J., 2010, *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 6(1), 77-84.
- [9] Savery, J.R., 2006, *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1), 9–20.
- [10] De Simone, C., 2014, *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(12), 17-29.
- [11] Bilgin, I., Şenocak, E., and Sözbilir, M., 2009, *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 5(2), 153-164.
- [12] Derry, S.J., Hmelo-Silver, C.E., Nagarajan, A., Chernobilsky, E., and Beitzel, B., 2006, *Journal of Educational Computing Research*, 35, 145-162.
- [13] De Graaff, E., and Kolmos, A., 2003, *International Journal of Engineering Education*, 19(5), 657-662.
- [14] Hmelo-Silver, C.E. , and Barrows, H.S., 2006, *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1(1), 21–39.
- [15] Tlhapane, S.M., and Simelane, S., 2010, *Knowledge Management & E-Learning: An International Journal*, 2(1), 68-83.
- [16] Yazdi, S.M., and Zandkarimi, G., 2013, *International Journal of Education and Learning*, 2(2), 49-56.
- [17] Koutsabasis, P., Stavrakis, M., Spyrou, T., and Darzentas, J., 2011, *International Journal of Human–Computer Interaction*, 27(2), 191–213.
- [18] Gautam, S.S., and Tiwari, M.K., 2016, *International Research Journal of Computer Science*, 3(1), 14-17.
- [19] Arkorful, V., and Abaidoo, N., 2014, *International Journal of Education and Research*, 2(12), 397-410.
- [20] Hrastinski, S., 2008, *Educause Quarterly*, No.4, 51-55.
- [21] Ahmad, I., and Bokhari, M.U., 2013, *International Journal of Computer Science Issues*, 10(1), 546-550.
- [22] Intel, 2012, Retrieved from <http://www.intel.com/>
- [23] Chanlin, L.-J., and Chan, K.-C., 2004, *Journal of Educational Computing Research*, 31(4) 437-452.



- [24] Kwinn, A., 2007, The Learning Development Conference and Expo, San Jose, California, USA.
- [25] Docherty, C., Hoy, D., Topp, H., and Trinder, K., 2005, *International Journal of Medical Informatics*, 74, 527-533.
- [26] King, S., Greidanus, E., Carbonaro, M., Drummond, J., Boechler, P., and Kahlke, R., 2010, *Journal of Interactive Online Learning*, 9(2), 133-150.
- [27] Ventura, M.D., 2014, *International Journal of Information and Education Technology*, 4(5), 426-429.
- [28] Lin, C., Yu, W-C.W., and Wang, J., 2014, *World Journal of Education*, 4(6), 9-15.
- [29] Chinnery, G.M., 2008, *Language Learning and Technology*, 12(1), 3-11.
- [30] Mansor, A.Z., 2012, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 59, 411-419.
- [31] Zhou, W., Simpson, E., and Domizi, D., 2012, *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 24(3), 359-375.
- [32] Suwantarathip, O., and Wichadee, S., 2014, *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 13(2), 148-156.
- [33] ÓBroin, D., and Raftery, D., 2011, *The All Ireland Journal of Teaching & Learning in Higher Education*, 3(1), 1-35.



PENDIDIKAN BERDIKARI BAGI PEMUDA MENUJU PEMUDA UNGGUL BERKEMAJUAN (*STUDI PADA KARANG TARUNA PONOROGO*)

Wahyudi Setiawan¹, Muh. Tajab², Katni³

¹*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: wahyudisetiawan089@gmail.com*

²*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: Mtajab@gmail.com*

³*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: katni@umpo.ac.id*

ABSTRAK

Pemuda adalah pondasi utama kebangkitan sebuah bangsa. Dengan kemandirian dan kesadaran untuk mandiri, pemuda akan menjadi sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan dalam segala aspek kehidupan. Pemuda akan selalu menang jika bertumpu pada kemandirian dirinya sendiri dan sadar bahwa mandiri itu adalah keutamaan, maka ia akan terus belajar demi masa depan diri dan bangsanya untuk menjadi lebih baik. Pendidikan berdikari menjadi sebuah model pendidikan bagi pemuda untuk mewujudkan pemuda yang unggul dan berkemajuan. Dengan pendekatan fenomenologis deskriptif diharapkan penelitian ini dapat menyajikan data lapangan yang otentik obyektif dan komprehensif. Hasil penelitian ini yaitu ditemukannya beberapa model pendidikan berdikari yang diterapkan pada beberapa Karang Taruna di Ponorogo demi mewujudkan pemuda yang mandiri dan berkemajuan. Dengan beberapa model kegiatan pendidikan tentang kemandirian yang diterapkan tersebut ternyata mampu menjadikan pemuda berhasil menemukan jati dirinya sebagai seorang pemuda mandiri berkemajuan yang harus mampu bersaing di era global. Pendidikan berdikari menjadi sebuah model pendidikan kemandirian bagi basis kepemudaan yang solutif atas persoalan-persoalan global yang sedang dihadapi saat ini.

Kata Kunci: Model Pendidikan, Berdikari, Pemuda, Berkemajuan

A. PENDAHULUAN

Pemuda adalah tombak kemajuan sebuah bangsa. Kekuatan dan daya ingin mengetahui segala hal yang baru pemuda merupakan modal besar sebuah bangsa untuk maju melalui memajukan pemudanya. Seiring perjalanan dalam berproses menuju pedewasaan diri, pemuda mengalami berbagai proses mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, psikologi, dan perkembangan kepribadian menuju kematangan emosi. Beberapa problem negatif yang sering muncul di media menjadikan kita semakin prihatin bahwa kondisi pemuda sedang dihadapkan pada krisis kepribadian. Ukuran kepribadian yang matang adalah disaat masalah datang menghampiri, seorang pemuda akan tetap mampu berdiri kuat dan solutif atas permasalahan yang sedang dihadapi. Berbagai fenomena negatif terkait pemuda selama ini adalah bentuk kegagalan kepribadian yang belum matang, tentunya harus tetap diimbangi dengan prestasi-prestasi yang telah mampu diukir oleh pemuda.



Kemandirian (Irmawansah & Mintaredja, 2015) adalah kunci dari keberhasilan seorang pemuda (Buengeler, Homan, & Voelpel, 2016; Caldwell, Farmer, & Fedor, 2008) dalam menatap masa depannya. Pemuda adalah kunci kemajuan bangsa, pemikiran, kerja nyata, gagasan, dan idealisme sebagai warga bangsa Indonesia adalah potensi besar pemuda dalam meningkatkan prestasi bangsa Indonesia. Prestasi-prestasi yang telah berhasil diraih oleh pemuda harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemuda yang unggul dan berkemajuan akan mampu meningkatkan prestasi diri dengan mengeluarkan segala potensi yang ada dalam dirinya.

Gagasan kemandirian ekonomi (Bararoh, 2014) dari dan untuk kita dengan konsep berdikari merupakan langkah awal menciptakan pemuda yang mandiri. Dalam konsep sejarah Soekarno, berdikari merupakan harapan Soekarno untuk menjadikan negara mandiri yang besar serta disegani oleh bangsa lain. Kemandirian ekonomi adalah langkah awal menuju kemandirian dalam segala bidang, pendidikan, kesehatan, politik, dan kebudayaan yang merupakan nilai-nilai kebangsaan yang wajib dicapai oleh sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia. Dari sinilah peran pemuda harus digerakkan, dimotivasi, dididik, dan diberikan peran dalam pembangunan bangsa supaya terlatih menjadi seorang pribadi yang kuat, jujur, bertanggungjawab, dan berdaya saing dalam kancah dunia global.

B. MODEL PENDIDIKAN BERDIKARI

Model pendidikan berdikari yang diterapkan pada Karang Taruna Ponorogo adalah dengan melakukan pendidikan kemandirian ekonomi dengan sistem pembukaan usaha mikro (Dimiyati, 2015). Usaha mikro yang terdiri dari budidaya ikan lele, beternak kambing, ayam Jawa super, dan bengkel motor merupakan upaya konkret bagaimana pemuda mencoba bangkit dari sikap pasif menuju produktif. Dilakukannya pendampingan ekonomi kepada kelompok pemuda adalah bagian dari support sistem SDM supaya pemuda mampu menjalankan usaha yang telah terbentuk supaya berjalan dengan baik. Dengan sistem kebersamaan melalui kelompok-kelompok kepemudaan Karang Taruna akan menjadi media yang tepat sebagai media pembelajaran dalam proses kemandirian dalam beberapa hal, ekonomi, kepribadian, sosial, dan kebudayaan sebagai bentuk jati diri bangsa. Diharapkan hal ini kelak akan mampu menjadi sebuah sistem yang solutif dan sistematis sebagai bentuk penanggulangan arus semangot TKIisme dalam diri pemuda yang mulai berpikir pragmatis.

Orientasi pada kemandirian ekonomi merupakan tujuan mulia bahwa setiap orang harus mampu, kuat, serta mandiri dalam perekonomian keluarga. Dengan terjadinya kemandirian perekonomian keluarga, maka perekonomian masyarakat secara bersama-sama akan mampu bangkit menjadi sistem ekonomi yang kuat dan mandiri dengan membentuk usaha-usaha skala mikro menuju kemandirian ekonomi makro. Sikap ketergantungan konsumsi (Achmadi & Prihantono, 2014) dalam segala aspek kebutuhan masyarakat merupakan indikasi bahwa secara ekonomi pribadi, keluarga, dan masyarakat bangsa ini mengalami keterpurukan. Keberanian untuk mencoba hal-hal yang kecil, SDM yang rendah, dan jaringan yang minim merupakan virus penyebab kemunduran perekonomian bangsa. Degradasi kemandirian, terkikisnya kepercayaan diri (Moordiningsih & Yuwono, 2011), minimnya pengalaman dalam belajar adalah penyebab seseorang mengalami kegagalan dalam mencoba sebuah usaha.

Karang Taruna berdiri sebagai wujud usaha pemerintah untuk memandirikan pemuda, menjadi media belajar, serta media untuk melahirkan kader-kader muda terbaik bangsa. Model mendirikan usaha mikro mendapatkan support dana dari pemerintah desa serta



swadaya masyarakat, misalnya yang terjadi di desa Purwosari kecamatan Babadan. Pemerintah desa berperan aktif dalam melakukan pendampingan terhadap kepemudaan di wilayah desa tersebut. Memberikan bantuan permodalan serta pendampingan SDM yang dilakukan secara aktif sehingga beberapa kelompok kepemudaan Karang Taruna di wilayah desa tersebut berhasil mandiri dan berjalan sebagai sistem usaha mikro. Pemerintah pusat perlu berperan aktif (Hariyanto & others, 2013) dalam mendukung program yang dicanangkan oleh pemuda jika berkaitan dengan kemandirian ekonomi dan sumber daya manusianya. Hal ini ditujukan supaya proses menuju kemandirian ekonomi yang dirintis atau dilakukan oleh pemuda mampu berjalan dengan baik hingga berhasil mewujudkan kemandirian pemuda secara komprehensif.

Proses dalam menuju pemuda yang mandiri dan tangguh tidaklah mudah, dibutuhkan dukungan dari segala aspek mulai dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan lingkungan masyarakat (Brock, 2010; Katz et al., 2012). Bangkitnya kepemudaan (Ferrari et al., 2010) adalah awal dari bangkitnya sebuah bangsa. Perkembangan media informasi yang sedemikian cepat menjadi nilai positif dan negatif bagi pemuda. Positifnya adalah sebagai media untuk mengakses informasi tanpa batas sehingga pemuda bisa mendapatkan informasi yang positif dari segala penjuru dunia dan segala bidang. Namun tidak sesederhana itu kondisi di lapangan, banyak pemuda yang kurang bisa memanfaatkan dengan baik media informasi yang ada. Misalnya dengan kecandungan media sosial dengan menggunakannya untuk hal-hal negatif, pornografi, dan aktifitas negatif lainnya.

Dalam beberapa hal, khususnya bidang ekonomi, pemerintah harus mendukung proses-proses kemandirian kepemudaan menuju pemuda yang mandiri. Konsep berdikari menjadi solusi (Widodo, n.d.) atas ketidakpastian keyakinan diri pemuda dalam menghadapi masa depannya. Pendidikan formal yang selama ini berlangsung ternyata belum memberikan jawaban yang solutif atas problem yang dihadapi pemuda khususnya masalah pekerjaan. Maka tidak bisa kita pungkiri jika semangat para pemuda lebih pada keinginan untuk menjadi TKI (Ariani, Abdillah, & Syakti, 2013) yang dikarenakan proses instan dengan penghasilan setiap bulan yang tinggi (Pawestri & others, 2010). Padahal ini bukanlah solusi jangka panjang bagi pengentasan kemandirian pemuda. Beberapa realita menunjukkan bahwa selesai menjadi TKI di luar negeri, mereka masih merasa kebingungan untuk mandiri dalam sosial ekonomi dan krisis kepercayaan diri (Novianti, 2010; Nurtjahjanti & Ratnaningsih, 2011; Primawati, 2012). Hal ini ibarat lingkaran arus yang sulit untuk diurai, semuanya terjadi karena proses (Randang, 2011) yang panjang, mulai dari proses pendidikan, support (Setiawan, 2016) dari keluarga dan lingkungan hingga dampak dari kebijakan pemerintah.

C. PEMUDA BERKEMAJUAN

Soekarno pernah berkata, “Serahkan kepadaku sepuluh orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia”. Perkataan Presiden pertama Indonesia ini sangat terkenal sebagai motivasi para generasi muda untuk bangkit dan berkarya bagi negeri. Dalam sebuah kondisi, Soekarno pernah melarang musik barat masuk di Indonesia (Pertiwi & others, 2014) sebagai bentuk filter terhadap kebudayaan barat yang bisa mempengaruhi pemuda Indonesia, pastinya kebudayaannya berbeda dengan budaya orang Indonesia. Dalam konteks kekinian pemuda dihadapkan bukan hanya pada persoalan kebudayaan (White & Naafs, 2012) dan akses informasi yang bebas, namun lebih dari itu bahwa pemuda saat ini dihadapkan pada tantangan global yang tanpa batas. Kompetisi global yang semakin terbuka menuntut



pemuda untuk berperan aktif (Young & Poon, 2013) dalam segala aspek bidang kehidupan, menunjukkan kemampuan diri sebagai sosok pemuda yang kuat dan tangguh (Masten et al., 2012).

Pemuda berkemajuan adalah ia yang mampu tegak ditengah badai arus negatif yang semakin mudah melanda generasi muda. Ketahanan fisik, pikir, dan psikologis adalah bentuk dari kemampuan pemuda berkemajuan untuk mengambil peran (Sanjaya, 2016) dalam berkompetisi di dunia global. Pemuda harus mampu menjadi pribadi yang utuh, kemampuan bahasa, intelektual yang cerdas, skill dalam segala bidang, spiritualitas yang matang, dan emosi yang stabil harus dimiliki bagi seorang pemuda yang hidup di eras global saat ini. Persaingan global yang tidak bisa kita hindari sekarang adalah tantangan nyata bagi pemuda untuk mengambil peran, bukan lagi menjadi seorang penonton dalam bidang apapun yang pandai bersorak, namun lebih pada karya nyata dan produktifitas yang tinggi sehingga eksistensi pemuda dalam dunia global terbukti dan ada.

Beberapa kasus negatif yang telah melanda pemuda adalah sebuah kritik bagi pemerintah, keluarga, dan lingkungan masyarakat untuk segera berbenah diri bahwa sesungguhnya mendidik kemandirian pemuda adalah tanggungjawab bersama. Tidak bisa satu pihak berjalan sendiri tanpa ada proses koordinasi sistem yang baik sehingga mampu mengantarkan pemuda sesuai dengan karakternya, berani, jujur, mandiri, dan berkepribadian yang kuat. Sebuah pribadi unggul dalam diri pemuda yang akan mampu menjadi generasi terbaik bangsa dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang berprestasi.

D. KESIMPULAN

Model pendidikan berdikari yang dijalankan bagi pemuda merupakan sebuah usaha untuk memajukan dan memandirikan pemuda sebagai bentuk dari upaya menguatkan eksistensi diri. Melalui program kemandirian ekonomi yang dijalankan akan mampu mendidik setiap pemuda untuk senantiasa belajar mandiri dalam segala hal, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Mendidik pemuda ke arah positif adalah tugas bersama keluarga, pemerintah, dan lingkungan masyarakat untuk mengantarkan pemuda menjadi pemuda yang unggul dan berkepribadian, sehingga bangsa Indonesia akan bangkit menuju bangsa yang besar dan berprestasi.

REFERENSI

Achmadi, A., & Prihantono, G. (2014). Modelling Demand Side Kelas Menengah Pemuda Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(1). Diambil dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/8771>

Ariani, A., Abdillah, L. A., & Syakti, F. (2013). Sistem pendukung keputusan kelayakan TKI ke luar negeri menggunakan FMADM. *arXiv preprint arXiv:1312.5162*. Diambil dari <http://arxiv.org/abs/1312.5162>

Bararoh, T. (2014). Eksplorasi Nilai-Nilai Marhaen dalam Penganggaran Daerah. Diambil dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4602>

Brock, T. (2010). Young adults and higher education: Barriers and breakthroughs to success. *The Future of Children*, 20(1), 109–132.

Buengeler, C., Homan, A. C., & Voelpel, S. C. (2016). The challenge of being a young manager: The effects of contingent reward and participative leadership on team-level turnover depend on leader age. *Journal of Organizational Behavior*, n/a-n/a. <http://doi.org/10.1002/job.2101>



Caldwell, S. D., Farmer, S. M., & Fedor, D. B. (2008). The influence of age on volunteer contributions in a nonprofit organization. *Journal of Organizational Behavior*, 29(3), 311–333. <http://doi.org/10.1002/job.482>

DIMYATI, M. (2015). Iptek Bagi Masyarakat (Ib. M) Wirausaha Baru Pemuda Putus Sekolah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 5(1), 28–33.

Ferrari, A., Thomas, D., Franklin, A. R., Hayes-Lattin, B. M., Mascarin, M., Van Der Graaf, W., & Albritton, K. H. (2010). Starting an adolescent and young adult program: some success stories and some obstacles to overcome. *Journal of Clinical Oncology*, 28(32), 4850–4857.

Hariyanto, H., & others. (2013). Perubahan Skema Permodalan Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Ekbisi*, 7(2). Diambil dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/index.php/Ekbisi/article/view/335>

IRMAWANSAH, I., & Mintaredja, D. A. H. (2015). *Pemikiran Soekarno Tentang Trisakti; Perspektif Epistemologi Kenneth Gallagher*. Universitas Gadjah Mada. Diambil dari http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=77788&is_local=1

Katz, D. M., Berger-Sweeney, J. E., Eubanks, J. H., Justice, M. J., Neul, J. L., Pozzo-Miller, L., ... others. (2012). Preclinical research in Rett syndrome: setting the foundation for translational success. *Disease Models and Mechanisms*, 5(6), 733–745.

Masten, A. S., Herbers, J. E., Desjardins, C. D., Cutuli, J. J., McCormick, C. M., Sapienza, J. K., ... Zelazo, P. D. (2012). Executive function skills and school success in young children experiencing homelessness. *Educational Researcher*, 41(9), 375–384.

Moordiningsih, M., & Yuwono, S. (2011). Model Wirausaha Mandiri: Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Kemandirian Usaha Pemuda Suku Jawa. Diambil dari <http://eprints.ums.ac.id/33022/>

Novianti, K. (2010). Analisis trend dan dampak pengiriman TKI: kasus dua desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jakarta: Jurnal Kependudukan Indonesia LIPI*, 5(1), 15–39.

Nurtjahjanti, H., & Ratnaningsih, I. Z. (2011). Hubungan kepribadian hardiness dengan optimisme pada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) wanita di BLKLN DISNAKERTRANS Jawa Tengah. *Jurnal Psikologi Undip*, 10(2), 126–132.

Pawestri, R., & others. (2010). Job Satisfaction of Indonesian Workers in Taiwan. *政治大學亞太研究英語碩士學位學程 (IMAS) 學位論文*, 1–102.

Pertiwi, A., & others. (2014). Larangan Soekarno Terhadap Musik Barat Tahun 1959-1967. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 2(3). Diambil dari <http://ejournal.unesa.ac.id/article/11865/38/article.pdf>

Primawati, A. (2012). Strategi Penggunaan E-TKI sebagai Wahana dalam Mengatasi Kesenjangan Informasi. *Journal Communication Spectrum*, 1(2). Diambil dari http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/11

Randang, F. B. (2011). Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia dalam Menghadapi Persaingan dengan Tenaga Kerja Asing. *SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(1), 66–73.

Sanjaya, D. (2016). Perumusan Strategi Pada Usaha Pemuda Sukses Dengan Pendekatan Quantitative Strategic Planning Matrix. *Performa*, 1(3), 287–296.

Setiawan, I. (2016). Peran Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Gea*, 6(1). Diambil dari <http://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/1733>



White, B., & Naafs, S. (2012). Generasi antara: refleksi tentang studi pemuda Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2), 89–106.

Widodo, S. K. (n.d.). Kebijakan Ekonomi Berdikari dan Perkembangan Sektor Perikanan. Diambil dari http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/sutejo_k_widodo_menuju_ekonomi_berdikari_di_sektor_perikanan_.pdf

Young, R., & Poon, S. (2013). Top management support—almost always necessary and sometimes sufficient for success: Findings from a fuzzy set analysis. *International journal of project management*, 31(7), 943–957.



STUDI KRITIS UU NO.40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN (FILOSOFI DAN IMPLEMENTASI)

Wildan Imaduddin Muhammad¹

¹*Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: Wildan.imaduddinmuhammad16@mhs.uinjkt.ac.id*

ABSTRAK

Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan basis hukum dilaksanakannya pembangunan pemuda di Indonesia. Dalam UU tersebut pemuda didefinisikan sebagai kelompok orang berusia 16-30 tahun yang memiliki peran sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Mengingat pentingnya peran pemuda itu, maka dalam UU diatur bahwasanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melayani, memfasilitasi, mengkoordinir dan mengawasi pemuda sehingga tujuan perannya dapat tercapai. Akan tetapi, jika UU tersebut ditinjau ulang, sebenarnya semua hal yang diatur dalam UU Kepemudaan telah tercantum dalam UU yang lebih umum seperti UUD 1945, UU HAM, UU Sisdiknas, UU ketenagakerjaan dan lain-lain yang satu sama lain saling berkaitan. Kemudian setelah UU itu diundangkan, lalu bagaimana Implementasi di lapangan? Pemerintah Pusat, Daerah dan masyarakat belum sampai pada cita-cita yang diidealkan oleh UU. Masih banyak problem pemuda yang belum dibenahi seperti pengangguran dan kriminalitas. Artikel ini hendak mengkritisi UU tentang Kepemudaan dari sisi landasan filosofis dan implementasi di ranah kebijakan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenpora dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: UU No. 40 Tahun 2009, Studi Kritis, Epistemologi, Kepemudaan

ABSTRACT

The Act No. 9 of 2009 on Youth is basic role for the regulation of young development in Indonesia. Young, according to the law, is the group of people between 16 until 30 years old that is act as the power of moral, social control, and the agent of change. Therefore, The Law regulates that the President, Mayor, and Citizen are responsible to service, facilitate, and care about young people, in order to achieve the goal of law. But, in my opinion, the Youth Rulings is one of waste rule because all of the regulation is basically noted in other common role such as the Act of Human Right, the Act of Education, the Act of Employee and others which are related one another. Afterwards, the Youth ruling has lawed, how the implementation policy in fields? the implementation of law is not well yet. Joblessness and criminality, for instance, are two problems that unfinished until now. This article will criticize the Act No. 40 of 2009 from political background, basic of philosophy, and the implementation of Law in the regulation of Youth Ministry Affairs and Regional Government.

Keywords: The Act No. 40 Of 2009, Critical Study, Basic Of Philosophy, Youth



A. PENDAHULUAN

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Population Fund (UNPF) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada tahun 2013, diproyeksikan pada tahun 2035 angka jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) akan mendominasi hingga mencapai 67,9 % dibandingkan dengan total jumlah penduduk.⁸ Data ini dapat diartikulasikan ke dalam dua hal sekaligus; di satu sisi dapat menjadi sebuah kesempatan bagi Indonesia jika kelompok usia ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dapat ikut andil untuk mempercepat pembangunan Nasional dan juga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi di sisi yang lain dapat diartikan juga sebagai sebuah malapetaka jika mayoritas penduduk usia ini tidak memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam pembangunan Nasional. Bahkan yang terjadi bisa sebaliknya, angka kriminalitas akan semakin tinggi apabila kesenjangan antara kaya dan miskin tidak dapat teratasi.

Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman menyatakan bahwa fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas cenderung meningkat disebabkan oleh beberapa faktor; Pertama, faktor internal yang meliputi; a. krisis identitas meliputi perubahan biologis dan sosiologis pada diri mereka, b. kontrol diri yang lemah. Kedua, faktor eksternal mencakup; a. Keluarga dan perceraian orang tua, b. Teman sebaya yang kurang baik, dan c. Komunitas/ tempat tinggal yang kurang baik. Adapun hal-hal yang dianggap mampu mengatasi angka kriminalitas remaja yang diutarakan oleh Nunung dan Muslim dengan mengutip pendapat Ayuningtyas adalah dengan empat langkah: pencegahan (*preventif*), pengentasan (*curative*), pembetulan (*corrective*), dan pemeliharaan (*preservative*) yang meliputi tiga lingkungan remaja: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Remaja beranjak sedikit dewasa dikatakan sebagai pemuda dan pemudi. Definisi pemuda sebagai sebuah entitas penduduk di suatu daerah atau negara biasanya dikelompokkan dengan tingkat usia tertentu yang satu negara berbeda dengan negara lain dalam mendefinisikan kelompok usia pemuda. Indonesia menjadikan kelompok usia 16-30 tahun sebagai pemuda dalam UU No. 40 Tahun 2009, Sedangkan apabila merujuk pada definisi yang dikeluarkan oleh PBB, maka kategori pemuda adalah kelompok usia 15-24 tahun.¹⁰ Perbedaan definisi kelompok usia pemuda menjadikan sebuah gambaran bahwa pemuda menjadi salah satu agen penting di kancah Nasional dan Internasional.

Untuk menekankan pentingnya peran pemuda itu, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada tanggal 14 Oktober 2009 yang diwakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkumham Andi Mattalata, dan Sekneg Wisnu Setiawan. Dalam pandangan penulis, UU termasuk dalam kategori spesifikasi aturan yang sebenarnya telah dirumuskan dalam UUD 1945, UU HAM, UU Sisdiknas, UU Ketenaga kerjaan yang satu sama lain saling berkaitan. Apabila semua Undang Undang tersebut konsisten dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, maka menurut penulis Undang-Undang tentang Kepemudaan tidak perlu dijadikan Undang Undang tersendiri.

⁸ Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035* (Jakarta: BPS, 2013) hlm. 25.

⁹ Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" dalam *Sosio Informa* vol. 1 No. 02, Mei-Agustus 2015, 121-140.

¹⁰ www.un.org diakses pada tanggal 20 Oktober 2016



Artikel ini dimaksudkan untuk mengkritisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan dari dua aspek: pertama dari segi epistemologi Undang-Undang, kedua, dari segi implementasi Undang-Undang. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah mengapa Undang-Undang Tentang Kepemudaan penting untuk dibuat? Apa yang menjadi landasan filosofisnya? Kemudian bagaimana proses implementasi Undang-Undang tersebut setelah berjalan selama tujuh tahun?

B. PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum membahas lebih jauh tinjauan filosofis Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa peraturan pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Pertama*, peraturan di masa colonial Belanda yang disebut dengan *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor indonesie* atau disingkat AB. Peraturan ini mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Setelah merdeka, peraturan ini otomatis ditinggalkan. *Kedua*, undang undang No. 2 tahun 1930 tentang Penertiban Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dari Peraturan Pemerintah sebagai Undang Undang Federal. Ketiga, Undang Undang No. 1 tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta. Keempat, selain berbentuk Undang-Undang, ada beberapa peraturan yang mengatur pembentukan undang-undang; a. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1945 tentang Pengumuman berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, b. keputusan Presiden Republik Indonesia No 234 tahun 1960 tentang Pengambalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen kehakiman ke Sekretariat Negara, c. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang Undang dan Rancangan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, d. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.¹¹

Masa reformasi tepatnya di tahun 1999 sampai tahun 2004, Pemerintah telah merevisi asas hukum Republik Indonesia yakni UUD 1945 hingga empat kali amandemen. Hal ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan, yakni tidak kurang dari 174 butir ketentuan tambahan dan hanya 25 butir ketentuan yang asli dan tidak mengalami perubahan. Jadi total UUD 1945 saat ini berjumlah 199 butir ketentuan.

Pada tahap selanjutnya, peraturan tentang penetapan Undang-Undang paling mutakhir tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai pelaksana dan penyempurna perintah pasal 22 A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian UU Nomor 10 tahun 2004 itu disempurnakan kembali ke dalam Undang Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹ Evie Rachmawati Nur Ariyanti, "Pembatasan Frasa Perubahan Kesekian Kali Pada Perumusan Judul Undang-Undang: Telaah Terhadap Undang-Undang Perpajakan" dalam *ADIL: Jurnal Hukum* Vo. 3 No. 2, 2012, 429-451.



Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu, terdiri dari 104 Pasal, Penjelasan, dan dua pasal lampiran.¹² Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 5, pembentukan perundang-undangan harus berdasarkan asas, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, yakni setiap pembentukan undang-undang harus memiliki tujuan yang jelas
2. Asas kelembagaan, bahwa setiap jenis undang-undang harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya adalah setiap Undang-Undang yang dibuat harus memperhatikan jenis dan materi muatan yang mencerminkan; pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain materi jenis dan materi muatan, harus mengindahkan hierarki perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹³
4. Asas dapat dilaksanakan, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus jelas dan tepat sasaran, penanggung jawab dan pelaksana tugasnya, memperhitungkan efektivitas undang-undang tersebut bagi rakyat dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis.
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya setiap peraturan undang-undang yang dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi kepentingan Negara dan rakyat.
6. Asas kejelasan rumusan. Setiap undang-undang wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, diksi kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan dapat dimengerti agar tidak menimbulkan multitafsir.
7. Asas keterbukaan. Yakni dalam pembentukan Undang-Undang, mulai dari perencanaan, perumusan, penyusunan, pemahasan, hingga penetapan, pemerintah yang diwakili oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus bersikap transparan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang dilaksanakan dalam Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu Program Legislasi Nasional yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif. Prolegnas berisi agenda jangka menengah yaitu untuk seluruh masa jabatan DPR dan Presiden, lima tahun, dan tahunan, yang berdasarkan skala prioritas pembentukan Undang-Undang. Hasil perumusan Undang-Undang dalam Prolegnas disebut Rancangan Undang-Undang yang memuat materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan.

Proses pengajuan Rancangan Undang-Undang dapat dilakukan oleh dua pihak: DPR dan Presiden. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR baik komisi, gabungan komisi, maupun alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi yang diatur dengan

¹² UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penetapan Undang-Undang

¹³ Pasal 5 dan 6 UU No. 12 Tahun 2011



Peraturan DPR. Kemudian disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden, dan Presiden menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lama dua bulan atau 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Begitupun proses sebaliknya, dari Presiden yakni RUU disiapkan oleh Menteri yang berkaitan atau pimpinan lembaga nonkementerian, kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada Pimpinan DPR dan selanjutnya dengan mekanisme yang sama, yakni agenda pembahasan paling lama 60 hari sejak surat diterima oleh DPR.

Pembahasan RUU kemudian dibahas bersama oleh pihak legislatif dan eksekutif yang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, terdiri dari: a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan tiga agenda kegiatan: pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meliputi: pertama, penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I. Kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Ketiga, penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan sendiri atau diwakili oleh Menteri yang ditugaskan.¹⁴

Apabila RUU tidak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPR masa jabatan itu. RUU yang telah disepakati disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama, dan RUU disahkan oleh Presiden paling lama tiga puluh hari terhitung sejak disepakati bersama. Kemudian jika RUU tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, maka RUU itu wajib diundangkan.¹⁵

C. TINJAUAN FILOSOFIS UU KEPEMUDAAN

Menurut Van Der Vlies, yang dikutip oleh Sony Maulana dkk, pembentukan undang-undang harus berdasarkan asas yang baik, yakni dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, asas-asas formil yaitu; asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), asas lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*), asas pelaksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*); kedua, asas-asas materiil, terdiri dari: asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.¹⁶

Dalam ilmu aturan perundang-undangan dijelaskan bahwa tinjauan filosofis tercermin dari konsider Undang-Undang. UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan berisi lima poin konsider:

- a. Bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat;

¹⁴ Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia* (Bandung: Unpad Press, 2005), 20

¹⁵ Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia ...* 28

¹⁶ Sony Maulana Sikumbang dkk, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Unpad Press, 2006), 41

- 
- 
- b. Bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;
 - d. Bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan.

Dari lima poin konsider di atas, sebagaimana tercantum dalam UU, terdapat empat alasan yang diambil oleh para pemangku kebijakan. Pertama, berdasarkan aspek kesejarahan yakni peran besar pemuda mengantarkan kemerdekaan Indonesia. kedua, aspek fungsi dan potensi pemuda untuk pembangunan nasional. Ketiga, aspek kebutuhan akan sumber daya manusia, khususnya pemuda, yang mumpuni dan profesional. Keempat, aspek tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang diejawantahkan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Berbicara tentang tinjauan filosofis, menurut penulis, tidak dapat terlepas dari tiga kata kunci filsafat ilmu: epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Epistemologi dalam kaitannya dengan Undang-Undang mempertanyakan tentang sumber kebenaran yang diambil oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah DPR dan Presiden untuk membuat suatu Undang-Undang—UU Kepemudaan. Kemudian ontologi mempertanyakan bagaimana Pemerintah mendefinisikan suatu kebenaran dalam Undang-Undang yang dibuat. Sedangkan aksiologi, membincang tentang kebermanfaatan setelah Undang-Undang tersebut dibuat khususnya bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Penulis akan mengulas satu-persatu hubungan filosofis antara konsesp asas yang digagas oleh van der Vlies dengan konsideran yang dimuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2009, dari sisi asas formil maupun asas materiil. Dari asas formil, ada lima asas masing-masing kaitannya adalah:

Pertama, Asas tujuan, dapat tercermin dari Pasal 3 yang berbunyi; pembangunan pemuda bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pernyataan Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan pemuda, dalam hal ini pembuatan Undang-Undang, adalah mencetak kader muda yang dapat diandalkan (berakhlak, sehat, kreatif dll), dan memiliki spirit kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Kedua, asas lembaga yang tepat. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan Undang-Undang Kepemudaan adalah Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 10, 11, 12 dan lebih spesifik di pasal 13 berbunya; Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan



pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Di pasal 14 berbunyi; Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, 12, 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

Tugas pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang adalah Menteri Pemuda dan Olahraga dan para gubernur serta para bupati/walikota di daerah masing-masing. Akan tetapi program dan implementasi pelaksanaannya nanti akan dibahas tersendiri di bagian berikutnya.

Ketiga, asas kedesakan. Dari sisi asas kedesakan, penulis dapat berpendapat bahwa Undang-Undang Kepemudaan bukanlah bagian dari UU yang mendesak untuk dibuat. Apabila menilik lagi kepada UUD 1945 dalam pasal 27 ayat (2) berbunyi: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian di pasal 28B ayat (2); Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. selanjutnya seluruh pasal 28 dari huruf A sampai I, menjelaskan secara rinci hak-hak setiap orang di Republik Indonesia.

Menurut penulis, apabila pemerintah konsisten melaksanakan UUD dengan baik, tidak perlu banyak peraturan-peraturan birokratif, tinggal bagaimana upaya yang maksimal dalam menggapai tujuan dan cita-cita negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. UU Tentang Kepemudaan, dilihat dari aspek kedesakan tidak mencerminkan keterdesakan dibuatnya UU tersebut.

Keempat, asas pelaksanaan. Berkaitan dengan asas pelaksanaan perlu dievaluasi lagi, karena masih banyak kriminalitas remaja, terutama di kota-kota. Untuk lebih jelas dan rinci, akan di bahas pada sub bab tersendiri di bagian berikutnya.

Beralih ke asas-asas materiil; terdapat lima asas utama. *Pertama*, berkaitan dengan asas terminologi dan sistematika yang benar. Dalam pasal 1 dijelaskan (1): Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Dari sisi ayat 1 saja, masih banyak perdebatan-perdebatan yang mengemuka. Penulis memperoleh data bahwa para ketua organisasi kepemudaan, sebut saja misalnya: GP Ansor (Yaqut Cholil, 41 tahun), Pemuda Muhammadiyah (Dahnil Anzar, 34 tahun), Pemuda Pancasila (Japto Soerjosoemarno, 64 tahun), dan lain lain. Dari sisi definisi pemuda saja, masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam tataran prakteknya. *Kedua*, asas dikenali, masih berhubungan dengan asas pertama. Artinya, jika asas pertama telah jelas, maka asas kedua lebih menegaskan kembali bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus jelas, efektif, dan fungsional.

Ketiga, asas perlakuan yang sama dalam hukum. UU tentang Kepemudaan secara konseptual disusun selengkap mungkin untuk pelayanan pemuda, pembangunan pemuda dan lain-lain, berarti semua pemuda warga negara Indonesia berhak atas semua aturan yang tertera dalam UU Tentang Kepemudaan. Akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya belum mencakup ke seluruh pemuda di Indonesia. lebih lengkapnya akan dibahas pada bagian implementasi Undang-Undang. *Keempat*, asas kepastian hukum. Kembali seperti permasalahan di asas sebelumnya, yaitu berkaitan antara perlakuan dan kepastian pada asas yang keempat. Problemmnya lagi lagi terletak pada implementasi pemerintah lewat program-program yang belum menyeluruh ke seluruh pemuda di Indonesia, yang nanti akan dibahas



lebih lanjut di bagian berikutnya. Terakhir aspek *kelima* pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual masih berkaitan dengan implementasi di lapangan.

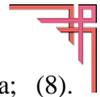
D. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2009; KRITIK AKAR PROBLEM

Untuk membahas implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, penulis menggunakan laporan kinerja Kemenpora 2015. Dalam struktur organisasi Kemenpora, UU Kepemudaan dicerminkan dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Menteri
2. Sekretariat Kementerian, yang terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Organisasi, b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga, c. Biro Humas Hukum dan Kepegawaian
3. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri atas: a. Asdep Peningkatan Sumber Daya Pemuda, b. Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda, c. Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda, d. Asdep Peningkatan Kreatifitas Pemuda, e. Asdep Organisasi Kepemudaan
4. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri atas: a. Asdep Peningkatan Kepanduan, b. Asdep Kepemimpinan Pemuda, c. Asdep Kewirausahaan Pemuda, d. Asdep Kepeloporan Pemuda, e. Asdep Tenaga Kepemudaan
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas: a. Asdep Olahraga Layanan Khusus, b. Asdep Olahraga Pendidikan, c. Asdep Olahraga Rekreasi, d. Asdep Industri Olahraga, e. Asdep Sentra Keolahragaan.
6. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas: a. Asdep Tenaga Keolahragaan, b. Asdep Pembibitan Olahragawan, c. Asdep Olahraga Prestasi, d. Asdep Penerapan Iptek Keolahragaan, e. Asdep Organisasi Keolahragaan.
7. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, terdiri atas: a. Asdep Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan, b. Asdep Pengembangan Standarisasi, c. Asdep Pengembangan Penghargaan dan Promosi, d. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan, e. Asdep Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan.

Dari semua bidang tersebut, Visi kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Pemuda berkarakter, maju dan mandiri yang menjadi output nawacita Jokowi-JK dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga yaitu; (1). Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (2). Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (3). Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; (4). Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; (5). Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (6). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (7). Meningkatkan sarana dan



prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (8). Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik, berjenjang dan berkelanjutan; (9). Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; (10). Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Ukuran kinerja yang dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilihat di bagian pengukuran kinerja dengan beberapa tujuan dan program yang telah terlaksana, antara lain:

Pertama, meningkatnya kepemudaan yang berdaya saing dengan tujuan kerja turunan yaitu: 1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan memiliki tujuan turunan lagi yakni: **A.** Meningkatnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan hidup bagi pemuda dengan program kerja: (a). Jambore Pemuda Indonesia (JPI), program ini merupakan kerjasama antara Kemenpora dengan Disdikpora Provinsi Riau diikuti oleh peserta utusan dari 34 Provinsi. (b). Kapal Pemuda Nusantara (KPN), merupakan metode mengembalikan karakter Indonesia maritim dengan menggunakan KRI Teluk Bintuni milik TNI-AL dengan tujuan pelayaran mulai dari Jakarta, Kota Baru, Siau, Tahuna, Marampit, Ternate, Parigi Moutong, dan Muna. **B.** Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda dengan program: (a). Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Utama yang merupakan program unggulan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dengan tujuan menghantarkan pemuda calon pemimpin bangsa memiliki kualitas kepemimpinan yang handal. (b). Penyelenggaraan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional, pelatihan ini dilaksanakan di 34 Provinsi berlangsung mulai April hingga Mei 2015. (c). Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka tingkat Nasional, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 06 sampai 16 Juni 2015 bertempat di Cibubur. **C.** Meningkatnya fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan pemuda dengan program; (a). Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dengan tiga turunan program yaitu; pelatihan dasar kewirausahaan pemuda, pelatihan penguatan usaha yang ditujukan bagi wirausaha muda pemuda, dan pelatihan pengembangan usaha yang ditujukan bagi wirausaha muda pemula. Sayangnya, tidak ada deskripsi peserta dan target yang telah tercapai. **D.** Meningkatnya fasilitas Pengembangan Kepeloporan Pemuda dengan program; a. Penempatan dan pendampingan PSP3 dengan peserta 3727 orang. **E.** Terlaksananya fasilitasi pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi pengelola organisasi kepemudaan dengan program kerja; (a). Dukungan Penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda 2015. (b). Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi tingkat Nasional. **F.** Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda di bidang Iptek dan Imtaq dengan program kerja: (a). Sekolah karakter Bangsa dalam mengembangkan Budaya sadar Pancasila dan Konstitusi. (b). Peningkatan kesadaran pemuda terhadap faktor destruktif. 2. Meningkatkan pengembangan teknologi dan kreativitas pemuda. Dengan program-program: a. Penguatan pasca program pemuda dan pengembangan industri kreatif, b. Gebyar Seni Budaya Indonesia.

Kedua, meningkatnya kepramukaan yang berkarakter. Dengan tujuan turunan yaitu: 1. Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan. Dengan beberapa tujuan turunan antara lain: **A.** Meningkatnya fasilitasi pendidikan kepanduan dengan realisasi 5600 orang pemuda yang telah difasilitasi.

Ketiga, meningkatnya keolahragaan yang berdaya saing dengan tujuan turunan antara lain:



1. Meningkatkan prestasi olahraga dengan tujuan turunan lagi: A. tercapainya posisi papan atas pada kejuaraan SEA Games dan ASEAN Games 2015, 2017, dan 2019. B. terlaksananya fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan dengan 9 program unggulan: (a). Pemusatan latihan dalam Prima (Program Indonesia Emas) sudah dimulai sejak Januari 2014 terus berlanjut di tahun 2015 dengan sistem promosi degradasi. (b). mengintensifkan cabang olahraga nomor unggulan. (c). Melaksanakan Training Camp cabang olahraga potensial ke luar negeri. (d). Trayout Internasional. (e). Mendatangkan pelatih asing. (f). Pendampingan pelatih fisik. (g). Sport Intelligent Program. (h). Pendampingan. (i). Pengawasan doping. C. Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan dengan program pemandu bakat cabang olahraga yang mencapai target 16000 orang peserta dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)

2. Meningkatnya budaya olahraga dengan beberapa tujuan turunan: A. Meningkatnya presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas melakukan olahraga menjadi 35 persen di tahun 2019. Upaya ini ditempuh dengan agenda kegiatan sebagai berikut: (a). Pendampingan Kejuaraan Olahraga Pelajar/Mahasiswa. (b). penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Antar Pendidikan. B. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dengan beberapa program turunan: (a). Acara Menpora Sport Fun Festival. (b). Acara Ekstreme Sport Championship tahun 2015. C. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dengan program-program: (a). Festival senam kebugaran jasmani. (b). gerak jalan. D. Meningkatnya jumlah komunitas olahraga di berbagai level. Target utama 150 lembaga, akan tetapi yang tercapai 62 lembaga, dengan presentase kinerja 41,3 %.

Setelah tujuan yang ketiga, sayangnya dalam Laporan Kinerja tidak berurut ke nomor yang keempat, loncat ke nomor yang kesebelas. Entah salah penulisan atau bagaimana, yang jelas adalah sisa tujuan dan program berkaitan dengan kemitraan dan evaluasi dan lain lain.

Dari data-data yang telah dipaparkan secara rinci oleh penulis, dapat dipahami bahwa program kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah memiliki sinkronisasi dengan beberapa tuuan UU Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan, terutama dari sisi tujuan pelayanan dan pembangunan pemuda. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa semua program tersebut belum menyentuh pada akar masalah pemuda dan remaja di Indonesia dengan banyaknya kriminalitas dan pengangguran yang menimpa pemuda-pemuda. Terutama akses pemuda jalanan atau yang disebut anak jalanan terhadap lapangan pekerjaan yang masih sangat formalistik.

Menurut Alan France dkk, dalam buku yang berjudul *A Political Ecology of Youth and Crime* dijelaskan bahwa ada relasi dialektis antara aksi sosial individu dengan kekuatan politik. Alan France mengutip pendapat Bronfenbrenner (1979), mengagas sebuah teori dialektis hubungan antara angka kriminalitas di suatu wilayah dengan kekuatan politik dan sosial di wilayah tersebut.¹⁷ Dalam teori tersebut disebutkan beberapa konsep kunci yaitu: makrosistem, mikrosistem, mesosistem, dan eksosistem. Makrosistem dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki sistem kuasa untuk mengatur dan mengoptimalkan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Mikrosistem adalah rakyat yang tidak memiliki akses terhadap sistem yang kuat. Kemudian mesosistem dalam hal ini adalah individu

¹⁷ Alan France dkk, *A Political Ecology of Youth and Crime* (London: Palgrave Macmillan, 2012), 19.



manusia yang ada di masyarakat. Adapun ekosistem merupakan lingkungan sekitar masyarakat dan individu, seperti institusi sekolah, rumah tangga, dan lain lain.

Dilihat dari perspektif ekologi remaja dan kriminalitas, Kemenpora menurut penulis belum menjamah ke ranah pemuda yang dianggap oleh masyarakat sebagai sampah masyarakat. Dalam pandangan teori ekologi remaja dan kriminalitas, masalah pemuda yang berbuat kriminal tidak dapat dipandang sebagai bentuk kriminalitas, karena ada lingkungan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya yang sulit untuk dijangkau oleh pemuda tertentu. Perlu pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah kriminal remaja tersebut, dengan dilihat dari perspektif pemuda itu sendiri.

Untuk evaluasi dari berbagai rujukan dan program Pemerintah untuk pembangunan pemuda, Pemerintah dalam hal ini Kemenpora, perlu melakukan riset serius tentang permasalahan pemuda di Indonesia. Sejauh pembacaan penulis, belum banyak jurnal yang representatif yang dijadikan rujukan bagi studi pemuda, selain jurnal studi pemuda yang diterbitkan oleh Youth Studies Centre (YouSure) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM). Program-program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah sudah semestinya menjawab berbagai problem pemuda yang dapat diketahui problem tersebut melalui riset sosial yang mendalam.

Dalam pandangan penulis, program-program Pemerintah dalam hal ini Kemenpora perlu dimulai dengan mengatasi problem pemuda yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Bukan hanya fokus pada pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah formal, sedangkan pemuda-pemuda pengangguran yang dianggap sebagai sampah masyarakat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, saran penulis adalah membangun terlebih dahulu wadah kajian yang fokus menggali problem pemuda di Indonesia. Dari riset-riset tersebut akan teridentifikasi masalah-masalah kriminalitas pemuda, kemudian dapat diatasi mulai dari masalah-masalah tersebut.

E. KESIMPULAN

Sebagai penutup, penulis menyampaikan bahwa program-program kerja yang telah dicapai oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpora telah bagus dan baik, menyentuh aspek-aspek pelayanan pemuda dan pembangunan pemuda dengan berbagai capaian kinerja yang cukup baik. Akan tetapi perlu pula untuk menyentuh kalangan pemuda yang dianggap bermasalah oleh masyarakat, seperti: pemuda pengangguran, geng motor, dan anak-anak jalanan yang seringkali dicap sebagai sampah masyarakat.

Hal yang paling pertama perlu dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai masalah pemuda di Indonesia dengan cara membangun wadah riset yang serius tentang studi pemuda. Kemudian setelah problem dikenali, maka dapat disusun berbagai program untuk memecahkan masalah-masalah pemuda tersebut.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS, 2013.
- Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas" dalam *Sosio Informa* vol. 1 No. 02, Mei-Agustus 2015.
- Evie Rachmawati Nur Ariyanti, "Pembatasan Frasa Perubahan Kesekian Kali Pada Perumusan Judul Undang-Undang: Telaah Terhadap Undang-Undang Perpajakan" dalam *ADIL: Jurnal Hukum* Vo. 3 No. 2, 2012.



Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2005.

Sony Maulana Sikumbang dkk, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Unpad Press, 2006.

Alan France et all. *A Political Ecology of Youth and Crime* (London: Palgrave Macmillan, 2012).

www.un.org diakses pada tanggal 20 Oktober 2016



STIMULASI PERKEMBANGAN BICARA ANAK USIA PRASEKOLAH MELALUI METODE *STORYTELLING* DI SEKOLAH PAUD DAN TK (USIA 3-5 TAHUN) DI KECAMATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG

Itryah¹ dan Urfaa Fajarwati²

¹*Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bina Darma Palembang*

²*Mahasiswa Program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Email : itryah@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan bicara anak usia prasekolah melalui metode storytelling. Penelitian dilakukan di Sekolah Paud dan TK di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tepatnya di Paud Kasih Ibu dan TK Yaspa. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 anak, 10 orang anak Paud Kasih Ibu dan 20 TK A dan B Yaspa. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi keterampilan berbicara yang sudah baku dengan berdasarkan aspek Brooks (2004). Hasil penelitian ini dengan perhitungan manual berdasarkan alat ukur observasi menunjukkan ada 17 anak yang memiliki keterampilan berbicara baik dengan rentang nilai tally (21-30) dan 13 orang anak yang memiliki keterampilan bicara cukup dengan rentang nilai tally (11-20). Anak yang memiliki keterampilan bicara baik dipengaruhi oleh . Kemudian dianalisis secara keseluruhan menggunakan analisis data One Sampel T Test menggunakan SPSS versi 19.0. Analisis data menggunakan one sampel t test menunjukkan $t_{table} = 3,3962 > t_{hitung} = -26,907$. artinya ada perbedaan keterampilan bicara pada setiap anak dan menunjukkan ada pengaruh metode story telling yang sangat signifikan dengan $p = 0,000$.

Kata Kunci: Perkembangan Bicara, Metode *Storytelling*

A. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan suatu pertukaran pikiran dan perasaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Pertukaran tersebut dapat dilaksanakan dengan setiap bentuk bahasa seperti : isyarat, ungkapan emosional, bicara atau bahasa tulisan, tetapi komunikasi yang paling umum dan paling efektif dilakukan dengan bicara.

Belajar bicara tentunya akan kita mulai sejak kecil. Sejak dini, anak-anak menemukan cara bahwa upaya awal mereka untuk berkomunikasi adalah dengan menangis atau dengan menggunakan isyarat tidak selalu di pahami, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar bicara segera setelah mereka siap melakukan hal itu, mereka berusaha belajar bicara karena mereka telah mengetahui bahwa bicara merupakan alat komunikasi yang baik ketimbang tangisan, isyarat, dan bentuk komunikasi lainnya yang telah mereka gunakan sebelumnya.

Bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Berbicara merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan, sebabmelalui sebuah aktivitas berbicara seseorang mampu berkomunikasi



menyampaikan apa yang diinginkan atau yang dirasakannya. Menurut Tarigan (2008) tujuan berbicara adalah : (1) memberitahukan dan melaporkan (*to inform*), (2) menjamu dan menghibur (*to entertain*), (3) membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan (*to persuade*).

Sedangkan menurut Hurlock (2006) mengemukakan bahwa salah satu tugas utama dalam belajar berbicara ialah anak harus dapat meningkatkan jumlah kosa kata, anak harus belajar mengaitkan arti dengan bunyi karena kata yang memiliki arti yang lebih dari satu dan sebagian kata bunyinya hampir sama, tetapi memiliki arti yang berbeda, maka meningkatkan kosa kata jauh lebih sulit daripada mengucapkannya. Sehingga diperlukan adanya suatu peningkatan kosa kata pada anak yang dapat menunjang pada kemampuan berbicara.

Kemampuan berbicara sudah harus dikembangkan sejak dini, bahkan sebelum anak masuk ke dunia sekolah. Bagaimana anak mampu berinteraksi dengan teman sebayanya atau pun guru ketika disekolah tergantung bagaimana ia berkomunikasi melalui berbicara. Anak usia pra-sekolah, usia 3-5 tahun, biasanya sudah dapat menggunakan kalimat yang rata-rata terdiri dari 4 atau 5 kata dan bisa berbentuk deklaratif, negatif (“Saya tidak lapar.”), interogatif (“Kenapa saya tidak boleh main di luar?”) atau imperatif (“Tangkap bolanya!”). Anak berusia 4 tahun menggunakan kalimat kompleks dan multiklausal (“Saya makan karena saya lapar”) (Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman, dan Levine, 2002). Mereka juga mampu menggunakan kata depan, seperti di bawah, di atas, di dalam dan di samping. Anak lebih banyak menggunakan kata kerja daripada kata benda. Bila anak telah menguasai kata-kata, kalimat dan tata bahasa, mereka juga akan dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih efektif.

Keterlambatan bicara dapat mempengaruhi penyesuaian sosial dan pribadi anak, tetapi juga mempengaruhi penyesuaian akademis mereka. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca yang merupakan mata pelajaran pokok pada awal karier sekolah anak. Kemudian, keadaan ini dapat mempengaruhi kemampuan berprestasi disekolah, digabungkan dengan masalah penerimaan sosial akan menimbulkan rasa benci mereka untuk bersekolah (Hurlock, 2002).

Keterlambatan bicara adalah istilah yang dipergunakan untuk mendeskripsikan adanya hambatan pada kemampuan bicara pada anak, tanpa disertai keterlambatan aspek perkembangan lainnya. Pada umumnya mereka mempunyai perkembangan intelegensi dan sosial-emosional yang normal.

Keterlambatan bicara yang biasanya terjadi pada anak usia prasekolah sering dialami juga pada anak-anak di beberapa sekolah di wilayah Plaju Seberang Ulu II. Tidak mengenal sekolah tersebut ternama atau tidak, fenomena ini terjadi sama pada anak-anak prasekolah tersebut. Hal ini jika ditelaah dari sistem pembelajaran disekolah tidak begitu signifikan terkait dengan permasalahan tersebut, sekolah-sekolah sudah menerapkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kurikulumnya, dan sudah diarahkan untuk mempersiapkan anak untuk masuk ke tingkat sekolah dasar.

Hambatan dalam berbicara yang terjadi pada anak justru tampak dan terdeteksi ketika anak-anak usia dibawah 5 tahun tersebut akan memasuki sekolah *pre-school* (PG, TK A, TK B) dan kebanyakan juga terdeteksi ketika seorang anak baru pertama kali masuk ke dunia sekolah.

Gambaran hambatan-hambatan kemampuan bicara yang sering terjadi pada anak-anak adalah usia *preschool* adalah masih belum fasih mengucapkan bunyi dari kata yang ia ucapkan secara benar dan jelas terlihat jelas misalnyaketika mereka mengucapkan kata tidak



mau di ucapkan “ndak au” kata susu di ucapkan “cucu”, mau minum di ucapkan “au imum”, dan kata bunda di ucapkan “unda”. Kemudian juga dapat terlihat pada kesulitan mengatur nada ketika berbicara, terkadang dia berteriak saat mengucapkan kata-kata dan terkadang berkata dengan suara yang sangat kecil dan terbata-bata sehingga lawan berbicara mereka kesulitan untuk mengartikan kata yang keluar dari mulutnya. Lalu ada pulayang masih menggunakan bahasa tubuh (isyarat) dengan hanya menggangguk, menggeleng atau menunjuk sesuatu yang ia inginkan atau mengungkapkan perasaanya melalui ekspresi wajahnya (cemberut, menangis atau tersenyum) dan hanya sesekali mengucapkan satu atau dua buah kata yang terkadang lawan bicaranya sulit untuk mengartikan kata yang keluar dari mulut mungilnya, sehingga membuat ia kesal dan menangis. Selain itu kemampuan bahasa reseptif dan kemampuan bahasa ekspresif juga seringkali terhambat pada anak-anak usia prasekolah, dimana kemampuan reseptif adalah ketidakmampuan atau kegagalan anak dalam menangkap dan menerima informasi atau instruksi yang disampaikan kepadanya, dan akan berkaitan dengan kemampuan ekspresif yaitu kegagalan anak dalam menyampaikan gagasan, keinginan, fikiran dan perasaannya kepada orang lain.

Banyakfaktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak, antara lain menurut Agung (Mufidah, 2010) terdapat dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain faktor fisik (organ-organ tubuh) dan nonfisik (tingkat intelegensi, kreativitas, kepribadian, bakat), sedangkan faktor eksternal antara lain; tingkat pendidikan, pembiasaan (termasuk didalamnya stimulasi) dan lingkungan.

Menurut Hurlock (2006) salah satu penyebab yang tidak diragukan lagi paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berceoteh. Apabila anak tidak didorong berceoteh, hal ini akan menghambat penggunaan kata-kata dan mereka anak terus tertinggal dibelakang teman seusia mereka yang mendapat dorongan berbicara lebih banyak.

Pada usia perkembangan di bawah lima tahun (balita) bahasa lisan (berbicara) berkembang sangat aktif dan pesat. Banyak masalah dalam proses belajar anak usia sekolah terjadi oleh karena adanya keterlambatan berbicara pada periode usia dibawah lima tahun. Anak usia balita yang mengalami keterlambatan bicara beresiko mengalami kesulitan belajar saat mereka berada pada usia sekolah. Kesulitan dalam membaca dan menulis akan menyebabkan pencapaian akademik yang kurang secara menyeluruh, dan ini dapat berlanjut sampai usia dewasa muda (Hurlock, 2006).

Keterlambatan berbicara dapat diatasi dengan bantuan dari lingkungannya terutama keluarga. Lingkungan dapat memberi stimulasi dengan cara mengajak anak bercaka-cakap, membacakan cerita/dongeng sering mengajarkan nyayian/lagu. Orang tua juga harus membiarkan anak mengekspresikan dirinya sendiri, memberikan kebebasan untuk bercerita tentang pengalamannya dan menjawabnya dengan baik dan dapat dimengerti oleh anak.

Saat memasuki masa perkembangan bicara, anak-anak akan menjelma sebagai tukang bicara. Dimana mereka akan terus berbicara tentang apa yang mereka lihat meskipun dengan kosakata yang masih sangat terbatas (Hurlock, 2006). Oleh karena itu penting bagi guru ataupun orangtua untuk memberikan stimulus bagi anak-anak agar kemampuan berbicara terutama dalam hal kosakata dan merangkai kalimat dapat berkembang pesat. Banyak media yang bisa digunakan sebagai stimulus untuk mengembangkan keterampilan bicara pada anak. Antara lain melalui interaksi komunikasi yang intens, musik, film, permainan, dan dongeng (*storytelling*) (Raines & Isabell, 2002).



Joan Brewer (2007) merekomendasikan bahwa untuk pengembangan keterampilan berbicara perlu disediakan aktivitas *storytelling*, menurutnya aktivitas ini memberikan keuntungan karena anak-anak akan menjadi penyimak dan pembicara aktif. Hal ini sangat sesuai karena metode *storytelling* adalah metode yang menarik, menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak.

Berbicara mengenai *Storytelling* atau mendongeng adalah seni paling tua warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu sarana positif guna mendukung kepentingan sosial secara luas. Secara umum semua anak-anak senang mendengarkan *storytelling*, baik anak balita (usia anak *prasekolah*), usia sekolah dasar, maupun yang telah beranjak remaja bahkan orang dewasa. Kegiatan *storytelling* dapat memperbaiki daya nalar anak dan memperluas komunikasi anak dengan orang dewasa, anak dengan temannya, atau anak itu sendiri. Dalam kegiatan *storytelling*, proses bercerita menjadi sangat penting karena dari proses inilah anak mempelajari kosakata dan bentuk kalimat yang baru. Pada saat proses *storytelling* berlangsung terjadi sebuah penyerapan pengetahuan yang disampaikan pencerita kepada *audience*.

Kegiatan *storytelling* atau dongeng disamping menambah kemampuan berbicara juga mampu mempelajari pendengaran melalui kejelasan dan volume suara yang didengarnya serta mampu menumbuhkan sikap tenang dan percaya diri dalam berbicara (Farris, 2003). *Storytelling* merupakan metode yang tepat untuk peningkatan keterampilan berbicara anak usia dini. Sehubungan dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah perkembangan bicara anak usia prasekolah meningkat melalui metode *storytelling* di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang?”.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan bicara anak usia prasekolah melalui metode *storytelling*. Penelitian dilakukan di Sekolah Paud dan TK di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, tepatnya di Paud Kasih Ibu dan TK Yaspa. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan perkembangan bicara anak usia prasekolah melalui metode *storytelling*, harapannya sebagai referensi bagi orang tua maupun guru untuk digunakan dalam meningkatkan perkembangan bicara anak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Saputra dan Rudyanto (2005), Keterampilan adalah kemampuan anak dalam melakukan berbagai aktivitas seperti motorik, berbicara, sosial- emosional, kognitif, dan afektif (nilai-nilai moral). Sedangkan, berbicara secara umum dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, gagasan, atau isi hati) seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain (Suhartono, 2005).

Menurut Agung (Mufidah, 2010) ada dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan segala potensi yang ada dalam diri seseorang, meliputi:

- a. Faktor fisik, merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara, dalam hal ini meliputi pita suara, lidah, gigi, dan bibir.
- b. Faktor non fisik (psikis), merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi



psikologis seseorang dan tidak berhubungan dengan fisik.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Hurlock (2008) juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara adalah:

- a. Intelegensi, yaitu semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan berbicara dikuasai sehingga semakin cepat dapat berbicara.
- b. Jenis disiplin, anak yang dibesarkan dengan disiplin yang cenderung lemah lembut lebih banyak berbicara daripada anak yang orang tuanya bersikap keras.
- c. Posisi urutan (urutan kelahiran), dimana anak sulung didorong untuk lebih banyak berbicara daripada adiknya.
- d. Besarnya keluarga, anak tunggal didorong untuk lebih banyak berbicara daripada anak-anak dari keluarga besar dan orang tuanya punya lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya.
- e. Dua Bahasa, meskipun anak yang berasal dari keluarga yang menggunakan dua bahasa lebih banyak memiliki perbendaharaan kata daripada anak yang berasal dari keluarga berbahasa tunggal, tetapi pembicaraannya akan sangat terbatas jika anak tersebut berada dengan teman sebayanya atau dengan orang dewasa di luar rumah.
- f. Jenis kelamin, terdapat efek penggolongan jenis kelamin pada pembicaraan anak sekalipun masih dalam masa prasekolah. Anak laki-laki diharapkan sedikit bicara dibandingkan anak perempuan.

Menurut Arsyad dan Mukti (2008) aspek-aspek keefektifan berbicara diantaranya adalah aspek aspek kebahasaan dan non kebahasaan. Aspek kebahasaan itu antara lain : ketepatan sasaran, ketepatan berbicara, penempatan tekanan pembicaraan atau perwakilan kalimat. Aspek kebahasaan yaitu sikap yang wajar, pandangan, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak gerik dan mimik, kenyaringan suara, relevansi dan penguasaan topic

Anak usia prasekolah mempunyai karakteristik khusus dalam kemampuan berbicara, antara lain : (a) sudah dapat bicara lancar dengan kalimat sederhana, mengenal sejumlah kosakata, (b) menjawab dan membuat pertanyaan sederhana, (c) serta menceritakan kembali isi cerita. (Suhartono, 2005).

Bowler and Linke (1996) memberikan gambaran tentang kemampuan bahasa anak usia 3-5 tahun. Menurut mereka pada usia 3 tahun anak menggunakan banyak kosakata dan kata tanya seperti apa dan siapa. Pada usia 4 tahun anak mulai bercakap-cakap, memberi nama, alamat, usia, dan mulai memahami waktu. Perkembangan bahasa anak semakin meningkat pada usia 5 tahun dimana anak sudah dapat berbicara lancar dengan menggunakan berbagai kosa kata baru.

Menurut Echols (2005) “*Storytelling* terdiri atas dua kata yaitu *story* berarti cerita dan *telling* berarti penceritaan”. Gabungan kedua kata *storytelling* berarti penceritaan cerita atau perihal menceritakan cerita. Fisher (Mustakim, 2005) menyatakan *Storytelling* adalah bentuk kreatifitas yang menyenangkan yang terbentuk dalam lintas Negara dan Budaya. Cerita-cerita yang lahir dari masyarakat mengkomunikasikan apa yang ada dalam cerita dan memperluas wawasan anak tentang berbagai ragam budaya. *Storytelling* adalah seni bercerita yang lebih tinggi dan memerlukan banyak berlatih sebagai salah satu kegiatan seni bercerita. “*storytelling* adalah kegiatan aktivitas yang bermanfaat dalam pembelajaran, *storytelling*



dapat menumbuhkan motivasi untuk menyimak cerita atau bercerita” (Mustakim, 2005).

Saxby (2001) menyatakan bahwa manfaat dongeng bagi anak terbentang luas mulai dari dukungan terhadap pertumbuhan berbagai pengalaman, perasaan, emosi, bahasa, perkembangan kognitif, sosial, estetis, spritual, eksplorasi dan penemuan. Manfaat dari *storytelling* juga memberi kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, mengembangkan daya imajinasi anak, memberikan pengalaman baru, mengembangkan wawasan anak, menurunkan warisan budaya dari generasi satu kegenerasi berikutnya (Mizan, 2007)

C. METODE

Variabel penelitian ini adalah perkembangan bicara dan metode *storytelling* yang khusus sudah diberikan kepada anak usia prasekolah (3-5 tahun). Subyek penelitian ini adalah anak yang sekolah di Paud/TK Kasih Ibu dan TK A dan TK B Yaspa yang berada di Seberang Ulu II Kota Palembang. Jumlah subyek (anak prasekolah) yang diteliti ada 30 orang, 3 orang guru dan orang tua siswa yaitu ayah/ibu. Instrumen penelitian ini menggunakan Lembar Observasi Keterampilan Berbicara yang sudah baku dari peneliti sebelumnya yaitu Lediana (2014) berdasarkan konsep teori dari Brooks (2004) sebagai berikut: (1) Pengucapan bunyi-bunyi tersendiri (vokal/konsonan), (2) Polapola intonasi, naik dan turunnya suara serta tekanan suku kata, (3) Ketetapan dan ketepatan ucapan, (4) Bentuk dan urutan kata-kata, (5) Kelancaran dalam berbicara. Dari kelima aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua belas aspek penilaian. Dengan hasil uji validitas berkisar antara 0,180 sampai dengan 0,869 dan Uji reliabilitas pada lembar observasi keterampilan berbicara menunjukkan nilai reabilitas alpha sebesar 0,884.

Desain penelitian ini adalah dengan pendekatan studi deskriptif, survey yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung. Faktor pendukung terhadap perkembangan bahasa setelah dilakukannya *metode storytelling* di sekolah. Yang menjadi focus perhatian untuk peningkatan perkembangan bahasa anak diantaranya, guru, orang tua, kurikulum, alat *storytelling*, waktu pelaksanaan *storytelling*, dan siswa sendiri.

D. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menjelaskan terlebih dahulu skor lembar observasi keterampilan berbicara anak secara manual dengan menggunakan alat ukur yang sudah baku. Data diperoleh anak Paud Kasih Ibu dan anak TK Yaspa di Kecamatan Seberang Ulu II. Perhitungan skor keterampilan berbicara memiliki standar penilaian yaitu : rentang skor nilai tally (penyebutan kata) 1 – 10 (Jelek), 11 – 20 (cukup) dan 21 – 30 baik.

Hasil Penelitian di Paud Kasih Ibu dengan 10 orang subyek penelitian yaitu 10 orang anak menunjukkan dari hasil lembar observasi kemampuan berbicara anak-anak dengan rentang nilai tally : 1-10 (jelek), 11-20 (cukup) dan 21-30 (baik). Ada 5 orang anak yang kemampuan berbicaranya baik pada subyek (2, 3, 5, 6, dan 7) dan 5 orang anak yang kemampuan berbicaranya cukup pada subyek (1, 4, 8, 9 dan 10). Sedangkan bahwa untuk anak TK A Yaspa dengan 10 orang anak sebagai subyek penelitian, menunjukkan skor keterampilan berbicara 10 orang anak tersebut dapat dijelaskan ada 6 orang anak dengan keterampilan cukup pada subyek (12, 13, 14, 16, 17 dan 18) dan 4 orang anak keterampilan berbicaranya baik (11, 15, 19 dan 20). Pada anak TK B Yaspa memiliki keterampilan bicara lebih banyak dibanding dengan TK A, ada 10 subyek penelitian untuk TK B Yaspa, hasilnya adalah ada 2 orang anak yang keterampilannya cukup yaitu pada subyek (24 dan 27)

dan 8 orang anak dengan keterampilan berbicaranya baik yaitu subyek (21, 22, 23, 25, 26, 28, 29 dan 30).

Total subyek penelitian ada 30 anak TK yang diteliti dengan keterampilan berbicara yang berbeda-beda. Semakin banyak anak menyebutkan kosa kata dan disebutkan dengan jelas huruf konsonan dan vokal maka keterampilan berbicara anak akan semakin baik dan perubahan perkembangan bahasa anak akan meningkat

Hasil Penelitian dengan uji statistic menunjukkan Selain menggunakan data lembar observasi keterampilan berbicara anak prasekolah, penelitian ini juga mengujikan data tersebut dengan metode statistic untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode storytelling yang sudah diberikan disekolah terhadap kemampuan siswa dalam menguasai kosa kata untuk berbicara. Metode statistic menggunakan One Sampel T Test, yaitu satu kelompok sampel dengan metode storytelling. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 dibawah ini :

Tabel. 1
Deskripsi Data Penelitian
One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Tally	30	19.9667	2.04237	.37288

Tabel 1 di atas menjelaskan bahwa deskripsi data penelitian menunjukkan jumlah sampel penelitian ada 30 orang anak, dengan nilai rata-rata Mean = 19,9667 dan nilai SD = 2,04237

Tabel. 2
Hasil Penelitian
Uji One Sampel T Test
One-Sample Test

	Test Value = 30					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Tally	-26.907	29	.000	-10.03333	-10.7960	-9.2707

Table 2 diatas menunjukkan hasil data penelitian mengenai data Keterampilan Berbicara dari 30 orang subyek, taraf signifikansi $P= 0,000 < 0,05$ dan $t = -26,907$. Nilai $t_{table} = 3,3962$ dan $t_{hitung} = -26,907$ ($t_{table} > t_{hitung}$). Disimpulkan bahwa ada perbedaan setiap anak dalam menguasai keterampilan berbicara, anak-anak sudah memiliki keterampilan berbicara yang baik dengan rentang nilai 21 – 30 dan keterampilan berbicara yang cukup dengan rentang nilai 11 – 20.



E. DISKUSI

Storytelling dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan berbicara pada anak sebanyak 70%. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses *storytelling* terdapat aktivitas yang bermanfaat dalam pembelajaran dimana *storytelling* dapat member kesenangan dan merangsang imajinasi anak serta melalui kegiatan *storytelling* anak mendapat banyak contoh pengucapan lafal, beragam kosakata baru, dan rangkaian kalimat. *Storytelling* juga mengajarkan anak untuk menjadi pendengar yang baik, menaruh perhatian pada ucapan orang lain, dan memberikan pengalaman serta pembelajaran dalam berbicara oleh karena itu metode *storytelling* penting terus diberikan buat anak usia prasekolah.

Yang menjadi focus perhatian untuk peningkatan perkembangan bahasa anak diantaranya selain anak itu sendiri (sebagai faktor internal) tetapi ada faktor lain juga yang mendukung agar keterampilan berbicara anak meningkat dan lancar berbicara (sebagai faktor eksternal) yaitu guru, orang tua, kurikulum, alat *storytelling*, dan waktu pelaksanaan *storytelling*. Lebih lanjut dijelaskan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara pada anak, antara lain menurut Agung (Mufidah, 2010) terdapat dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain faktor fisik (organ-organ tubuh) dan nonfisik (tingkat intelegensi, kreativitas, kepribadian, bakat), sedangkan faktor eksternal antara lain; tingkat pendidikan, pembiasaan (termasuk didalamnya stimulasi) dan lingkungan.

Penelitian ini juga mengambil data informasi melalui wawancara kepada guru yang memberikan metode *storytelling* setiap minggu nya dan juga kepada orang tua terutama ibu yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. ada 3 orang guru yang diwawancarai yang terdiri dari 1 guru Paud Kasih Ibu dan 2 guru TK Yaspa. Hasil wawancara menjelaskan bahwa. Metode *storytelling* yang diberikan kepada anak-anak sekolah Paud dan TK berfungsi secara langsung untuk meningkatkan keterampilan berbicara juga dapat bermanfaat dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pula perkembangan kognitif, emosi dan perilaku baik.

Hasil wawancara menyebutkan bahwa, anak prasekolah dari sisi perkembangan emosi mereka; merasa diperhatikan, memunculkan keberanian, terbuka terhadap dirinya, anak merasa dihargai dan merasa diperhatikan setiap ucapan dan idenya. Sedangkan dari sisi perkembangan kognitif mereka; memiliki banyak kosa kata sehingga banyak yang dibicarakan saat diskusi/cerita, cepat memahami apa yang dijelaskan, dapat melihat minat dan kemampuan dalam belajar, melatih anak menanggapi dan mendengar, memiliki pengetahuan yang cukup tentang hewan dan perilaku-perilaku/pesan moral yang baik, mengasah ingatan anak, meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi, dapat lancar menuliskan huruf dan angka, mengucapkan kata kalimat dengan benar. Untuk melihat perkembangan perilaku baik pada anak prasekolah yaitu; anak lebih percaya diri, perilaku aktif, memiliki motivasi dan semangat belajar yang baik.

Dari hasil wawancara singkat diatas maka jelas bahwa penting bagi guru ataupun orangtua untuk memberikan stimulus bagi anak-anak agar kemampuan berbicara terutama dalam hal kosakata dan merangkai kalimat dapat berkembang pesat. Banyak media yang bisa digunakan sebagai stimulus untuk mengembangkan keterampilan bicara pada anak. Antara lain melalui interaksi komunikasi yang intens, musik, film, permainan, dan dongeng (*storytelling*) (Raines & Isabell, 2002).

Pada orang tua dapat diketahui secara singkat terkait dengan keterampilan berbicara anak yaitu; selain berbicara lancar dan kemampuan interaksi komunikasi baik, anak juga



lebih terbuka, pemahaman terhadap pengetahuan juga meningkat, motivasi belajar atau semangat belajar, kosa kata bertambah, juga meningkatnya konsentrasi, cepat memahami huruf dan angka, mudah berinteraksi, cepat memahami orang lain berbicara. Disimpulkan bahwa keterampilan berbicara pada anak akan meningkatkan jika lingkungan memberikan support yang baik, dengan adanya metode storytelling disekolah dan support dari orang tua dalam mengasah nya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Lediana (2014) menunjukkan ada pengaruh yang signifikan setelah diberikan metode storytelling pada perkembangan bicara anak. *Storytelling* terhadap keterampilan berbicara pada anak *level kiddy 1* di *Goldie Land Islamic Preschool* Palembang. Penelitian sebelumnya pada anak yang belum sama sekali diberikan metode storytelling. Perbedaan dengan penelitian ini adalah anak-anak prasekolah yang ada di TK Kasih Ibu dan TK Yaspa sudah menjadi kurikulum, diberikan 1 minggu sekali dengan tema cerita yang berbeda dan dibawakan oleh guru pembimbing kelas tersebut. Sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan storytelling dan anak-anak selalu antusias, semangat, setiap diberikan cerita. Dapat dilihat dari siswa prasekolah tersebut keterampilan bicara sangat pesat. Informasi ini didapat dari guru dan orang tua secara langsung.

F. KESIMPULAN

Anak akan terus berbicara tentang apa yang mereka lihat meskipun dengan kosakata yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu penting bagi guru ataupun orangtua untuk memberikan stimulus bagi anak-anak agar kemampuan berbicara terutama dalam hal kosakata dan merangkai kalimat dapat berkembang pesat. Banyak media yang bisa digunakan sebagai stimulus untuk mengembangkan keterampilan bicara pada anak salah satunya storytelling.

Metode storytelling yang diberikan kepada anak-anak sekolah Paud dan TK berfungsi secara langsung untuk meningkatkan keterampilan berbicara juga dapat bermanfaat dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pula perkembangan kognitif, emosi dan perilaku baik. Anak akan cepat memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui cerita-cerita yang disampaikan saat berdongeng. Anak memiliki banyak kosa kata sehingga banyak yang dibicarakan saat diskusi/cerita, cepat memahami apa yang dijelaskan, dapat melihat minat dan kemampuan dalam belajar, melatih anak menanggapi dan mendengar, memiliki pengetahuan yang cukup tentang hewan dan perilaku-perilaku/pesan moral yang baik, mengasah ingatan anak, meningkatkan rasa ingin tahu yang tinggi, dapat lancar menuliskan huruf dan angka, mengucapkan kata kalimat dengan benar.

REFERENSI

- Agustina, Susanti, 2008. *Mendongeng Sebagai Energi Bagi Anak*, Jakarta: Rumah Ilmu Indonesia.
- Asfandiyar, Andi Yudha. 2007. *Cara Pintar Mendongeng*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Arsyad, Maidar & Mukti U.S. 2008. *Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Azwar, S. 2006. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bunanta, Mukti. 2005. *Buku Dongeng & Minat Membaca*. Jakarta: Pustaka
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Tangga. Brewer, Jo An. 2007. *Introduction to Early Child-hood Education Preeschol*
- Chaplin, J.P. 2006. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Damayanti, Dwi Retna, dkk. 2005. *Program Pendidikan Untuk anak Usia Dini di Prasekolah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Hana, Jasmin. 2011. *Terapi Kecerdasan Anak dengan Dongeng*, Yogyakarta: Berlian Media.
- Harun Rasyid, dkk. 2009. *Assesmen Perkembangan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Hurlock, E. B. 2008. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Itadz, 2008. *Cerita Untuk Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Tiara Wacana Sujiono, Yuliani Nuraini. 2009. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT. Macana Jaya Cemerlang.
- Musfiroh, T. 2005. *Bercerita Untuk Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdiknas.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. ^[1]_[SEPP]
- Tarigan, HG. 2008. *Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa*. Bandung: Angkasa.



PENTINGNYA KARANG TARUNA SEBAGAI SALAH SATU WADAH UNTUK MENYIAPKAN GENERASI EMAS

Besti Usmafadini¹ dan Okti Wilymafidini²

¹Universitas Negeri Yogyakarta
Email: bestifidini@gmail.com

²STIA NUSA Sungai Penuh Jambi
Email:oktiwily@gmail.com

ABSTRAK

Pemuda merupakan aset bangsa yang dikenal juga dengan istilah generasi emas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai *agent of change*. Pemudalah yang dapat merubah bangsa ini, memberikan inovasi, meningkatkan kualitas bangsa, dan menjadi generasi penerus yang akan memimpin bangsa ini. Untuk menjadi generasi emas, pemuda membutuhkan wadah sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan pembinaan. Salah satu wadah tersebut adalah karang taruna. Sayangnya, karang taruna tidak selalu berjalan aktif. Di sebagian daerah, karang taruna masih belum berjalan maksimal. Tujuan dari makalah ini adalah memaparkan pentingnya karang taruna sebagai salah satu wadah untuk menyiapkan generasi emas. Hasil dan pembahasannya adalah pemuda merupakan generasi emas yang perlu mendapatkan pembinaan. Karang taruna merupakan salah satu wadah yang dapat menyiapkan pemuda menjadi generasi emas. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan melalui karang taruna seperti pembangunan karakter melalui kajian-kajian, dekat dengan masyarakat melalui pengajian di rumah-rumah warga, menciptakan lapangan kerja seperti berwira usaha, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang ada di karang taruna dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemuda dan masyarakat setempat. Melalui karang taruna, pemuda mendapatkan banyak pembelajaran positif. Melalui karang taruna juga, pemuda dapat mengembangkan desanya.

Kata Kunci: Karang Taruna, Generasi Emas, Pemuda, Pembinaan, Pengembangan

A. PENDAHULUAN

Pemuda merupakan aset bangsa yang dikenal juga dengan istilah generasi emas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memiliki peran penting sebagai *agent of change*. Pemudalah yang dapat merubah bangsa ini, memberikan inovasi, meningkatkan kualitas bangsa, dan menjadi generasi penerus yang akan memimpin bangsa ini. Generasi muda mempunyai peran penting sebagai seorang revolusioner sosial di tengah-tengah masyarakat karena pemuda dianggap mempunyai kemampuan yang lebih, semangat besar, daya saing yang tinggi dan daya pikir yang cepat serta fisik yang masih gesit.

Pemuda memiliki potensi ekstra dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Dikatakan demikian karena usia pemuda merupakan bagian dari kelompok usia yang sangat produktif, baik di bidang sosial kemasyarakatan, politik, seni hingga ekonomi. Peran pemuda ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan salah satu pilar yang dibutuhkan untuk membangun Negara yang tangguh. Meskipun bukan satu-satunya, keterlibatan pemuda merupakan modal utama dalam pembentukan dan pertumbuhan serta perkembangan sebuah



bangsa. Artinya, pemuda sebagai sebuah bagian dari masyarakat mempunyai kekuatan besar untuk menjadi tombak dalam sebuah arus kemajuan bangsa.

Dewasa ini, permasalahan yang dialami para pemuda sangat kompleks. Mulai dari masalah ekonomi (pengangguran), yang kemudian merembet ke berbagai masalah lain seperti putus sekolah, krisis percaya diri, pergaulan sosial, pengembangan minat, kenakalan remaja, narkoba, pencurian, alcohol, dan sebagainya. Tidak hanya itu, pengaruh globalisasi dan modernisasi juga berakibat pada ketidakpedulian pemuda terhadap bangsanya sendiri. Pemuda sibuk menjadi konsumen, sibuk dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjadi generasi emas, pemuda membutuhkan wadah sebagai tempat untuk mempersiapkan diri dan mendapatkan pembinaan.

Salah satu wadah yang dapat membantu generasi muda terhindar dari masalah dan membantunya mempersiapkan diri untuk membangun bangsa adalah karang taruna. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.”

Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa karang taruna merupakan organisasi yang sudah disiapkan dan ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda di wilayah desa yang harus dimanfaatkan. Tugas pokok dan fungsi karang taruna sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam Pasal 3 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Sementara itu, yang menjadi fungsi karang taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam Pasal 3 Ayat 3 adalah sebagai berikut:

Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

Sayangnya, karang taruna tidak selalu berjalan aktif. Dewasa ini Karang Taruna dalam masyarakat mulai luntur keberadaannya, bahkan sudah mulai hilang. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh modernisasi dan arus globalisasi, sehingga menyebabkan mulai hilangnya minat pemuda-pemudi untuk berpartisipasi di dalamnya. Di sebagian daerah, pada pelaksanaan program dan kegiatan Karang Taruna baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, partisipasi generasi muda terhadap Karang Taruna sangat rendah. Banyak diantara pemuda yang kurang antusias terhadap Karang Taruna, banyak hal yang belum diketahui mengenai kebijakan yang terkait dengan Karang Taruna dan tidak menyadari betapa pentingnya Karang Taruna sebagai wadah organisasi pemuda di daerah atau wilayah masing-masing.



Dari paparan masalah ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda dihadapkan pada tantangan globalisasi dan modernisasi. Pemuda menghadapi berbagai masalah sosial yang harus diselesaikan. Karang taruna sebagai wadah yang dapat membantu pemuda untuk terhindar dan mengatasi masalah yang dihadapinya ternyata belum berjalan secara maksimal. Untuk itu, makalah ini bertujuan memaparkan pentingnya karang taruna sebagai salah satu wadah untuk menyiapkan generasi emas. Harapannya, dengan adanya makalah ini pemuda menyadari pentingnya karang taruna sehingga karang taruna dapat berjalan aktif lagi mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pemuda bangsa Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Karang Taruna

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda di lingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi oleh tim BAPPEDA Kota Surakarta (2014) dipaparkan bahwa pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kepanduan (pramuka), pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Selanjutnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru, nama Karang Taruna hanya diperuntukkan bagi kepengurusan tingkat Desa/Kelurahan serta Unit/Sub Unit saja (tingkat RT/RW). Sedangkan kepengurusan tingkat Kecamatan sampai Nasional menggunakan sebutan Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT). Hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11/HUK/1988 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

Keberadaan Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada waktu itu bertumpu pada landasan hukum yang dimiliki, yang terus diperbaharui sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masalah kesejahteraan sosial serta sistem pemerintahan yang terjadi. Landasan hukum yang dimiliki Karang Taruna adalah Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/KEP/1/1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Karang Taruna, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. II/MPR/1983 Tentang GBHN, menempatkan Karang Taruna sebagai wadah Pembinaan Generasi Muda.

Krisis moneter yang melanda bangsa ini tahun 1997 turut memberikan dampak bagi menurunnya dan bahkan terhentinya aktivitas sebagian besar Karang Taruna. Saat dilaksanakan Temu Karya Nasional (TKN) IV tahun 2001 di Medan, disepakatilah perubahan nama menjadi Karang Taruna Indonesia (KTI). Oleh karena masih banyaknya perbedaan persepsi tentang Karang Taruna maka pada TKN V 2005 yang diselenggarakan di Banten tanggal 10-12 April 2005, Namanya dikembalikan menjadi Karang Taruna. Ketetapan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Dengan dikeluarkannya Permensos



ini diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran tentang Karang Taruna, dalam arti bahwa pemahaman tentang Karang Taruna mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial tersebut. Selanjutnya, permensos ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

2. Pemuda dan Karang Taruna

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan, pemuda adalah yang berumur 16-30 tahun. Senada dengan itu, pengertian pemuda dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Pemuda adalah kelompok masyarakat yang mulai mencari jati dirinya, oleh karena itu manusia muda ini masih memerlukan pembinaan dan pengembangan potensi dalam dirinya agar menuju ke arah yang lebih baik dan membawa bangsanya ke dalam perubahan yang positif. Pembinaan generasi muda juga diperlukan untuk menghindari masalah social seperti perilaku negative.

Keterlibatan pemuda dalam proses pembaruan dan pembangunan sangat diperlukan. Kaum muda membawa semangat dan karakter yang kuat untuk memacu kelompok usia lain terhanyut dalam suasana yang berkobar. Semangat ini ditunjukkan dengan adanya prestasi, keunggulan khas, dapat diandalkan, daya juang dalam setiap persaingan, dan tidak kalah penting yaitu modal moral. Pemberdayaan merupakan salah satu wujud program kegiatan untuk dapat membuat perubahan baik dan peningkatan kualitas kaum muda.

Dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan disebutkan bahwa pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemuda yang memiliki posisi generasi penerus bangsa digadang-gadang sebagai kelompok yang strategis untuk menanamkan jiwa revolusioner, kompetitif, optimis, bermoral dan berbudaya. Dengan segudang potensi yang dimiliki, pemuda mulai perlu diberdayakan dalam berbagai bidang kehidupan dalam lingkungan masyarakat.

Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui wadah yang kita kenal dengan Karang Taruna. Nama karang taruna, sejatinya begitu populer di kalangan sebagian besar pemuda di Indonesia, karena organisasi ini merupakan wadah kaum muda untuk berkreasi dan bereksplorasi. Berdasarkan asal katanya, “karang” berarti tempat, sedangkan “taruna” artinya remaja atau pemuda. Dengan demikian, “karang taruna” dapat diartikan sebagai tempat kegiatan para remaja atau pemuda. Anggota Karang Taruna yang disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.

Dalam Pedoman Dasar Karang Taruna Pasal 1 (2011:3) disebutkan bahwa pengertian karang taruna sebagai berikut:

“Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak bidang usaha kesejahteraan sosial”.

Dari pengertian ini dapat kita lihat bahwa karang taruna merupakan wadah pembinaan, penyelenggaraan program pemberdayaan, serta wadah untuk pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda. Artinya, Karang Taruna termasuk dalam organisasi kepemudaan. Hal



ini mengacu pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (2009:15) yang menyebutkan bahwa organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

Dalam Pedoman Dasar Karang Taruna, sebagai acuan terselenggaranya karang taruna, dalam pasal 19 dan 20 tentang Program Kerja menyebutkan:

“Setiap karang taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat. Program kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan”.

Lebih rinci dalam Pedoman Dasar Karang Taruna Pasal 2 (2011:5) menyebutkan tujuan karang taruna sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan dan perkembangan tiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda,
- b. Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan,
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda, dan
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesiambungan.

Berdasarkan pemaparan di atas tujuan karang taruna berfokus pada usaha kesejahteraan sosial yang secara terinci meliputi pengembangan kualitas sumber daya manusia terutama pemuda, pengembangan usaha dan perluasan kemitraan secara terarah dan berkesinambungan sehingga tercipta kemandirian. Karang taruna tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya.

Dalam Pedoman Dasar Karang Taruna (2011:6) karang taruna mempunyai fungsi:

- a. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda,
- b. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda,
- c. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif,
- d. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- e. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal, dan
- f. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas fungsi karang taruna meliputi pencegahan dan pemecahan masalah sosial, menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial, menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif, mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda, mengembangkan dan menumbuhkan tanggung jawab sosial untuk generasi



muda, menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan kearifan lokal, serta berperan aktif dalam usaha memperkuat semangat kebangsaan.

Karang Taruna dalam menjalankan roda kegiatannya berlandaskan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dengan landasan-landasan tersebut secara jelas bahwa organisasi karang taruna secara fungsional dibina oleh pemerintah. Secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dapat terjun langsung dan berfokus membantu pemerintah dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Tugas-tugas karang taruna direalisasikan melalui berbagai macam program kegiatan. Program kerja/kegiatan yang dimiliki oleh karang taruna hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di sekitarnya. Program kegiatan berlangsung secara terarah dan berkesinambungan serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat khususnya generasi muda. Keberadaan karang taruna harus mampu menunjukkan peran dan fungsinya secara optimal di tengah-tengah masyarakat, sehingga memberikan *trust* (kepercayaan) dalam masyarakat kepada karang taruna untuk membantu, membangun dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia maupun alam di daerah.

3. Pentingnya Karang Taruna

Secara eksplisit uraian-uraian diatas mengemukakan bahwa keikutsertaan karang taruna dalam pengembangan masyarakat dirasakan cukup penting. Karang taruna sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, pada prinsipnya dapat dilihat dari aktivitas individu dan kelompok (Gunawan dan Muhtar, 2010:23). Partisipasi organisasi kemasyarakatan khususnya karang taruna sebagai bagian dari masyarakat sangat diperlukan sebagai *agent of change* mitra pemerintah memecahkan masalah sosial dalam masyarakat dan wahana pengembangan potensi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abu Hasan (2010) yang berjudul Peran Karang Taruna Bhakti Loka dalam Pemberdayaan Masyarakat Setempat, ditemukan bahwa karang taruna berperan aktif dalam kegiatan sosial setempat. Salah satu kegiatan karang taruna yaitu pemberdayaan masyarakat selama tiga tahun terakhir yaitu melalui bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa karang taruna memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat.

Karang Taruna juga dirasa menduduki posisi penting karena sangat dekat dengan masyarakat level terbawah, masyarakat akar rumput. Keberadaan Karang Taruna diharapkan mampu menjadi agen pembaruan, agen pencerahan dalam pembangunan memberantas kemiskinan. Peran lain yang bisa diambil Karang Taruna adalah jadi motivator, inspirator dalam pembangunan dan katalisator keserasian sosial. Karang Taruna juga merupakan wadah pemupukan karakter bangsa, yang jika dikembangkan secara kreatif akan merupakan kekuatan dahsyat bangsa ini.

Sebagai organisasi sosial kepemudaan yang mempunyai jaringan hingga ke tingkat bawah, Karang Taruna merupakan mediator dan motivator dalam pembangunan. Karang Taruna merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini. Karena itu, pemuda Karang Taruna harus mempunyai tekad dan keinginan untuk memberikan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa.



Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berada di Desa/Kelurahan dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial. Sebagai wadah pembinaan tentu saja mempunyai beberapa program yang akan dilaksanakan yang melibatkan seluruh komponen dan potensi yang ada di Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Sebagai lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pembangunan kesejahteraan sosial dan berfungsi sebagai subyek, Karang Taruna sedapat mungkin mampu menunjukkan fungsi dan perannya secara optimal. Jadi, peran Karang Taruna bukan saja dalam pembinaan remaja saja, melainkan juga usaha mengadakan perubahan serta perbaikan sosial kemasyarakatan.

Sampai saat ini keberadaan Karang Taruna diakui oleh negara. Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Jadi, lembaga Karang Taruna sangat dianjurkan untuk ada dalam masyarakat. Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang anggotanya merupakan pemuda-pemudi dari daerah tersebut. Karang Taruna menjadi wadah untuk menanamkan nilai kebangsaan, pengembangan potensi yang mereka miliki, menjadi wadah untuk belajar berorganisasi, juga dapat dijadikan untuk penyaluran aspirasi mereka untuk perkembangan bangsa ini. Tetapi tidak banyak pemuda di Indonesia yang mengerti arti penting Karang Taruna yang sesungguhnya, mereka hanya memandang sebelah mata organisasi Karang Taruna dan memandang bahwa Karang Taruna hanya sebuah wadah untuk pertemuan pemuda saja.

C. KESIMPULAN

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan modal utama kemajuan suatu bangsa. Pemuda dikatakan sebagai generasi emas dan perlu mendapatkan pembinaan. Karang taruna adalah salah satu wadah yang dapat menyiapkan pemuda menjadi generasi emas. Karang taruna sebagai organisasi kepemudaan yang merupakan wadah bagi pengembangan potensi pemuda. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan melalui karang taruna seperti pembangunan karakter melalui kajian-kajian, dekat dengan masyarakat melalui pengajian di rumah-rumah warga, menciptakan lapangan kerja seperti berwirausaha, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang ada di karang taruna dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemuda dan masyarakat setempat. Melalui karang taruna, pemuda mendapatkan banyak pembelajaran positif. Melalui karang taruna juga, pemuda dapat mengembangkan desanya. Oleh karena itu, kehadiran karang taruna dirasa sangat penting untuk membantu pemuda dalam memajukan bangsa.

REFERENSI

- Abu Hasan A. (2010). Peran Karang Taruna Bakti Loka, Gejayan, Desa Condong Catur, Depok Sleman Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Pemuda. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga.
- BAPPEDA Kota Surakarta. (2014). *Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Optimalisasi Peran Karang Taruna Kota Surakarta*.
- Gunawan dan Muhtar. (2010). *Kontribusi Organisasi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: P3KS Press.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Dasar Karang Taruna*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.



Undang-undang RI Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan.





STRATEGI PENINGKATAN OLAHAN TUNA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN INDONESIA MENJADI DESTINASI WISATA HALAL DUNIA

Yasinta Zulaikha¹

¹*Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Email: yasintazulaikha@gmail.com*

ABSTRAK

Indonesia sangat potensial menjadi destinasi wisata halal paling unggul di dunia karena selain memiliki modal sosial yang tinggi, juga memiliki keragaman destinasi, kekayaan budaya nusantara, serta kekayaan sumberdaya alam yang tinggi. Tuna merupakan komoditas ikan Indonesia terbesar di dunia dan dapat menjadi ciri khas dari wisata halal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi Indonesia sebagai wisata halal dunia; (2) mengetahui potensi tuna Indonesia; (3) mengetahui strategi agar produk olahan tuna dapat menjadi unggulan yang bisa digunakan sebagai ciri khas Indonesia sebagai wisata halal dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya observasi, wawancara, dan kajian pustaka dengan menelaah data sekunder seperti buku, jurnal, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Indonesia mempunyai potensi sebagai destinasi wisata halal dunia dikarenakan jumlah penduduk muslimnya yang tinggi dan banyaknya destinasi wisata; (2) Tuna merupakan komoditas Indonesia yang produktivitasnya tinggi serta jelas kehalalannya sehingga dapat digunakan sebagai ciri khas wisata halal Indonesia; (3) strategi yang dapat digunakan agar Tuna dapat menjadi komoditas unggulan antara lain dengan (a) meningkatkan mutu tuna olahan Indonesia; (b) diversifikasi produk olahan tuna; (c) mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif; (d) meningkatkan pengembangan *market intelligence* dan promosi.

Kata Kunci : Indonesia, Wisata Halal, Tuna, Olahan

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, multidisiplin, multidimensi, dan multisektoral yang melibatkan sektor pemerintah, stakeholder, serta masyarakat. Pariwisata salah satu sektor industri yang berkembang sangat pesat. Dan menjadi sektor pendukung perekonomian dunia secara global, pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 4% dibandingkan tahun sebelumnya atau diakumulasikan dengan jumlah 1 milyar lebih wisatawan yang melakukan perjalanan ke luar negaranya (UNWTO, 2012).

Wisata halal dinilai memiliki prospek yang cukup bagus dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Potensi pasar pariwisata syariah makin prospektif lantaran jumlah pendapatan yang didapatkan dari wisatawan muslim terbilang tinggi. Rata-rata kaum muslim yang ada di Asia, Amerika, dan Eropa merupakan kalangan kelas menengah. Mereka adalah pasar yang pas untuk dibidik oleh pelaku usaha karena daya beli mereka terus naik.

Salah satu komponen pendukung pemerintah dalam pengembangan wisata halal adalah dengan menyiapkan satu produk olahan unggulan. Salah satu komoditas unggulan Indonesia adalah Tuna. Ikan tuna sebagai salah satu sumber bahan baku bagi perekonomian

Indonesia memegang peran yang cukup penting, mengingat potensi sumberdaya ikan tuna di perairan Indonesia tersedia cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Komoditas ikan tuna beserta produk-produk turunannya mempunyai daya keunggulan komparatif di pasar lokal maupun internasional, kemampuan sektor perikanan tuna cukup besar untuk menciptakan kesempatan usaha bisnis, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat perikanan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi Indonesia sebagai wisata halal dunia; (2) mengetahui potensi tuna Indonesia; (3) mengetahui strategi agar produk olahan tuna dapat menjadi unggulan yang bisa digunakan sebagai ciri khas Indonesia sebagai wisata halal dunia.

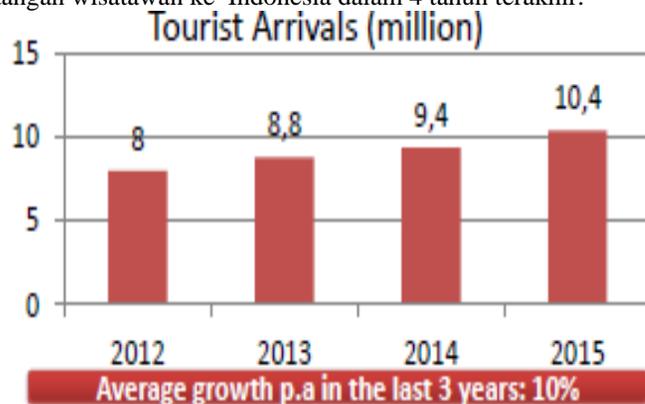
B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian diantaranya observasi, wawancara, dan kajian pustaka dengan menelaah data sekunder seperti buku, jurnal, dan internet.

C. PEMBAHASAN

1. Potensi Wisata Halal Indonesia

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI sejauh ini telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata syariah. Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan (Sapudin, 2014). UNWTO memperkirakan jumlah tersebut merupakan 12,3 % dari total belanja wisatawan secara global di tahun 2011. Sedangkan penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara muslim ke Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan sebesar \$1,6 milyar dari total \$8,5 milyar. Gambar 1 menunjukkan kedatangan wisatawan ke Indonesia dalam 4 tahun terakhir.



Gambar 1. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia
Sumber: Kemenparkraf (2015)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa jumlah kedatangan wisatawan mancanegara semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dapat menjadikan peluang wacana wisata halal Indonesia menjadi destinasi utama wisata halal dunia akan semakin meningkat. Salah satu



peluang yang dapat dimanfaatkan terkait wacana Indonesia akan menjadi destinasi wisata halal dunia secara langsung atau tidak langsung bidang kuliner. Ikan merupakan bahan makanan yang jelas kehalalannya sehingga akan sangat menguntungkan bila tuna digunakan sebagai ciri khas wisata kuliner halal Indonesia.

2. Potensi Tuna Indonesia

Pada awal 1950-an, penangkapan yang paling banyak (sekitar 80%) ada di Pasifik. Antara 1970 dan 1978, pasar utama ikan tuna meningkat secara signifikan karena ekspansi perikanan di Timur Atlantik dan pengembangan perikanan lepas pantai baru di bagian timur Pasifik. Antara 1978 dan 1984, banyak kapal pindah ke Barat dan Tengah Pasifik dan Barat Samudera Hindia, dimana terdapat pengembangan perikanan baru di sana. Pada pertengahan 1980-an, tangkapan ikan tuna meningkat menjadi 2,4 juta ton. Pada tahun 1994, mereka telah meningkat untuk 3,4 juta ton dengan kondisi oseanografi yang lebih baik serta terdapatnya kapal pengangkut. Pemerintahan *Fish Aggregating Devices* (FADs) juga memberikan kontribusi peningkatan ini.

Sebagian besar pasar utama ikan tuna tropis mempunyai tingkat eksploitasi yang baik karena kesuburan tinggi, distribusi geografis yang luas, oportunistik perilaku dan dinamika populasi lainnya (mempunyai tingkat kehidupan yang pendek) membuat mereka sangat produktif. Secara umum, dengan manajemen perikanan yang tepat, spesies tropis mampu mempertahankan hasil yang tinggi. Namun, kemungkinan eksploitasi berlebihan dan menipisnya stok tidak boleh dianggap remeh. Secara keseluruhan, stok pada spesies yang beriklim sedang kurang produktif dan mungkin akan lebih rentan terhadap eksploitasi berlebihan.

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan komersil, tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari perairan laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan laut Nusantara seluas 2,8 juta km², dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km², dengan keanekaragaman sumberdaya ikan laut yang melimpah, menyimpan potensi perikanan laut yang sangat besar. Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), produksi ikan pelagis besar secara nasional termasuk didalamnya tuna pada tahun 2011 sebesar 955.520 ton (KKP, 2012).

Ditunjang oleh keadaan alamnya, luas wilayah perairan Indonesia dan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia menjadi negara eksportir terbesar kedua setelah Thailand di kawasan ASEAN. Ditinjau dari segi potensi sumberdaya, Thailand tidak memiliki potensi yang besar seperti Indonesia. Dimasa yang akan datang kesempatan subsektor perikanan untuk tumbuh masih terbuka luas, baik di sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Dari sisi penawaran, Indonesia memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km² (perairan Indonesia dan teritorial 3,1 juta km², perairan ZEE 2,7 juta km²) dan garis pantai sekitar 90 ribu km (terpanjang di dunia) yang merupakan basis kegiatan ekonomi perikanan.

Pergerakan (migrasi) kelompok ikan tuna di wilayah perairan Indonesia mencakup wilayah perairan pantai, teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada wilayah perairan ZEE Indonesia, migrasi ikan tuna merupakan bagian dari jalur migrasi tuna dunia karena wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara samudera Hindia dan samudera Pasifik (Alfindo, 2009). Jumlah tangkapan tuna di beberapa titik penangkapan hasil laut Indonesia cukup banyak, hal ini dikarenakan perairan Indonesia yang merupakan lintasan jalur migrasi tuna.

Dewasa ini permintaan ekspor tuna cenderung meningkat dibandingkan produk lain. Adanya peluang pasar internasional ini harus didukung oleh strategi pemasaran internasional yang memadai. Meningkatnya ekspor ikan tuna menunjukkan bahwa proses perencanaan pemasaran dilakukan bukan hanya setelah produk siap dijual, melainkan telah dilakukan sejak proses penangkapan, penanganan pascapanen, hingga pada strategi pemilihan produk dan pasar yang kompetitif.

Tujuan ekspor utama hasil ikan tuna Indonesia adalah Jepang, Singapura, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Negara-negara tersebut merupakan tujuan utama yang menyerap lebih dari dua pertiga ekspor Indonesia. Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia menurut negara tujuan ekspor tersebut disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Negara Tujuan utama ekspor perikanan Indonesia tahun 2002

No	Negara Tujuan Ekspor	US \$	%
1	Jepang	67.413.701	74,60
2	Singapura	7.844.209	8,68
3	Eropa dan Australia	6.419.141	7,10
4	USA	5.821.183	6,44
5	Thailand	2.734.765	3,03
6	Korea Selatan	138.671	0,15

Sumber: BPS 2003

Pasar domestik juga merupakan potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Peluang ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya restoran-restoran *seafood* dan makin banyaknya supermarket yang menjual daging ikan tuna. Saat ini konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita sekitar 19,04 kg/tahun. Potensi pasar domestik juga dapat terlihat dari kecenderungan meningkatnya permintaan hasil perikanan tuna Indonesia untuk digunakan sebagai bahan baku industri. Dewasa ini pemerintah semakin mengembangkan diversifikasi usaha pada bidang industri pengolahan. Dengan demikian, hasil perikanan tuna yang tidak dapat dikonsumsi sebagai ikan segar, dapat ditangani dengan pengolahan pasca panen.

3. Strategi Peningkatan Olahan Tuna

Lestari *et al.*, (2013) melakukan analisis RCA dan matriks kompetitif dan diperoleh hasil gambaran daya saing tuna olahan di Indonesia dan teridentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi daya saing ikan tuna olahan Indonesia di pasar Internasional. Berdasarkan kedua analisis tersebut, dapat dirumuskan alternatif-alternatif strategi dalam meningkatkan daya saing industri tuna olahan Indonesia. Strategi-strategi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Analisis dan Strategi pengelolaan olahan Tuna (Lestari et al., 2013)

No	Hasil analisis	Prioritas strategi	Alasan
1	RCA ikan tuna olahan	1) Meningkatkan mutu tuna olahan Indonesia.	
2	Indonesia (2010) 1,48		
	Matriks Profil Kompetitif	2) Mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif.	1) Mutu tuna olahan Indonesia masih dapat ditingkatkan dengan menerapkan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i> dan <i>Good Manufacturing Practice (GMP)</i> .
	a. Faktor produksi dan pemasaran		
	1) Daya saing faktor produksi dan pemasaran Indonesia (2,218) lebih rendah dibandingkan negara Thailand (2,899), Spanyol (2,743), dan Ecuador (2,409).	3) Meningkatkan pengembangan <i>market intelligence</i> dan promosi.	
	2) Mutu ikan olahan (0,315).		
	3) Hambatan tarif dan non tarif (0,215).		2) Ikan tuna Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan, baik tarif maupun non tarif, sebagai contoh dengan tidak menjadi anggota CCSBT, menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan kuota ekspor.
	4) Pengembangan <i>market intelligence</i> dan promosi (0,220)		3) Kurangnya kegiatan <i>market intelligence</i> dan promosi, sehingga ekspor ikan tuna olahan Indonesia diekspor ke negara-negara tertentu yang memang sudah menjadi negara tujuan ekspor sebelumnya.

<p>b. Faktor manusia dan kelembagaan</p> <p>1) Daya saing faktor manusia dan kelembagaan, Indonesia (2,208) lebih rendah dibandingkan dengan negara Thailand (2,747), Spanyol (2,486), Equador (2,372), dan Mauritius (2,320)</p> <p>2) Peran pemerintah dalam pengembangan Industri tuna olahan (0,147)</p> <p>3) Ketersediaan SDM yang mampu dalam penanganan mutu (0,315)</p> <p>4) Peran pemerintah dalam penanganan <i>Illegal Fishing</i> (0,130)</p>	<p>1) Meningkatkan pemerintah dalam mengembangkan industri pengolahan</p> <p>2) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan mutu ikan tuna olahan,</p> <p>3) Pemberantasan dan pengawasan <i>illegal fishing</i></p>	<p>1) Ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu menyebabkan kerugian dan besarnya biaya produksi.</p> <p>2) Peningkatan kapasitas SDM akan sangat mendukung peningkatan mutu produk.</p> <p>3) <i>Illegal fishing</i> menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan para pelaku industri kekurangan bahan baku.</p>
---	---	--

Sebagai bahan pangan, produk agro-industri diharuskan mempunyai persyaratan standar cukup ketat. Persyaratan standard tersebut bukan hanya terhadap mutu produknya, sehingga ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu (1) mutu produk, (2) keamanan pangan, dan (3) ketelusuran (traceability). Untuk itu peningkatan standar produk agro-industri pangan olahan sangat penting sebagai faktor penguat daya saing produk (Panjaitan et al., 2011)

Lestari et al., (2013) mengkaji beberapa faktor dalam peningkatan usaha olahan tuna, antara lain

1. Faktor Produksi dan Pemasaran

a. Meningkatkan mutu tuna olahan Indonesia. Strategi ini perlu segera dilakukan terutama oleh pelaku usaha pengolahan tuna, karena mutu produk olahan tuna akan sangat menentukan penguasaan pasar internasional. Peningkatan mutu perlu dilakukan dari sisi hulu-hilir. Penanganan ikan tuna pada saat penangkapan, pasca penangkapan, distribusi/selama transportasi dari pelabuhan ke tempat pengolahan sampai dengan penerapan GMP dan HACCP perlu dilakukan dengan baik. Thailand sudah memelopori dan menguasai pasar internasional dapat dijadikan contoh bagaimana negara tersebut menghasilkan ikan tuna olahan bermutu. Padahal, jika dilihat dari segi sumberdaya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif sangat baik. Salah satu faktor daya peningkatan daya saing produk adalah melakukan promosi. Dalam pemasaran diperlukan promosi untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk, dengan harapan konsumen dapat membeli produk yang dipromosikan (Yulianti et al., 2008).



- b. Mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif. Pemerintah dapat mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif. Untuk hambatan tarif dapat dilakukan dengan mengadakan lobi-lobi dengan negara eksportir, maupun yang terlibat dalam organisasi bilateral dan multilateral. Sebagai contoh, negara-negara yang tergabung dalam kelompok ACP dapat fasilitas penurunan tarif yang berlaku di EU. Hambatan non tarif menyangkut tentang isumutu, sanitasi, keamanan pangan, kesehatan, terorisme, isu lingkungan dan hambatan administratif. Untuk mengatasi hambatan non tarif para pelaku harus meningkatkan mutu olahan tunanya, sehingga dapat menembus pasar tujuan. Dalam mengekspor produk perikanan ke luar negeri, pembeli dan pemerintah negara importir menerapkan ketentuan impor produk yang ketat dan harus diikuti oleh para produsen (Yuwono *et al.*, 2012)
- c. Meningkatkan pengembangan *market intelligence* dan promosi. Hasil dari *market intelligence* digunakan sebagai pedoman bagi pelaku untuk menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pasar. Pemasaran produk ikan sebaiknya dilakukan dengan membentuk suatu divisi pemasaran sendiri (Andriyani *et al.*, 2011)

2. Faktor Manusia dan Kelembagaan

- a. Meningkatkan peran pemerintah dalam pengembangan industri olahan tuna. Pengembangan industri lahan tuna sangat memerlukan dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan tersebut baik berupa ketejaminan bahan baku, dukungan terhadap bahan baku pendukung lainnya seperti fasilitasi impor terhadap kaleng maupun dukungan di sisi hulu khususnya dalam penangkapan tuna. Dukungan yang juga amat penting adalah mempermudah proses birokrasi dan tatalaksan ekspor, mendorong maskapai penerbangan untuk memberikan pelayanan khusus serta menjaga kestabilan kondisi ekonomi dan keamanan. Perbaikan kebijakan dan kelembagaan dimaksudkan untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan usaha (Friliyantini *et al.*, 2012)
- b. Peningkatan kapasitas SDM yang mampu dalam peningkatan mutu. Dalam mengembangkan industri olahan tuna yang berdaya saing maka ketersediaan SDM yang mampu dalam pengawasan mutu produk yang dihasilkan oleh industri pengolahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM sangat diperlukan dan dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat budaya perusahaan (Susilo *et al.*, 2011). Strategi ini dapat dilakukan dengan jalan mengadakan pelatihan HACCP, GMP, dan lain-lain.
- c. Pemberantasan dan pengawasan *illegal fishing*. Perlu dilakukan pengawasan terus menerus terhadap perairan Indonesia untuk menghindari adanya *illegal fishing*. Penindakan yang tegas terhadap pelaku *illegal fishing*, sehingga negara terselamatkan dari kerugian besar dan produksi tuna dapat ditingkatkan. Disamping itu, melakukan lobi-lobi dengan negara-negara tujuan ekspor untuk menerapkan peraturan untuk mencegah masuknya produk hasil kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing*. Uni eropa telah mensyaratkan bahwa impor produk perikanan yang berasal dari luar UE (kecuali produk air tawar dan budidaya serta beberapa jenis kekerangan) harus dilengkapi dengan dokumen penangkapan yang menjamin bahwa produk tersebut ditangkap sesuai dengan status bendera kapal penangkap. Negara berdasarkan bendera kapal penangkap berkewajiban menyusun verifikasi sertifikat penangkapan dan memastikan bahwa kiriman tersebut dapat ditelusiri dengan jelas, baik asal kapalnya, tempat pemindahann muatan sampai kepada pengolahannya.



D. KESIMPULAN

Indonesia mempunyai potensi sebagai destinasi wisata halal dunia dikarenakan jumlah penduduk muslimnya yang tinggi dan banyaknya destinasi wisata. Tuna merupakan komoditas Indonesia yang produktivitasnya tinggi serta jelas kehalalannya sehingga dapat digunakan sebagai ciri khas wisata halal Indonesia. Strategi yang dapat digunakan agar Tuna dapat menjadi komoditas unggulan antara lain dengan (a) meningkatkan mutu tuna olahan Indonesia; (b) mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif; (c) meningkatkan pengembangan *market intelligence* dan promosi.

REFERENSI

- Andriyani, R. M. Hubeis dan A. Munandar. 2011. Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Kelompok Pembudidaya Ikan melalui Program Replika Skim. *Jurnal Manajemen IKM* 6(1): 9-19
- Badan Pusat Statistik. 2003. Negara tujuan ekspor hasil perikanan Indonesia.
- Friliyantini, T. A.F. S. Hubeis dan A. Munandar. 2011. Strategi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Sektor Wisata Bahari. *Jurnal Manajemen IKM* 6(1): 55-63
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2015. *Buletin Wonderful Indonesia Muslim Friendly Destination*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) . 2012. *Tuna Indonesia*. Jakarta
- Lestari, W., Rizal S, dan Komar S. 2013. Strategi Peningkatan Daya Saing Olahan Tuna di Pasar Internasional. *Jurnal Manajemen IKM* 8(1): 36-44
- Panjaitan , L. E, M. Syamsun dan D. Kadarisman. 2011. Kajian Tingkat Penerapan Manajemen Mutu Terhadap Kinerja UMKM Sektor Agro Industri Pangan. *Jurnal Manajemen IKM* 6(2): 117-124
- Sapudin, A. 2014. Analisis perbandingan hotel dan pariwisata syariah dengan konvensional. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.
- Susilo, W. Eriyatno, M. J. Affandi dan D.A. Goenawan. 2011. Rancang Bangun Model Audit Manajemen Sumberdaya Manusia. *Jurnal Manajemen IKM* 6(2): 133-142
- Yulianti, M. K. Mudikjo dan M. Sarma. 2008. Kajian Strategi dan Bauran Pemasaran Batik Garutan. *Jurnal MPI* 3(1): 11-24
- Yuwono, B, R. Zakaria dan N.K. Panjaitan. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan cara produksi yang baik dan standar prosedur operasi sanitasi pengolahan fillet ikan di Jawa. *Jurnal Manajemen IKM* 7 (1): 10-19

RESISTENSI KULTURAL ORANG MUDA GALUR MANGGALA TERHADAP SUPRASTRUKTUR KAPITALISME AKHIR

Rosyid Adiatma¹

¹*Pengurus Karang Taruna Galur Manggala Tingkat Desa, Desa Jeblog, Kab.Klaten,
Prop.Jawa Tengah, Mahasiswa Program Magister Ilmu Religi dan Budaya
Universitas Sanata Dharma 2015
Email: adiatmarosyid@yahoo.com*

A. PENDAHULUAN

Realitas yang dialami orang muda berelasi erat dengan kondisi sosial yang dikondisikan wacana zamannya dan ikut “mengatur” anutan bertindak. Kapitalisme sebagai cara pandang dunia yang tidak terbatas pada sistem ekonomi turut berandil besar dalam mewacanakan kondisi sosial ini.¹ Karena ada suprastruktur dalam masyarakat yang mengatur dan mengondisi keberlangsungan kapitalisme. Suprastruktur inilah yang menjaga reproduksi terus-menerus ideologi kelas dominan dalam menjaga hegemoninya dari suatu sistem kapitalistik.²

Kapitalisme bertujuan pada akumulasi kapital atau modal, dan membalik semua konsep keuntungan dengan nilai tukar yang diciptanya sendiri, mengubah nilai guna seolah setara dengan nilai tukarnya³ (uang misalnya). Rekaan ini akhirnya menjadi *fetish* dan diyakini manusia sebagai hal yang terbentuk secara alami. Sehingga, kontradiksi-kontradiksi di dalamnya tidak akan terlihat.

Bagaimana bisa ia yang mempunyai nilai guna kalah dengan kapitalis yang hanya mempunyai nilai tukar? Padahal nilai guna ada terlebih dahulu sebelum nilai tukar. Inilah kontradiksi pertama, dengan begitu kapitalis sebenarnya melakukan muslihat yang berujung penindasan. Dengan kata lain, penguasaan dengan ideologi kelas dominan.⁴

Selanjutnya masalah konsumsi, pekerja bagi kapitalis mengonsumsi lagi barang yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, karena ia adalah seorang pekerja bagi kapitalis. Singkat kata, semua produksi melalui konsumsi akan kembali pada kelas non-kapitalis. Jadi, ia yang bekerja keras melakukan produksi, ia sendiri juga yang membutuhkan, lalu mengonsumsinya, tapi ia tidak menanggung untung.⁵ Keuntungan tetap di tangan kapitalis, inilah kontradiksi kedua.

Perkembangan berikutnya pada kapitalisme akhir, akumulasi kapital dihasilkan dari konsumsi nilai tanda yang mengatur suprastruktur masyarakat, bahwa mengonsumsi adalah sebuah optimisme baru dari sebuah gairah modernitas atau malah hal yang melampauinya.⁶ Konsumsi menjadi konsumsi tanda yang bukan lagi nilai guna tapi diganti dengan nilai

¹ Althusser, Louis & Balibar, Etienne.1970.Reading Capital (terj) Ben Brewster. New Left Book:London. hal.44

² *Ibid.*,hal.212

³ *Ibid.*,hal.22

⁴ Althusser,Louis.1969.For Marx. (terj) Ben Brewster. New Left Book:London. hal.99

⁵ Althusser, Louis & Balibar, Etienne. 1970. Reading Capital (terj) Ben Brewster.New Left Book:London. hal.210

⁶ Jameson,Fredric.1997.Postmodernism, or The Cultural Magic of Late Capitalism.Duke University:Durham.hal.xi



tanda.⁷ Dan komoditas yang melimpah “memaksa” kapitalis menciptakan hasrat nilai tanda pada komoditas itu untuk menjaga keuntungannya, dengan mencipta suprastruktur baru berupa ilusi kelas.⁸ Dengan mengonsumsi berarti menjaga posisi seseorang di dalam suatu kelas yang lebih tinggi melalui beragam wacana.⁹ Pada ranah religiusitas bahkan, ia seolah menjadi penjaga garda depan religiusitas dengan menawarkan wacana jilbab misalkan dengan tren berbusana syariah sebagai cara berpenampilan yang sesuai dengan kenikmatan hasrat konsumsi yang menguntungkan kapitalis. Kapitalisme akhir mampu menciptakan realitasnya sendiri untuk menguntungkan dirinya.¹⁰

B. MEMBACA RUANG DESA SEBAGAI MEDAN KONTESTASI KAPITALISME

Kesadaran kritis orang muda terhadap kapitalisme akhir misalnya dalam membaca wacana pembangunan pabrik air minum di ruang desa mereka dalam kemasan yang dirancang oleh swasta, lalu lewat pemerintah desa melakukan pertukaran nilai guna sawah dengan nilai tukar uang dengan ideologi kapitalis berupa kesejahteraan bersama. Pandangan dunia kesejahteraan bersama adalah ilusi kapitalis yang membalik pandangan dunia secara ekologis dan konsep kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan kapitalis adalah mitos kesetaraan kesejahteraan yang merupakan ideologi kelas dominan yang sebenarnya timpang dan hanya menguntungkan satu pihak,¹¹ karena tidak mempertimbangkan nilai tukar kapitalis yang merupakan rekaan dengan nilai guna sebagai nilai nyata, yang terkandung dalam suatu barang. Dalam kasus pendirian pabrik, pemilik sawah dibalik daulat dirinya atas tanahnya sendiri untuk rela ditukar dengan uang demi kesejahteraan bersama, meski sebenarnya ada Undang-undang pelarangan privatisasi air yang telah diabaikan kapitalis dan tidak banyak dibagikan pada masyarakat. Kesejahteraan bersama yang dimaksud “mungkin” adalah porsi besar keuntungan bagi kapitalis dan sedikit untung bagi masyarakat beserta dampak-dampak ekologisnya.

C. KAPITALISME DAN SUPRASTRUKTUR

Kapitalisme bukanlah hal yang ada dengan sendirinya secara alami, ia adalah sebuah mode produksi di perkembangan awalnya, yang membutuhkan reproduksi kondisi-kondisi¹² yang memungkinkan akumulasi kapital itu terus berlangsung serta mengaburkan dirinya dari kontradiksi-kontradiksi mode produksi yang sebenarnya eksploitatif dan menindas. Formasi sosial yang merupakan basis bagi mode produksi kapitalisme adalah kunci bagi reproduksi kapitalisme,¹³ dengan mereproduksi konstruksi masyarakatnya sesuai mode produksi kapitalisme, berarti inilah suprastruktur masyarakat yang diperantarai oleh *Ideological State Apparatuses* (I.S.A.).¹⁴ Lewat pendidikan, keluarga, keyakinan, media, hukum dan politik.¹⁵

⁷ Baudrillard, Jean. 1998. *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage Publications: London hal.27

⁸ *Ibid.*, hal.50

⁹ *Ibid.*, hal.35

¹⁰ *Ibid.*, hal.33

¹¹ *Ibid.*, hal.44

¹² Althusser, Louis. 1984. *Essays on Ideology*. Verso: London. hal.8

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, hal.17



I.S.A inilah sebuah wacana yang mendisiplinkan, menobatkan pikiran dari melihat eksploitasi kapitalisme dan orientasi sosial terhadap kelas tertentu sebagai standar yang paling normal kehidupan.

Pendidikan sebagai salah satu I.S.A kapitalisme, memberikan pandangan dunia lumrah kapitalisme yang akan terlihat pada sikap hidup, orientasi cita-cita kerja orang muda, hingga akhirnya ia akan menempatkan diri pada kelas apa dan bagaimana melihat kehidupan, jika tidak tentu akan kekritisan dalam menempatkan diri di pelbagai kontestasi kapitalistik ini. Dalam penentuan kelas dan orientasi hidup kapitalistik orang muda sebagai hasil suprastruktur formasi sosialnya terlihat pada konsumsi tanda dalam kapitalisme akhir yang sebenarnya berfungsi sebagai nilai mitis¹⁶ yang mengarah ke ilusi kelas menengah dengan komodifikasi pengalaman ilusif kelas menengah itu.¹⁷ Untuk mencapai kelas itu yang sebenarnya adalah strategi politik kapitalisme akhir, mereka melakukan komodifikasi pengalaman atau **konsumasi** sebagai pilihan bagi pencapaian kenikmatan karena telah berada pada kelas tertentu.¹⁸

D. ORANG MUDA, IDEOLOGI KAPITALISME DAN SUPRASTRUKTUR

Kapitalisme menggerakkan dirinya dan melahirkan dirinya terus menerus melalui mekanisme ideologi yang membentuk formasi sosial. Ideologi memiliki sistem representasi dengan kaidah tersendiri yang memiliki citra, mitos, gagasan dan konsep untuk mentransformasi dunia materi dan berfungsi untuk membentuk subyek serta memberi pemahaman yang keliru terhadap suatu kondisi.¹⁹ Dalam kehidupan orang muda dan kapitalisme akhir, ideologi ini beroperasi sebagai pembentuk identitas orang muda, ia memberikan pengalaman yang telah terkomodifikasi sebagai posisi kelasnya yang akhirnya membentuk identitasnya. Pemakaian gawai, tren berbusana dan berpenampilan, bepergian ke tempat minum kopi kelas menengah, pilihan *game*, pengalaman berpetualang ke tempat-tempat tertentu adalah contoh kecil pemberi identitas kelas menengah atau bahkan identitas religius.

Galur Manggala sebagai karang taruna tingkat desa di Desa Jeblog, Kab.Klaten adalah komunitas orang muda yang ber"ada" ruang di suatu kondisi yang penuh kontestasi kapitalisme akhir. Kapitalisme adalah kenyataan sejak penjajah hadir di Indonesia dan berupaya menguasai suprastruktur dengan strategi kuasa kultural dengan penjajahan epistemik hasil abad pencerahan, dengan menganggap kulit putih lebih tinggi karena ia lebih rasional.²⁰ Dalam konteks dekolonisasi Indonesia, kapitalisme hadir dalam wacana perang dingin, diperebutkan posisinya.²¹ Pada era ini kapitalisme hadir dari tatanan dunia global melalui perusahaan transnasional, organisasi kepanjangan tangannya seperti IMF dan Bank Dunia

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Baudrillard, Jean. 1998. *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage Publications: London hal.33

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hal.31

¹⁹ Althusser, Louis. 1969. *For Marx*. (terj) Ben Brewster. New Left Book: London. hal.231

²⁰ Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas*. Serambi: Jakarta. hal.207-211

²¹ McMahon, Robert J. 1981. *Colonialism and Cold War: The United States Struggle for Indonesian Independence 1945-49*. Ithaca, Cornell University: New York. hal.11.



yang berpengaruh terhadap kebijakan negara.²² Konteks-konteks inilah yang membuat suprastruktur kapitalisme terbentuk melalui tahap demi tahap yang lama, yang diperantarai I.S.A dan tidak terkecuali orang muda ikut terbentuk identitasnya di sana.

E. IDENTITAS KOLEKTIF SEBAGAI AWAL RESISTENSI KULTURAL

Apakah orang muda Galur Manggala dalam identitas kolektifnya, yang posisinya terhimpit suprastruktur kepentingan yang begitu besar dari kekuatan kapitalisme, selamanya ditempatkan atau memosisikan diri sebagai korban saja, tanpa bisa berdaya tawar?

Penggabungan diri orang muda dalam Galur Manggala sebagai pembentuk identitas kolektifnya merupakan awalan bagi gerakan sosial baru di level politik kultural. Karena di dalamnya tercakup tercapainya kebersamaan, kohesi dan kontinuitas yang dirasakan bersama, diraih melalui penciptaan batas-batas sosial sebagai suatu aspek aksi kolektif yang coba mengatasi persoalan tentang identitas, aktualisasi diri dan nilai-nilai “pascamaterialis”²³ melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

Menurut Melucci, karakteristik gerakan sosial baru kurang memberi perhatian pada kerja dalam sistem politik yang mapan, namun memberi perhatian pada perkembangan sosial lebih luas, bertindak sebagai sumber kebaikan bersama, memilih demokrasi langsung dan partisipasi anggota ketimbang demokrasi representatif serta ditandai dengan sikap antioritarian, antibirokratis, bersamaan dengan cara berorganisasi mereka yang demokratis dan berorientasi aktivisme.²⁴ Terlebih, keanggotaannya serta konteks orientasi nilai dan gerakannya bisa sangat cair dalam menciptakan juga mengartikulasi persoalan dan solusinya dalam “bahasa baru”, hingga berefek pada diri dan meluas jangkauannya.²⁵

F. SIARAN RADIO *STREAMING* SEBAGAI “BAHASA BARU”: SIARAN DAN PENGALAMAN MENGOLAH DIRI

Asumsi paling umum dalam memandang siaran radio adalah memandangnya sebagai peristiwa dengan penjarakan sangat jauh. Mengandaikan dualitas yang dikotomis antara penyiar dan pendengar. Sehingga berbicara siaran radio berarti imaji tentang banyaknya jumlah pendengar dan kemenarikan siaran, berkenaan informasi yang disampaikan juga lagu yang dibawakan.

Tapi, bagaimana jika dikotomi itu runtuh? Masihkah siaran dibicarakan dengan cara itu? ataukah ia merupakan “bahasa baru” yang memberi perhatian pada perkembangan sosial lebih luas, bertindak sebagai sumber kebaikan bersama? Radio Galur Manggala telah mulai siaran sejak 23 November 2015 atas inisiatif orang muda Galur Manggala, diobrolkan lalu dicarikan bentuknya, dari FM hingga memilih siaran *streaming* sebagai bentuk akhirnya, hingga hari ini. Semuanya adalah bentuk eksperimen dengan ketidakmulusan teknis, kesulitan tempat, jaringan, hingga waktu luang untuk siaran. Mengingat kesibukan yang sangat padat dari para anggotanya. Atas kebaikan salah seorang anggota pada awalnya untuk penyediaan tempat dan jaringan, hingga kini (jaringan). Telah mengalami perpindahan ke ruang yang lebih luas di lantai dua Balai Desa Jeblog. Dengan tempat yang lebih luas dan

²² Simpson, Bradley R. 2010. *Economist with Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta. hal. 28.

²³ Barker,Chris.2015. *Cultural Studies,Teori dan Praktik*.Kreasi Wacana:Yogyakarta.hal.133

²⁴ *Ibid.*,hal.134

²⁵ *Ibid.*,hal.378



letaknya yang lebih strategis, memungkinkan pengalaman siaran bisa dialami lebih banyak orang lagi, serta membawa dampak yang berlainan dan sejenis ketertarikan yang tak lumrah.

Siaran tak dilakukan dalam ruang kedap suara, selazim siaran radio pada umumnya, tidak ada batasan waktu dan larangan masuk ruang. Semuanya “biasa” sealami mengantuk-tidur dan lapar-makan. Tema yang dibicarakan beragam, dari keseharian desa, dikotomi desa-kota, sepak bola, cinta, musik, informasi-informasi dari karang taruna, pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga hal-hal berat yang menjadi keresahan dan perlu direspon seperti pendidikan dan ketidakpedulian pemuda, masalah masa depan yang berakibat egoisitas, kapitalisme dan resistensinya hingga resistensi kultural menentang pendirian pabrik di desa Jeblog dengan pertimbangan lingkungan dan kepentingan politis dan konsep kesejahteraan yang dikelirukan. Apa yang terjadi setelahnya? Sebagai “bahasa baru”?

Siaran radio *streaming* menjadi peristiwa transformasi diri, dalam religiositas, pengetahuan yang teralami benar sebagai pengalaman perkembangan. Ia yang bergabung dalam siaran, bukan selamanya menjadi penonton pasif. Pembagian kerja bisa begitu cair, berganti peran dalam penyesuaian sesuai kebutuhan jika masalah-masalah teknis terjadi seperti kesalahan jaringan, kehabisan bahan obrolan atau rasa jenuh dan lelah. Semuanya tidak dilihat sebagai hal dalam perkara baik-buruk dalam etiket, tapi peristiwa mencintai pengalaman melakukan. Melakukan hingga penuh sampai peristiwa lain mengode dan berkata sudah.

Siaran biasa berlangsung dari jam 20.00-00.00 dan bisa beerubah-ubah sesuai kondisi, siaran adalah pengalaman kemanusiaan yang lain, pengalaman siaran adalah pengalaman musyawarah, memberi kesempatan sebanyak mungkin suara terdengar dari banyak orang yang hadir di situ, sejenis keterlibatan berkesan apresiatif. Belakangan, intensitas dan pemberian pengalaman cair transformatif ini ingin bisa dinikmati banyak orang lain lagi, hingga ide-ide pembuatan poster sebelum siaran dan dokumentasi audionya. Siaran bisa diakses di galurmanggala15.caster.fm dan twitter @galurmanggala_ yang berubah menjadi @radiomanggala.

G. RESISTENSI KULTURAL SUPRASTRUKTUR KAPITALISME AKHIR

Gerakan sosial baru, menurut para peneliti yang terilhami Pierre Bordieu adalah sebetulnya habitus kultural yang terdeterminasi oleh kondisi konflik struktural “politis” yang diturunkan dari nilai dan norma yang jauh dari kepentingan ekonomi, tipikal pada lapangan kultural tertentu hingga bisa sangat tidak rasional tapi beralasan (*not rational but reasonable*).²⁶ Sebagai sebuah aktivisme, gerakan sosial baru sebagai perilaku kolektif terletak di luar hal-hal yang ditentukan oleh struktur normatif sosial dengan norma baru yang merepresentasikan upaya untuk transformasi norma yang ada, karena norma yang ada tidak lagi memuaskan dalam pikiran masing-masing individu.²⁷

Suprastrukturalisme kapitalisme akhir yang menjadi titik fokus utama bagi aktivisme orang muda Galur Manggala, karena berefek kesadaran palsu bagi perjalanan realitas orang muda, sehingga mengelirukan realitas kapitalisme akhir sebagai satu-satunya realitas. Maka, ia perlu dikritisi dan dicarikan alternatif realitas yang lain. Pendidikan Kaum Muda adalah

²⁶ Porta, Donatella Della dan Diani, Mario. 2006. *Social Movement: An Introduction*. Blackwell Publishing: Victoria. hal. 11

²⁷ *Ibid.*, hal. 13



salah satu cara yang diinisiasi orang muda Galur Manggala untuk mengatasi hal ini. Ada 7 jenis kegiatan dalam Pendidikan Kaum Muda ini.

Jenis Kegiatan I

Diskusi: Tema, Tanggung Jawab Generasi (Karangtaruna yang Menyembuhkan)

Tema ini memperkarakan masalah sosial yang umum dijumpai dalam berkarangtaruna yang telah diselenggarakan pada masing-masing dukuh di desa Jeblog. Dengan cara psikoanalisa Freudian yang telah menjadi klasik namun masih sangat berguna, karena membukakan perspektif yang lain dalam membaca manusia dengan mencari mata rantai yang hilang (*missing link*) sekaligus bisa menyembuhkan sakit asosial bahkan fisik. Sebab mencari atau membahasakan apa yang ditolak dibahasakan seperti: takut sendiri sehingga mengelompok kemudian menciptakan kebenaran kelompok dan melakukan intimidasi, hasutan lalu mengganggu kohesi sosial yang seharusnya lebih cair. Kebenaran bentukan kelompok itu, menyebabkan seseorang memperoleh pembenaran bagi larinya dirinya dari tanggungjawab karangtaruna. Melalui pembicaraan ini, karang taruna berlaku sebagai psikoanalisa yang menyembuhkan. Menciptakan kesadaran baru, seperti yang dicontohkan oleh Freud dari masalah klinis, keluar dari kedokteran beralih ke kemanusiaan dengan tulisannya tentang kebudayaan. Karangtaruna ingin memberikan dirinya bagi semua kelompok dengan banyak bentuk pengungkapan yang menata pengalaman suatu kelompok menjadi bermakna. Sehingga, memberikan perluasan, bahwa kesadaran tergantung dari luasnya pengetahuan. Dan makna, ada pada yang kita pilih atau yang tidak kita pilih.

Jenis Kegiatan II

Diskusi :Tema Karangtaruna sebagai Kritik atas Kapitalisme (Kembalilah Ke Desa)

Sistem ekonomi kapitalis mendapat kritik dari Marx dan terus-menerus mendapat pembaruan dari neo-marxist karena kapitalisme memengaruhi wajah sosial yang akhirnya, berorientasi kota, kemajuan, modernitas, uang. Telah menjadi nilai-nilai anutan dalam masyarakat yang tidak disadari. Hingga menjadi orientasi hasil setelah pendidikan dalam pelbagai tingkat pendidikan, menjadikan taruna-taruni berorientasi kurang lebih sama dalam hal kota, kemajuan, modernitas, uang, tercermin dari jenis relasi sosialnya yang berpendidikan tinggi semakin meremehkan dan acuh dengan desanya. Peniruan gaya hidup bentuk luaran kota, penggunaan gawai, gaya busana terbaru yang tanpa disadari diciptakan agar tingkat konsumsi terus bertambah dengan terus-menerus menciptakan hasrat bagi kenikmatan-kenikmatan baru yang akan terus menguntungkan kapitalis. Berkarangtaruna, berarti menemukan kemanusiaan dan religiositas dalam kegiatan bersama penuh kenikmatan bukan hasil tindakan konsumtif, melainkan penemuan sesuatu hal baru yang lebih menggairahkan sebagai kenikmatan aktif. Dalam kapitalisme, kesenangan akan pelampiasan hasrat mengonsumsi adalah hal semu yang akan tetap menimbulkan lubang-lubang eksistensial yang tak akan tersembuhkan atau hanya teralihkan dengan kegiatan mengonsumsi yang bisa diganti-ganti obyeknya, termasuk mengonsumsi dalam rangka religiositas. Karang taruna ingin mengembalikan diri dari mode hidup kapitalistik ke desa, berkontribusi bagi kemakmuran nya dan mengobati diri bersama-sama.



Jenis Kegiatan III

Diskusi: Tema Kesadaran Aturan Desa dan Ekonomi Kerakyatan

Kesadaran aturan desa, harus diajarkan. Sebab, akan ada celah kosong yang akan digunakan untuk kecurangan bertendensi memperkaya diri dengan mengabaikan kepentingan rakyat (kejahatan pita merah). Pengajaran kesadaran ini sekaligus untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap pemerintah desa, serta menjalankan fungsi kontrol dalam masyarakat yang menuntut transparansi. Sehingga kemakmuran dan keselamatan dunia-akhirat akan terjaga. Serta mampu menjadi pergerakan untuk menggerakkan kaum petani, memberikan akses-akses kebudayaan petani dalam perayaan bahagia petani setelah panen.

Jenis Kegiatan IV

Diskusi dan Lokakarya

Tema: Buku dan Visual

Dalam tema ini, sekaligus akan diadakan pameran buku selama seminggu. Buku sebagai simbol pengetahuan, jalan pintas masuk ke dalam perluasan kesadaran dari penulis yang telah bertekun sekian lama mewujudkan kesadarannya sendiri dalam wujud yang bisa diterima. Dibicarakan pula perannya sekaligus bagaimana seseorang mewujudkan kesadarannya dalam kata atau bentuk visual untuk menyampaikan pesan.

Jenis Kegiatan V

Pementasan dan Diskusi

Teaterbayang. Teater bayang bermuladari inspirasi yang tumbuh saat taruna-taruni Galur Manggala dalam puncak sukacita nya dan tenggelam dalam identitas komunal dari sebuah kegiatan yang menjaring kelimpahan penyegaran dari alam atau *tapovana* (Makrab) 12-13 Desember 2015 di Nglorog Rejo. Peristiwa makrab adalah peristiwa yang membuat manusia berkoneksi dengan ruang kehidupan. Sebab, ruang tergantung oleh pemaknaan, begitu pula desa sebagai ruang sekaligus mendapatkan pemaknaan dari *tapovana* dan berkarangtaruna. Tanpa makrab, ruang akan berbahaya karena di luar batas keakraban dan membuat penghuninya (taruna-taruni atau masyarakat) bisa dan saling merasa terasing.

Pemaknaan Pementasan Teater Bayang

Pementasan teater bayang ini adalah sebetuk improvisasi dari pemecahan kreatif keterbatasan ruang dan narasi teater waktu itu. Kenapa mesti bayang? Bayang tubuh yang ditampilkan sebagai representasi citra tubuh yang lebih ekspresif, yang diperantarai cahaya dan selembar kain putih, bisa mencipta transformasi imaji bagi penonton sekaligus menampilkan tubuh menjadi lebih ekspresif. Menjadi sihir media dalam teater yang tidak lagi diperlakukan sebagai salah satu perspektif melihat belaka, tapi juga pemecahan kreatif estetika panggung. Pada akhirnya, teater bayang akan dimaknai sebagai konstruksi dari keyakinan yang sedang dijalani untuk memperkaya kualitas kehidupan untuk perkembangan batin bersama-sama orang lain.

Pendek kata, teater bayang adalah kenyataan dan fiksi yang bertemu sebagai bayangan yang nyata. Menjadi personifikasi yang mungkin bisa dilakoni bersama sebagai teks kehidupan, dan bukan pemeranan kehidupan. Karena menghidupinya bersama-sama dalam keseharian kita. Mengangkat persoalan orang muda, pendidikan dan lapangan kerja,



gaya hidup yang mengitari , menjadi tubuh bayangan yang menyimpan pesan. Entah pembebasan atau penghiburan.

Jenis Kegiatan VI

Pemutaran dan Diskusi Film

Berbagi kesadaran pemaknaan ruang desa melalui film dengan pengenalan sejarah yang dituturkan langsung dari seseorang desa yang menerima secara langsung kelisanan tradisi yang bisa saja sirna tanpa pengabdian kreatif. Film, adalah estetika lanjutan dalam memperkarakan kapitalisme dan pemaknaan kembali desa, untuk mengajak kembali taruna-taruni mencintai kembali desanya.

Jenis Kegiatan VII

Pentas Puisi dan Musik

Pentas puisi dan musik adalah cara kerja budaya, bila kekurangan akses terhadapnya. Kelincahan hidup lekas usai atau bahkan sirna. Kegiatan ini adalah puncak penyediaan bagi pelbagai kemungkinan akses ke kebudayaan agar hidup senantiasa dirayakan sekaligus bisa menjadi penyembuh masyarakat.

H. KESIMPULAN: LAPIS KEDUA RESISTENSI KULTURAL

Orang muda yang mengambil identitas kolektif bersama Galur Manggala adalah bentuk pergeseran dari bentuk “politik publik” ke arah “politik personal” sebagai resistensi kultural. Ia merupakan bentuk interaksi strategis manusia dengan ruang yang melahirkan praktik kultural. Ia menjadi gerakan sosial baru yang mengubah apa yang dipikirkan orang. Sehingga pada lapis kedua pemaknaanya ia mencapai tataran simbolis yang justru berefek etis karena “inovasi” daya manusia dalam mengubah suprastruktur tidak bisa dibayangkan sebagai perlawanan antara dua oposisi, namun bisa mengalihkan identifikasi pada suprastruktur ke nilai lain yang lebih mengkomodasi dan memerdekakan.

REFERENSI

- Althusser, Louis dan Balibar, Etienne. 1970. *Reading Capital* (terj) Ben Brewster. New Left Book
- Althusser, Louis. 1969. *For Marx*. (terj) Ben Brewster. New Left Book: London
- Althusser, Louis. 1984. *Essays on Ideology*. Verso: London
- Barker, Chris. 2015. *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Kreasi Wacana: Yogyakarta
- Baudrillard, Jean. 1998. *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage Publications: London
- Gouda, Frances. 2007. *Dutch Culture Overseas*. Serambi: Jakarta
- Jameson, Fredric. 1997. *Postmodernism, or The Cultural Magic of Late Capitalism*. Duke University: Durham
- McMahon, Robert J. 1981. *Colonialism and Cold War: The United States Struggle for Indonesian Independence 1945-49*. Ithaca, Cornell University: New York
- Porta, Donatella Della dan Diani, Mario. 2006. *Social Movement: An Introduction*. Blackwell Publishing: Victoria
- Simpson, Bradley R. 2010. *Economist with Guns: Amerika Serikat, CIA, dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta



PEMUDA DAN INISIATIF BARU FILANTROPI ISLAM DI YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP KOMUNITAS LASKAR SEDEKAH DAN YAYASAN SENYUM KITA

Azis¹

¹*Mahasiswa SKI PPs UIN Sunan Kalijaga
Program Assistant Globethics.net Indonesia ICRS UGM
Email: Azis_qq@yahoo.com*

ABSTAK

This paper tries to discuss the growing initiatives within the young Muslim in Yogyakarta to organize social welfare activities, and analyzes the way in which zakat and sedekah are practiced among them. This paper focuses on two Islamic philanthropy organization's i.e Laskar Sedekah (LS) and Yayasan Senyum Kita (YSK). The author states that the establishment of independent alms agencies within young Muslim which are not affiliated to Islamic organization, government or corporation have become new players in the rapid growth of the Islamic philanthropy in the Reformasi era. This paper examines the following issues: what are the main forces stimulating young Muslim in Yogyakarta to set up philanthropic organization; what kinds of religious ideas are applied to mobilize charities from Muslim society; and how these concepts are interpreted and practiced in Laskar Sedekah and Yayasan Senyum Kita as alms collectors? This paper argues that the new trends of Islamic philanthropy organizations in Yogyakarta has indicated the dynamics of Islamic discourse in Indonesia especially to counter the flourish of Islamic fundamentalism. Beside that, the author states that new media such as Facebook, Blog, Web, etc. has pivotal tool to maintain the autonomous of these organizations both from the state and religious organizations.

Kata Kunci: Pemuda, Filantropi Islam, Komunitas Laskar Sedekah, Yayasan Senyum Kita

A. PENDAHULUAN

Pemuda adalah setiap warganegara Indonesia yang berusia 16–30 tahun seperti yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pemuda di Indonesia jumlahnya mencapai 25% dari sekitar 245 juta populasi Indonesia atau sekitar 62 juta jiwa.¹ Secara historis, peran pemuda tidak dapat diragukan lagi baik dalam upaya mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan bangsa. Isu pengarusutamaan pemuda dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik dalam sektor privat maupun publik, kian terasa begitu penting khususnya dalam rangka menyambut bonus demografi yang akan dipanen bangsa ini dalam beberapa tahun ke depan.

Penelitian ini membahas tentang peran pemuda dalam inisiatif-inisiatif baru filantropi Islam di Yogyakarta, yakni tentang cara yang dilakukan oleh para pemuda Muslim dalam

¹ Lihat Imam Nahrawi, "Pengarusutamaan Pemuda" dalam Harian Kompas 29 Oktober 2016.



menerima, menerjemahkan, mengekspresikan, dan mengorganisir praktik berderma dalam kehidupan publik. Tradisi berderma di dalam dunia Islam, sebagaimana yang ada dalam peradaban lainnya, telah menjadi bagian integral dalam kehidupan Muslim. Baik Al-Quran maupun Hadis banyak dijumpai ayat dan riwayat yang menganjurkan kedermawanan dalam berbagai bentuknya² mulai dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf.³

Secara spesifik, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dinamika filantropi Islam di Yogyakarta pada era Reformasi. Secara historis, peneliti berasumsi bahwa Yogyakarta merupakan tempat yang menjadi setting historis dimulainya modernisasi filantropi Islam di Indonesia. Para ahli menyatakan bahwa modernisasi filantropi Islam tersebut pertama kali dilakukan oleh Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan.⁴ Dengan spirit Surah Al-Maun, Muhammadiyah mengubah praktik filantropi tradisional menjadi filantropi modern dengan menyalurkan dana filantropi untuk program-program jangka panjang seperti mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan klinik kesehatan. Selain Muhammadiyah, lembaga filantropi lain di Yogyakarta yang menjadi pioner tumbuhnya filantropi Islam modern saat ini adalah Yayasan Dompot Dhuafa Republika pada dekade 1990-an. Kelahiran Dompot Dhuafa (DD) menginspirasi masyarakat Muslim di Indonesia untuk mendirikan lembaga serupa seperti Dompot Sosial Ummul Qurro' (DSUQ), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), dan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT).⁵

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, dengan dibukanya keran demokrasi yang diiringi dengan tuntutan kebebasan berpendapat, berserikat, termasuk kebebasan untuk mengakses informasi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika praktik filantropi Islam di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Periode ini menyaksikan pesatnya perkembangan organisasi-organisasi filantropi Islam serta lahirnya undang-undang yang berhubungan dengan filantropi Islam.⁶ Salah satu hal yang menarik tentang perkembangan filantropi Islam pada masa Reformasi ini adalah munculnya inisiatif-inisiatif baru filantropi Islam yang dikelola secara mandiri oleh kalangan pemuda Muslim khususnya di wilayah Yogyakarta. Sejumlah lembaga atau komunitas filantropi ini tidak berafiliasi dengan salah satu kelompok keagamaan, partai politik, perusahaan maupun pemerintah. Di Yogyakarta, beberapa lembaga/komunitas filantropi tersebut antara lain Laskar Sedekah (LS), Sedekah Rombongan (SR), Simpul Sedekah (SS), Rumah Hati Jogja (RHJ), Yayasan Senyum Kita (YSK), dan lainnya. Anggota komunitas-komunitas ini terdiri dari para pemuda dari beragam afiliasi keagamaan dan menggunakan cara-cara kreatif dalam upaya penggalangan dana (*fundraising*) dan pendistribusiannya.

² Di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menekankan tentang filantropi diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.

³ Hilman Latief, "Transforming the Culture of Giving in Indonesia: The Muslim Middle Class, Crisis, and Philanthropy." Paper dipresentasikan dalam acara *visiting Japan at the invitation of the Nanzan University Faculty of Foreign Studies* regarding zakat in Modern Indonesia, tanggal 23 Oktober 2015. https://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2015_no.11/01_Hilman.pdf. Diakses 12 Oktober 2016

⁴ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, terj. Eva Mushoffa (Yogyakarta: Gading, 2016), 156. Lihat juga Gwenaël Njoto dan Feillard, "Financing Muhammadiyah: The Early Economic Endeavours of a Muslim Modernist Mass Organization in Indonesia (1920s-1960s)" dalam *Journal Studia Islamika*, Vol. 21 No. 1 2014.

⁵ Fauzia, *Filantropi Islam*, 228-229.

⁶ *Ibid.*, 223.



Selain faktor politik, faktor penting lainnya yang melatarbelakangi munculnya komunitas-komunitas baru filantropi Islam di Yogyakarta adalah perkembangan teknologi informasi khususnya media-media baru (*new media*) seperti blog, Facebook, BlackBerry Massanger (BBM), Twitter, WhatsApp (WA), dan lainnya. Kedua hal inilah mendorong sejumlah pemuda Muslim di Yogyakarta untuk mendirikan komunitas-komunitas filantropi yang bergerak mengumpulkan donasi berupa zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah seperti fakir miskin, anak-anak yatim, penyandang difabel, dan lainnya.

Laskar Sedekah, misalnya, komunitas filantropi ini berdiri pada tahun 2012 yang dikelola oleh anak-anak muda usia 20-30 tahun dari berbagai latar belakang pendidikan dan afiliasi organisasi keagamaan seperti Islam modernis, tradisional dan revivalis. Dalam penggalangan dana, Laskar Sedekah mengoptimalkan media sosial seperti Facebook, BBM, WA, dan Web sebagai sarana untuk mendapatkan donasi. Mereka menyalurkan donasi yang mereka kumpulkan khususnya untuk memberdayakan fakir miskin untuk diberdayakan agar menjadi mandiri. Sampai saat ini, setidaknya sudah terdapat 18 cabang komunitas Laskar Sedekah yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia seperti Semarang, Surabaya, Pontianak, Medan, Bandung, dan lainnya.⁷

Adapun Yayasan Senyum Kita (YSK) merupakan organisasi filantropi yang bergerak dalam bidang pendidikan. Yayasan ini berdiri pada tahun 2009 dan mendistribusikan donasi yang dikumpulkan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim dan penyandang difabel dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan perguruan tinggi. Selain itu, YSK juga mengadakan program-program pelatihan di sejumlah panti asuhan di kawasan Yogyakarta seperti training kewirausahaan, kepenulisan, dan lainnya.⁸

Dengan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa lembaga-lembaga filantropi sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan kelanjutan dari perkembangan filantropi Islam pada periode sebelumnya. Dua lembaga yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Laskar Sedekah (LS) dan Yayasan Senyum Kita (YSK) merupakan representasi dari trend baru gerakan filantropi Islam di Yogyakarta. Dua lembaga tersebut akan dikaji dalam perspektif sejarah sosial dengan menitikberatkan pada bagaimana lembaga-lembaga ini menggunakan sosial media sebagai instrument penting dalam menerjemahkan dan mempraktikkan filantropi Islam di Yogyakarta.

Penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut: Pertama, bagaimana sosial media berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan filantropi Islam di Yogyakarta? Kedua, bagaimana sosial media digunakan untuk menyebarkan ide-ide keagamaan oleh lembaga-lembaga filantropi untuk mendorong masyarakat Muslim di Yogyakarta untuk berderma?; dan bagaimana ide-ide tersebut diinterpretasikan dan dipraktikkan oleh kedua lembaga yang diteliti?

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan dua macam sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam (*deep interview*) kepada para pendiri, pengelola, dan relawan dari lembaga filantropi yang menjadi objek penelitian ini. Adapun sumber

⁷ Wawancara Andy F.Noya dengan Ma'ruf Fahrudin Pendiri Laskar Sedekah dalam acara *Kick Andy* di Metro TV, tanggal 17 Juli 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=XLgjR50ID3Q>. Diakses 10 Agustus 2016.

⁸ Wawancara Peneliti dengan Muhammad Niam Sidqi, Staff dan Relawan di Yayasan Senyum Kita, tanggal 19 Agustus 2016.



sekunder diambil dari artikel jurnal, buku, video, dan tulisan-tulisan lainnya yang membahas tentang filantropi secara umum dan filantropi Islam secara khusus.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terhadap filantropi Islam di Indonesia sudah banyak dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan seperti sejarah, ekonomi, hukum Islam, dan politik. Berikut akan diuraikan sejumlah penelitian tentang filantropi Islam yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

Amelia Fauzia dalam disertasinya yang berjudul *Faith and the state: a history of Islamic philanthropy in Indonesia* mengkaji tentang sejarah filantropi Islam di Indonesia sejak awal Islamisasi sampai dengan masa Reformasi. Fauzia melihat bahwa praktik filantropi merupakan salah satu indikator dinamika hubungan antara masyarakat sipil (*civil society*) dan negara. Dalam penelitian disertasinya tersebut Fauzia berpendapat bahwa praktik filantropi menunjukkan kontestasi yang seimbang antara masyarakat sipil dan negara. Dia berasumsi bahwa praktik filantropi semakin menguat ketika negara dalam keadaan tidak stabil atau lemah dan terkadang digunakan untuk menantang kekuasaan negara. Sebaliknya, ketika negara kuat, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kolonial Belanda dan Orde Baru, maka praktik filantropi cenderung melemah, meskipun tetap masih menemukan cara untuk menjalankan kegiatan filantropi dalam ruang publik untuk mendorong perubahan sosial.

Meskipun karya Amelia Fauzia ini merupakan kajian yang komprehensif tentang sejarah filantropi Islam di Indonesia, penulis menemukan beberapa celah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukannya. Pertama, praktik filantropi Islam di masa Reformasi mengalami perkembangan yang signifikan. Kegiatan filantropi Islam tidak hanya dikelola oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lainnya, tetapi juga oleh komunitas-komunitas baru yang tidak berafiliasi ke pemerintah maupun organisasi keagamaan tertentu. Kedua, dalam disertasinya tersebut Fauzia lebih menitikberatkan kepada faktor politik sebagai faktor dominan yang mempengaruhi praktik filantropi Islam di Indonesia. Menurut peneliti, salah satu faktor penting tumbuhnya komunitas-komunitas filantropi Islam masa Reformasi adalah perkembangan teknologi informasi. Komunitas-komunitas filantropi yang tumbuh di era ini cenderung memanfaatkan media baru sebagai sarana komunikasi dan penggalangan dana (*fundraising*) sehingga mengesampingkan sekat-sekat ideologi atau afiliasi terhadap organisasi keagamaan tertentu. Meskipun tidak dapat dinafikan bahwa juga tetap terdapat banyak lembaga filantropi dengan afiliasi organisasi keagamaan atau ideologi tertentu.

Penelitian disertasi tentang filantropi Islam di Indonesia juga dilakukan oleh Hilman Latief dalam karyanya yang berjudul *Islamic Charities and Social Action: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2012. Dalam penelitian tersebut Latief mengupas secara mendalam beragam motif sejumlah lembaga filantropi Islam di Indonesia seperti Dompot Dhuafa (DD), Rumah Zakat Indonesia (RZI), LAZIS Muhammadiyah, Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (DPU-DT), Al-Azhar Peduli (AAP), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Latief mengatakan bahwa di antara motif gerakan filantropi Islam tersebut meliputi motif untuk kesejahteraan (*welfare*), dakwah sampai dengan motif politik. Dalam karyanya yang lain yang berjudul *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, secara khusus Latief mengkaji kegiatan filantropi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dalam karyanya itu Latief menyebutkan sejumlah kegiatan filantropi yang menjadi fokus



kegiatan filantropi di Muhammadiyah khususnya pendidikan dan kesehatan dengan mendirikan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan.

Dari kedua karya Hilman Latief tersebut, terdapat sejumlah persamaan dengan penelitian dalam tesis ini. Pertama, yakni batasan waktunya yang fokus pada kajian lembaga-lembaga filantropi Islam era Reformasi. Kedua, baik penelitian Hilman Latief maupun dalam tesis ini sama-sama mengkaji terhadap gerakan filantropi yang berkembang di wilayah perkotaan. Adapun perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian Hilman Latief terletak pada objek kajiannya. Penelitian Hilman Latief lebih kepada lembaga-lembaga filantropi yang berada di bawah payung organisasi keagamaan tertentu, partai politik Islam, dan lembaga donor internasional. Adapun penelitian ini ditujukan kepada lembaga filantropi yang mandiri dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penggalangan dana dan komunikasi dalam internal masing-masing lembaga tineliti. Oleh sebab itu, sejumlah lembaga filantropi Islam dalam penelitian ini merupakan inisiatif-inisiatif baru dalam dunia filantropi Islam.

Penelitian yang tidak kalah pentingnya tentang perkembangan filantropi di Indonesia dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy* (PIRAC) yang berjudul *Investing in Ourselves: Giving and Fund raising in Indonesia*. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa motivasi terbesar praktik filantropi di Indonesia adalah motif keagamaan, yaitu agama Islam. Pada bagian awal, penelitian tersebut menyatakan bahwa perkembangan signifikan praktik filantropi di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa hal khususnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada dekade 1990-an, kemiskinan, dan sejumlah bencana yang terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru banyak upaya kegiatan filantropi yang dilakukan oleh masyarakat sipil termasuk media massa seperti koran harian dan televisi. Pada bagian pembahasan, studi PIRAC mengupas sejumlah lembaga filantropi di Indonesia yang tidak hanya fokus kepada lembaga filantropi Islam, tetapi juga lembaga sejenis yang didirikan oleh komunitas keagamaan lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Budha.

Beberapa lembaga filantropi Islam yang dikaji oleh PIRAC tersebut yaitu Dompot Dhuafa (DD) yang berdiri di Yogyakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (DPU-DT), dan Dompot Sosial Umul Quro (DSUQ). Batasan temporal dalam penelitian tersebut dimulai dari tahun 1990-an sampai dengan tahun 2002 sehingga sangat membantu untuk mengetahui perkembangan filantropi di Indonesia dalam periode tersebut khususnya setelah terjadinya krisis pada tahun 1997 dan setelah tumbanganya rezim Orde Baru.

Kajian tentang filantropi lainnya juga dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tertuang dalam buku *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Menurut al-Quran dan Hadis*. Karya ini mencakup tentang filantropi dan keadilan sosial, kewajiban dan ajakan berderma, pahala dan hukum derma, etika berderma dan pengelolaan derma, serta jenis dan cara menghitung zakat. Karya lainnya yaitu *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* yang merupakan bunga rampai yang disunting oleh Idris Thaha. Sejumlah intelektual muslim menuangkan gagasannya tentang filantropi di dalam karya ini seperti Azyumardi Azra, Dawam Raharjo, Rahmat Djarmika, serta praktisi Adiwarman A.Karim dan Zaim Saidi. Karya lainnya yakni Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar (ed.) *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus dan Lembaga Zakat di Indonesia* yang memberikan informasi relevan tentang implementasi konsep pelayanan di kalangan Muslim Indonesia.



Selain beberapa penelitian di atas, peneliti mendapatkan sejumlah penelitian tentang filantropi Islam di Yogyakarta:

Pertama, penelitian Gwenaël Njoto dan Feillard berjudul “Financing Muhammadiyah: The Early Economic Endeavours of a Muslim Modernist Mass Organization in Indonesia (1920s-1960s)” yang diterbitkan *Journal Studia Islamika*, Vol. 21 No. 1 2014. Penelitian ini membahas tentang kegiatan filantropi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari awal berdirinya organisasi ini sampai dengan dekade 1960-an. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa donasi yang dikumpulkan oleh Muhammadiyah sebagian besar diperoleh dari anggota organisasi khususnya para pedagang yang berada di kawasan Yogyakarta dan Solo. Selain itu, penelitian tersebut menyatakan bahwa pada periode sebelum kemerdekaan di tubuh Muhammadiyah sudah berkembang wacana tentang pembentukan Bank Islam.

Sebagai kajian historis, penelitian tersebut menguatkan penelitian sebelumnya bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang pertama kali melakukan pembaharuan terhadap praktik filantropi. Penelitian tersebut memberikan informasi yang komprehensif mengenai sejarah awal filantropi Islam modern yang ada di kawasan Yogyakarta.

Kedua, penelitian Nurkholish dkk. yang berjudul “Profile of Islamic Philanthropy in Yogyakarta Special Province” yang diterbitkan oleh *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* Volume VII No.1 2013. Penelitian tersebut mengkaji tentang manajemen internal, strategi fundraising dan pendistribusian Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Yogyakarta. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa sampai dengan tahun 2008 di Yogyakarta terdapat 28 lembaga pengelola ZISWAF berdasarkan dari data Kementerian Agama DIY. Dari jumlah tersebut yang masih aktif berjumlah 16 lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berada di lembaga tertentu cenderung lebih mengandalkan pada pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam menarik minat muzakki untuk membayarkan zakatnya ke LAZ.

Artikel tersebut sangat bermanfaat bagi peneliti khususnya untuk memetakan lembaga-lembaga filantropi di Yogyakarta. Berdasarkan studi tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa masih banyak lembaga-lembaga filantropi yang belum dimasukkan dalam daftar lembaga pengelola dana ZISWAF di Yogyakarta. Studi tersebut juga lebih banyak menyoroti aspek normatif dan yuridis dari filantropi Islam, dan kurang memberikan perhatian terhadap kegiatan sehari-hari seperti bagaimana rekrutment anggota, cara-cara yang ditempuh dalam fundraising, dan program-program seperti apa saja yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam mendistribusikan dana ZISWAF yang dikumpulkan.

Dengan mengacu pada sejumlah penelitian di atas, penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan fokus kajian pada inisiatif-inisiatif baru filantropi Islam pada masa Reformasi dengan menitikberatkan pada lembaga atau komunitas filantropi yang independen. Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi karya-karya lain tentang filantropi Islam di Indonesia sebagaimana yang disebutkan di atas.

C. SOSIAL MEDIA DAN FILANTROPI ISLAM DI YOGYAKARTA

Dalam studi filantropi, terdapat dua jenis filantropi yakni filantropi tradisional dan filantropi modern atau dikenal juga dengan istilah filantropi keadilan sosial.⁹ Filantropi tradisional memiliki kesamaan arti dengan karitas, yakni pemberian individu secara sukarela dengan tujuan meringankan beban masyarakat tidak mampu, bersifat spontan atau jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.¹⁰ Adapun filantropi modern berprinsip bahwa harta yang berasal dari donasi individual maupun kolektif tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumtif atau sekali habis, tetapi juga digunakan untuk kepentingan jangka panjang, dikelola secara lebih produktif, memberdayakan dan memiliki visi keberlanjutan. Lebih dari itu, filantropi modern mengasumsikan adanya pendampingan yang serius dan konsisten yang diharapkan dapat mengatasi problem sosial seperti pengentasan kemiskinan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dua lembaga yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni Laskar Sedekah dan Yayasan Senyum Kita termasuk ke dalam kategori filantropi Islam modern. Sebagai gerakan filantropi yang lahir pada masa era Reformasi, Amelia Fauzia memberikan ciri-ciri spesifik tentang filantropi modern pada masa ini yakni: modernisasi pengelolaan, diversifikasi program, dan reformulasi fikih.¹² Di samping tiga ciri-ciri tersebut, filantropi modern khususnya yang digerakkan oleh pemuda sangat dipengaruhi oleh sosial media baik dalam hal manajemen kelembagaan, fundraising, dan pertanggungjawaban lembaga/komunitas kepada publik.

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang sejarah singkat munculnya Komunitas Laskar sedekah dan Yayasan Senyum Kita dan bagaimana sosial media berperan penting dalam aktivitas filantropi Islam kedua lembaga tineliti.

1. Laskar Sedekah

Komunitas Laskar Sedekah berdiri pada 30 Maret 2012 di Sleman Yogyakarta oleh Ma'ruf Fahrudin. Ide untuk bersedekah bermula dari keinginan Ma'ruf untuk membantu seorang balita yang menderita bibir sumbing. Setelah itu, Ma'ruf mengunggah foto balita tersebut ke akun sosial mediana dan mendapatkan respon yang positif dari teman-temannya di dunia maya. Uang yang terkumpul pada saat itu berjumlah sekitar empat juta rupiah yang kemudian disalurkan untuk membantu biaya operasi balita tersebut.¹³

⁹ Soma Hewa and Philo Hove, *Philanthropy and Cultural Context* (Maryland: University Press Amerika, 1997), hlm. 4. dalam Ahmad Fathan Aniq, *Zakat Discourse in Indonesia: Teachers' Resistance to Zakat Regional Regulation in East Lombok* (Jakarta: Mora, 2012), 60.

¹⁰ Fauzia, *Filantropi Islam*, hlm. 18.

¹¹ Latief, *Melayani Umat*, hlm. 38-39. Secara sederhana Dawam Raharjo menyatakan bahwa filantropi lebih dekat dengan filsafat moral dan praktiknya yang bersifat sosial. Adapun karitas lebih dekat dengan ajaran keagamaan sehingga praktiknya bersifat individual dan menyangkut konsep pahala dan dosa. Lihat Dawam Raharjo, "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis" dalam Idris Thaha (ed.), *Berderma untuk Semua: Praktek dan Wacana Filantropi Islam* (Jakarta: Teraju, 2003), xxxiii.

¹² Fauzia, *Filantropi Islam*, 237.

¹³ Wawancara Andy F.Noya dengan Ma'ruf Fahrudin Pendiri Laskar Sedekah dalam acara *Kick Andy* di Metro TV, tanggal 17 Juli 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=XlgjR50ID3Q>. Diakses 10 Agustus 2016.



Mengetahui besarnya antusias masyarakat di media sosial dalam penggalangan dana sedekah, pada 30 Maret 2012 Ma'ruf bersama enam orang temannya mengadakan suatu pertemuan dan membentuk perkumpulan yang diberi nama Laskar Sedekah. Tidak lama setelah itu, mereka langsung memanfaatkan jejaring sosial media seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan Web untuk melakukan aksi penggalangan dana sedekah.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, komunitas ini pun mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai salah satu tempat untuk menyalurkan sedekah mereka. Sampai bulan Februari 2016, sudah terdapat 18 cabang komunitas Laskar Sedekah di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Surakarta, Makassar, Semarang, Bogor, Malang, Medan, Balikpapan, dan lainnya.¹⁵

Dalam aksi penggalangan dana, Ma'ruf menyatakan bahwa cara yang ditempuh 80% menggunakan sosial media dan 20% lewat sedekah langsung. Cara yang ditempuh dalam sedekah langsung atau offline ini di antaranya adalah program Jemput Sedekah, One Day One Thousand, dan datang langsung ke rumah laskar. Program Jemput Sedekah biasanya dilakukan oleh pasukan Laskar Sedekah dengan mendatangi orang-orang yang ingin bersedekah dengan membuat janji terlebih dahulu atau lebih dikenal dengan istilah *COD-an* (*Cash on Delivery*). Adapun program One Day One Thousand merupakan program LS dengan membuat sejumlah celengan (*money box*) dari karton dan diberikan kepada orang-orang yang tertarik untuk bersedekah dengan cara ini. Menurut Ma'ruf ide One Day One Thousand ini bermula dari salah satu anggota Pasukan LS di Samarinda. Setelah uang di dalam celengan tersebut penuh, maka uang yang terkumpul akan diantarkan langsung ke Rumah Laskar atau dapat juga meminta agar anggota Laskar menjemputnya.¹⁶

Dalam aksi penggalangan dana, LS melakukannya dengan mengunggah foto sejumlah masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Hal yang sama juga dilakukan ketika LS memberikan bantuan, yakni dengan mengunggah foto beserta uang nominal yang diterima oleh si penerima derma. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memamerkan sedekah, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban LS kepada publik, khususnya para donatur. Menurut keterangan Ma'ruf jumlah donasi yang terkumpul setiap bulannya mencapai angka lebih dari 200 juta rupiah dari semua komunitas LS seluruh Indonesia.¹⁷

Donasi yang dikumpulkan oleh Laskar Sedekah disalurkan ke sejumlah kalangan seperti Janda yang tidak mampu, fakir dan miskin, dhuafa yang sakit, dan bantuan kepada anak-anak panti asuhan. Selain itu, ada juga program tebar nasi bungkus yang dibagikan kepada masyarakat miskin seperti tukang becak, pengemis, dan lainnya yang diadakan setiap hari Minggu setelah Subuh. Laskar sedekah saat ini juga sudah memiliki sejumlah ambulance yang digunakan untuk mengantar dan menjemput pasien yang memanfaatkan fasilitas ini untuk berobat di rumah sakit.¹⁸

2. Yayasan Senyum Kita

Ide awal untuk mendirikan komunitas filantropi ini digagas oleh salah satu mahasiswa Psikologi UGM Dwi Wahyu Arif Nugroho pada akhir tahun 2008. Dia bersama tujuh rekannya kemudian mendirikan sebuah komunitas yang bernama Senyum Community. Sejak

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara Fatimah Husein Kepada Ma'ruf Fahrudin, 04 Februari 2016

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*



awal komunitas ini bergerak dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan pemuda Indonesia. Pada 19 September 2015 Senyum Community mengubah namanya menjadi Yayasan Senyum Kita.¹⁹

Sejumlah sosial media yang digunakan oleh Senyum sebagai sarana penggalangan dana yaitu Web, Instagram, Facebook, Line, dan Youtube. Pengurus yayasan ini terdiri dari 13 pengurus dan sekitar 146 relawan yang tersebar di sejumlah kota yang berada di daerah Yogyakarta.²⁰ Donasi yang dikumpulkan oleh lembaga ini sebagian besar digunakan untuk membiayai sekitar 143 anak sekolah dari kalangan tidak mampu dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Selain ini, Senyum juga mengadakan pelatihan-pelatihan dan bimbingan belajar di sejumlah panti asuhan yang ada di sekitar Yogyakarta.

Program reguler YSK meliputi Sehati (Senyum Adik Sehati), Semangat (Senyum Mengajar Anak Yatim), dan Serasi (Senyum Meraih Prestasi). Sehati merupakan program beasiswa pendidikan yang diberikan setiap bulan kepada anak-anak dan pemuda yatim, dhuafa, dan difabel. Donasi untuk program ini diperoleh dari donatur tetap yang bersedia menjadi kakak asuh bagi mereka. Sampai bulan Agustus 2016 jumlah kakak asuh tersebut berjumlah sekitar 80 orang. Adapun program Semangat meliputi Semangat Menulis, Semangat Wirausaha, Semangat Berkarya, dan Semangat Bersedekah. Program-program ini merupakan pelatihan yang diberikan oleh YSK kepada anak-anak di sejumlah panti asuhan yang ada di kawasan Yogyakarta.²¹

Di samping kedua program di atas, terdapat program Serasi yang berupa apresiasi terhadap anak-anak panti. Dalam program ini, YSK mengadakan Senyum Youth Camp (SYC) dengan menginap adik-adik asuh selama dua hari satu malam atau tiga hari dua malam untuk mengikuti sejumlah kegiatan untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka, baik secara akademik di sekolah maupun keaktifan dan kreatifitasnya.²²

D. ANALISIS

Dari pemaparan tentang kedua komunitas filantropi tersebut, diketahui bahwa sosial media menjadi alat yang instrumental baik dalam penggalangan dana maupun menjaga kepercayaan publik. Faktor lain yang menjadi kekuatan kedua komunitas ini adalah terjunnya para pemuda sebagai tenaga inti baik sebagai pengurus maupun sebagai relawan. Komunikasi antara pengurus dan relawan, baik LS maupun YSK, dijalin dengan menggunakan grup WhatsApp. Selain itu, kedua komunitas ini juga tidak terikat dengan salah satu ormas Islam tertentu sebagai prasyarat untuk menjadi relawan di dalamnya.

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang isu-isu keislaman yang berkembang di kedua komunitas ini meliputi pemahaman tentang amil dan wacana-wacana keislaman yang muncul di dalam kedua komunitas tersebut.

1. Amil

Secara umum amil dipahami sebagai orang yang bertugas untuk membagikan zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Dalam literatur fiqih, amil digolongkan sebagai salah satu

¹⁹ www.senyumkita.com, diunduh tanggal 29 Oktober 2016.

²⁰ Wawancara Peneliti dengan Muhammad Niam Sidqi, Staff dan Relawan di Yayasan Senyum Kita, tanggal 19 Agustus 2016.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*



dari delapan golongan yang berhak sebagai penerima zakat. Namun demikian, sejumlah ulama ada yang memahami bahwa amil tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat.

Sebagai lembaga penyalur dana sedekah, LS memahami bahwa meskipun mereka bertindak sebagai penyalur sedekah, tapi mereka tidak berhak untuk mendapatkan gaji atau bagian dari pekerjaan tersebut. Semua pasukan Laskar Sedekah tidak ada satu pun yang mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut. Untuk itu, mereka menggandeng sejumlah pengusaha di Yogyakarta sebagai sponsor bagi kegiatan ini. Dana dari sponsor inilah yang digunakan oleh LS khususnya untuk menggaji para sopir ambulance dan menutup biaya operasional. Tidak jarang, anggota pasukan LS juga menggunakan uang pribadi mereka demi kegiatan bersedekah yang mereka galakkan.

Sebaliknya, Yayasan Senyum Kita memahami bahwa amil berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. Konsekuensinya, pengelola lembaga ini, khususnya pengurus harian, mendapatkan gaji dari pekerjaannya. Menurut Niam Sidqi, bagian Manajemen Development, pengurus harian yang mendapatkan gaji berjumlah empat orang. Adapun relawan lainnya biasanya akan mendapatkan uang transport kurang lebih berjumlah 100 ribu setiap bulannya.

2. Wacana Keislaman (*Islamic Discourse*) Pemuda dan Filantropi Islam

Seperti yang mafhum diketahui bahwa era Reformasi menjadi ajang munculnya gerakan-gerakan Islam radikal di Indonesia untuk tampil di depan publik. Laskar Jihad, Laskar Jundullah, HTI, NII, MMI, dan lainnya merupakan beberapa gerakan Islam yang ikut meramalkan wacana keislaman di era Reformasi saat ini. Bahkan, dalam ranah akademis dan media massa sebagian besar kajian terhadap Islam di Indonesia era Reformasi lebih banyak mengkaji gerakan-gerakan tersebut dibandingkan dengan gerakan Islam yang toleran yang bergerak secara massif di tengah kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Studi terhadap filantropi Islam ini merupakan upaya kecil dalam hal mengimbangi wacana Islam radikal yang berkembang di Indonesia saat ini. Peneliti melihat bahwa kemunculan Laskar Sedekah juga tidak lepas dari kegelisahan para pendiri komunitas ini atas menguatnya wacana Islam garis keras yang mendominasi ruang publik di Indonesia. Pemilihan nama Laskar Sedekah salah satunya dimaksudkan untuk mengubah mindset ‘menakutkan’ masyarakat tentang ‘Laskar’ yang seringkali diidentikkan dengan gerakan-gerakan Islam tertentu. Dalam hal ini Ma’ruf Fahrudin mengatakan,

“Jadi gini, ketika awal terbentuk memang kata, mohon maaf, kata-kata nama laskar itu kan agak kayaknya negatif ya di mata banyak orang? Wah ini kok kayaknya *medeni* (menakutkan). Nah, ternyata setelah teman saya nyeletuk kata itu, itu malah kita sambungkan dengan sedekah..Nah, laskar ini sebenarnya kita artikan kumpulan, kumpulan ketika kita action bareng-bareng, nah sedekah ini, yang di sini kita anggap ambil nama adalah berbagi. Jadi kita ngumpul bareng-bareng untuk berbagi, seperti itu..dan konsep ini akhirnya diterapkan sama teman-teman ternyata yang dulunya negatif, “Oh, ini kok ada Laskar Sedekah?” ternyata waktu itu langsung booming dan bahkan polisi itu sampai “Itu apa to?” pingin tahu seperti itu, dan akhirnya waktu itu saya juga pernah diintel sama polisi juga, “Itu apa?” gitu kan..dia masih nanya-nanya gitu. Kan dikira kayak, mohon maaf, Laskar Jihad, atau apa kayak gitu lho..”²³

Selain dalam hal penamaan, wacana keislaman juga dapat disaksikan dalam kegiatan kesehatan kedua komunitas ini. Dalam hal yang paling sederhana, Ma’ruf menganjurkan

²³ Wawancara Fatimah Husein.



kepada para anggota laskar untuk mengajak atau mengingatkan para penerima sedekah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam khususnya salat. Dengan demikian, di samping semangat untuk berbagi, komunitas ini juga memiliki semangat yang kuat untuk berdakwah (islamisasi), yakni melakukan syiar agama Islam.

Baik Laskar Sedekah maupun Yayasan Senyum Kita tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan tertentu. Keduanya menerima anggota dari beragam afiliasi keagamaan. Semangat bersedekah dan berbagi yang mereka galakkan menihilkan sekat-sekat keagamaan tersebut. Dalam hal ini Ma'ruf mengatakan,

“...jadi satu jadi pasukan semua: NU, Muhammadiyah, mau yang apa semua, Salafi, masuk ke sini semua, yang penting niat kita adalah berbagi dan ikhlas, itu aja.”²⁴

Bahkan, Yayasan Senyum Kita tampil dengan kemasan yang lebih inklusif. Meskipun spirit utamanya berasal dari nilai-nilai keislaman, komunitas ini juga menerima keanggotaan dari non-Muslim. Donasi yang mereka kumpulkan juga ada yang disalurkan untuk memberikan beasiswa kepada anak sekolah dari kalangan di luar agama Islam.

E. KESIMPULAN

Pemuda memiliki kontribusi yang besar dalam menggerakkan sektor publik di Indonesia yang dibuktikan dengan munculnya inisiatif-inisiatif baru filantropi Islam. Perkembangan teknologi informasi dengan hadirnya sosial media di Indonesia pada era Reformasi saat ini menjadi piranti yang penting (instrumental) yang dimanfaatkan oleh para pemuda di dalam lembaga-lembaga filantropi baik untuk penggalangan dana maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laskar Sedekah dan Yayasan Senyum Kita merupakan dua komunitas filantropi yang digerakkan oleh pemuda untuk mengekspresikan kepedulian sosial mereka. Dalam menjalankan program-programnya, kedua lembaga ini digerakkan oleh para pemuda Muslim dari beragam afiliasi keagamaan. Wacana keislaman yang berkembang di dalam lembaga filantropi ini di antaranya adalah melakukan couter terhadap pesatnya wacana Islam radikal di Indonesia dan semangat berdakwah (islamisasi) yang ditujukan kepada para penerima donasi.

REFERENSI

BUKU:

Alterman, Jon B., Shireen Hunter, and Ann L. Phillips, “The Idea and Practice of Philanthropy in The Muslim World” Washington, DC: USAID, 2005.

Aniq, Ahmad Fathan, *Zakat Discourse in Indonesia: Teachers’ Resistance to Zakat Regional Regulation in East Lombok*. Jakarta: Kementerian Keagamaan RI, 2012.

Dahlan, Abdul Aziz Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997.

Fauzia, Amelia. *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* Melbourne: *The University of Melbourne*, 2008.

²⁴ *Ibid.*



PEMUDA, PENDIDIKAN, DAN PERAN AKTIVIS KEPEMUDAAN DI PERBATASAN PULAU SEBATIK, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Choirul Fuadi¹ dan Naufal Fitryansyah²

¹*Pascasarjana Univeritas Negeri Yogyakarta Prodi Linguistik Terapan
Email: Choirulfuadi78@gmail.com*

²*Pascasarjana Univeritas Negeri Yogyakarta Prodi Manajemen Pendidikan
Email: Fy.naufal@gmail.com*

ABSTRAK

Perbatasan merupakan garda terdepan dari NKRI, sehingga perlu perhatian yang serius dari pemerintah. Perhatian tersebut dapat terimplementasi dalam berbagai hal, seperti pendidikan, sarana dan prasarana, serta kebudayaan yang ada. Dewasa ini, Pulau Sebatik, sebagai salah satu pulau terluar dan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, mengalami berbagai masalah sosial baik dalam pemuda, pendidikan dan multi budaya. Salah satu masalah yang dihadapi pemuda adalah bahaya narkoba dan degradasi moral. Dari segi pendidikan yakni kurangnya fasilitas pendidikan. Dari segi budaya, masyarakat Sebatik telah sangat mengenal istilah “garuda didadaku, ringgit didompetku” yakni bertransaksi menggunakan uang ringgit Malaysia namun berkebangsaan Indonesia, serta berhadapan langsung dengan budaya melayu malaysia. Artikel ini bertujuan untuk; 1) mendeskripsikan dan mengangkat permasalahan - permasalahan diperbatasan Pulau Sebatik dalam cakupan pemuda, pendidikan dan memberi solusi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, 2) Peran aktivis kepemudaan dalam hal pemuda, dan pendidikan. Artikel ini bersifat kualitatif deskriptif. Dalam pembahasa ditemukan berbagai permasalahan dipulau sebatik. Permasalahan yang ada di perbatasan Pulau Sebatik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Namun, perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah baik pejabat daerah dan pusat.

Kata Kunci : Pendidikan, Pemuda, Pulau Sebatik, Aktivis Kepemudaan.

A. PENDAHULUAN

Pulau Sebatik adalah pulau terdepan dan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pulau ini terdapat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan kabupaten tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Luas wilayah Pulau Sebatik ± 247,47 KM² dengan jumlah penduduk 47.709 jiwa berdasarkan database SIAK periode Juni 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar, Pulau Sebatik dinobatkan menjadi pulau terluar bersama 91 pulau lainnya. Berdasarkan peraturan ini, titik koordinat pulau terluar ini adalah 04°08'35" LU, 117°47'14" BT. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pulau Sebatik ditetapkan sebagai daerah terdepan NKRI. Wilayah Pulau Sebatik terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian Utara milik Kerajaan Malaysia,



sedangkan pada bagian selatan milik Republik Indonesia. Pada bagian utara wilayah Sebatik berbatasan dengan Negara Bagian Sabah (Malaysia), bagian timur berbatasan dengan laut Sulawesi, sedangkan pada bagian selatan dan barat berbatasan dengan Selat Sebatik.

Kecamatan Sebatik resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 dimana pada saat itu terdiri dari Desa Setabu, Desa Pancang, Desa Sungai Nyamuk, dan Desa Tanjung Karang. Semakin pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk Pulau Sebatik dan rencana pemerintah menjadikan pulau ini sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), maka pemerintah melakukan pemekaran desa dan kecamatan, sehingga wilayah Kecamatan Sebatik terbagi menjadi 19 Desa dan 5 Kecamatan, yakni Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah.

Kecamatan Sebatik terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Padaidi, Desa Sungai Manurung, Desa Tanjung Karang, dan Desa Balansiku. Ibu kota dari Kecamatan Sebatik adalah Desa Tanjung Karang. Kecamatan Sebatik Barat resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006. Wilayah Kecamatan Sebatik Barat terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Setabu, Desa Binalawan, Desa Liang Bunyu, dan Desa Bambang. Ibu kota dari Kecamatan Sebatik Barat adalah Desa Binalawan.

Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah resmi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011. Kecamatan Sebatik Timur terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Tanjung Aru, dan Desa Bukit Aru Indah. Ibukota dari Kecamatan Sebatik Timur adalah Desa Sungai Nyamuk. Kecamatan Sebatik Utara terdiri dari 3 Desa yaitu Desa Seberang, Desa Lapri, dan Desa Pancang. Ibu kota dari Kecamatan Sebatik Utara adalah Desa Pancang. Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Sungai Limau, Desa Maspul, Desa Aji Kuning, dan Desa Bukit Harapan. Ibu kota Kecamatan Sebatik Tengah adalah Desa Aji Kuning.

Pulau Sebatik akrab dengan sapaan “1 Pulau 2 Tuan” atau “Pulau Double Country” atau “Pulau Tapal Batas”. Sapaan tersebut sangat mendasar dikarenakan wilayah Pulau Sebatik yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian utara milik Kerajaan Malaysia, sedangkan bagian selatan milik Republik Indonesia. Pembagian wilayah ini berdasarkan pada hasil wilayah jajahan, dimana wilayah Sebatik Malaysia merupakan hasil jajahan Inggris sedangkan Sebatik Indonesia adalah wilayah hasil jajahan Belanda. Wilayah Pulau Sebatik meliputi perbatasan daratan, lautan, dan udara dengan negara Malaysia. Di Pulau Sebatik terdapat 18 patok perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia.

Menurut Bengen (Abubakar, 2006 : 19) permasalahan yang terjadi di pulau-pulau kecil perbatasan adalah kondisinya yang relatif terisolasi dan jauh dari pulau induknya, terbatasnya sarana dan prasarana perekonomian seperti, jalan, pelabuhan, pasar, listrik, lembaga keuangan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya rendah serta rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat kurangnya fasilitas pendidikan, tidak tersedianya media informasi dan komunikasi serta fasilitas kesehatan.

Sebagai daerah perbatasan, Pulau Sebatik dihadapkan dengan berbagai masalah pendidikan dan kepemudaan. Masalah pendidikan seperti minimnya sarana pendidikan, kurangnya tingkat kesejahteraan guru, dan sulitnya mendapatkan ases pendidikan. Sedangkan masalah kepemudaan adalah maraknya peredaran narkoba yang jelas mengancam dan merusak generasi bangsa di perbatasan Pulau Sebatik.



Menurut Ki Hajar Dewantara (2011 : 20), pendidikan adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Berbagai permasalahan pendidikan sedang terjadi Indonesia seperti permasalahan yang paling mencolok adalah pemerataan pendidikan. Permasalahan ini sudah sangat lama terjadi, sehingga terjadi ketimpangan antara pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di Pulau Kalimantan. Ketimpangan ini terjadi disebabkan pendistribusian guru yang tak merata, kurangnya sarana pendidikan, dan tingkat kesejahteraan guru yang masih rendah. Kemudian menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Dari permasalahan yang ada, harus dianalisa terlebih dahulu dan kemudian diberikan solusi dari masalah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan dan mengangkat permasalahan - permasalahan diperbatasan Pulau Sebatik dalam cakupan pemuda, pendidikan dan serta memberi solusi mengenai permasalahan-permasalahan tersebut, 2) Peran aktivis kepemudaan dalam hal pemuda dan pendidikan.

B. PEMBAHASAN

1. Permasalahan di Pulau Sebatik

a. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat dan suatu bangsa. Kekuasaan negara yang begitu besar mencakup segenap kehidupan masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik, maka tidak bisa dipungkiri bahwa negara juga mengatur kehidupan pendidikan. Negara juga berkepentingan terhadap lembaga pendidikan untuk digunakan sebagai agen dalam membangun watak dan kesadaran jiwa nasionalisme masyarakat perbatasan Pulau Sebatik. Pendidikan dewasa ini diselenggarakan semakin demokratis, semakin merata dan terbuka bagi setiap orang.

Pulau Sebatik biasa juga disebut sebagai “Kota Pendidikan Anak TKI”. Susahnya mendapatkan akses pendidikan di Malaysia membuat para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) memilih perbatasan Pulau Sebatik sebagai jalur untuk mendapatkan akses pendidikan bagi anak mereka. Konstitusi negara ini telah mengatur dalam Undang-undang Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, ayat (2) mengatakan bahwa setiap



warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di dalam undang-undang ini sudah cukup jelas diatur, bahwa setiap warga manusia memiliki hak atas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun masyarakat perbatasan Pulau Sebatik dan anak TKI dalam mengakses pendidikan masih memprihatikan karena kurangnya perhatian pemerintah.

Presiden Joko Widodo dalam program *nawacita* akan membangun dari daerah terdepan dan daerah pinggiran. *Tag line* kebijakan ini akan bias ketika kurang maksimalnya implementasi kebijakan yang salah satunya dikhususkan untuk perbatasan Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mengatasi berbagai persolan yang ada di daerah perbatasan Pulau Sebatik khususnya permasalahan sektor pendidikan, maka diperlukan campur tangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya campur tangan pemerintah pusat di daerah perbatasan ini adalah salah satu bentuk kerja nyata pemerintah pusat untuk mempertahankan wilayah Pulau Sebatik.

Kerja nyata yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya sektor pendidikan belum dirasakan secara signifikan warga perbatasan Pulau Sebatik. Kerja nyata pemerintah terhambat disebabkan kurang maksimalnya implementasi kebijakan pendidikan di perbatasan Pulau Sebatik, yakni kurangnya sosialisasi program pendidikan, kebijakan yang selalu berganti, banyaknya instansi yang mengatur daerah perbatasan, pengurusan birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit.

Fasilitas pendidikan di perbatasan Pulau Sebatik masih dikatakan tertinggal. Data dari BPS kabupaten Nunukan 2015 menyebutkan bahwa di Kecamatan Sebatik Barat, belum terdapat sekolah SMA sehingga siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di SMP mayoritas melanjutkan pendidikan di Kecamatan Sebatik dengan jarak tempuh yang jauh. Cara lainya yakni siswa memilih melanjutkan ke ibukota kabupaten dengan cara melintas laut ke Pulau Nunukan. Sedangkan siswa yang tidak melanjutkan sekolah memilih untuk menjadi TKI negara tetangga Malaysia, bebapa faktor penyebab siswa tidak melanjutkan sekolah karena faktor kemiskinan, tidak adanya sekolah SMA, kurangnya dorongan orang tua, dan mahalny biaya pendidikan.

Selain itu, kurangnya memadai sarana perpustakaan disekolah, seperti jumlah buku dan masih ada sekolah yang belum ada perpustakaanya. Padahal tujuan dari adanya perpustakaan adalah menumbuhkan budaya dan minat membaca. Oleh karena itu, diperlukan adanya penambahan sarana perpustakaan yang memadai.

Salah satu program yang dicanamkan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh di era Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono adalah mendirikan Akademi Komunitas di perbatasan Pulau Sebatik. Program ini adalah salah bentuk untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK anak perbatasan dan anak TKI agar mampu bersaing didunia kerja, namun program ini tidak terealisasi dikarenakan adanya pergantian pengambilan kebijakan di republik ini.

Salah satu program unggulan dari Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum dirasakan warga perbatasan Pulau Sebatik dan anak TKI, bahkan warga perbatasan tidak pernah mendengar program ini. Selain itu, Presiden Joko Widodo dibawah Kementerian Perikanan dan Kelautan mempunyai program membangun 5 perguruan tinggi diwilayah terluar dan terdepan NKRI salah satunya di perbatasan Pulau Sebatik. Perguruan tinggi yang akan dibangun di Pulau Sebatik akan diberi nama Politeknik Perikanan Negeri Sebatik, namun program ini belum ada tanda-tanda untuk direalisasikan.



b. Pemuda dan Peran Aktivis Kepemudaan

Menurut Nurcahyani (2008 : 3) mengatakan bahwa pada umumnya wilayah perbatasan selalu menjadi basis kegiatan perdagangan antar negara baik secara legal maupun illegal. Secara sadar atau tidak, daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sangat rentan terkontaminasi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Telah disebutkan bahwa pulau sebatik terdiri atas berbagai macam ras suku bangsa. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga Pulau Sebatik masih mengandalkan pasokan dari Kota Tawau yang berada di Malaysia.

Dalam hal ini, mereka menyebut istilah Garuda didadaku, Ringgit didompetku. Ringgit adalah nama mata uang negara Malaysia, mata uang ini sangat populer di kalangan dan digunakan sebagai transaksi jual beli warga perbatasan Pulau Sebatik. Bahkan Kehidupan warga perbatasan ini sangat bergantung dengan Kota Tawau (Sabah, Malaysia), karena hampir semua kebutuhan pokok warga perbatasan disuplai dari Kota Tawau Malaysia. Ketergantungan hidup warga perbatasan Pulau Sebatik tak dapat lagi dihindari. Hasil bumi warga perbatasan Pulau Sebatik hampir semuanya di jual ke Kota Tawau Malaysia seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil laut, dan sebagainya. Ironinya, warga Malaysia membeli hasil bumi ini dengan harga yang sangat murah.

Kuatnya ketergantungan ekonomi warga perbatasan Pulau Sebatik terhadap Kota Tawau Malaysia menyebabkan semakin kuatnya dominasi ringgit terhadap rupiah. Miliaran rupiah uang warga perbatasan Pulau Sebatik beredar di Kota Tawau Malaysia, minimnya infrastruktur dalam menjalankan roda perekonomian dan kurangnya perhatian pemerintah adalah faktor utama warga perbatasan ini lebih memilih membelajakan uangnya ke luar negeri. Sebagai bahan perbandingan, Kerajaan Malaysia sudah sejak lama mendesain Kota Tawau sebagai magnet ekonomi untuk warga perbatasan Pulau Sebatik. Kerajaan Malaysia memberikan status otonomi kepada Kota Tawau, sehingga tidak heran jika Kota Tawau Malaysia memiliki fasilitas penunjang ekonomi seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, pasar, dan listrik yang tidak pernah mati.

Selain itu, bayangan lain yang dihadapi pemuda di Pulau sebatik adalah Bahaya Narkoba. Narkoba menjadi permasalahan utama di perbatasan Pulau Sebatik. Pasca Malaysia melakukan penutupan pelabuhan jalur Sebatik – Tawau Malaysia pada tanggal 1 Januari 2013, Pulau Sebatik menjadi gerbang utama masuknya narkoba dari luar negeri untuk diedarkan kesejumlah wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa dengan menggunakan pelabuhan tikus. Saat ini, banyak generasi Sebatik baik dari pemuda maupun siswa yang menjadi target pengedar, pengguna narkoba dan bahkan sudah ada yang masuk penjara. Pulau Sebatik juga digunakan teroris sebagai jalur memasukan bahan baku untuk membuat senjata dan bom di Indonesia.

Melihat permasalahan tersebut, beberapa organisasi kepemudaan diperbatasan Pulau Sebatik seperti KNPI Sebatik Barat, Forum Mahasiswa Sebatik (FORMAS), Himpunan Mahasiswa Sebatik (HIPMAS), Forum Bela Negara (FBN) Sebatik membuat program kerja. Program kerja kerja didesain dengan melibatkan pelajar dan masyarakat seperti KNPI Sebatik Barat mengadakan jelajah tapal batas, kegiatan jelajah tapal patas ini bertujuan untuk memperjelas dan mengajak pelajar dan masyarakat untuk mengenal patok perbatasan yang memisahkan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, pada tanggal 28 Nopember 2016 KNPI Sebatik barat juga mengadakan sumpah di patok 15 bersama pemuda, pelajar, dan masyarakat pulau sebatik.



Forum Mahasiswa Sebatik (FORMAS) dan Himpunan Mahasiswa Sebatik (HIPMAS) adalah organisasi kemahasiswaan yang fokus pada pendidikan dengan cara mengajak generasi Sebatik untuk melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi dan aktif mengadvokasi pelajar Sebatik. Beberapa bentuk program kerja seperti mengadakan seminar motivasi, kompotisi karya ilmiah, kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sebatik, dan sosialisasi kampus. Forum kemahasiswaan ini juga aktif memperkenalkan Pulau Sebatik kepada lembaga lain, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.

Pemuda Sebatik yang bergabung dengan Forum Bela Negara (FBN) Sebatik aktif dimasyarakat dengan mengadakan kegiatan seperti tanam pohon dipatok perbatasan Indonesia-Malaysia, mengadakan pengkajian batas wilayah perbatasan, dan bazar cinta rupiah. Sedangkan pemuda Sebatik yang bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti LSM Ganas yang berkomitmen mengawal pemerintahan dan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang tak pro rakyat. LSM Ganas telah mengkritisi kebijakan pemerintahan tak mengganti anggota DPRD dapil Sebatik yang tersangkut kasus korupsi.

2. Solusi

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian integral bagi bangsa Indonesia, sehingga membutuhkan strategis untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia seperti mendorong pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sebatik, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

a. Pendidikan

- Pemerataan pendidikan.
- Membuat kota pendidikan. Banyak anak TKI yang menuntut ilmu diperbatasan Pulau Sebatik menjadi potensi untuk meningkatkan Sumbe daya manusia Indonesia. Dengan ditetapkan Pulau Sebatik sebagai kota pendidikan maka akan membuat sentral pendidikan baru di Indonesia timur sehingga akses pendidikan untuk anak TKi lebih mudah dijangkau, apalagi saat ini sulitnya menjadapatkan akses pendidikan di negara Malaysia.
- Peningkatan Fasilitas pendidikan
- Pemberian beasiswa
- Mendirikan perguruan tinggi
- Peningkatan kesejahteraan Guru
- Peningkatan Kualitas kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan.
- Pengadaan sarana perpustakaan.

b. Kepemudaan dan Aktivis Kepemudaan

- Peran pemerintah dalam pengelolaan pemuda dan lembaga kepemudaan.
- Dukungan baik moril dan materil dari Pemerintah pusat dan daerah.
- Penguatan organisasi kepemudaan sebagai basis perkumpulan remaja.
- Membuat studi banding keluar untuk kepemudaan dan aktivis kepemudaan.



C. KESIMPULAN

Permasalahan yang ada di perbatasan Pulau Sebatik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Namun, perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah baik pejabat daerah dan pusat.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. Diakses pada 29 Oktober 2016 dari <https://nunukankab.bps.go.id>
- Dewantara, Ki Hajar. 2011. Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan UST
- Mustafa, A. 2006. Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan : Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik. Jakarta : Buku Kompas
- Nurchayani, L. Ade, S., Ini C. Sasi. 2008. Identitas Suku Di Perbatasan (Tinjauan Sejarah dan Sosial Budaya) Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak : Pontianak
- Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat
- Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara



PENDIDIKAN PERDAMAIAN UNTUK ORANG TUA DAN ANAK DALAM PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL

Laelatul Badriyah¹

*¹Young Interfaith Peacemaker Community (YIPC)
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Email: badralayla@gmail.com*

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan, diskriminasi antar suku, dan kasus intoleransi agama adalah serentetan kasus yang dialami Indonesia. Indonesia memiliki tugas besar untuk meminimalisir kasus-kasus tersebut. Tidak jarang, kasus tersebut berawal dari sempitnya pemahaman tentang keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga oleh semua lapisan masyarakat. Pendidikan sebagai pondasi utama bagi negara memiliki peran dalam membangun perdamaian di negara berbineka. Pendidikan perdamaian kepada orang tua dan anak menjadi satu paket usaha yang harus digalakan dan tidak bisa dipisahkan. Pendidikan non formal diberikan kepada orang tua untuk dapat memahami makna perdamaian dan usaha untuk menciptakan perdamaian. Melalui pendidikan formal, pendidikan perdamaian dapat diajarkan kepada anak-anak. Harapannya, institusi pendidikan dapat bekerja sama dengan orang tua untuk membangun generasi damai.

Kata Kunci: Pendidikan, Perdamaian

A. PENDAHULUAN

Semua orang tahu Indonesia memiliki keberagaman etnik, budaya, bahasa, dan agama yang kaya raya. Satu sisi, keberagaman merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan dirayakan. Namun di sisi lain, keberagaman dapat menjadi penyebab sebuah konflik. Ini satu tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Mungkin, kita harus berbahagia dengan hasil penelitian dari Setara Institute yang mengeluarkan indeks kota toleran di Indonesia pada 2015. Ada 10 kota toleran yang terdeteksi oleh Setara Institute yaitu Pematang Siantar, Salatagia, Singkawang, Manado, Tual, Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak dan Palangkaraya.¹ Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah Indonesia negara yang sangat luas, terdiri dari pelbagai pulau. Tentu saja angka 10 bukan angka ideal untuk melihat indeks toleransi di Indonesia. Bagaimana dengan kota lain yang ada di Indonesia?

Laporan KBB 2014 yang diterbitkan oleh The Wahid Institute menyajikan potret suram kehidupan beragama di Indonesia. Tercatat 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara, sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non negara.² Bentuk pelanggaran yang dilakukan berupa tindakan menghambat/melarang atau menyegel rumah ibadah 17 peristiwa, tindakan kriminalisasi atas

¹ <http://setara-institute.org/en/english-tolerant-city-index-2015/> diakses pada 28 Oktober 2017

² Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 “Utang” Warisan Pemerintah Baru, Jakarta: The Wahid Institute, 2014, hlm. 21



dasar agama sebanyak 14 peristiwa, serta melarang atau menghentikan kegiatan atau keagamaan masing-masing 12 peristiwa.³

Selain permasalahan di atas, di bidang pendidikan, marak terjadi kasus kekerasan dan *bullying*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejak tahun 2011 hingga Agustus 2014 terdapat sejumlah 369 pengaduan masyarakat untuk kasus *bullying*. Jumlah tersebut mencapai 25% dari seluruh pengaduan di bidang pendidikan yang mencapai 1480 kasus.⁴ Pada tahun 2015, korban kekerasan saat MOS, *bullying* sebanyak 127 siswa. Sedangkan anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah sebanyak 64 siswa. Adapun korban tawuran sebanyak 71 siswa, sementara anak yang menjadi pelaku tawuran 88 siswa.⁵

Berdasarkan data di atas, Indonesia sedang mengalami krisis kekerasan di kalangan masyarakat dan generasi muda. Angka di atas bukan angka kecil. Tingkat radikalisme masyarakat dan anak-anak tinggi. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar tidak berjalan dengan semestinya, Hak sebagian masyarakat Indonesia direnggut oleh oknum-oknum yang tidak toleran. Permasalahan itu terjadi karena kurangnya pemahaman untuk hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan. Kurangnya pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan agamanya dan menjalankan ritualnya di negara yang berasaskan Pancasila ini.

Tentu saja, permasalahan ini harus segera mendapatkan solusinya. Kita tidak mau generasi bangsa kita mengalami hal yang sama dengan sekarang. Kita – yang peduli pada masa depan generasi bangsa – harus saling membahu untuk menyelamatkan kondisi ini. Dengan cara apa? Mengembalikan fungsi pendidikan sebagai tempat yang nyaman dan aman adalah hal yang bisa dilakukan. Karena pendidikan merupakan kunci sukses dan ampuh dalam membentuk manusia yang berperadaban dan bermartabat tinggi.⁶

Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan akan memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk dapat hidup secara manusiawi. Melalui pendidikan manusia bisa belajar tentang nilai-nilai universal seperti menghormati orang lain, jujur, mengasihi sesama dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan damai di lembaga pendidikan formal atau pun non formal menjadi penting untuk diterapkan. Karena di sini lah kesadaran dan pentingnya hidup damai akan diberikan, diajarkan, dan diimplementasikan.

Dalam pandangan penulis, pendidikan perdamaian tidak hanya cukup diberikan kepada anak-anak saja. Ada orang tua yang harus menerima tentang nilai-nilai ini.⁷ sehingga alasan dipilihnya orang tua khususnya Ibu dan anak-anak dalam penelitian ini dikarenakan beberapa pertimbangan. Pertama, orang tua adalah pemberi ijin pertama untuk hal-hal yang

³ *Ibid*, hlm 22

⁴ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/> diakses pada 28 Oktober 2016.

⁵ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita/> diakses pada 28 Oktober 2017

⁶ Mulyono Daniprawiro, 2009, Opini: Mendorong Terciptanya Pendidikan Damai, Gemari.

⁷ Bukan maksud penulis mengaggap bahwa orang tua tidak mengetahui nilai-nilai perdamaian seperti toleransi, menghormati orang yang berbeda suku atau agama, namun dengan kondisi masyarakat saat ini, yang cenderung reaktif terhadap satu fenomena yang terjadi, akibat cepatnya arus informasi di media sosial yang berkembang, pemahaman pendidikan perdamaian penting juga untuk diberikan kepada orang tua. Agar orang tua tidak terjebak pada justifikasi terhadap satu hal.



dapat dipelajari oleh anaknya.⁸ Kedua, situasi damai harus dimulai dari rumah, sehingga orang tua memiliki peran menciptakan suasana damai di rumah. Ketiga, orang tua adalah mitra guru yang mampu mendorong dan mengembangkan aktualisasi atau pelaksanaan budaya damai tanpa kekerasan.⁹ Keempat, anak-anak sebagai generasi penurus bangsa harus diberikan pemahaman pendidikan perdamaian sejak kecil. Agar tidak terjadi kembali kasus-kasus kekerasan pada teman sebaya atau lainnya.

Pendidikan perdamaian yang disosialisasikan kepada orang tua dan diajarkan kepada anak-anak merupakan salah satu usaha nyata untuk mendukung program PBB dan UNICEF. Kendati banyak literature yang memberikan pendidikan perdamaian kepada anak-anak korban konflik, dalam tulisan ini, tidak dikhususkan kepada anak-anak korban konflik melainkan kepada anak-anak non korban konflik. Karena pendidikan perdamaian dibutuhkan untuk aspek yang lebih luas.

B. PENDIDIKAN PERDAMAIAN

Dalam pelbagai literature pendidikan perdamaian disebut pendidikan damai. Dengan tidak bermaksud mengurangi makna, istilah yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendidikan perdamaian. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan sebagai sarana untuk memberikan tuntunan hidup kepada peserta didik. Lembaga pendidikan sebagai salah satu tempat untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik. Oleh karena itu,

⁸ Dengan tidak bermaksud mengeneralisir, berdasarkan pengalaman penulis, penilaian orang tua berpengaruh pada materi yang diberikan kepada siswa. Penulis tergabung dengan komunitas Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia (YIPC). YIPC adalah satu komunitas di Yogyakarta yang memiliki fokus pada dialog lintas iman dan pendidikan perdamaian kepada pemuda. Selain memberikan pendidikan perdamaian kepada pemuda sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjebak pada kelompok ekstrimisme, YIPC mulai berfikir untuk memberikan pendidikan perdamaian kepada anak-anak melalui PAUD, Sekolah Minggu, dan Taman Pendidikan Anak (TPA) sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam prosesnya, untuk memberikan pendidikan perdamaian kepada tiga lembaga pendidikan tersebut sangatlah sulit. YIPC kerap kali mengalami penolakan. Ketika YIPC berhasil mengajar ke salah satu TPA dan PAUD di Yogyakarta, belum genap satu bulan, YIPC kembali mengalami penolakan sehingga pembelajaran tersebut terpaksa harus dihentikan untuk sementara. Sebenarnya – walaupun penilaian ini subyektif – anak-anak terlihat senang dan antusias untuk mengikuti pembelajaran melalui metode berdongeng yang dibawakan oleh YIPC. Penolakan tersebut kerap kali datang dari orang tua dan guru-guru. Orang tua menilai materi yang diberikan kepada anak-anak PAUD dan TPA bermuatan Islam liberal. Padahal, kami hanya menceritakan satu kisah tentang keberagaman Indonesia yang kaya raya melalui buku *peace education* dari Peace Generation. Kami mengajarkan bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan agama. Dalam kisah tersebut satu suku dengan suku yang lain, satu agama dengan agama yang lain dapat hidup berdampingan dengan baik. Kami juga mengajarkan di mana letak daerah yang dikisahkan melalui peta Indonesia. Di manakah paham liberal yang kami ajarkan? Materi yang kami ajarkan tidaklah berbeda dengan mata pelajaran PPKN hanya berbeda kemasan saja. Kami mengajar melalui sebuah kisah interaktif, sementara PPKN berupa teori-teori yang harus dihafal.

⁹ Buku *peace education*.

¹⁰ Ki Hajar Dewantara, *Bgian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977, hlm 20



pengetahuan dan pemahaman yang tepat tentang suatu hal harus diberikan dengan tepat. Contoh, memberikan pemahaman tentang Indonesia yang multiethnic dan multireligion, bagaimana kita bisa berdampingan hidup dengan mereka.

Jika kita menggunakan teori aliran kognitif yang menyebutkan bahwa anak diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, akan tetapi semua tulisan itu suram atau tidak jelas. Menurut aliran ini ditetapkan, bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram itu dan yang berisi baik, agar kelak nampak budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar tidak menjadi tebal, bahkan semakin suram.¹¹ Ini lah tugas pendidik saat ini, memperjelas tulisan-tulisan suram yang dimiliki peserta didik dengan hal-hal baik. Memperjelas tulisan ini harus dilakukan sedini mungkin, agar siswa belum memiliki celah untuk memperjelas tulisan yang buruk.

Crow and Crow mendefinisikan pendidikan sebagai proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.¹² Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan berfungsi memberikan pengetahuan, keterampilan yang akan membantu kehidupan sosial peserta didik sesuai dengan lingkungannya. Lebih jauh, Choirul Mahfud memaknai definisi tersebut sebagai usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan tertentu yang dikehendaki masyarakat.¹³ Dalam hal ini, pendidikan memiliki tujuan menciptakan generasi damai untuk penerus bangsa. Suasana damai di masyarakat pasti dikehendaki oleh semua masyarakat yang ada di bumi ini.

Berdasarkan piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Konstitusi UNESCO, dan pernyataan umum hak asasi manusia 1974 menyatakan bahwa pendidikan akan diarahkan kepada pengembangan pribadi manusia dan untuk memperkuat rasa hormat kepada hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar. Perlunya kemajuan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, ras, atau kelompok agama, dan akan memajukan aktivitas PBB untuk memelihara perdamaian.¹⁴

Piagam PBB dan UNESCO lebih rinci lagi mendefinisikan tentang pendidikan. Pendidikan diarahkan untuk kemanusiaan. Sehingga tujuan akhir dari pendidikan adalah lahirnya manusia-manusia yang memahami hak sebagai manusia di muka bumi yang meliputi hak hidup, hak memeluk agama, hak menentukan pilihan, hak berkumpul, dan lain sebagainya. Agar tidak ada manusia yang merenggut hak orang lain dengan aksi intoleransi.

UNESCO sebagai konstitusi yang fokus pada pendidikan di negara-negara, ilmu pengetahuan, dan budaya organisasi telah menganggap penting pendidikan perdamaian. Hal itu ada dalam pernyataan UNSECO yang berbunyi “UNESCO *recommendation concerning education for international, understanding, cooperation, and peace and education relating to human right and fundamental freedom.*” Wujud dari pernyataan UNESCO tersebut berlanjut dalam bentuk konstitusi yang berisi perintah untuk membangun budaya perdamaian dalam setiap pemikiran orang yang hidup di dunia. Di sini juga disebutkan tentang budaya perdamaian menurut UNESCO 1992, yaitu *value, attitude, behavior and way of life based on*

¹¹ *Ibid*, hlm 23

¹² Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 34.

¹³ *Ibid*, hlm 34

¹⁴ M Nurul Ikhsa Saleh, Peace Education: Konsep Sejarah, Konsep & Relevansinya dengan Pendidikan Islam, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012, hlm 39.

*non violence and respect for fundamental right and freedoms, on understanding, tolerance and solidarity, on the sharing, and free flow of information and the full participation and empowerment of women.*¹⁵ Maksudnya adalah budaya perdamaian merupakan bagian dari nilai, sikap, prilaku, dan cara hidup yang didasarkan pada penolakan kekerasan dan hormat terhadap hak asasi manusia serta kebebasan, pemahaman, toleransi dan solidaritas, saling berbagi, dan bebas memperoleh informasi dan penuh partisipasi serta ada kesempatan bagi wanita.

Adapu fokus utama pendidikan perdamaian adalah mengubah prilaku. Sesuai dengan definisi UNICEF untuk peace education yaitu:

“Peace education in UNICEF refers to the process of promoting the knowledge, skills, attitudes and values needed to bring about behavior changes that will enable children, youth and adults to prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve conflict peacefully; and to create the conditions conducive to peace, whether at an intrapersonal, interpersonal, intergroup, national or international level.”

Definisi tersebut menyatakan bahwa pendidikan perdamaian merupakan proses pemajuan pengetahuan, kecakapan-kecakapan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang mana akan memungkinkan anak-anak, remaja, dan dewasa untuk: (i) mencegah konflik dan kekerasan, baik tindakan maupun secara struktural; (ii) memecahkan konflik secara damai (to resolve conflict peacefully); dan (iii) menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian apakah pada level diri individu, antarindividu, dalam kelompok, national atau internasional.¹⁶

Contoh perubahan tingkah laku anak-anak yang telah mendapatkan pendidikan perdamaian

Sebelum mendapatkan nilai	Setelah mendapatkan nilai
Tidak mau berinteraksi dengan orang yang berbeda agama, suku, budaya, dan bahasa	Ada interaksi dengan orang yang berbeda agama, suku, budaya, dan bahasa
Memiliki prasangka terhadap teman yang berbeda	Hilangnya prasangka terhadap teman yang berbeda
Memiliki sikap intoleransi (Aktif/Pasif)	Memiliki sikap toleransi aktif
Tidak mau saling menolong dengan teman yang berbeda	Saling menolong dengan teman yang berbeda
Tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain	Memiliki kepercayaan terhadap orang lain

C. PENDIDIKAN PERDAMAIAN UNTUK ANAK

Mahatma Gandhi mengatakan jika kita ingin menciptakan perdamaian di dunia, maka kita harus memulainya dari anak-anak. Penulis sepakat dengan Gandhi karena anak-anak adalah aset bangsa yang paling berharga. Kepada generasi bangsa itulah kita menyanjarkan

¹⁵ *Ibid*, hlm 39

¹⁶ Susah Fountain, Peace Education in UNICEF, New York: United Nations Children’s Fund, 1999, hlm 9.

masa depan bangsa yang penuh damai. Untuk dapat mewujudkan itu, kita harus mendidik kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosionalnya sejak dini. Anak-anak harus diajarkan bagaimana menciptakan perdamaian di sekelilingnya.

Cara khusus memberikan pendidikan perdamaian kepada anak-anak yaitu dengan cara memasukkan dalam kurikulum pengajaran yang mencegah pada toleransi dan tanpa kekerasan. Ada enam prinsip yang harus diperhatikan jika pendidikan perdamaian akan dikembangkan di tingkat pendidikan: mengacu pada kerja sama, peduli dalam berkomunikasi tanpa membeda-bedakan, mengerti perasaan atau mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, menghargai adanya keberagaman, bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan penuh pertimbangan, dan apabila terjadi konflik selalu diputuskan melalui pemecahan secara bersama-sama.¹⁷

Untuk pengembangan materi pendidikan perdamaian yang dinyatakan oleh UNESCO, UNICEF, dan pendapat para ahli harus mengarahkan pada tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan skill. Menurut UNESCO Aspek kognitif meliputi kesadaran ekologi, penghormatan diri, sikap toleransi, hormat terhadap martabat manusia dan perbedaan, saling memahami antarbudaya, kepekaan jenis kelamin, sikap peduli dan empati, sikap rekonsiliasi, dan tanpa kekerasan, tanggung jawab sosial, solidaritas, resolusi berwawasan global. Aspek skill meliputi komunikasi, kegiatan reflektif dan pendengaran aktif, kerja sama, empati, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah, apresiasi nilai artistic dan estetika, kemampuan menengahi diri penuh imajinasi, kepemimpinan ideal dan memiliki visi.¹⁸

Adapun materi pendidikan perdamaian menurut UNICEF bisa dilihat dalam tabel berikut ini.

Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Kesadaran kebutuhan diri	Komunikasi	Sikap menghormati
Kesadaran diri memahami secara alami tentang konflik dan perdamaian	Kemampuan untuk bekerja sama	Tanggap persoalan
Kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik	Kemampuan untuk berpikir kritis	Sikap toleransi
Tidak ada kekerasan	Kemampuan untuk memikirkan secara kritis tentang prasangka	Menerima orang lain apa adanya
Resolusi konflik	Kemampuan untuk berhubungan terus menerus	Menghormati perbedaan
Analisis membangun perdamaian dan pemecahan konflik	Menghadapi emosi dengan kesabaran melalui pemecahan masalah	Menghormati hak dan tanggung jawab anak-anak dan orang tua
Proses penyelesaian sengketa dengan mediasi	Kemampuan untuk menghasilkan solusi sebagai alternatif	Kesadaran perbedaan gender

¹⁷ M Nurul Ikhsa Saleh, *Peace Education: Konsep Sejarah, Konsep & Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012, hlm 70.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 71-72

Memahami hak dan tanggung jawab	Resolusi konflik yang bersifat membangun	Pengenalan karakteristik orang lain
Kesadaran budaya sebagai warisan budaya	Pemecahan konflik	Empati
Pengenalan terhadap prasangka	Menciptakan perdamaian	Rekonsiliasi
	Adaptasi	Solidaritas sosial
		Tanggung jawab sosial sosial

Berdasarkan tabel di atas, ada buku yang *recommended* digunakan oleh lembaga pendidikan PAUD, TPA, Sekolah Minggu, dan lain-lain. Buku *peace generation kids* adalah salah satu buku yang bisa rujuk untuk mengajarkan nilai-nilai perdamaian. Beberapa judul buku tersebut adalah *Beda Selera Tetap Saudara*, *Juara di Hari Merdeka*, *Pahlawan di Hari Lebaran*, *Sahabat dari Balik Tembok*, *Teman Sejati senang Berbagi*, *Tetangga Baru Beda Suku*, *Sahabat yang dapat dipercaya*, *Puasa di Minahasa*, *ssst Jangan Berisik*, *Bintang untuk Persahabatan*.

Buku-buku tersebut mengandung nilai-nilai menerima diri sendiri, memahami prasangka, menghormati perbedaan agama, menghormati perbedaan jenis kelamin, menghormati perbedaan status ekonomi, memahami perbedaan kelompok diantara geng, memahami keragaman, memahami konflik, memolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan memberi maaf.¹⁹

Pembelajaran dari buku tersebut bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, *hidden* kurikulum, atau menjadi bagian dari ekstrakurikuler. Jika dimasukkan ke dalam kurikulum, pendidikan perdamaian menjadi satu bagian mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ini akan memudahkan pihak sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai perdamaian. Jika dimasukkan ke dalam *hidden* kurikulum, nilai-nilai pendidikan perdamaian dimasukkan pada mata pelajaran. Di sini, nilai-nilai pendidikan perdamaian disampaikan satu paket dalam mata pelajaran tertentu dengan menyesuaikan materi pelajarannya. Nilai pendidikan perdamaian bisa juga dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Namun, ini berarti tidak semua siswa akan mendapatkan nilai-nilai ini.

Jika buku-buku ini diajarkan kepada siswa-siswa PAUD, TPA, dan Sekolah Minggu sebaiknya buku ini diajarkan secara langsung. Berdasarkan pengalaman penulis, anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran ini karena kita tidak hanya bercerita tapi ada aktivitas yang mendukung kecerdasan kognitif, motorik, dan emosional. Buku ini juga dikemas dengan pelbagai permainan.

Selain mengajarkan perdamaian melalui buku, anak-anak bisa diajak untuk *live in* dengan orang-orang yang berbeda. Contoh kampung A mayoritas beragama Kristen, kampung B mayoritas beragama Islam. Bisa diagendakan program *live in* anak-anak dan orang tua di kampung A ke kampung B, begitu pun sebaliknya. Metode ini sesuai dengan konsep pembelajaran dari UNICEF *learning to live together* bersama orang tua. Orang tua bisa interaksi dengan orang tua yang lain, dan anaknya pun bisa berinteraksi.

¹⁹ Leanne Fooks, *Buku Panduan Untuk Guru, Peace Generation*, hlm 15



D. PENDIDIKAN PERDAMAIAN UNTUK ORANG TUA

1. Alternatif Pertama Pendidikan Perdamaian untuk Orang Tua

Pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan perdamaian kepada anak membuat penulis berpikir untuk memberikan beberapa alternative yang bisa diberikan kepada orang tua. Tidak bisa dipungkiri, pandangan tokoh masyarakat setempat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Tidak jarang, tokoh masyarakat mengajarkan untuk bersikap intoleran kepada masyarakat. Sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan peta kepemimpinan masyarakat yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap isu perdamaian dan multikulturalisme. Melalui pemimpin masyarakat ini, nilai perdamaian dapat disampaikan dan diajarkan kepada orang tua. Salah satu media untuk menyampaikan ini adalah pengajian di desa-desa, sosialisasi kepada masyarakat yang diinsiasi oleh pemerintah setempat.

2. Alternatif Kedua Pendidikan Perdamaian untuk Orang Tua

Konsep *long life education* berdasarkan hadis carilah ilmu sejak dari buaian sampai ke liang lahad harus diterapkan di sini. Karena orang tua akan diajak untuk belajar hidup bersama dengan masyarakat yang berbeda dengannya. Konsep ini dalam rekomendasi pendidikan UNESCO disebut dengan *learning to live together*.

3. Alternatif Ketiga Pendidikan Perdamaian untuk Orang Tua

Nobar (nonton bareng) dan diskusi film adalah cara yang bisa dilakukan. Orang tua, khususnya Ibu-Ibu senang berkumpul dengan Ibu-Ibu yang lain dalam moment-moment tertentu seperti arisan. Dalam moment ini, kita bisa menyisipkan agenda untuk menonton film bersama. Menonton satu film yang bermuatan kebhinekaan, hidup rukun bersama, dan rekonsiliasi konflik bisa disajikan kepada para orang tua. Salah satu contoh film yaitu *Where do We Go now*. Satu film yang berbicara tentang bagaimana perempuan merekonsiliasi konflik yang terjadi dan meredam konflik yang terjadi di lingkungannya.

E. KESIMPULAN

Pendidikan menjadi alternative utama untung mengajarkan nilai-nilai perdamaian kepada anak-anak dan orang tua. Karena awal mula sebuah peradaban adalah pendidikan. Jika kita ingin membangun sebuah peradaban yang damai, santun, dan saling menghormati maka kita harus memulainya dari anak-anak melalui pendidikan. Pendidikan perdamaian ini bisa disampaikan dalam pelbagai cara. Di bidang pendidikan, kita bisa memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah, memasukkan ke dalam hidden kurikulum, masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, *live in together* dan lainnya. Sementara untuk orang tua, bisa dilakukan dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pengajaran oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Memanfaatkan moment-moment orang tua saat berinteraksi dengan tetangga untuk menonton film bersama, berdiskusi, dan belajar sehingga timbul kesadaran bahwa damai harus dimulai dari rumah, dan orang tua punya peran penting dalam hal ini. *live in together* menjadi salah satu alternative yang bisa dilakukan bersama oleh anak-anak dan orang tua.



REFERENSI

M Nurul Ikhsa Saleh, 2012, *Peace Education: Konsep Sejarah, Konsep & Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media.

Ki Hajar Dewantara, 1977, *Bgian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Choirul Mahfud, 2009, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Eddy Aqdhijaya dkk, 2016, *Pendidikan Interreligious non-Formal*, CDCC, KAICID

Zainal Abidin Bagir dkk, 2013, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*, Yogyakarta: CRCS UGM

Susah Fountain, 1999, *Peace Education in UNICEF*, New York: United Nations Children's Fund

Mulyono Daniprawiro, 2009, *Opini: Mendorong Terciptanya Pendidikan Damai, Gemari*.

Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 "Utang" Warisan Pemerintah Baru, 2014, Jakarta: The Wahid Institute

Leanne Fooks, *Buku Panduan Untuk Guru, Peace Generation Bandung*

<http://setara-institute.org/en/english-tolerant-city-index-2015/> diakses pada 28 Oktober 2017

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/> diakses pada 28 Oktober 2016.

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita/> diakses pada 28 Oktober 2017



PEMUDA DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Muhammad Anshori¹

¹Pascasarjana Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

Email: anshori92@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang istilah yang digunakan dalam al-Qur'an dan hadis terkait dengan pemuda. Masalah pemuda memang menarik untuk dikaji karena mereka memiliki peran penting dalam membangun masyarakat, negara, dan peradaban. Peran pemuda sangat diharapkan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang, tidak ada yang mengingkari hal ini karena sudah jelas. Tulisan ini tidak membahas masalah pemuda secara umum, tetapi hanya terfokus pada kata yang terkait dengannya. Dalam al-Qur'an ada dua kata yang digunakan, yaitu *fatā* dan *fityah*, baik dalam bentuk mufrad ataupun tašniyah. Kedua kata ini ditujukan kepada tokoh-tokoh baik, seperti Nabi Ibrahim, murid Nabi Musa, para penghuni goa (*aṣḥāb al-kaḥfi*), dan Nabi Yusuf. Sedangkan kata pemuda yang digunakan dalam hadis adalah *syāb* dan *syabāb*. Konteks penggunaan kedua kata ini berbeda-beda, termasuk juga dalam kajian alam akhirat, seperti pemuda yang akan dinaungi pada hari akhirat kelak. Dari segi kritik sanad dan matan hadis, ditemukan ada satu hadis bermasalah yaitu hadis terkait dengan nikah pemuda. Masalah nikah memang bukan terkait halal-haram tetapi karena hadis itu berasal dari Nabi maka perlu diteliti. Kritik sanad dan matan hadis memang hal yang urgen dalam kajian hadis, baik dari masa lalu ataupun masa sekarang.

A. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang selalu menarik untuk dikaji adalah tentang pemuda. Pemuda merupakan aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya supaya bisa meneruskan perjuangan bapak bangsa. Tidak salah jika ada pepatah mengatakan bahwa *syubbān al-yaum rijāl al-gadd* (pemuda hari ini merupakan pemimpin hari esok). Dalam konteks Indonesia untuk mengembangkan bakat dan potensi pemuda dalam berbagai bidang maka dibentuklah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah atau negara sangat dituntut untuk memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjaga keutuhan bangsa. Salah satu SDM yang menjadi prioritas adalah kaum muda yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Dalam Islam pemuda dituntut untuk aktif dalam membangun peradaban dunia untuk menjaga keseimbangan kehidupan di bumi.

Dalam tulisan ini akan dikaji tentang konsep pemuda dalam al-Qur'an dan hadis, dengan fokus pada term *fatā*, *fityah*, *syabāb*, dan *syāb*. Keempat kata tersebut biasa diterjemahkan dengan pemuda yang memang lazim digunakan dalam bahasa Arab-Indonesia. Bisa dikatakan bahwa fokus tulisan ini hanya untuk melihat makna dan penggunaan kata-kata tersebut al-Qur'an dan hadis. Kajian al-Qur'an dan hadis dari hari ke hari memang menarik, lebih-lebih terhadap makna-makna atau yang sering disebut dengan *ma'ānī al-qur'ān* dan *ma'ānī al-ḥadīs*.¹ Tidak hanya kaum Muslim (*insiders*) saja yang

¹ Beberapa pengkaji *ma'ānī al-ḥadīs* yang berkontribusi dalam menambah literatur kajian ini antara lain; Nurun Najwah menawarkan dua metode dalam memahami hadis yaitu metode *historis* dan *hermeneutik*. Lihat Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi; Teori dan*



mengkaji kedua sumber ajaran Islam tersebut, tetapi juga kalangan Non-Muslim (*outsiders*) atau yang biasa disebut orientalis. Kajian mereka tentu berbeda-beda, ada yang mengkaji dari segi sejarah, sosial, antropologi, makna kata-kata, dan sebagainya.

Perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak akan membahas masalah pemuda secara umum, tetapi hanya fokus pada keempat kata yang disebutkan di atas. Kajian ini memang penting dilakukan supaya makna term *fatā*, *fityah*, *syabāb*, dan *syāb* bisa dianalisis. Meskipun keempat kata tersebut diartikan sama-sama pemuda, namun konteks penggunaannya berbeda-beda. Sumber primer dalam tulisan ini tentu al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, yang pasti kitab-kitab hadis dan syarahnya juga penting untuk diteliti. Sebelum membahas keempat makna kata itu, terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat tentang konsep pemuda.

B. KONSEP PEMUDA

Pemuda merupakan salah satu aset bangsa yang harus tetap dijaga dan dikembangkan potensinya. Tanpa pemuda maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan seimbang dengan nilai-nilai keragaman. Di negara manapun pasti pemuda memiliki kontribusi besar dalam menentukan arah keberagamaan, perpolitikan, dan sebagainya, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dalam konteks Indonesia, sejak dahulu memang para pemuda memiliki kontribusi besar dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan keutuhan NKRI. Begitu bersejarahnya pemuda-pemuda Indonesia, sehingga dalam sejarah kemerdekaan dikenal adanya istilah Sumpah Pemuda. Sampai saat ini hari sumpah pemuda diabadikan dalam hari-hari bersejarah dalam mempertahankan NKRI. Selain sektor pendidikan, sektor olahraga juga tidak kalah menarik untuk dilihat.

Atlet-atlet muda Indonesia telah menunjukkan eksistensi Indonesia di tingkat Internasional, seperti sepak bola, bulu tangkis, lomba lari, seni tari, dan lain sebagainya. Tentu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena memiliki pemuda-pemuda yang siap bersaing dalam berbagai acara ataupun lomba, baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional. Pemuda merupakan tonggak kehidupan bangsa sehingga Islam sendiri memberi perhatian penuh terhadap mereka. Sarjana-sarjana Muslim telah banyak menulis karya yang terkait dengan pemuda, meskipun diakui bahwa tulisan-tulisan mereka masih normatif dan masih umum. Tetapi tentu karya-karya itu memiliki kontribusi besar dalam melihat fenomena pemuda di Indonesia. Ada banyak buku, artikel, ataupun penelitian lainnya yang mengkaji pemuda dari berbagai aspeknya.

Di antara buku-buku atau karya-karya yang membahas tentang hal-hal terkait dengan pemuda adalah *Moral Agama, Suluh Kepribadian Pemuda Menghadapi Arus Budaya Massa* oleh Muslim (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1987), *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik di Indonesia*; Kurniadi (Bandung: Angkasa, 1987), *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer*; Muhammad Budi Setiawan (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009), *Dialog Pemuda dalam Membangun Bangsa: Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing Pemuda dalam Menghadapi Krisis Global* (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009), *Potret Pemuda Indonesia*; M. Amir P. Ali (Yogyakarta: Ombak, 2008), *Dialog Pemuda Dalam Membangun Bangsa: 80 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2009), *Bangkitlah Pemuda Dunia di Tanganmu*;

Aplikasi (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, cet-I, 2008). Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press, cet-I, 2008).



Musthafa al-Ghazali (Solo: Ramadhani, 2004), *Strategi Pembinaan Pemuda*; Abdul Gafur (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2004), *Rekonstruksi Pemuda*; Pandu Dewanata dan Chavchay Syaifullah (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2008), *Pemuda dan Perkembangan IPTEK dalam Perspektif Agama*, editor; Musa Asy'arie dkk (Yogyakarta: Pusat Studi Filsafat dan Kebudayaan Islam IAIN, 1989), *Pemuda Dambaan Surga: Nasihat Bagi Generasi Muda*; Mahdi Hadawi Tehrani (Jakarta: Citra, 2014), *Pemuda Pasca Orba: Potret Kontemporer Pemuda Indonesia*; M. Najib Azca (Yogyakarta: Yousuro, 2011), *Hari Sumpah Pemuda Sekaligus Sebagai Hari Pemuda* (Jakarta: Kemendikbud, 1978), *Islam dan Pemuda*; Ahmad Muhammad Jammal.

Dinamika Gerakan Pemuda Melawan Korupsi (GPMK) Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora, 2016), *Solidaritas Pemuda Perkotaan di Yogyakarta (Karang Taruna di Kampung RW 01 Suryowijayan Kecamatan Mantrijeron)*, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora, 2016), *Sahabat Remaja Nabi: Kisah Hidup Pemuda-Pemuda Kader Rasulullah saw; Fathi Fawzi Abd al-Mu'thi* (Bandung: Zaman, 2009). Selain itu karya-karya terjemah juga banyak dalam edisi Indonesia, antara lain *Pemuda Militan*; Hasan al-Banna dan Ahmad Muhammad Jamal (Solo: Pustaka Mantiq, 1992), buku ini merupakan terjemahan dari *Ilā al-Syabāb min Ajli al-Syabāb, The Power of Youth: Risalah Para Pemuda Pewaris Peradaban*; Muhammad Fathi,² *Pemuda: Aktivitas dan Problematikanya Dalam Tinjauan Islam*; Abdul Halim Uways (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994),³ *Pemuda Islam di Persimpangan Jalan*; Abul Ala Maududi dan Ahmad Muhammad Jammal, dan lain sebagainya.

Dari karya-karya di atas, jelas sekali bahwa pemuda memang aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya dalam segala bidang. Lebih-lebih dalam sejarah Indonesia dikenal adanya Hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Oktober. Isi Sumpah Pemuda ada tiga yaitu, 1). *Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia*, 2). *Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia*. 3). *Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia*. Demikian isi sumpah pemuda yang masih sangat relevan untuk setiap masa. Peran pemuda sudah tidak diragukan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauh sebelumnya, al-Qur'an dan hadis sudah memberikan gambaran umum tentang sosok pemuda ideal.

C. PEMUDA DALAM AL-QUR'AN

Dalam al-Qur'an kata yang identik dengan pemuda adalah *fatā* dengan berbagai macam bentuk dirivasinya. Ia terulang sebanyak tujuh kali dengan rincian, *fatā* (QS. Yūsus [12]: 30, al-Kahfi [18]: 60 dan 62, al-Anbiyā' [21]: 60), *fatayāni*/bentuk *tašniyah* (QS. Yūsus [12]: 36), *al-fityatu* (QS. al-Kahfi [18]: 13), *fityān* (QS. Yūsus [12]: 62), dan *fatayāt*/pemudi (QS. al-Nisā' [4]: 25).⁴ Ayat-ayat ini memiliki konteks yang berbeda-beda, tetapi fokusnya satu yaitu tentang sosok pemuda. Kecuali kata yang disebut terakhir meskipun diartikan pemudi, tetapi konteks pembicaraannya tentang perbudakan. Untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan redaksi masing-masing ayat sesuai dengan kategori tersebut.

² Edisi Arabnya adalah *al-Ta'āmul Ma'a al-Syabāb*.

³ Edisi Arab buku ini adalah *Musykilāt al-Syabāb fi Ḍau' al-Islām*.

⁴ Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm bi Ḥāsyiah al-Muṣḥaf al-Syarīf* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007 M/1428 H), hlm. 623-624.



1. **Kata *Fatā*.**
a. **Surat Yūsuf ayat 30.**

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya), Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata."

Kata *fatā* dalam ayat di atas tertuju kepada Nabi Yūsuf, yang merupakan seorang pemuda tampan sehingga memikat lawan jenisnya, termasuk isteri raja Mesir ketika itu. Yūsuf dijadikan sebagai nama surat al-Qur'an karena kisah-kisahannya diceritakan dari awal sampai akhir. Bahkan satu-satunya Nabi yang dikisahkan secara panjang lebar dalam satu surat penuh adalah Yūsuf sendiri. Dalam kitab-kitab tafsir, banyak diuraikan hal-hal terkait dengan beliau, tetapi lebih banyak israiliyat yang belum tentu kebenarannya. Dalam surat tersebut digambarkan sosok pemuda bernama Yūsuf yang adil, penyabar, kasih sayang, hormat kepada orang tua, tidak pendendam, bertakwa kepada Allah, dermawan, dan pemaaf. Kajian terhadap surat Yūsuf dan sosok pemuda Yūsuf itu sendiri sudah menarik banyak pengkaji al-Qur'an.

Ayat di atas tidak menyebutkan nama perempuan yang tertarik terhadap Yusuf, hanya disebutkan dengan *imra'ah al-aziz* (isteri raja). Tetapi dalam berbagai macam literatur tafsir disebutkan bahwa nama perempuan itu adalah Zulaikhā. Tafsir-tafsir bi al-ma'sūr banyak memuat cerita-cerita aneh dan ajaib tentang kisah-kisah Zulaikha dan Yusuf. Sebenarnya kalau tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi saw. terkait nama-nama tokoh atau tempat yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an, maka tidak seharusnya menentukan nama-nama tertentu. Itulah sebabnya pakar tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab tidak setuju dengan pendapat-pendapat ulama yang mengatakan adanya tokoh Zulaikhā. Dalam al-Qur'an ada beberapa tempat, nama tokoh, binatang dan sebagainya yang tidak diketahui secara eksplisit. Misalnya nama-nama pemuda penghuni gua (*aṣḥābul kahfi*) dan anjing mereka, panjang, lebar dan jenis kayu perahu Nabi Nuh, nama semut yang berbicara ketika Nabi Sulaimān lewat, dan sebagainya. Tetapi nama-nama itu bisa dipastikan harus ada penelitian yang mendalam terkait hal tersebut.

Di antara karya-karya yang membahas Nabi Yusuf antara lain, artikel "The Quranic Presentation of the Joseph Story Naturalistic or Formulaic Language?" yang ditulis A.H. Johns,⁵ artikel ini memang bagus karena ia membahas dengan baik cerita atau kisah Yusuf

⁵ Anthony Hearle Johns seorang Guru Besar di Australian National University, Canberra, Australia, lahir di London, Inggris pada tahun 1928. Keluarganya beragama Katolik, yang awalnya tinggal di Hungaria kemudian pindah ke London. Tidak banyak data yang didapatkan untuk membahas biografi A.H. Johns karena memang jarang ada orang yang menulis pemikirannya. Di antara karya-karya Johns adalah *Al-Rāzi's Treatment of the Qur'anic Episodes Telling of Abraham and His Quest; Qur'anic Exegesis with a Human Face*, *Narrative, Intertext, and Allusion in the Qur'anic Presentation of Job* (*Journal Quranic Studies*), "Three Stories of a Prophet: al-Ṭabari's Treatment of Job in Sūrah al-Anbiyā'; 83-84 (part II)". Wardatun Nadhiroh telah membahas pemikiran A.H. Johns dalam tesisnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kemudian poin-poin tertentu diringkas dan direvisi untuk dipublikasikan di jurnal. Dalam jurnal Ilmu Ushuluddin tulisan tersebut diberi judul "Memahami Narasi Kisah al-Qur'an dengan *Narrative Criticism* (Studi atas Kajian A.H. Johns), Vol. 12, No. 2, Juli

dalam al-Qur'an. Sarjana-sarjana Muslim juga pernah membahas Surat Yūṣuf, baik secara keseluruhan (*kulli*) maupun sebagian (*juz'i*). Sebut saja misalnya Abū Ḥafṣ Umar al-Auṣī (w. 751 H) yang menulis *Zahru al-Kimām fī Qiṣṣah Yūsuf Alaihi al-Salām*,⁶ Abdur Raḥmān bin Nāṣir al-Sa'dī (1376 H) menulis *Fawā'id Mustanbaṭah min Qiṣṣah Yūsuf Alaihi al-Salām*,⁷ Nāṣir bin Sulaimān al-Umar, *Tadabbur Sūrah Yūsuf: Tahzīb Āyāt li al-Sā'ilīn*.⁸ Sarjana-sarjana Barat juga tertarik mengkaji surat Yūsuf, seperti Mustansir Mir dalam artikelnya "The Qur'anic Story of Joseph: Plot, Themes dan Characters" (The Muslim World, LXXVI, 1986). Kisah-kisah Nabi dalam al-Qur'an juga telah ditulis secara umum, misalnya Ibn Kaṣīr al-Dimasyqī (w. 774 H) dalam buku *Qaṣaṣ al-Anbiyā'*, Muḥammad Alī al-Ṣābūnī dalam buku *al-Nubūwah wa al-Anbiyā'*, Muḥammad Aḥmad al-Āmūlī dalam buku *Qiṣṣah al-Qur'ān*, dan lain-lain.

b. Surat al-Kahfi ayat 60-62

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَدَاءٌ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62)

60. dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke Pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". **61.** Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. **62.** Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini".

Ayat di atas berbicara tentang kisah Nabi Musa dan *fatā*-nya ketika berada dalam perjalanan jauh. Beberapa literatur tafsir menyebutkan bahwa nama tokoh (*fatā*) yang menemani Musa adalah Yusya'. Sebenarnya kisah perjalanan Musa dengan muridnya cukup panjang diceritakan dalam surat tersebut, sampai akhirnya mereka bertemu dengan sosok bernama Khiḍr. Tetapi ketika bersama Khiḍr tidak terdapat murid yang menemani Musa karena jelas sekali dari dialog yang terjadi antar keduanya.

c. Q.S. al-Anbiyā' [21], 60

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim.

2013". Fokus kajiannya adalah tentang kisah Nabi Ayyūb as., tetapi biografi A.H. Johns sangat sedikit dibahas karena minimnya data.

⁶ Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ Umar bin Ibrāhīm al-Anṣārī al-Auṣī, *Zahru al-Kimām fī Qiṣṣah Yūsuf Alaihi al-Salām*, ditahqiq oleh Kamāluddīn Allām (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, cet-I, 1424 H/2003 M).

⁷ Abdur Raḥmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Fawā'id Mustanbaṭah min Qiṣṣah Yūsuf Alaihi al-Salām*, dita'liq oleh Abū Muḥammad Asyraf bin Abd al-Maqṣūd (Riyāḍ: Aḍwā' al-Salaf, cet-I, 1420 H/2000 M).

⁸ Nāṣir bin Sulaimān al-Umar, *Tadabbur Sūrah Yūsuf: Tahzīb Āyāt li al-Sā'ilīn*, (Riyāḍ: al-Dāirī al-Syarqī, cet-I, 1436 H/2015 M).

Ayat di atas berbicara tentang seorang pemuda bernama Ibrahim, yang merupakan seorang pemberani dalam mengungkapkan kebenaran meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Kisah Ibrahim banyak di ulas dalam al-Qur'an, tetapi satu-satunya surat yang menyebut beliau sebagai pemuda atau *fatā* adalah surat al-Anbiyā' ayat 60 ini. Dikisahkan bahwa Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembuh oleh kaumnya pada saat raja Namrud berkuasa.

Ibrahim merupakan salah satu Nabi yang termasuk kategori *ūlu al-azmī* dengan Nabi Nuh, Musa, Isa, dan Muhammad saw. Dalam sejarah agama-agama, Ibrahim dikenal sebagai bapak agama monoteis yang memiliki pengaruh besar terhadap tradisi Islam. Bahkan dalam ritual haji, hampir semua rukun ataupun amalah lainnya merujuk kepada beliau, putranya Ismail, dan isterinya Hajar. Tidak heran jika dalam al-Qur'an ada surat khusus yang disebut surat Ibrāhīm. Bahkan semua sunnah fitrah yang dikerjakan umat Islam merupakan bagian dari ajaran-ajaran Nabi Ibrahim as. yang diwarisi kepada Nabi Muḥammad saw. dan umatnya. Syiar-syiar Nabi Ibrahim sangat banyak jumlahnya, sampai-sampai Waliyullah al-Dihlawī (1114-1176 H) dalam bukunya "*al-Fauz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tafsīr*"⁹ menyebutkan lebih dari 10 macam sunnah fitrah;

وإنَّ شعائر الملة الإبراهيمية هي: حج بيت الله الحرام, واستقباله في الصلوات, والغسل من الجنابة, والإختتان, وسائر خصال الفطرة, وتحريم الأشهر الحرم, وتعظيم المسجد الحرام, وتحريم المحرمات النسبية والرضاعية, والذبح في الحلق, والنحر في اللبّة, والتقرب بالذبح والنحر إلى الله - تعالى - لاسيما في أيام الحج.¹⁰

Sesungguhnya yang termasuk bagian dari syi'ar-syiar agama Nabi Ibrāhīm adalah haji ke Baitullah, berkiblat ke sana untuk shalat, mandi junub, khitan dan seluruh perkara fitrah (kesucian), pengharaman (berperang) pada bulan haram, mengagungkan Masjid al-Ḥaram. Keharaman menikahi nasab serta saudara persusuan, menyembelih pada tenggorokan, menyembelih bagian leher, berkorban dengan sembelihan, lebih-lebih pada hari-hari haji.

Sejak masa muda, Ibrahim sudah menjadi orang pemberani yang tidak takut siapapun selain Tuhannya. Ini patut diteladani oleh pemuda-pemuda sekarang demi tercapainya kehidupan sosial yang harmonis. Inti dari kisah itu adalah amar makruf nahi munkar, tentu tidak boleh dipahami secara tekstual. Pemahaman kontekstual terhadap al-Qur'an ataupun hadis harus didahulukan, bahkan kontekstual tidak cukup tetapi harus dikontekstualisasikan.

2. Bentuk *tašniyah* (*tašniyah*), dua orang

Bentuk ini terulang dua kali dalam al-Qur'an yaitu dalam surat Yusuf ayat 36 dan 62, yang berbunyi:

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَرْبِي خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْنَأُ بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

⁹ Kitab ini ditulis dalam bahasa Persia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Salmān al-Ḥusainī al-Nadawī.

¹⁰ Qaṭṭubuddīn Aḥmad Ibn Abdurrahīm Ibn Wajīh al-Dihlawī, *al-Fauz al-Kabīr fī Uṣūl al-Tafsīr*, diterjemahkan ke dalam bahasa Aran oleh Sulaimān al-Ḥusainī al-Nadawī, t. th hlm. 24.

Dan bersama dengan dia (Yusuf) masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. berkatalah salah seorang diantara keduanya: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku memeras anggur." dan yang lainnya berkata: "Sesungguhnya aku bermimpi, bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebahagiannya dimakan burung." berikanlah kepada Kami ta'birnya; Sesungguhnya Kami memandang kamu Termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan mimpi).

Meskipun teks al-Qur'an itu sama, tetapi penafsirannya bisa berbeda-beda sesuai dengan cara pandang seorang penafsir. Beberapa literatur tafsir menyebutkan bahwa dua pemuda adalah budak, sebagian pendapat mengatakan keduanya pelayan kerajaan. Salah satu dari keduanya merupakan tukang pembuat roti, dan yang satu lagi tukang bawa air. Dua pemuda dalam ayat di atas menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf supaya diketahui makna mimpi tersebut. Kesimpulan dari mimpi itu adalah bahwa salah satu dari kedua pemuda itu akan dihukum sampai mati, dan yang satunya lagi selamat. Orang yang selamat inilah yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari fitnah setelah melakukan klarifikasi cukup lama. Disebutkan bahwa sebab mereka dimasukkan penjara adalah karena ingin meracuni raja, kemudian hal tersebut diketahui sehingga mereka ditangkap.

Terlepas dari konteks ayat di atas, pelajaran yang bisa diambil adalah tentang kejujuran dan sikap terbuka terhadap orang lain. Sebagai seorang pemuda yang kuat, kita dituntut untuk selalu jujur dalam perkataan dan tindakan. Mengutamakan kebenaran di atas kepentingan pribadi, melakukan hubungan sosial antar sesama, dan menjauh sifat-sifat tercela. Tentu sifat-sifat tercela ini banyak macamnya, termasuk juga keinginan untuk mencelakai orang lain. Sebagai aset bangsa dan negara, seorang pemuda diharuskan untuk berkontribusi dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Sifat hasad, dengki dan iri harus dikikis dari dalam hati supaya jasmani menjadi sehat.

Sedangkan ayat 62 menceritakan tentang dua tukang timbang pada masa Nabi Yusuf menjadi Menteri di Mesir. Kata *fityān* di sini berarti dua pemuda yang bertugas untuk menimbang makanan ketika ada yang meminta. Jika dilihat dari redaksi kisahnya, kedua pemuda ini taat kepada pemerintah meskipun secara zahir melakukan hal yang tercela, yaitu memfitnah dan berbuat dusta terhadap saudara-saudara Yusuf. Tetapi maksud dari Yusuf sangat baik, yaitu supaya semua kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat oleh saudara-saudaranya dahulu bisa terbongkar. Tentu juga untuk membenarkan firmah Allah swt dan menunjukkan kemahakuasaan-Nya. Ayat 62 berbunyi:

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya: "Masukkanlah barang-barang (penukar kepunyaan mereka)"¹¹ ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, Mudah-mudahan mereka kembali lagi"¹².

¹¹ Menurut kebanyakan ahli tafsir, barang-barang dari saudara-saudara Yusuf yang digunakan sebagai alat penukar bahan makanan itu ialah kulit dan terompa.

¹² Tindakan ini diambil oleh Yusuf sebagai siasat, dengan cara menanam Budi kepada mereka, agar mereka nantinya bersedia kembali lagi ke Mesir dengan membawa Bunyamin.



3. Kata *al-fityatu* (QS. al-Kahfi [18]: 13)

Kata *al-fityatu* juga terulang sekali dalam al-Qur'an, konteks pembicaraannya adalah pemuda-pemuda yang melindungi diri dari kediktatoran seorang raja demi mempertahankan iman. Pemuda-pemuda ini tidur di dalam goa selama kurang lebih tiga abad, tetapi masih hidup. Kemudian jejak langkah mereka diabadikan oleh Allah dalam al-Qur'an sebagai pelajaran bagi umat manusia. Bahkan menjadi nama surat dan memiliki kelebihan tersendiri dari surat-surat lain sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi saw. Bunyi ayat 13 surat al-Kahfi adalah:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذَانَهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ
إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطْنَا (14)

Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. 14. dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan Kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, Sesungguhnya Kami kalau demikian telah mengucapkan Perkataan yang Amat jauh dari kebenaran".

4. *fatayāt*/pemudi (QS. al-Nisā' [4]: 25)

Kata ini terulang hanya sekali juga dalam al-Qur'an, tetapi konteksnya adalah masalah budak perempuan mukminat yang layak untuk dinikahi.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنْتُمْ فَانكِحُوا بِمَعْشَرَ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

D. PEMUDA DALAM HADIS

Sebelum menjelaskan kata atau konsep pemuda dalam hadis, terlebih dahulu akan dijelaskan dua kajian pokok dalam studi hadis. Dua kajian itu adalah sanad dan matan atau yang biasa disebut kritik sanad dan kritik matan. Untuk menentukan sah atau tidaknya



suatu hadis penulis menggunakan kaedah kesahihan sanad hadis yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail. Ditinjau dari segi kesahihan riwayat hadis yang ditawarkan oleh ulama hadis seperti ketersambungan sanad (*ittiṣāl al-sanad*), keadilan periwayat (*adālah al-rāwī*), kedabitan periwayat (*ḍabṭ al-rāwī*), tidak ada illat dan tidak *syazz*. Kelima syarat itu merupakan syarat hadis sahih dalam kaidah mayor secara umum yang dikemukakan oleh ulama hadis. Sedangkan kaidah minor secara khusus bisa masuk ke dalamnya beberapa persyaratan lagi. Apabila masing-masing unsur kaidah mayor bagi kesahihan sanad disertakan kaidah-kaidah minornya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:¹³

Unsur kaidah mayor *pertama*, sanad bersambung, mengandung unsur kaidah minor: *muttasil* (bersambung), *marfū'* (bersandar kepada Nabi saw), *maḥfūz* (terhindar dari *syuḏūz*) dan bukan *mu'al* (mengandung cacat). Unsur kaidah mayor *kedua*, periwayat bersifat adil, mengandung unsur-unsur kaidah minor: beragama Islam, mukallaf (balig dan berakal sehat), melaksanakan ketentuan agama Islam, dan memelihara *murū'ah* (adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia kepada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan). Unsur kaidah mayor *ketiga*, periwayat bersifat ḍabīṭ dan atau *aḍbaṭ*, mengandung unsur-unsur kaidah minor: hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan riwayat hadis yang dihafalnya kepada orang lain, terhindar dari *syuḏūz*, dan terhindar dari illat.

Dalam studi hadis kritik matan biasa disebut *naqd al-matni*, *al-naqdu al-dākhilī*, *al-naqdu al-bāṭinī*, dan *kritik internal*. Meneliti matan hadis memang lebih sulit daripada meneliti sanad. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahwa bagi orang yang ingin meneliti matan hadis, dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuannya adalah supaya hasil penelitiannya bisa benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di antara syarat-syarat itu ialah *pertama*, memiliki keahlian dalam bidang hadis. *Kedua*, memiliki pengetahuan yang luas atau memadai dan mendalam tentang ajaran Islam. *Ketiga*, telah melakukan *muṭālaah* (penelitian, pembacaan) yang cukup. *Keempat*, memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar. dan *kelima*, Memiliki tradisi keilmuan yang tinggi.¹⁴ Dalam penelitian matan hadis, jika dikaitkan dengan penelitian sanad maka ada empat kemungkinan hasilnya.

Keempat hasil itu bisa terjadi dalam semua hadis yang diteliti, dengan rincian sanadnya sahih maka matan juga sahih, sanadnya lemah maka matan juga lemah, sanadnya sahih matan lemah, dan sanadnya lemah tetapi matannya sahih. Sebagaimana sudah disebutkan di atas bahwa meneliti matan hadis lebih sulit daripada meneliti sanad, ini disebabkan karena ada lima faktor yang dominan. Faktor-faktor itu adalah a). Adanya periwayatan secara makna. b). Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja. c). Latar belakang timbulnya petunjuk hadis tidak selalu mudah dapat diketahui, d). Adanya kandungan petunjuk hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi “supra rasional”, e). Masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadis.¹⁵

¹³ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 132-133. Penulis yang sama, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani, cet-I, 1995 M/1415 H), hlm. 77-78.

¹⁴ M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, cet-I, 1992 M/1413 H), hlm. 130.

¹⁵ M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,...130.



Pakar hadis Indonesia, M. Syuhudi Ismail¹⁶ menawarkan tiga langkah metodologis dalam melakukan kritik matan hadis yaitu a). Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad, b). Meneliti susunan lafal matan semakna, c). Meneliti kandungan matan.¹⁷ Apapun bentuk hadis itu, perlu diteliti karena ia menyangkut pribadi Nabi saw. Semua hadis memang potensial untuk diteliti karena; *pertama*, tidak semua hadis tertulis di zaman Nabi, *kedua*, Hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam, *ketiga*. Telah terjadi berbagai kasus manipulasi dan pemalsuan hadis. *Keempat*, Proses penghimpunan hadis yang memakan waktu demikian lama, *kelima*. Jumlah kitab hadis yang demikian banyak jumlahnya, dengan metode penyusunan yang berbeda, dan *keenam*. Telah terjadi vperiwayatan hadis secara makna. Itulah sekilas tentang kajian sanad, matan dan urgensi penelitian hadis yang perlu diketahui meskipun singkat. Selanjutnya akan difokuskan pada kajian pemuda dalam hadis Nabi saw.

Dalam hadis, kata yang sering disebut untuk menunjukkan pemuda adalah *al-syabāb* dan *al-syāb* dengan beragam konteksnya. Pada bagian ini penulis tidak akan menjelaskan apa itu hadis, kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam,¹⁸ dan sebagainya, tetapi yang akan dijelaskan adalah masalah pemuda dalam hadis itu sendiri. Dalam kaitannya dengan masalah pemuda ada dua kata yang digunakan, yaitu *al-syāb* dan *al-syabāb*. Kedua kata ini digunakan dalam konteks anjuran untuk menikah bagi yang mampu, perintah untuk menggunakan masa muda sebelum masa tua, dan kategori orang yang masuk dalam naungan Allah pada hari kiamta. Adapun yang terkait dengan anjuran atau perintah untuk menikah antara lain:

¹⁶ M.Syuhudi Ismail lahir di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 23 April 1943. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Negeri di Sedorejo, Lumajang, Jawa Timur (1955), ia meneruskan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun di Malang (tamat 1959); Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta (tamat 1961); Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, cabang Makassar (kemudian menjadi IAIN Alauddin Makassar), berijazah Sarjana Muda (1965), Fakultas Syari'an IAIN Alauddin Ujung Pandang (tamat 1973), Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta (Tahun Akademisi 1978/1979), Program Studi S2 Pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tamat 1985), kemudian Program Doktorat pada Institut yang sama (tamat 1987). Disertasinya diterbitkan dengan judul "*Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*." Sejak terbit buku ini banyak memberi wawasan dalam kajian hadis Nabi. Syuhudi wafat pada hari Ahad 19 November 1995 M. Lihat biografi singkat beliau dalam buku *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, cet-III, 1426 H/2005 M), hlm. 269-270.

¹⁷ M.Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 177-178.

¹⁸ Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an atau dalam istilah ulama hadis dikenal dengan istilah *bayān*, yang terdiri dari tiga macam, yaitu *bayān taqrīr* atau *ta'kīd*, *bayān tafsīr*, dan *bayān tasyrī'*. Maksud *bayān taqrīr* atau *ta'kīd*, adalah menegaskan kembali suatu ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an. *bayān tafsīr*, ialah menjelaskan ayat al-Qur'an yang memiliki tiga bentuk penjelasan atau penjabaran, yaitu memerinci yang global/*tafsīl al-ijmāl*, membatasi kemutlakan ayat/*taqyīd muḥlaq*, dan mengkususkan keumuman/*takhṣīṣ al-ām*. Sedangkan *bayān tasyrī'* maksudnya adalah fungsi hadis sebagai sumber ajaran atau hukum kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan hadis atau sunnah dan fungsinya secara panjang lebar dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih, dan literatur-literatur hadis, seperti Muḥammad Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, cet-II, 1391 H/1971 M), hlm. 46-50. Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānātuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: Dār al-Qaumīyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, t. th).

1. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْبَى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا نَزُوجُكَ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ لَعَلَّهَا تَذَكَّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَنْ نَلْنُ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ....

Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Yahyā al-Tamīmī dan Abū Bakar bin Abū Syaibah dan Muḥammad bin al-Alā al-Hamdānī semuanya dari Abū Mu'āwiyah - lafaz dari Yahyā - telah mengabarkan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari al-A'masy dari Ibrāhīm dari Alqamah ia berkata; *Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Uṣmān. Maka ia pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman berkata, "Wahai Abū Abdurrahmān, maukah Anda kami nikahkan dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat mengingatkan masa lalumu." Abdullah berkata; Jika Anda berkata seperti itu, maka sungguh, Rasulullah saw. telah bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual."*

2. *Al-Mu'jam al-Ausaf* karya al-Ṭabarānī (w. 360 H):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ السَّمَرِيُّ قَالَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْلَمَاتِي قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا شَابٍ تَزَوَّجَ فِي حَدَائِثِهِ سَنَّهُ إِلَّا عَجَّ شَيْطَانُهُ يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصِمَ مِنِّي دِينُهُ.¹⁹

.....Dari Jābir berkata, Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang pemuda menikah pada usia muda, setan akan berteriak, celaka aku,,agamanya telah terjaga dari godaan-ku.

Riwayat yang sama dengan hadis di atas juga diriwayatkan oleh Abū Ya'lā al-Mauṣilī (w. 307 H) dalam *Musnad*-nya (no. 2041),²⁰ Ibn Adī dalam *al-Kāmil fī Ḍu'afā' al-Rijāl*,²¹

¹⁹ Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Ausaf*, ditahqīq oleh Abū Mu'āz Ṭāriq bin Auḍullāh bin Muḥammad dan Abū al-Faḍl Abdul Muḥsin bin Ibrāhīm al-Ḥusainī, juz-IV (Kairo: Dār al-Ḥaramain, cet-I, 1415 H/1995 M), hlm. 375.

²⁰ Aḥmad bin Alī bin al-Muṣannā al-Tamīmī, *al-Musnad*, ditahqīq dan ditakhrīj hadis-hadisnya oleh Ḥusain Salīm Asad, juz-VI (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turās, cet-III, 1410 H/1989 M), hlm. 37.

²¹ Abū Aḥmad Abdullāh bin Adī al-Jurjānī (w. 365 H), *al-Kāmil fī Ḍu'afā' al-Rijāl*, juz-IV, hlm. 42.

Ibn al-Jauzī dalam kitab *al-Ilal al-Mutanāhiyah*,²² Ibn Asākir (499-571 H) dalam kitab *Tārīkh Madīnah Dimasyq*.²³ Tetapi kualitas sanad dan matan hadis tersebut dipertanyakan oleh ulama kritikus hadis karena semua jalur riwayatnya terdapat periwayatan yang bernama Khālīd bin Ismā'īl. Biografi-biografi periwayatan hadis sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab *rijāl al-ḥadīṣ*²⁴ yang memiliki kaitan erat dengan ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.²⁵ Berikut sekilas tentang Khālīd bin Ismā'īl yang banyak dikritik oleh ulama-ulama hadis sehingga menyebabkan matan hadis di atas tertolak.

Nama lengkapnya adalah Abū al-Walīd Khālīd bin Ismā'īl al-Makhzūmī al-Madanī. Meriwayatkan dari Hisyām bin Urwah, Ibn Juraij, dan Ubaidullāh bin Umar hal-hal yang ganjil atau aneh. Di antara periwayatan yang meriwayatkan dari jalur sanad Khālīd bin Ismā'īl adalah al-Alā' bin Maslamah, Sa'dān bin Naṣr, dan lain-lain. Dalam kitab-kitab hadis *mu'tabarah* seperti *al-kutub al-sittah*²⁶ ataupun *al-tis'ah*, nama Khālīd bin Ismā'īl tidaklah

²² Abū al-Faraj Jamāluddīn Abdurrahmān bin Alī bin Muḥammad al-Jauzī al-Qurasyī al-Bagdādī, *al-Ilal al-Mutanāhiyah*, juz-III, hlm. 610. al-Maktabah al-Syāmilah.

²³ Abū al-Qāsim Alī bin Ḥasan bin Hibatullāh bin Abdullāh, terkenal dengan nama Ibn Asākir, *Tārīkh Madīnah Dimasyq*, juz-XXVII, hlm. 20.

²⁴ Ilmu *Rijāl al-Ḥadīṣ* membahas tentang biografi periwayatan hadis mulai dari masa sahabat sampai masa para *mukharrij al-ḥadīṣ* sendiri. Di antara penulis-penulis literatur *rijāl al-ḥadīṣ* misalnya Imam al-Bukhārī (w. 256 H) dengan *al-Tārīkh al-Kabīr*, Ibn Sa'ad (w. 230 H) dengan *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Ibn Abdilbarr al-Qurtubī (363-463 H) dengan *al-Istī'āb fī Ma'rifati al-Aṣḥāb*, Ibn Asākir (499-571 H) dengan *Tārīkh Madīnah Dimasyq*, Ibn al-Asīr al-Jazarī (555-630 H) dengan *Usdu al-Gābah fī Ma'rifah al-Ṣaḥābah*, Ibn Ḥajar al-Asqalānī (773-852 H) dengan *al-Iṣḥāb fī Tamyiz al-Ṣaḥābah*, *Tahzīb al-Tahzīb*, *Taqrīb al-Tahzīb*, dan *Lisān al-Mizān*, al-Ḍahabī (673-748 H) dengan *Siyar A'lām al-Nubalā*, *Taẓkirah al-Ḥuffāz*, dan lain-lain.

Selain kitab-kitab biografi (*biographical literatures*) di atas, ada juga kitab-kitab yang menilai sifat-sifat positif atau negatif seorang periwayatan hadis secara umum (*al-jarḥ wa al-ta'dīl*). Misalnya *al-Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl*; Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H), *al-Siqāt*; Ibn Hibbān al-Bustī (w. 354 H), *al-Du'aqū' wa al-Matrikīn*; al-Nasā'ī (w. 303 H), *al-Du'aqū'*; al-Uqailī (w. 322 H), al-Dāraqutnī (w. 385 H) dan Ibn al-Jauzī, *Asmā' al-Mudallisīn*; al-Suyūfī (w. 911 H), dan lain-lain. Kitab-kitab yang disebut ini merupakan bagian dari kajian sanad hadis.

²⁵ Secara umum kajian ini dibahas dalam kitab-kitab *ulūm al-ḥadīṣ*, tetapi ada beberapa kitab yang khusus membahas tentang kajian ini yaitu, *al-Raf'u wa al-Takmil fī al-jarḥ wa al-ta'dīl*, karya Abū al-Ḥasanāt Muḥammad Abdul Ḥayy al-Laknawī al-Hindī (1264-1304 H), ditahkik dan dita'lik oleh Abdul Fattāh Abū Guddah (KSA: Maktabah Ibn Taimīyah li al-Ṭibā'ah wa Nasyr al-Kutub al-Salafiyah, t. th), *al-Jāmi' fī al-jarḥ wa al-ta'dīl li Aqwāl al-Bukhārī, Muslim, al-Ijlī, Abī Zur'ah al-Rāzī, Abī Dāwud, Ya'qūb al-Faswī, Abī Ḥātim al-Rāzī, al-Turmuḏī, Abī Zur'ah al-Dimasyqī, al-Nasā'ī, al-Bazzār wa al-Dāraqutnī*, dikumpulkan dan disusun oleh al-Sayyid Abū al-Ma'āṭī al-Nūrī, Aḥmad Abdurrazzāq 'Id, Ḥasan Abdul Mun'im al-Syalabī, dan Maḥmūd Muḥammad Khalīl al-Ṣaidī (Beirut: Ālam al-Kutub, cet-I, 1412 H/1992 M), *Khulāṣah al-Ta'ṣīl li Ilmi al-jarḥ wa al-ta'dīl*, karya al-Syarīf Ḥātim bin 'Arif al-Aunī (Makkah al-Mukarramah, Dār al-Fawā'id, cet-I, 1421 H), *Alfāz wa Ibārāt al-jarḥ wa al-ta'dīl baina al-Afrād wa al-Taẓkīr wa al-Tarkīb wa Dilālah kullī minhā alā Ḥāli al-Rāwī wa al-Marwī*, karya Aḥmad Ma'bad Abdul Karīm (Riyād: Maktabah Aḍwā' al-Salaf, cet-I, 1425 H/2004 M). *Al-Manhaj al-Islāmī fī al-jarḥ wa al-ta'dīl: Dirāsah Manhajīyah fī Ulūm al-Ḥadīṣ* (Kairo: Dār al-Salām, cet-I, 1429 H/2008 M).

²⁶ *Al-Kutub al-Sittah* adalah istilah yang digunakan untuk enam kitab induk yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmidzī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan *Sunan Ibn Mājah*. Lihat Muḥammad Abū Syuhbah, *Fī Riḥāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥāh al-Sittah* (Kairo: Silsilah al-Buḥūṣ al-Islāmīyah, 1415 H/1995 M). Abū al-Tayyib al-Sayyid Ṣiddīq Ḥasan Khān al-Qanūjī (w. 1307

terkenal. Namanya hanya disebutkan dalam kitab-kitab *rijāl*, itupun lebih kepada *al-jarḥ* daripada *al-ta'dīl*. Al-Ḍahabī menilainya lemah (*al-ḍa'if*),²⁷ Ibn Adī menilainya suka memalsukan hadis terhadap periwayatan-periwayatan yang siqat (*yaḍa'u al-ḥadīṣ alā siqāt al-muslimīn*),²⁸ Ibn Ḥibbān menilainya telah meriwayatkan dari Ubaidullāh bin Umar hal-hal yang aneh, tidak boleh berhujjah dengan hadisnya dan tidak pula boleh meriwayatkan darinya (*rawā an Ubaidillāh Ibn Umar al-a'ajīb, lā yajūzu al-iḥtijāju bihi biḥāl*), hal senada juga diungkapkan oleh Abū Nu'aim al-Aṣbahānī,²⁹ al-Dāraqutnī menilainya lemah dan riwayatnya ditinggalkan (*ḍa'if wa matrūk*),³⁰

Nūruddīn al-Haiṣamī menilai riwayatnya ditinggalkan (*matrūk*),³¹ Ibn al-Jauzī juga memasukkan nama Khālid bin Ismā'il al-Makhzūmī dalam kitab *al-Ḍa'if wa al-Matrūkīn* (para periwayat yang lemah dan yang ditinggalkan riwayatnya).³² Al-Azdī menilainya sebagai pendusta dan meriwayatkan dari periwayat siqat dengan penuh kebohongan.³³ Demikian juga dengan Sabṭ Ibn al-Ajamī memasukkannya sebagai pemalsu hadis,³⁴ Ibn al-Sakan menilainya *munkar al-ḥadīṣ*.³⁵ Beberapa literatur menyebutkan bahwa Khālid bin Ismā'il meriwayatkan dari Ubaidullāh bin Umar hadis-hadis munkar (*al-manākir*). Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa salah satu *rawi* hadis yang dinilai negatif (*al-jarḥ*) oleh ulama hadis dalam hadis di atas adalah Khālid bin Ismā'il al-Makhzūmī. Dalam ilmu hadis dijelaskan bahwa apabila seorang *rawi* hadis tertuduh sebagai pemalsu hadis atau ditinggal riwayatnya (*matrūk*) maka status hadis itu menjadi palsu. Karena itu berdasarkan

H), *al-Ḥiṭṭah fī Ḍikri al-Ṣiḥāḥ al-Sittah*, ditahkik oleh Alī Ḥasan al-Ḥalabī (Beirut: Dār al-Jīl dan Ammān: Dār al-Ammār, t. th).

²⁷ Al-Ḍahabī, *al-Mugnī fī al-ḍa'if*, 197.

²⁸ Abū Aḥmad Abdullāh bin Adī al-Jurjānī, *al-Kāmil fī Ḍu'afā' al-Rijāl*, dengan pentahqīq Ādil Aḥmad Abdul Maujūd dan Alī Muḥammad Mu'awwad, ikut juga dalam tahqīqnya kitab ini Abdul Fattāh Abū Sunnah, juz-III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t. th), hlm. 475. Hal ini juga dikutip oleh Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān bin Qīmāz/Qāyumāz al-Ḍahabī, *Mīzān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, pada edisi terbitan ini disertai juga dengan *Ḍail Mīzān al-I'tidāl*, karya Abū al-Faḍl Abdurrahīm bin al-Ḥusain al-Iraqī, ditahqīq oleh Alī Muḥammad Mu'awwad dan Ādil Aḥmad Abdul Maujūd, juz-II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1416 H/1995 M), hlm. 406. *al-Mugnī fī al-Ḍu'afā'* juz-I, hlm. 167. Demikian juga dalam kitab *Mīzān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, j-I, hl. 418. Dalam kitab ini, Al-Ḍahabī memaparkan penilaian dari Ibn Adī, al-Dāraqutnī dan Ibn Ḥibbān.

²⁹ Abū Abdirrahmān Muqbil bin Hādī al-Wādī'ī, dkk, *Tarājim Rijāl al-Dārāqutnī fī Sunanihi allaḏīna* (Ṣan'a'-Yaman: Dār al-Āṣār-Mu'assasah al-Rayyān, t. th), hlm. 213. Muḥammad Nāsiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ḍa'ifah wa al-Mauḍū'ah wa Āsaruhā al-Sayyī' fī al-Ummah*, juz-II (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1421 H/2000 M), hlm. 114.

³⁰ Alī bin Umar bin Aḥmad Dāraqutnī, *Kitāb al-Ḍa'if wa al-Matrūkīn*, ditahqīq oleh Muḥammad Lūṭfī al-Ṣabbāg (Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, cet-I, 1400 H/1980 M), jilid-I, hlm. 121.

³¹ Nuruddīn al-Haiṣamī, *Majma' al-Zawā'id wa Manba' al-Fawā'id*, Juz-IV, hlm. 465. Beliau mengatakan ini setelah mengutip hadis tersebut dari Jābir bin Abdullāh al-Anṣārī.

وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما شاب تزوج في حداثة سنة عج شيطانه : يا ويله يا ويله عجم مني دينه رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك.

³² Jamāluddīn Abū al-Faraj Abdur Raḥmān bin Alī bin Muḥammad bin al-Jauzī, *al-Ḍa'if wa al-Matrūkīn*, ditahqīq oleh Abū al-Fidā' Abdullāh al-Qaḍī, juz-I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-I, 1406 H/1986 H), hlm. 244.

³³ Ibn al-Jauzī, *al-Ḍa'if wa al-Matrūkīn*, juz-I, hlm. 244.

³⁴ Abū al-Wafā' Ibrāhīm bin Muḥammad bin Sabṭ bin al-Ajamī, *al-Kasyf al-Ḥaṣīṣ an man Rumiya bi Waḍ'ī al-Ḥadīṣ*

³⁵ Abū Abdirrahmān Muqbil bin Hādī al-Wādī'ī, dkk, *Tarājim Rijāl al-Dārāqutnī*, hlm. 213.

kritik sanad dalam kaedah ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, banyak ulama mengatakan bahwa hadis *أخبرني الحسن بن حكيم المروزي أنبا أبو الموجه أنبا عبدان أنبا عبد الله بن أبي هند عن أبيه عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتيم خمساً قبل خمس شبايك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفرأعك قبل شغلك وحياتك قبل موتك* adalah hadis palsu.

Sedangkan hadis yang terkait dengan pemuda supaya menggunakan masa mudanya sebelum datang masa tua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Ḥākim al-Naisābūrī (w. 405 H) dalam *al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain*. Al-Ḥākim merupakan seorang ulama hadis yang memiliki pengaruh besar dalam kajian hadis,³⁶ salah kitab hadisnya yang populer adalah *al-Mustadrak*. Beliau meriwayatkan sebagai berikut:

أخبرني الحسن بن حكيم المروزي أنبا أبو الموجه أنبا عبدان أنبا عبد الله بن أبي هند عن أبيه عن بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتيم خمساً قبل خمس شبايك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفرأعك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.³⁷

....Dari Ibn Abbās ra, bahwa Nabi saw. pernah memberi nasehat kepada seseorang untuk menggunakan secara maksimal lima hal sebelum datang yang lima pula; masa mudamu sebelum datang masa tua, masa sehatmu sebelum masa sakit, masa kayamu (ketika berkecukupan) sebelum masa fakir (membutuhkan, tidak punya apa-apa), waktu luang, kesempatanmu sebelum masa sibuk, dan masa hidupmu sebelum datang kematian.

Hadis di atas dengan jelas menyebutkan bahwa masa yang disebutkan pertama kali oleh Nabi saw. adalah masa muda. Ini disebabkan karena masa tersebut merupakan masa di mana otot-otot, kebugaran, stamina, dan kerja organ tubuh manusia masih normal, jarang mengalami gangguan-gangguan fisik. Selain itu, masa untuk berkarya harus dimulai sejak masa muda supaya bisa menyiapkan diri menghadapi masa tua.

3. Pemuda yang mendapat naungan pada hari kiamat.

Dalam beberapa kitab hadis primer disebutkan bahwa salah satu orang yang akan mendapat naungan pada hari kiamat adalah pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Al-Bukhārī (w. 256 H) dalam *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥnya*³⁸ dan ulama hadis lainnya meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمِ لَظْلِ يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

³⁶ Salah satu sarjana Muslim Indonesia yang mengkaji pemikiran al-Ḥākim dalam kajian hadis adalah M. Abdurrahman dalam disertasi di IAIN (sekarang UIN) Jakarta, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, *Pergeseran Pemikiran Hadits: Ijtihad Al-Ḥākim dalam Menentukan Status Hadits* (Jakarta: Paramadina, cet-I, 2000).

³⁷ Abū Abdillāh Muḥammad bin Abdullāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak alā al-Ṣaḥīḥain*, no. 7927, pada edisi terbitan ini juga dicantumkan kritik al-Ḥākim terhadap riwayat al-Ḥākim, demikian juga kritik Ab Abd al-Rahmān Muqbil bin Hādī al-Wāda'ī, juz-IV (Mesir-Kairo: Dār al-Ḥaramain li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'), hlm. 447.

³⁸ Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī (w. 256 H), *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Jāmi'*. Nama lengkap kitab ini adalah *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṡ Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* atau *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*

وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ
إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَحَقُّ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا
فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ.³⁹

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: "Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; pemimpin yang adil, **seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabbnya**, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah; mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, 'Aku takut kepada Allah', dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis."

Hadis di atas menggambarkan sosok pemuda ideal yang taat terhadap perintah agama dengan selalu beribadah kepada Allah. Sejak kecil sampai masa muda, ia dibimbing supaya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam beberapa kitab *syarh* diuraikan tentang keutamaan pemuda yang dibesarkan di lingkungan agamis, dan selalu menjaga pergaulan. Ulama-ulama terdahulu biasanya melakukan rihlah ilmiah sejak masih muda sehingga ketika dewasa sudah bisa menghafal, mengumpulkan dan menulis banyak hadis. Dalam konteks sekarang, makna ibadah harus diperluas tidak hanya salat, puasa, zakat, dan haji. Ini semua merupakan ibadah *maḥḍah*, tetapi ada juga yang disebut ibadah *gairu maḥḍah*. Bagi kalangan kaum muda, termasuk ibadah jenis ini adalah melakukan rihlah akademik, mengikuti seminar, konferensi, diskusi, termasuk juga menulis karya-karya ilmiah.

E. KESIMPULAN

Demikianlah tulisan singkat ini membahas tentang pemuda dalam al-Qur'an dan hadis yang fokus pada term *fatā*, *fityah*, *syabāb*, dan *syāb*. Dalam al-Qur'an kata pemuda sering disebut dengan *fatā* dan *fityah*, yang merujuk kepada tokoh-tokoh baik. Bahkan kata *fatā* sendiri digunakan hanya tertuju kepada nama-nama Nabi, seperti Nabi Ibrahim, Musa, Yusuf, dan satu kali kepada murid Nabi Musa sebagaimana dijelaskan di atas. Sementara kata *fityah* ditujukan kepada pemuda-pemuda saleh yang taat serta kuat dalam keyakinan kepada Allah. Dalam al-Qur'an atau literatur keislaman pemuda-pemuda ini biasa disebut *aṣḥāb al-kahfi* (penghuni goa). Berbeda halnya dengan hadis, kata yang digunakan untuk merujuk kepada pemuda adalah *syabāb*, dan *syāb*. Kedua kata ini memiliki akar kata dan makna yang sama tetapi konteks penggunaannya berbeda sebagaimana telah dijelaskan di atas. Diakui bahwa tulisan ini sangat deskriptif dan perlu penelitian lebih lanjut dengan metode dan teori yang tepat untuk menganalisis kata-kata terkait dengan pemuda dalam al-Qur'an dan hadis.

Kajian terhadap al-Qur'an dan hadis perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, terutama dari kaum Muslim sendiri. Untuk konteks sekarang, terutama sekali di Indonesia kajian terhadap kedua sumber ajaran Islam tersebut sudah cukup maju. Terbukti

³⁹ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 620, lihat juga, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1712, Sunan al-Turmuḏī, no. 2313, *Sunan al-Nasā'ī*, *Musnad Aḥmad*, no. 9288, dan *al-Muwatta'* Imam Mālik, no. 1501.



dengan dibentuknya Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) yang khusus mengkaji al-Qur'an dari berbagai sumbernya. Demikian juga dengan studi hadis yang sudah dibentuk Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia (ASILHA), yang fokus terhadap kajian hadis. Baru-baru ini ASILHA menyelenggarakan Simposium Ilmiah yang dihadiri para pakar atau peminat kajian hadis dari berbagai daerah. Penulis juga ikut berpartisipasi dalam acara tersebut yang diselenggarakan di University Hotel UIN Sunan Kalijaga, pada hari Rabu 26 Oktober 2016. Intinya bahwa kajian terhadap al-Qur'an dan hadis harus tetap dikembangkan supaya bisa membawa peradaban yang gemilang bagi Islam.

REFERENSI

- Abdul Bāqī, Muḥammad Fu'ād *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm bi Hāsyiah al-Muḥaḥaf al-Syarīf*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007 M/1428 H.
- Abū Syuhbah, Muḥammad, *Fī Riḥāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥāḥ al-Sittah*, Kairo: Silsilah al-Buḥūs al-Islāmīyah, 1415 H/1995 M.
- Abū Ya'lā, Aḥmad bin Alī bin al-Muṣannā al-Tamīmī, *al-Musnad*, ditahqīq dan ditakhrīj hadis-hadisnya oleh Ḥusain Salīm Asad, juz-VI, Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turās, cet-III, 1410 H/1989 M.
- Ajlūnī-al, Ismāīl bin Muḥammad bin Abdul Hādī al-Jarrāḥī, *Kasyf al-Khaḥā' wa Muzīl al-Ilbās Ammasytuhira min al-Aḥādīs alā Alsinah al-Nās*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H/2001 M.
- Albānī-al, Muḥammad Nāṣiruddīn, *Silsilah al-Aḥādīs al-Ḍaīfah wa al-Mauḍū'ah wa Aṣaruhā al-Sayyi' fī al-Ummah*, Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', cet-I, 1421 H/2000 M.
- Dāraquṭnī-al, Abū al-Ḥasan Alī bin Umar bin Aḥmad bin Maḥdī, *al-Ilal al-Wāridah fī al-Aḥādīs al-Nabawīyah*, ditahqīq dan ditakhrīj oleh Maḥfūzur Raḥmān bin Zainullāh al-Salafī, juz-XV, Riyāḍ: Dār al-Ṭayyibah, cet-I, 1405 H/1985 M.
- Dāraquṭnī-al, Alī bin Umar bin Aḥmad *Kitāb al-Ḍuqfā' wa al-Matrūkīn*, ditahqīq oleh Muḥammad Lūṭfī al-Ṣabbāg, J-I, Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, cet-1, 1400 H/1980 M.
- Haisamī-al, Nuruddīn *Majma' al-Zawāid wa Manba' al-Fawāid*, juz-IV, al-Maktabah al-Syāmilah.
- Ibn Adī/Uday, Abū Aḥmad Abdullāh bin al-Jurjānī *al-Kāmil fī Du'afā' al-Rijāl*, ditahqīq dan dita'liq oleh Ādil Aḥmad Abdul Maujūd dan Alī Muḥammad Mu'awwad, juz-VIII, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th.
- Ibn Arrāq, Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin al-Kinānī, *Tanzīh al-Syarī'ah al-Marfū'ah an al-Aḥādīs al-Syanī'ah al-Mauḍū'ah*, ditahkik dan dita'lik oleh Abdul Wahhāb bin Abdul Laṭīf dan Abdullāh bin Muḥammad al-Gumārī, Juz-II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t. th.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, cet-I, hlm. 1992 M.
- _____ *Hadīts Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, cet-I, 1995 M/1415 H.
- _____ *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988 M.
- Jauzī-al, Abū al-Faraj Jamāluddīn Abdurrahmān bin Alī bin Muḥammad al-Qurasyī al-Bagdādī, *al-Ḍuqfā' wa al-Matrūkīn*, ditahqīq oleh Abū al-Fidā' Abdullāh al-Qāḍī, juz-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, cet-I, 1406 H/1986 H.



- Jurjānī-al, Abū Aḥmad Abdullāh bin Adī, *al-Kāmil fī Ḍu'afā' al-Rijāl*, dengan pentahqīq Ādil Aḥmad Abdul Maujūd dan Alī Muḥammad Mu'awwad, ikut juga dalam tahkinya kitab ini Abdul Fattāh Abū Sunnah, juz-III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t. th.
- Qanūjī-al, Abū al-Ṭayyib al-Sayyid Ṣiddīq Ḥasan Khān, *al-Ḥiṭṭah fī Żikri al-Ṣiḥāḥ al-Sittah*, ditaḥqīq oleh Alī Ḥasan al-Ḥalabī, Beirut: Dār al-Jīl dan Ammān: Dār al-Ammār, t. th.
- Qāwaqujī-al, Abū al-Maḥāsin *al-Lu'lu' al-Maṣnū' fīmā lā Aṣla lahu au bi aṣlihi Mauḍū'*,
Sahmī-al, Abū al-Qāsim Ḥamzah bin Yūsuf bin Ibrāhīm *Tārīkh Jurjān*, juz-I,
Suyūṭī-al, Abdurrahman bin Abū Bakar, *al-Jāmī' al-Ṣagīr fī Aḥādīs al-Basyīr al-Nazīr*,
Bairut: Dār Kutub al-Ilmīyah, cet-V, 2010.
- Syaukānī-al, Muḥammad bin Alī bin Muḥammad bin Abdullāh, *al-Fawā'id al-Majmū'ah fī al-Aḥādīs al-Mauḍū'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1416 H/1995 M.
- Ṭabarānī-al, Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Mu'jam al-Auṣaṭ*, ditaḥqīq oleh Abū Mu'āz Ṭāriq bin Auḍullāh bin Muḥammad dan Abū al-Faḍl Abdul Muḥsin bin Ibrāhīm al-Ḥusainī, juz-IV, Kairo: Dār al-Ḥaramain, cet-I, 1415 H/1995 M.
- Uqailī-al, Abū Ja'far Muḥammad bin Amr bin Mūsā bin Ḥammād al-Makkī, *al-Ḍu'afā' al-Kabīr*, ditaḥkik oleh Abdul Mu'ṭī Amīn Qal'ajī, juz-II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, cet-II, 1418 H/1998 M.
- Wādī'ī-al, Abū Abdirrahmān Muqbil bin Hādī, dkk, *Tarājim Rijāl al-Dārāquṭnī fī Sunanihi allażīna*, Ṣan'a'-Yaman: Dār al-Āṣār-Mu'assasah al-Rayyān, t. th.
- Żahabī-al, Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Usmān bin Qīmāz, *al-Mugnī Fī al-Ḍu'afā'* juz-1.



PEMUDA SEBAGAI MOTIVATOR MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN POTENSI LOKAL DEMI MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Marta Dwi Ningrum¹

¹*Universitas Negeri Yogyakarta, Karangmalang, Yogyakarta*
Email : Martadwin@gmail.com

ABSTRAK

Pemuda adalah tombak suatu bangsa, kemajuan bangsa di masa yang akan datang ditentukan oleh kualitas pemuda pada bangsa tersebut. Pemuda dinilai sebagai individu yang paling produktif dalam diri manusia dan memiliki kekuatan fisik yang kuat dibandingkan dengan usia-usia di atasnya maupun dibawahnya. Masa muda merupakan proses menuju dewasa yang memiliki kreativitas yang tinggi dan inovatif. Dengan demikian, pemuda dipandang mampu berkontribusi dalam pengembangan masyarakat. Penulisan ini akan mengkaji pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal demi mewujudkan pengembangan masyarakat. Pemuda diharapkan mampu memberikan kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk mampu mengidentifikasi potensi lokal yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun budaya demi mewujudkan pengembangan masyarakat. Pemuda bersama-sama dengan anggota masyarakat secara mandiri mampu mengidentifikasi, mengelola, dan melestarikan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui peran dan implementasi pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal demi mewujudkan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas : 1) peran pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal demi mewujudkan pengembangan masyarakat dan 2) implementasi pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal demi mewujudkan pengembangan masyarakat.

Kata Kunci : Pemuda, Motivator, Potensi Lokal, dan Pengembangan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pemuda adalah salah satu modal masyarakat yang dapat berkontribusi dalam kesejahteraan di masyarakat. Pemuda adalah sumber energi yang mampu memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus belajar agar menjadi lebih baik. Motivasi yang dimaksud adalah memberikan kesadaran berupa tindakan-tindakan yang mampu memberikan contoh bagi masyarakat. Pemuda dinilai sebagai individu yang paling produktif dalam diri manusia dan memiliki kekuatan fisik yang kuat dibandingkan dengan usia-usia di atasnya maupun dibawahnya. Pemuda merupakan komponen penting bagi suatu bangsa, namun disisi lain pemuda rentan terkena berbagai pengaruh negatif seperti narkoba, tindak kriminal, tawuran, dan pengangguran. Sejak tahun 2008, permasalahan pengangguran menjadi masalah besar bagi Bangsa Indonesia. Menurut data BPS Bulan Februari 2008, jumlah penganggur terbuka tercatat 9,42 juta orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang. Dari jumlah 9,42 juta orang pengangguran, terdiri dari 7,4 juta orang (78,38)



adalah pemuda usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia yang saat ini kurang lebih 210 juta orang, dari jumlah tersebut yang dikategorikan generasi muda atau yang berusia muda diantara 15 sampai 35 tahun diperkirakan 78 juta orang atau 37 % dari jumlah penduduk seluruhnya yang sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga kerja usia muda yang akan mengisi berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pengangguran di Indonesia sangat memperhatikan, banyak perhatian dan program yang diluncurkan untuk mengurangi pengangguran terutama pengangguran pada usia produksi.

Berbagai upaya tersebut mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2016 menjadi 7,02 juta. Namun walaupun terdapat pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia tetapi harus diperlukan usaha yang lebih untuk mengurangi pengangguran tersebut. Selain pengangguran, permasalahan lain terkait dengan kondisi pemuda di Indonesia adalah narkoba. Laporan akhir survey nasional tahun 2014 penyalahgunaan narkoba oleh BNN ada 3,8 juta sampai 4,1 juta pada satu tahun terakhir pada usia 10-59 tahun. Narkoba merupakan musuh terbesar bagi pemuda dan dapat merusak generasi bangsa. Kasus lainnya terkait dengan kekerasan, tindak kriminal, dan tawuran juga menjadi masalah dalam menghambat kemajuan pemuda. Apabila kondisi pemuda pada suatu bangsa demikian, maka kemajuan bangsa akan diragukan. Hal ini disebabkan karena kondisi pemuda saat ini mempengaruhi nasib suatu bangsa di masa depan. Sisi lain, pemuda memiliki kemampuan, motivasi dan daya kreativitas yang tinggi. Pengembangan potensi diri dan aktualisasi diri sangat diperlukan bagi pemuda. Motivasi dan kreativitas yang tinggi menjadi modal awal bagi pemuda dalam mengembangkan potensi lokal pada suatu daerah. Pemuda harus mampu mengemukakan ide-ide kreatif untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pemuda diharapkan mampu berkontribusi dalam memberikan kesadaran dan motivasi bagi masyarakat untuk mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila kondisi tersebut dapat terwujud maka pengembangan masyarakat dapat tercapai. Menurut Ife dan Frank (2014:409) pengembangan masyarakat adalah upaya yang bertujuan untuk membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Dengan demikian, kajian ini akan membahas Pemuda sebagai Motivator Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Lokal demi Mewujudkan Pengembangan Masyarakat.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Pemuda

Pemuda adalah penerus bangsa, kalimat ini mengandung makna yang sangat penting dan sudah dikenal oleh masyarakat. Namun kalimat tersebut di masyarakat hanya sebuah kalimat yang biasanya dijadikan sebagai semboyan semata. Pemuda adalah penerus bangsa berarti pemuda adalah penentu nasib bangsa. Para pahlawan berjuang untuk memerdekakan Indonesia, dan seharusnya pemuda berjuang dalam mempertahankan dan memajukan bangsa. Kemajuan maupun kemunduran Bangsa Indonesia akan bergantung pada pemuda saat ini. Menurut Wahyu (2009:92), kodrat pemuda yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam komitmennya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta sikap, komitmen, dan keberpihakan kepada masyarakat maka pemuda adalah elemen bangsa yang menyandang peran sebagai agen perubahan (*Agent of Change*) dan agen kontrol sosial (*Agent of Social*



Control) dalam masyarakat. Untuk menciptakan model pemuda yang dimaksud diatas maka Ormas adalah sarana dan arena yang tepat untuk belajar, bereksperimen dan berlatih menjadi *Agent of Change* dan *Agent of Social Control*. Penjelasan tersebut menekankan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang menyandang peran sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Agen perubahan ini akan membawa perubahan masyarakat ke arah lebih baik. Hal ini sesuai dengan kajian ini bahwa pemuda mampu sebagai *agen of change* dengan berperan sebagai motivator masyarakat.

Taufik Abdullah (1974) menyatakan ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam tatanan masyarakat, antara lain :

- a. Kemurnian idealismenya
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru
- c. Semangat pengabdianya
- d. Spontanitas dan pengabdianya
- e. Inovasi dan kreativitasnya
- f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri
- h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Penjelasan di atas memperkuat alasan pemuda memiliki tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Hal ini juga melandasi peran pemuda sebagai motivator masyarakat khususnya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat demi mewujudkan pengembangan masyarakat. Pemuda diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan segala kemampuan, kreativitas, dan inovasi yang dimiliki menuju pada membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik.

2. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat mengacu pada terwujudnya masyarakat yang mampu menyadari kebutuhannya sendiri dan saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan potensi diri maupun lokal yang dimiliki. Menurut Ife dan Frank (2014:409) pengembangan masyarakat adalah upaya yang bertujuan untuk membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur negara kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elite profesional, dan sebagainya yang kurang berperikemanusiaan dan sulit diakses. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat bertujuan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan mulai dari masyarakat itu sendiri hingga struktur dan birokrasi yang mengaturnya.

Pengembangan masyarakat merupakan pembangunan masyarakat dengan langkah awal membangun kesadaran masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhannya secara mandiri dan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan masyarakat. Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014:510), yang menyatakan bahwa pemberdayaan seharusnya menjadi tujuan dari semua bentuk pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosa kata, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan masyarakat berusaha untuk



memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk hidup mandiri. Sedangkan jika dikaitkan dengan proses pemberdayaan yaitu bahwa salah satu tujuan dari pengembangan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan (Edi, 2010:59). Pada dasarnya pemberdayaan mengandung dua pengertian atau kecenderungan :

- a. Pemberdayaan menekankan pada proses pemberian, memberikan atau mengalihkan sebaian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses memberikan atau mengalihkan kekuatan dan kekuasaan ini menurut Okley dan Marsdan dapat dilengkapi dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi-organisasi.
- b. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya dengan menggunakan potensi kritis yang ada pada dirinya, seperti dikemukakan oleh Paulo Freire (1972). Proses menstimulasi ini tidak selamanya berasal dari luar dirinya. Dari dalam sendiri orang juga bisa menstimulasi memberdayakan dirinya (Siti Partini Suardiman, 2011: 27-30).

Berdasarkan penjelasan terkait beberapa definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat aktivitas memberikan dan mengalihkan kekuatan berupa pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kepada individu dengan tujuan memberikan “daya kepada individu tersebut. Konsep pemberdayaan dalam kaitan dengan mewujudkan pengembangan masyarakat merupakan proses memberikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki dan mencari solusi bersama untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan mengelola, memanfaatkan dan melestarikan potensi yang dimiliki. Ife dan Frank (2014:340) menjelaskan bahwa proses pengembangan masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sarana untuk sebuah tujuan tetapi suatu tujuan yang penting sehingga proses dan hasil atau sarana dan tujuan digabung. Ife menambahkan bahwa langkah-langkah pengembangan masyarakat yaitu:

- a. Proses merupakan milik masyarakat, bukan milik pekerja sosial.
- b. Proses harus berjalan sesuai dengan langkah masyarakat bukan langkah yang diinginkan oleh pekerja sosial.
- c. Proses pengembangan terjadi secara bertahap, bukan perubahan radikal yang dipaksakan.
- d. Pekerja pengembangan hanya membantu menciptakan kondisi yang tepat untuk pengembangan , dan membantu menjamin sumber daya namun langkah pengembangan benar-benar di luar kewenangannya.
- e. Kadangkala, batasan-batasan dunia luar menghendaki bahwa proses dibuat kesepakatan untuk memenuhi deadline, dan masyarakat dan pekerja perlu membuat keputusan untuk efek tersebut. Namun tetap memberikan waktu yang memadai untuk proses tersebut yang disesuaikan dengan masyarakat.

Pengembangan masyarakat berjalan secara natural tanpa ada pemaksaan. Pemuda diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berproses dan terus memajukan dirinya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Masyarakat diharapkan mampu mengelola dan memenuhi kebutuhannya sendiri secara bersama-sama. Pengembangan masyarakat akan



terwujud apabila terdapat kerjasama antar masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, peran pemuda adalah mampu menjadi motivator dan penggerak masyarakat untuk menyadarkan kebutuhan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kajian ini akan dibahas bagaimana pemuda sebagai salah satu komponen masyarakat berkontribusi dalam mewujudkan pengembangan masyarakat yang mampu berperan sebagai motivator masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Pemuda sebagai Motivator Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Lokal demi Mewujudkan Pengembangan Masyarakat.

Pemuda sebagai motivator masyarakat artinya pemuda memberikan motivasi, penyadaran, dan menggerakkan masyarakat dalam melakukan suatu hal tertentu. Dalam masyarakat, pemuda dinilai lebih produktif dan inovatif dibandingkan kelompok lainnya. Peran pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal artinya pemuda mampu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh daerahnya baik potensi sumber daya maupun potensi alam. Pemuda diharapkan mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk kemajuan daerah bersama, artinya pemuda mampu menjadi penemu dan penggerak masyarakat untuk secara bersama-sama memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk kemajuan bersama.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya, potensi alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia sangat berlimpah, namun hanya sebagian kecil dari masyarakat kita yang benar-benar mampu mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut dengan benar. Tanah yang subur, kekayaan laut, kekayaan bahan tambang, dan panorama alam yang indah menjadi modal yang kuat bagi kemajuan Negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya, masyarakat Indonesia belum mampu mengelola secara maksimal. Selain potensi alam, potensi budaya dan adat istiadat dari masing-masing daerah juga beragam. Hal ini menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, pemuda sebagai komponen masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerahnya. Pemuda mampu mengajak masyarakat secara bersama-sama mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Sebagai contoh:

Suatu daerah berada di daerah pegunungan, tanahnya sangat subur dan segala macam sayuran dapat tumbuh subur. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sayur mayur. Mereka akan mendapatkan uang ketika musim panen tiba, namun ketika musim panen hasil perkebunan tersebut dijual ketengkulak dengan harga yang murah. Dengan kondisi demikian, pemuda diharapkan mampu memberikan solusi bagi masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki berupa tanah yang subur dan memiliki perkebunan sayur mayur. Pemuda yang memiliki kemampuan yang lebih kreatif diharapkan mampu memanfaatkan hasil perkebunan tidak hanya dijual berupa sayuran mentah, namun berbagai sayuran tersebut dapat diolah kembali agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hasil perkebunan dapat diolah menjadi aneka macam makanan seperti dodol tomat, keripik sayuran, nugget sayur, dan olahan lainnya yang mudah dibuat oleh masyarakat. Pemuda dapat memberikan penyadaran dan pelatihan bagi masyarakat dalam membuat aneka macam makanan tersebut. Tidak hanya mengelola menjadi makanan namun pemuda juga perlu



memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam hal mengemas dan memasarkan produk yang dihasilkan.

Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki secara maksimal, mata pencaharian penduduk tidak hanya sebagai petani namun juga sebagai produsen makanan olahan dari sayuran. Dengan demikian, pendapatan masyarakat akan meningkat karena mendapatkan uang tidak hanya ketika musim panen tiba. Kondisi demikian dapat tercapai apabila adanya kreativitas dan kemauan masyarakat untuk berusaha mengelola apa yang dimiliki secara maksimal. Pemuda diharapkan sebagai komponen masyarakat yang mampu menjadi motivator dan penggerak masyarakat.

Ilustrasi di atas mampu menggambarkan peran pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal, masih banyak potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia yang belum dimanfaatkan. Dengan demikian, pemuda diharapkan dapat berperan sebagai:

- a. Penggerak, pemuda mampu membuat dan menerapkan berbagai strategi untuk mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.
- b. Motivator, pemuda mampu memberikan semangat dan dorongan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki.
- c. Fasilitator, pemuda mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan ketrampilan dan potensi lokal masyarakat setempat.

Apabila masyarakat mampu melakukan hal tersebut maka masyarakat akan belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan maupun potensi yang dimiliki dan secara bersama-sama akan memajukan kesejahteraan bersama.

2. Implementasi Pemuda sebagai Motivator Masyarakat dalam Pemanfaatan Potensi Lokal demi Mewujudkan Pengembangan Masyarakat

Peran pemuda sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal harus diwujudkan dengan berbagai tindakan nyata. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal demi mewujudkan pengembangan masyarakat adalah:

- a. Identifikasi potensi lokal, tahap ini sangat diperlukan untuk mengetahui potensi lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemuda mengidentifikasi potensi wilayah yaitu potensi hasil pertanian, perkebunan atau perikanan, potensi wisata, dan potensi geografis. Identifikasi potensi lokal bertujuan untuk mengetahui potensi apa saja yang harus dikembangkan oleh masyarakat agar mampu mengelola kekayaan alam yang dimiliki.
- b. Identifikasi ketrampilan lokal, tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Ketrampilan tersebut dimiliki oleh mayoritas masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari kegiatan ini mengetahui ketrampilan yang dimiliki masyarakat sehingga diharapkan ketrampilan tersebut mampu mendukung kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.
- c. Perencanaan kegiatan, pemuda membuat rencana kegiatan pemberdayaan yang mendukung pemanfaatan hasil potensi dan ketrampilan lokal masyarakat.

- d. Pelaksanaan kegiatan, pemuda mampu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan yang sudah direncanakan. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan.

Pemuda dalam hal ini berperan dalam analisis hingga pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Indikator keberhasilan dari program ini yaitu mampu membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan potensi dengan baik.

- Memanfaatkan, masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimilikinya. Misalnya, menggunakan hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ataupun memanfaatkan potensi lingkungan seperti air terjun untuk obyek wisata.
- Mengelola, masyarakat mampu merawat, mengendalikan, dan mengembangkan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimilikinya sehingga terhindar dari eksploitasi sumber daya alam.
- Melestarikan, masyarakat mampu melestarikan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimilikinya.

Implementasi kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan beserta peran pendamping desa dapat digambarkan dengan bagan di bawah ini:



Bagan 1. Implementasi Peran Pemuda dalam Pemanfaatan Potensi Lokal

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diharapkan mampu memperjelas implementasi sebagai motivator masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal demi mewujudkan pengembangan masyarakat.

D. PENUTUP

Pemuda adalah komponen masyarakat yang memiliki kontribusi dalam pengembangan masyarakat. Pemuda mampu berperan sebagai motivator masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki pada daerah tersebut. Pemuda memberikan pengetahuan



dan ketrampilan bagi masyarakat agar mampu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki dan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemuda dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan dan kesejahteraan pada masyarakat tersebut.

REFERENSI

- Ace Suryadi. (2009). *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Menberdayakan Rakyat :Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. (2014). *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Partini. (2011). *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gama Press.
- Taufik Abdullah. (1974). *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta:LP3S.
- Wahyu Ishardino. S. (2009). Peran serta Pemuda dalam Membangun Masyarakat. *Jurnal Madani*,1, 5: 88-93.



HAKIKAT PENDIDIK DALAM DIMENSI DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Wahyudi¹

¹*Mahasiswa Pascasarjana Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga
E-mail: 4h41lu1@gmail.com, noerwahyudi43@yahoo.com*

ABSTRAK

Pendidik memegang peran yang sangat penting dalam tujuan dan sasaran pendidikan, yakni membentuk peserta didik supaya berkepribadian mandiri serta bersikap dewasa dalam menyikapi problema hidup yang semakin kompleks pada era globalisasi ini. Pendidik dalam tujuan pendidikan Islam secara umum diorientasikan untuk membentuk peserta didik menjadi insan kamil dan mampu menjadi khalifah Allah SWT di Bumi. Oleh sebab itu, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak sekolah dalam mempersiapkan pendidik yang benar-benar dapat menjadi teladan, memahami hakikatnya sebagai seorang pendidik serta mengetahui tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Sehingga dalam transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik seperti penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan dan spiritual bisa teroptimalkan.

Kata Kunci: Hakikat Pendidik, Dimensi, Perspektif Pendidikan Islam

Abstract

Educator holds a very important role in the educational goals and objectives, namely to build learners' personality so independent and mature way of dealing with life's problems are increasingly complex in the globalization era. Educators in Islam in general educational goals are oriented to form the learners to be perfect man, and able to be the Caliph of Allah on earth. Therefore, the government should cooperate with the school in preparing educators who truly can be an example, to understand the essence as an educator as well as knowing their duties and functions as an educator. Thus, in the transformation of knowledge to learners such as the planting of the moral, social, intellectual, and spiritual skills can be optimized.

Keyword: Itself Educators, Dimensions, Perspectives of Islamic Education

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu bentuk interaksi manusia, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional¹ disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang

¹ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 3.



diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.² Rumusan tujuan tersebut menuntut terwujudnya peserta didik yang berkualitas, cerdas ilmu pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertakwa serta berakhlak karimah.

Jika dilakukan pengamatan dari segi aktualisasinya bahwa pendidikan merupakan proses interaksi antara pendidik dan anak didiknya. Pendidik dan anak didik adalah padanan frase yang serasi, seimbang dan harmonis. Hubungan keduanya berada dalam relasi kejiwaan yang saling membutuhkan. Pendidik berperan sebagai pengajar (pemberi materi dalam pembelajaran) dan anak didik berperan sebagai pelajar (penerima materi dalam proses belajar mengajar). Kemudian, pendidik berkewajiban meluruskan pribadi anak didik yang dinamis agar tidak membelok dari kebaikan, karena pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap anak didiknya.³ Hal tersebut dilakukan supaya dari interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik tercipta satu tujuan yaitu kebaikan.

Oleh sebab itu, Pendidik memegang peran yang sangat penting dalam tujuan dan sasaran pendidikan yakni membentuk anak didik supaya berkepribadian mandiri serta bersikap dewasa dalam menyikapi problema hidup yang semakin kompleks pada era globalisasi ini. Pendidik dalam tujuan pendidikan Islam secara umum diorientasikan untuk membentuk anak didik menjadi insan kamil dan mampu menjadi khalifah Allah SWT di bumi.⁴

Hakikat inilah yang dijadikan pendidik sebagai landasan untuk melakukan kegiatan transformasi ilmu pengetahuan kepada anak didik, yang mana anak didik merupakan objek dalam penanaman nilai moral, sosial, intelektual, keterampilan dan spiritual. Sehingga dalam perkembangan pendidikan yang semakin maju, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mempersiapkan pendidik yang benar-benar dapat menjadi teladan dan memahami hakikatnya sebagai seorang pendidik serta mengetahui tugas dan fungsinya sebagai pendidik.

Berdasarkan pemaparan singkat tentang hakikat pendidik tersebut maka mengkaji tentang hakikat pendidik dalam pendidikan, terkhusus pendidikan Islam sangat menarik dan dianggap perlu dilakukan. Oleh sebab itulah, penjelasan tentang hakikat pendidik dalam pendidikan Islam akan diuraikan secara mendetil pada sub pembahasan di bawah ini, yang mencakup: hakikat, tugas dan fungsi, kode etik, syarat-syarat atau kompetensi pendidik muslim (profesional, pedagogik, kepribadian/personal, sosial serta kepemimpinan) dan sifat yang harus dimiliki pendidik muslim.

² Mengenai definisi pendidikan, lihat juga Deni Damayanti, *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah: Teori dan Praktik Internalisasi Nilai* (Yogyakarta: Araska, 2014), hlm. 9.

³ Mengenai hakikat pendidik dalam pendidikan, lihat Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 31.

⁴ M. Agus Nuryanto, "Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam: Perspektif Paedagogik Kritis" dalam *HERMENEIA Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 9, Nomor 2 Desember 2010, hlm. 213.

B. HAKIKAT PENDIDIK DALAM DIMENSI DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

1. Hakikat Pendidik dalam Islam

Secara etimologi pendidik adalah orang yang mendidik.⁵ Ditinjau dari segi terminologi, pendidik adalah orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman kepada anak didik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan. Jadi disimpulkan bahwa, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman kepada anak didik dan memberi pertolongan dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan.

Secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan berupaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁶ Tujuannya adalah supaya anak didik mencapai tingkat kedewasaannya, mandiri dalam melaksanakan tugasnya selaku makhluk individual maupun sosial serta memahami hakikat dan melaksanakan tugasnya di bumi sebagai hamba Allah SWT.

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan sebutan sebagai berikut:⁷

- Murabbi** adalah orang yang menjadi model, contoh dan sentral identifikasi diri atau menjadi pusat panutan, teladan dan konsultan bagi peserta didiknya.
- Mu'allim** adalah orang yang menguasai ilmu, mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan *transfer* ilmu pengetahuan, *internalisasi* serta *implementasinya*.
- Mu'addib** adalah orang yang memperbaiki, melatih, mendisiplinkan, mengambil tindakan dan mendidik. Artinya, *mu'addib* harus mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan.
- Mudarris** adalah pengajar atau guru. Artinya, *mudarris* adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan ruang gerak serta lingkungan dimana ilmu pengetahuan dan keterampilan diberikan. Misalnya, pendidik dalam *setting* sekolah disebut dengan guru, diperguruan tinggi disebut dengan dosen, di rumah secara pribadi disebut dengan tutor, di pusat latihan disebut instruktur atau *trainer* dan di lembaga pendidikan khususnya yang mengajarkan agama disebut dengan guru agama.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 353.

⁶ Ramayulis, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 19.

⁷ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, Cet I (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), hlm. 203.



2. Tugas Pendidik dalam Pendidikan Islam

- a. Tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Tugasnya ialah berupaya menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁸
- b. Tugas pendidik pada umumnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Korektor. Pendidik bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, koreksi yang dilakukan bersifat menyeluruh dari afektif sampai ke psikomotor.
 - 2) Inspirator. Pendidik menjadi inspirator atau ilham bagi kemajuan belajar mahasiswa, petunjuk bagaimana belajar yang baik dan mengatasi permasalahan lainnya.
 - 3) Informator. Pendidik harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 4) Organisator. Pendidik mampu mengelola kegiatan akademik (belajar)
 - 5) Motivator. Pendidik mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar
 - 6) Inisiator. Pendidik menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran
 - 7) Fasilitator. Pendidik dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar
 - 8) Pembimbing. Pendidik membimbing anak didik manusia dewasa susila yang cakap
 - 9) Demonstrator. Jika diperlukan pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah dipahami
 - 10) Pengelola kelas. Pendidik mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif
 - 11) Mediator. Pendidik menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaktif edukatif.
 - 12) Supervisor. Pendidik hendaknya dapat, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran, dan
 - 13) Evaluator. Pendidik dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur.⁹

3. Fungsi Pendidik dalam Pendidikan Islam

Al-Quran telah mengisyaratkan peran para Nabi dan pengikutnya dalam pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu *ilahiyyah* serta aplikasinya. Isyarat tersebut terdapat dalam QS. Al-Imran: 79, Al-Baqarah: 129 & Al-Imran: 164.

- a. QS. Al-Imran: 79

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّنِيذِينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya: *tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi*

⁸ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam* (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2013), hlm. 93.

⁹ Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm.139.

(dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani (orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah), karena kamu selalu mengajarkan Al-kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya."¹⁰

b. Al-Baqarah: 129

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

Artinya: ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab (Al-Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

c. Al-Imran: 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

Artinya: sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dari gambaran ayat diatas, disimpulkan bahwa guru memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi pembersihan. Artinya, seorang pendidik berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, pengembang serta pemelihara fitrah manusia.
- 2) Fungsi pengajaran. Artinya, seorang guru berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kode Etik Pendidik Muslim

Jika pendidik muslim ingin berhasil dalam menjalani tugas serta kewajiban profesinya sebagai pendidik, maka ia harus mematuhi 8 kode etik sebagai berikut:

- a. Menyayangi serta memperlakukan anak didik sebagaimana perlakuan dan kasih sayang pendidik terhadap anaknya sendiri. Supaya timbul percaya diri dan rasa tentram pada diri peserta didik.
- b. Bersedia sepenuhnya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan tidak mengajar untuk mencari upah atau mendapatkan penghargaan dan tanda jasa. Akan tetapi mengajar karena semata-mata mencari keridhaan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.

¹⁰ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, di Sekolah dan di Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 169-170.



- c. Memberi nasihat kepada anak didik dengan cara mengingatkannya bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan mencari kekayaan, kedudukan (jabatan) dan popularitas.
 - d. Mencegah (tidak membiarkan) anak didik jatuh kedalam akhlak tercela.
- e. Mengingat guru sebagai teladan maka kebaikan hati dan toleransi haruslah dimilikinya. Sebagai contoh: kepakaran guru dalam spesialisasi keilmuan tertentu tidak menyebabkan memandang remeh disiplin keilmuan lainnya.¹¹
- f. Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman anak didiknya.
- g. Terhadap anak didik yang berkemampuan rendah, pendidik harus menyampaikan materi pelajaran sejelas mungkin agar mereka paham dengan materi yang disampaikan tersebut.
- h. Memberi ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, sehingga terkolaborasi antara ucapan dan tindakan.¹²

Jadi dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa seorang pendidik sebenarnya bukan hanya bertugas memindahkan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya saja, akan tetapi pendidik juga bertanggungjawab atas pengelolaan dan perencanaan. Oleh karena itu, tugas dan peran pendidik dalam pendidikan dikerucutkan lagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) sebagai pengajar (*teacher*), bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan; 2) sebagai pendidik (*educator*), yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian *kamil* seiring dengan tujuan Allah SWT menciptakannya; 3) Sebagai managerial (*leader*), yang memimpin, mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait, terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.

5. Syarat dan Sifat Pendidik

- a. Syarat-syarat yang Harus Dimiliki oleh Pendidik

Pasal 8 undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen berbunyi: “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional”.¹³

Pada poin pertama dalam pasal 8 di atas terdapat kalimat “guru wajib memiliki kualifikasi akademik”. Maksudnya ialah pendidik setidaknya diwajibkan memiliki kualifikasi ini. Ternyata hal tersebut sejalan dengan Pasal 13 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, yang berbunyi: “guru pendidikan Agama minimal harus memiliki kualifikasi akademik Strata 1/Diploma IV, dari program studi pendidikan agama dan/atau program studi agama dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan memiliki sertifikat profesi

¹¹ Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam...*, hlm. 208.

¹² Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Pendidikan Islam*, Penerjemah: Mahmud Arif (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 130-131.

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*, hlm. 6.



guru pendidikan Agama”.¹⁴ Akan tetapi pada pasal 13 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 ini dikhususkan untuk guru pendidikan Agama saja.

b. Kompetensi yang Harus Dimiliki Pendidik

Jika ingin berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik maka ia harus mempunyai kompetensi yang menunjang. Ternyata mengenai hal ini telah diatur pada Pasal 10 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, berbunyi: “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.¹⁵

Kemudian, pasal 10 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tersebut ternyata sejalan dengan Pasal 16 ayat 1 pada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, yang berbunyi: “guru pendidikan Agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan”.¹⁶ Hanya saja mengenai kompetensi yang harus dimiliki pendidik pada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 ini ditambah satu kompetensi yakni kompetensi kepemimpinan.

Kemudian, Penjabaran mengenai kelima kompetensi tersebut tertera pada pasal 16 ayat 2-6, yaitu:

- 1) Pasal 16 ayat 2. Kompetensi pedagogik¹⁷, meliputi: a) pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; b) penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama; c) pengembangan kurikulum pendidikan agama; d) penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama; e) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama; f) pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama; g) komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; h) penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama; i) pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan j) tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.
- 2) Pasal 16 ayat 3. Kompetensi kepribadian¹⁸, meliputi: a) tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; b) penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; c) penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; d) kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta e) penghormatan terhadap kode etik profesi guru.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, hlm. 8.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005..., hlm 6.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010..., hlm. 9

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.



- 3) Pasal 16 ayat 4. Kompetensi Sosial¹⁹, meliputi: a) sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; b) sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan c) sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.
- 4) Pasal 16 ayat 5. Kompetensi Profesional²⁰, meliputi: a) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama; b) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama; c) pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif; d) pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan e) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
- 5) Pasal 16 ayat 6. Kompetensi kepemimpinan²¹, meliputi: a) kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama; b) kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; c) kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta d) kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Sifat-sifat yang Harus Dimiliki oleh Pendidik Muslim

- a. *Rabbaniyah*. *Rabbaniyah* adalah mengaitkan diri kepada Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung melalui ketaatan kita kepada syari'at-Nya serta melalui pemahaman akan sifat-sifat-Nya. Jika pendidik telah memiliki sifat rabbani, maka seluruh kegiatan pendidikannya bertujuan untuk menjadikan anak didiknya sebagai generasi *rabbani* yang mentaati perintah dan memahami sifat-sifat Tuhan YME.
- b. Ikhlas. Artinya, aktivitas pendidik bukan hanya untuk menambah wawasan keilmuannya saja, akan tetapi juga untuk meraih keridhaan Allah SWT serta mewujudkan kebenaran.
- c. Sabar. Dalam hal ini, pendidik memberi materi pelajaran tahap demi tahap secara berlahan tapi pasti, tidak tergesa-gesa dan memaksakan keinginannya kepada siswa untuk melihat hasil seperti yang diharapkannya.
- d. Jujur. Ketika menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik, pendidik harus menerapkan materi pelajaran sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepadanya.²²
- e. Intellect. Seorang pendidik harus senantiasa meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kajiannya. Jadi seorang pendidik mesti memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, baik dalam ilmu-ilmu keislaman, sejarah, geografi, bahasa, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10-11

²² Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam...*, hlm. 170-172.

- 
- 
- f. Cerdik dan terampil. Seorang pendidik harus cerdik dan terampil dalam menciptakan metode pengajaran yang variatif serta sesuai dengan situasi dan materi pelajaran. Artinya, kepemilikan ilmu saja tampaknya belum menandai peran seorang pendidik, karena bagaimanapun dia juga dituntut untuk mampu menyampaikan pengetahuannya kepada anak didik sesuai dengan taraf kemampuan dan kapasitas akal anak didik.
 - g. Tegas. Seorang pendidik harus tegas dan meletakkan sesuatu sesuai proporsinya sehingga dia akan mampu mengontrol dan menguasai siswa. Jika dia dituntut untuk keras, dia tidak boleh menampakkan kelunakkannya dan jika dia dituntut untuk lembut, maka dia harus menjauhi kekerasan.
 - h. Memahami psikologi. Seorang pendidik diharuskan memahami psikologi anak, psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Sehingga, ketika mengajar dia akan memahami dan memperlakukan anak didiknya sesuai kadar intelektual dan kesiapan psikologisnya.
 - i. Peka fenomena kehidupan. Pendidik harus peka terhadap fenomena kehidupan, sehingga dia mampu memahami berbagai kecenderungan dunia beserta dampak positif dan negatifnya terhadap anak didik, terutama dampak terhadap akidah dan pola pikir mereka.
 - j. Adil. Artinya, seorang pendidik tidak berpihak dan mengutamakan kelompok tertentu. Dalam hal ini, dia harus menyikapi setiap anak didiknya sesuai dengan perbuatan dan bakatnya.²³

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab memberikan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman kepada anak didik dan memberi pertolongan dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan. Secara khusus, pendidik dalam persepektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan berupaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan *murabbi*, *mu'allim*, *mu'addib*, *mudarris*, dan *mursyid*.
- b. **Fungsi Pendidik dalam Pendidikan Islam.** Al-Quran telah mengisyaratkan peran para Nabi dan pengikutnya dalam pendidikan dan fungsi fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu *ilahiyyah* serta aplikasinya. Isyarat tersebut terdapat dalam QS. Al-Imran: 79, Al-Baqarah: 129 & Al-Imran: 164. Dari gambaran ayat tersebut, disimpulkan bahwa guru memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) fungsi pensucian. Artinya, seorang pendidik berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, pengembang serta pemelihara fitrah manusia; dan 2) fungsi pengajaran. Artinya, seorang guru berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan berbagai keyakinan kepada manusia agar mereka menerapkan seluruh pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari.

²³ *Ibid.*, hlm. 173-175.



- c. Tugas utama pendidik dalam pendidikan Islam ialah berupaya menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sedangkan tugas pendidik pada umumnya sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator.

- d. Kode Etik Pendidik Muslim

Jika pendidik muslim ingin berhasil dalam menjalani tugas serta kewajiban profesinya sebagai pendidik, maka ia harus mematuhi 8 kode etik sebagai berikut: 1) menyayangi anak didik seperti menyayangi anaknya sendiri; 2) mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan tidak mengajar untuk mencari upah atau mendapatkan penghargaan dan tanda jasa. Akan tetapi mengajar karena semata-mata mencari keridhaan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya; 3) memberi nasihat kepada anak didik dengan cara mengingatkannya bahwa tujuan menuntut ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan mencari kekayaan, kedudukan (jabatan) dan popularitas; 4) Mencegah (tidak membiarkan) anak didik jatuh kedalam akhlak tercela; 5) kepakaran guru dalam spesialisasi keilmuan tertentu tidak menyebabkan memandang remeh disiplin keilmuan lainnya; 6) Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman anak didiknya; 7) Terhadap anak didik yang berkemampuan rendah, pendidik harus menyampaikan materi pelajaran se jelas mungkin agar mereka paham dengan materi yang disampaikan; dan 8) Memberi ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, sehingga terkolaborasi antara ucapan dan tindakan.

- e. Syarat dan Sifat Pendidik dalam Pendidikan Islam

Syarat-syarat yang harus dimiliki pendidik muslim jika ingin berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik maka ia harus mempunyai kompetensi yang menunjang, diantaranya yaitu: kompetensi personal, sosial, professional, paedagogik serta kompetensi kepemimpinan. Kemudian kelima kompetensi tersebut diharapkan dan diarahkan supaya bersifat *religious*. Sedangkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik yaitu: *rabbaniyah*, ikhlas, sabar, jujur, intelektual, cerdas dan terampil, tegas, memahami psikologi, peka fenomena kehidupan dan adil.

2. Saran

Sebagai calon pendidik (guru agama dan guru bimbingan dan konseling) dalam pendidikan Islam, maka sudah seharusnya kita menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hakikat guru. Supaya kita benar-benar paham tentang hakikat, tugas dan peran, kode etik, tujuan, syarat dan sifat serta kompetensi yang harus dimiliki pendidik muslim.

REFERENSI

- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, di Sekolah dan di Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Damayanti, Deni, *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah: Teori dan Praktik Internalisasi Nilai*, Yogyakarta: Araska, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.



- Kurniawan, Syamsul dan Mahrus, Erwin, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta: Ar-Ruz Media, 2013.
- Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam: Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi Arus Global*, Cet I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014.
- M. Agus Nuryanto, "Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam: Perspektif Paedagogik Kritis" dalam *HERMENEIA Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 9, Nomor 2 Desember 2010.
- Mujib, Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia Group, 2006.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*.
- Ramayulis, *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Ramayulis dan Nizar, Syamsul, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Ridla, Muhammad Jawwad, *Tiga Aliran Utama Pendidikan Islam*, Penerjemah: Mahmud Arif, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka belajar, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen*.



UTOPIA PERUBAHAN MENANTI LAHIRNYA PEMUDA EKSISTENSIALIS

Ridhatullah Assya'bani¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Rassyabani@gmail.com

ABSTRAK

Dunia saat ini dihadapkan pada—apa yang disebut oleh Ziauddin Sardar sebagai—*global problematique*, problem yang terintegrasi dengan berbagai peristiwa global. Situasi ini tanpa disadari telah menubuh pada hampir setiap negara, termasuk Indonesia, dan menimbulkan kemulut muliti-dimesional yang menjadi rangkaian interdependensi masalah. Usaha untuk melakukan perubahan pada akhirnya menjadi utopis dan nyaris mustahil. Gagasan pemuda eksistensialis dinantikan untuk menjadi tawaran alternatif bagi kemulut ini. Salah satu langkah melahirkan pemuda eksistensialis adalah dengan merekonstruksi pola pikir dan membenahi karakter. Melalui rekonstruksi ini diharapkan pemuda eksistensialis mampu menegasikan utopia perubahan itu, karena pemuda eksistensialis merupakan mereka yang tidak hanya bebas dalam menentukan arah hidup, tetapi juga mereka yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Alhasil, sebagai solusi dari *global problematique*, pemuda eksistensialis diharapkan lahir dengan ide-ide cemerlang dan merealisasikannya secara total. Implikasi dari studi ini, secara teoritis, pemuda eksistensialis bukan mereka yang menyerah pada kondisi sosial yang carut-marut, melainkan mereka yang berusaha menunjukkan eksistensinya dan merangkul yang ada di sekitarnya untuk menciptakan tatanan sosial yang kondusif. Secara praksis, kajian ini menjadi langkah penyadaran terhadap pemuda bahwa mereka seharusnya memiliki pemikiran integralistik dan eksistensialis dengan menempatkan dirinya sebagai individu yang berperan penting dalam mendesain berbagai keilmuan seraya menyadari ke-diri-annya dalam dunia yang faktis ini.

Kata Kunci: Global Probematique, Utopia, Pemuda, Eksistensialis, Pola Pikir, Karakter

A. PENDAHULUAN

Umat manusia berkembang menjadi satu sistem dengan kesalingterkaitan satu dengan yang lainnya. Saling keterkaitan tersebut membentuk suatu ikatan global yang saling terintegrasi, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru, seperti ketergantungan dunia pada sumber-sumber energi, bahan mentah, pangan, dan bahkan lingkungan hari semakin sempit.¹ Keadaan inilah—meminjam istilah Ziauddin Sardar—yang disebut dengan *global problematique*, yakni masalah yang memiliki keterkaitan dari peristiwa-peristiwa global dengan berbagai macam kecenderungan-kecenderungan. Sehingga menyebabkan kekacauan dalam dunia, termasuk Indonesia, bentuk kekacauan ini seperti kemiskinan semakin meningkat, kekerasan terjadi dimana-mana, sumber daya alam semakin menipis dan lain sebagainya. Dengan kata lain, masalah-masalah yang dihadapi umat manusia sekarang

¹Conrad H. Waddington, *The Man-Made Future* (London: Croom Helm, 1978), 9.



memiliki keterhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan bersifat multi-dimensional yang bersifat mengikat, pada akhirnya mengganggu stabilitas dan mengancam kelangsungan umat manusia secara keseluruhan.² Pada titik inilah yang disebut dengan antara tantangan dan harapan, disatu situasi ini menjadi tantangan untuk diselesaikan, disisi lain menjadi harapan yang berujung pada utopia belaka.

Adapun masalah-masalah tersebut di antaranya:³ peningkatan pengaruh lingkungan terhadap aktivitas manusia; kekurangan sumber-sumber daya yang dapat dilestarikan; peningkatan eksponensial penduduk dunia; keterbatasan produksi pertanian untuk mencukupi pangan penduduk dunia; aktivitas manusia yang cenderung modernisasi dan industrialisasi; peningkatan kecenderungan pada urbanisasi dan megalopolis; semakin meluas dampak buruk dari aktivitas-aktivitas antara negara-negara berkembang dengan negara-negara sedang berkembang; ketergantungan penggunaan teknologi yang semakin meningkat pada aktivitas manusia; kecenderungan budaya indrawi yang semakin meningkat, seperti yang bersifat empiris, sekular, humanistik, pragmatik, utiliter, dan hidonistik, sehingga mengesampingkan hal-hal yang bersifat spiritual; kekurangan lapangan pekerjaan yang menyebabkan pengangguran semakin meningkat; dan rangsangan terhadap hal-hal baru yang diakibatkan oleh semakin besarnya ketidakseimbangan konsumsi bukan disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, *global problematique* juga menebarkan sejenis penyakit yang saat ini menggejala hampir di seluruh wilayah bangsa di dunia: *globalphobia* (ketakutan/ketidaksiapan terhadap globalisasi). Keadaan ini biasa dirasakan oleh orang-orang Dunia Ketiga yang berlumur kemiskinan dan kehancuran sosial.⁴ Hal ini mendapat relevansinya di Indonesia, berdasarkan profil kemiskinan BPS menjelaskan dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin meningkat. Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa dikatakan belum stabil dan masih mengalami krisis ekonomi.

Selain masalah ekonomi, juga terjadi bentuk-bentuk kekerasan, seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan antar remaja dan lain-lain, sehingga mengakibatkan tidak hanya berwujud krisis ekonomi, krisis ekologi, krisis minyak tanah, krisis makanan, dan krisis kesehatan, tapi juga menjelma menjadi krisis eksistensi (*existencial crisis*). Masyarakat—termasuk pemuda—Indonesia pada akhirnya didera oleh kecemasan eksistensial yang begitu kronis. Inilah mengapa diperlukan rekonstruksi pola pikir dan pembentukan karakter (*arakter building*) sebagai salah satu alternatif untuk melahirkan pemuda eksistensial, yang mampu melahirkan ide-ide cemerlang dan merealisasikannya sebagai salah satu alternatif untuk mencapai perubahan yang nyata.

² Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilisation*, (terj. Rahmani Astuti, *Rekayasa Masa depan Islam*) (Bandung: Mizan, 1989), 99.

³ Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilisation*, hlm. 100-101.

⁴ Lih. M. Bisyrri, "Mempertimbangkan Pendekatan Baru," dalam *Jurnal Edukasi*, (Sumenep: Dinas Pendidikan, Nomor 05, 2006), hlm. 16

⁵ Lihat tribunnews.com: Potret Kemiskinan di Indonesia 2016 : Dalam Angka Berkurang, di Desa Justru Makin Parah dirilis Kamis, 21 Juli 2016 21:24 WIB. Diakses Jumat, 21 Oktober 2016.

B. PENDIDIKAN BERBASIS EKSISTENSIALIS

“Anakmu bukan milikmu, mereka putera-puteri Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau lahir, namun tidak dari engkau, mereka ada padamu, namun bukan hakmu...” (Khalil Gibran).

Puisi ini menyiratkan makna bahwa peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan, menuntun manusia dalam pencarian jati dirinya sendiri. Mengacu pada KBBI, pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu sehingga memiliki pola pikir, perilaku dan karakter yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan sangat terkait dengan aktivitas manusia yang bertujuan membantu pengembangan manusia menjadikan manusia yang memiliki kepribadian bijaksana.⁶ Salah satu jalan untuk mencapai tujuan ini ialah melalui pendidikan berbasis eksistensialis.

Berbicara eksistensialis⁷ tentunya tidak akan lepas dari tokoh-tokoh eksistensialisme, seperti Soren Kierkegaard (1813-1855) dianggap sebagai tokoh utama dalam filsafat eksistensialisme; kemudian dipopolekan oleh Jean Paul Satre (1905-1980). Eksistensialisme Jean Paul Satre inilah yang banyak mempengaruhi filsafat eksistensialisme selanjutnya dan menjadi rujukan dan simbol eksistensialisme. Tokoh lain juga yang dianggap sebagai eksistensialis adalah Karl Jaspers (1883-1969), dan Gabriel Marcel (1889-1973).

Bagi Satre, “*Man is nothing else but that which he makes of himself*”, manusia adalah sebagaimana ia menjadikan dirinya sendiri.⁸ Pernyataan Satre ini menemukan relevansinya dengan puisi Gibran diatas “Anakmu bukan milikmu, mereka putera-puteri Sang Hidup yang rindu pada diri sendiri...”, memberikan pemahaman bahwa manusia berhak memiliki kebebasan dan menentukan arah hidupnya. Lebih lanjut Satre menegaskan *man is free, or, rather man is freedom* (kebebasan seharusnya dimiliki oleh setiap manusia). Artinya, kebebasan merupakan hal yang niscaya untuk manusia, bahkan menjadi ciri khas dari manusia. Inilah yang harus disadari oleh pemuda saat ini. Meskipun demikian, menjadi eksistensialis bukan berarti tidak sadar terhadap kebenaran dan kesalahan, baik dan buruk. Menjadi eksistensialis berarti menyadari keberadaan dirinya ditengah-tengah situasi yang bersifat relatif. Lalu, muncul pertanyaan apakah manusia bebas tanpa batas, dan mengesampingkan rasa tanggung jawab?

Untuk menjawab pertanyaan ini, K. Bartens menjelaskan bahwa kebebasan para eksistensialis tentu bukan bebas tanpa bertanggung jawab. Menurutnya, kebebasan dibagi menjadi enam bagian. *Pertama*, kebebasan kesewenang-wenangan; *kedua*, kebebasan fisik;

⁶ Muhmedayeli, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 36

⁷ Secara etimologi, eksistensial berasal dari kata eksistensi, sedangkan eksistensi berasal dari bahasa Inggris yakni *existence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Adapun secara terminologi memiliki beberapa makna: pertama, apa yang ada; kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada); dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Lihat dalam Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183. Kata ini kemudia mempunyai varian: eksistensi yang berarti keberadaan atau ada, sedangkan eksistensial pemahaman filosofis tentang apa makna menjadi manusia, dan apa makna keberadaannya. Adapun eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi.

⁸ Jean Paul Satre, *Existentialism and Humanism*, (terj. Ph. Mairet) (London: Methuen, Co dan Ltd, 1948), 28.



ketiga, kebebasan yuridis; *keempat*, kebebasan psikologis; *kelima*, kebebasan moral; dan *keenam*, kebebasan eksistensial.⁹

Dari enam point tersebut, kebebasan yang tertinggi ialah kebebasan eksistensial (*the ultimate freedom*) mencakup seluruh aspek diri manusia. Namun, diantara point tersebut terdapat kebebasan moral, sebagai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Para eksistensialis adalah mereka yang menjadi diri mereka sendiri dan mempunyai kematangan, baik dalam bidang material maupun spritual. Dengan demikian, para eksistensialis mampu mengeksplor apa yang mereka miliki dan bertanggung jawab terhadap apa telah dilakukannya.

Pernyataan Satre ini memiliki kesamaan dengan Mulla Sadra (1571-1641). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fawaid bahwa bagi Sadra kebebasan eksistensial semacam ini disebut sebagai jiwa (*soul*) yang bergerak (*motion*) untuk bertanggung jawab dalam mengajak orang lain menuju kebenaran. Dalam pandangan Paul Sartre, kebebasan ini disebut “faksinitas,” yaitu kebebasan yang dipahami sebagai penghindaran dari kontingensi (kekinian), dan dari kenyataan, tapi justru ada suatu kenyataan lain yang terlepas dari kenyataan tersebut. Faksitas inilah yang membuat kebebasan yang dimiliki oleh tidak lagi bebas tanpa batas, karena ia memiliki relasi dengan individu lain (*responsibility with the other*). Pada posisi ini, Satre maupun Sadra, tidak melulu melihat eksistensial individu dalam bentuk esensial, tetapi juga dalam relasinya dengan “yang lain”. Artinya, kebebasan individu selalu akan dibatasi oleh kedaradaan manusia lain.¹⁰

Dengan demikian, jika mengacu pada pandangan filsuf eksistensial ini, manusia harus terlebih dahulu memberikan kesadaran terhadap dirinya, bahwa meraka sebenarnya dunia kebebasan, kemudian mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia bebas secara kratif ditengah-tengan keberadaan manusia lain. Secara tidak langsung, mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan dengan kebasan yang dimilikinya.

Berkeanaan yang dimaksud dengan pendidikan berbasis eksistensial ialah pendidikan yang memanusiakan manusia, mengungkap keunikan dan kesadaran pada diri manusia, bahwa manusia merupakan manusia yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Pendidikan berbasis eksistensial ini menekankan bahwa manusia merupakan manusia dinamis, aktif, kreatif, dan berproses. Selain itu, manusia pada posisi ini bisa dikatakan realitas yang tiada akhir, sebab manusia adalah makhluk dinamis yang selalu berhadapan dengan segala yang ada diluar dirinya, dan pada realitas yang selalu berubah-ubah. Pada titik ini, melalui pendidikan berbasis eksistensial, menjadikan manusia sadar akan keberadaannya di dunia.¹¹

Untuk mencapai taraf eksistensial, manusia harus melalui proses. Proses ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan dan pengalamannya, terutama pengalaman ketika berjumpa dengan manusia lain. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, kunci utama filsuf eksistensialisme adalah ‘kesadaran diri’, melalui kesadaran ini manusia akan menjejaki proses menuju ke arah yang lebih baik. Kesadaran ini muncul hanya jika manusia memiliki kebebasan untuk menentukan. Artinya, hanya dengan kebebasanlah

⁹ K. Bartens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), terutama dalam halaman 99-117.

¹⁰ Selengkapnya lihat Achmad Fawaid, Sumbangsih Pendidikan Islam dalam Pembentukan Generasi Eksistensial (Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra dan Jean P. Sartre), dalam *Jurnal At-Turas* (IA Nurul Jadid, Probolinggo), Vol. 3 No. 1, 13-16.

¹¹ Dikutip oleh Muhmidayeli dalam *Filsafat Pendidikan*, dari Harnold H. Titus, dkk., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Terj. H.M Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 139.



manusia akan mampu menentukan sikap diri dan aktualisasi dirinya, apapun yang diputuskannya benar-benar dari kesadaran, tentunya harus dibarengi dengan kesadaran akan tanggung jawab.

Berkenaan dengan proses ini, Whitehead mengungkapkan bahwa manusia berproses melalui empat tahap, yakni datum, proses pengolahan, kepenuhan, dan keputusan. Pada tahap pertama, manusia melakukan *flash back* terhadap patahan-patahan memory aktual di masa lalu sebagai data awal untuk melakukan hal yang baru. Tahap kedua, manusia berada pada posisi pengolahan, tahap di mana subjek didik diajak untuk mengalami langsung dari proses terjadinya sesuatu. Proses ini selalu dikaitkan dengan posisi eksistensial yang menginginkan setiap manusia mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Artinya, sesuatu yang aktual bukan saja yang ada sekarang, melainkan juga yang ada di masa lampau dan masa yang akan datang.¹²

Dengan demikian, melalui pendidikan pendidikan berbasis eksistensial dengan menjunjung tinggi asas kebebasan dan tanggung jawab sebagai asas fundamental yang melekat pada setiap manusia, diharapkan akan melahirkan pemuda eksistensial pula. Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan harus memberikan kebebasan pada peserta didik agar berimajinasi dan berkreasi untuk mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Hanya dengan cara inilah peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga menjadi manusia yang mempunyai pola pikir mandiri, kreatif, berkarakter dinamis dan melahirkan ide-ide cemerlang serta merealisasikannya secara total

C. MENJADI PEMUDA EKSTENSIALIS

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui pendidikan berbasis eksistensial diharapkan mampu mencetak pemuda-pemuda eksistensial, pemuda yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan dirinya dan mempunyai pola pikir mandiri, kreatif, berkarakter dinamis dan melahirkan ide-ide cemerlang serta merealisasikannya secara total. Untuk menjadi pemuda eksistensial, tidak harus menjadi “lain” dari yang “lain”, namun untuk menjadi pemuda eksistensial setidaknya menyadari bahwa dunia merupakan sesuatu yang (tidak mungkin) untuk dikendalikan oleh manusia. Oleh karenanya, membuat pilihan atas dasar kemauan sendiri dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan sebagai langkah awal menjadi pemuda eksistensial.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fawaid bahwa pemuda (generasi) eksistensial bukan mereka yang berpangkat menjadi insinyur, meneger, pebisnis dan lain sebagainya, tapi pemuda (generasi) eksistensial adalah mereka yang menjalani propepsi secara totalitas atas kehendak dan kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang tua atau orang lain. Pemuda (generasi) bukan mereka yang menyerah pada kondisi sosial yang carut-marut, melainkan mereka yang berusaha menunjukkan eksistensinya sebagai manusia yang bebas melalui ide-ide cemerlang dan merealisasikannya secara total, serta mampu menentukan masa depannya sendiri. Inilah yang harus disadari oleh pemuda sekarang.¹³ Inilah mengapa Indonesia memerlukan pemuda eksistensial ditengah peristiwa-peristiwa global dengan berbagai

¹² Alfred North Whitehead, *Proces and Reality* (New York: The Free Press, 1979), 215.

¹³ Achmad Fawaid, *Sumbangsih Pendidikan Islam dalam Pembentukan Generasi Eksistensial*, hal. 19-20



macam kecenderungan-kecenderungan yang mengganggu stabilitas dan mengancam kelangsungan umat manusia secara keseluruhan.

Untuk menjadi pemuda eksistensial, selain tidak harus menjadi “lain” dari yang “lain” dan menyadari keberadaan dunia di luar kendali, juga yang perlu dilakukan adalah rekonstruksi pola pikir pemuda dan *character building*. Yang dimaksud dengan rekonstruksi pola pikir disini ialah upaya mengarahkan pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh, sehingga pemuda dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti penyediaan ragam data empiris dan informasi teoritis, memberikan analisis, kritik, pertimbangan, dan pemubuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk memecahkan problem yang sedang dihadapi.

Pertanyaan yang muncul, mengapa harus rekonstruksi pola pikir, tidak yang lain? Karena suatu tindakan atau sikap seseorang—termasuk pemuda—pasti tidak akan terlepas dari apa yang dipikirkannya atau idenya. Dalam buku Psikologi Kepribadian dijelaskan bahwa, individu atau seseorang akan menggugurkan konstruk pemikirannya (ide) untuk melakukan suatu tindak dengan mempertimbangkan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi.¹⁴ Artinya, pola pikir seseorang—banyak lainnya—mempengaruhi tindakan (*action*) di dunia nyata. Selain itu, pepatah arab juga mengatakan bahwa “berpikirlah sebelum bertindak”. Inilah mengapa rekonstruksi pola pikir diperlukan untuk menjadi pemuda eksistensial.

Melalui rekonstruksi pola pikir, pemuda diharapkan mampu berpikir secara kritis, tidak langsung menerima informasi tanpa harus memverifikasi sumber-sumber dari informasinya dan berikap tidak hanya kritis terhadap realitas yang ada, tetapi juga melakukan auto-kritik terhadap apa yang telah dilakukannya. Tujuan dari rekonstruksi pola pikir ini adalah untuk membebaskan pemuda dari dogma-dogma atau belenggu-belenggu, bahkan rezim penguasa. Artinya, rekonstruksi pola pikir ini bermaksud untuk mengembalikan jati diri pemuda yang sebenarnya, mengembalikan eksistensi pemuda demi masa depan yang lebih baik.

Adapun yang dimaksud dengan *character building* disini adalah membentuk karakter seseorang agar bersifat progresif, yang mengarah kepada suatu kondisi yang lebih baik. Definisi karakter menurut Roback adalah dorongan psikal seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip dasar.¹⁵ Dalam Dictionary.com menjelaskan juga bahwa karakter merupakan sifat-sifat yang membentuk ciri khas dari individu. Selain itu, beberapa tokoh psikologi mendefinisikan karakter sebagai mesin yang mendorong seseorang bertindak, mesin inilah yang bisa disebut dengan emosi.¹⁶ Artinya karakter merupakan watak atau tabiat seseorang dalam melakukan sesuatu.

Rekonstruksi pola pikir dan *character building* mempunyai relasi yang sangat ketat, membentuk karakter seseorang tidak akan mampu hanya jika merontruksi pola pikir terlebih dahulu. Karena cara berpikir seseorang akan mempengaruhi bagaimana dan kapan ia harus bertindak, misalnya jika pola pikir seseorang cenderung pada pragmatis maka yang akan dia lakukan adalah mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun sebaliknya, jika pola

¹⁴ Lawrence A. Pervin dkk., *Psikologi Kepribadian: Teori dan Penelitian* (terj. A. K. Anwar, Personality: Theori and Research) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 401

¹⁵ Review book of The Psychology Of Character, dalam jurnal *The British Medical* (Jstore), Vol. 1, No. 34499, Hal. 138

¹⁶ Wiilliam Brown, *The Psychology of character* (London: University of Oxford, 1925), 31



pikir seseorang cenderung idealis maka ia akan melakukan apa yang harus ia lakukan dan meninggalkan apa yang harus ia tinggalkan.

Pada tahap ini, pendidikan yang berbasis eksistensialis akan mengarahkan dan membentuk pola pikir seseorang agar menuju pada perubahan yang lebih baik, melalui pengembangan ide-ide cemerlang yang dimiliki oleh setiap individu. Pengembangan ide-ide ini bertujuan agar mampu memberikan solusi-solusi yang tepat dalam setiap masalah serta mampu memberikan sugestis perubahan menuju kepada situasi yang lebih baik.

Rekonstruksi pola pikir ini dilakukan bertujuan untuk merubah *mindset* seorang pemuda agar tidak menerima apa adanya dari realitas yang ada, tidak pasrah dalam menghadapi problem-problem yang ada disekitarnya, tidak bertindak atas paksaan orang lain, dan tidak bersifat individualistik. Namun, bersifat kritis terhadap realitas, berusaha untuk mencari solusi dari problem yang dihadapi, bertindak berdasarkan kebijaksanaan, dan memiliki integritas sosial yang tinggi.

Selain itu, melalui rekonstruksi pola pikir, diharapkan dapat merubah *mindset* seorang pemuda, dari *mindset* parasit, imitatif dan ketergantungan menuju *mindset* produktif-kreatif. *Mindset* inilah diharapkan mampu menghasilkan dan mendatangkan manfaat secara berkesinambungan melalui ide-ide kreatif yang dimiliki oleh setiap pemuda. Produksi berarti menghasilkan, dengan menghasilkan, kita akan mampu memenuhi kebutuhan dasar, ketika mampu memenuhi kebutuhan dasar maka kebutuhan dasar inilah yang akan membawa kita untuk meraih peluang untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih maju.¹⁷

Berkenaan dengan *character building*, ada enam yang perlu diperhatikan juga untuk menjadi pemuda eksistensialis: *respect* (pengormatan); *responsibility* (tanggung jawab); *citizenship-civic duty* (kesadaran berwarga-negara); *fairness* (keadilan); *caring* (kepedulian); dan *trustworthiness* (kepercayaan).

Oleh sebab itu, sebagai pemuda eksistensial harus memperhatikan, pertama: *respect* menjadi salah satu yang paling esensial, karena eksistensi seseorang bisa diakui hanya jika memberikan penghormatan terhadap orang lain “aku ada karena kamu”. Meminjam istilah Emmanuel Levinas sebagai mana yang dijelaskan oleh Fahmy bahwa perjumpaan dengan “yang lain” (*autrui*) menandai proksimitas, yakni moment perjumpaan *Aku* dengan *Liyan* yang menandai sebuah relasi yang melampaui kategorisasi dan mengharuskan untuk memberikan penghormatan terhadap orang lain.¹⁸

Kedua: *responsibility* (tanggung jawab), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemuda eksistensialis adalah pemuda yang tidak hanya bebas dalam menentukan pilihan, tetapi juga ia bertanggung jawab terhadap kebebasannya atau apa yang telah dilakukannya. Sebagaimana dikutip oleh Fawaid dari *Existentialism and Humanism* (1948) bahwa Sartre pernah mengakui akan tanggung jawab terhadap orang lain, bahkan Sartre menegaskan bahwa kebebasan dan tanggung jawab merupakan efek dari eksistensialisme itu sendiri.¹⁹

Ketiga: *citizenship-civic duty* (kesadaran berwarga-negara), kesadaran ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, kesadaran ini

¹⁷ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik dan Praktik* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011), 260-263.

¹⁸ Selengkapnya lihat Fahmy Farid Purnama, *Filsafat Alteritas Emmanuel Levinas* (Etika sebagai 'Proto Philosophy'), dalam *Jurnal Cogito*, Vol. 3, No. 1.

¹⁹ Dalam Sumbangsih Pendidikan Islam dalam Pembentukan Generasi Eksistensialis oleh Achmad Fawaid dalam *jurnal At-Turas*.



memiliki peran penting untuk menjaga agar tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak kemanusiaan (hak asasi manusia). Kesadaran ini juga telah menjadi asas di Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum pada sila ketiga “persatuan Indonesia”. Diantara butir dari sila ke tiga tertulis “mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa”, dan “mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia”.

Keempat: *fairness* (keadilan), untuk mendefinisikan keadilan memang tergolong rumit, terkadang apa yang dianggap oleh suatu pihak adil, namun oleh pihak lain tidak adil. Namun, secara sederhana keadilan cenderung pada pemaknaan pembagian yang sama; sesuai kebutuhan; dan keputusan yang tidak memihak. Terlepas dari semuanya, yang perlu diketahui bahwa sikap adil merupakan kewajiban moral, baik bagi setiap individu ataupun kelompok.

Kelima, *caring* (kepedulian), ini menjadi salah satu perekat masyarakat. *Caring* menjadikan seseorang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan mengetahui bagaimana menjadi orang lain. Terkadang *caring* diungkapkan melalui tindakan, memberi atau terlibat dengan orang lain tersebut. Istilah yang mungkin mempunyai kesamaan—kemiripan—dengan *caring* adalah *solidarity* (rasa solidaritas). Di sinilah awal seseorang sadar bahwa orang lain merupakan bagian dari dirinya.

Keenam, *trustworthiness* (kepercayaan), pilar ini menjadi basis fundamental di antara pilar-pilar lainnya. Pasalnya apabila kepercayaan seseorang telah hilang maka yang akan terjadi ialah ketidakpedulian sehingga akan melahirkan sifat individualistik, antara satu dengan yang lainnya. Juga akan menghilangkan rasa tanggung jawab terhadap orang lain. Elemen yang terdapat dalam pilar ini sebagai berikut; integritas; kejujuran; menepati janji; dan kesetiaan. Sebagai seorang (pemuda) eksistensial setidaknya mampu menghadirkan enam pilar ini dalam diri, dan menjaga elemen-elemen yang terdapat pada pilar yang terakhir sebagai eksistensi diri di dunia.

Setidaknya, pemuda harus memiliki enam komponen dalam jiwanya. Mengingat sekarang masalah-masalah tidak lagi bersifat searah, tetapi berbagai arah yang memiliki keterhubungan antara masalah satu dengan yang lainnya. Ditengah-tengah kehidupan yang diselimuti berbagai masalah, saatnya pemuda sebagai generasi yang dipercaya membawa perubahan yang lebih baik, perubahan boleh terjadi, namun jangan lupa untuk menyelesaikan masalah. Buat apa melakukan perubahan, tapi tidak memberikan solusi. Pada titik inilah pemuda eksistensial diharapkan, tidak hanya melakukan perubahan, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah serta memberikan solusi.

Hingga pada saatnya, kita akan menemukan pemuda-pemuda hebat, memberikan perubahan yang solutif yang lahir dari Negara Indonesia, mampu merubah Indonesia, bahkan dunia. Mengutip dari penggalan dari kata-kata Bung Karno: “*berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia*”. Entah kapan sepuluh pemuda ini lahirnya? Kita tunggu saja.

D. IMPLIKASI

Setidaknya, studi ini memberikan implikasi, baik secara teoretis maupun praksis. Secara teoretis pemuda eksistensial bukan mereka yang menyerah pada kondisi sosial yang carut-marut, melainkan mereka yang berusaha menunjukkan eksistensinya dan merangkul yang ada di sekitarnya untuk menciptakan tatanan sosial yang kondusif. Karena mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ada disekitarnya



Secara praksis studi ini menjadi langkah penyadaran terhadap pemuda bahwa mereka seharusnya memiliki pemikiran integralistik dan eksistensial dengan menempatkan dirinya sebagai individu yang berperan penting dalam mendesain berbagai keilmuan seraya menyadari ke-diri-annya dalam dunia yang faktis ini. Pada tataran praksis ini, pemuda eksistensial tidak hanya mereka yang menjadi dokter, insinyur, pembisnis, direktur atau menager, tetapi juga mereka yang mampu mengembangkan keilmuannya seraya demi kemajuan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dengan demikian, di tengah maraknya tragedi kemanusiaan yang melanda para pemuda bangsa Indonesia abad XXI ini, menjadi pemuda eksistensial merupakan jawaban atas problem tersebut. Perubahan yang sejati memang harus dimulai dari kesadaran akan jati diri sebagai manusia yang “merdeka” dan “bebas.” Tanpa itu semua, perubahan akan tetap menjadi utopia belaka.

REFERENSI

- Achmad Fawaid, Sumbangsih Pendidikan Islam dalam Pembentukan Generasi Eksistensial (Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra dan Jean P. Sartre), dalam *Jurnal At-Turas* (IA Nurul Jadid, Probolinggo), Vol. 3 No. 1
- Alfred North Whitehead, *Proces and Reality* (New York: The Free Press, 1979).
- Conrad H. Waddington, *The Man-Made Future* (London: Croom Helm, 1978)
- Fahmy Farid Purnama, Filsafat Alteritas Emmanuel Levinas (Etika sebagai ‘Proto Philosophia’), dalam *Jurnal Cogito*, Vol. 3, No. 1.
- Fatchul Mu’in, *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik dan Praktik* (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2011)
- Harnold H. Titus, dkk., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, (Terj. H. M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Jean Paul Sartre, *Existentialism and Humanism*, terj. Ph. Mairet, (London: Methuen, Co dan Ltd, 1948)
- K. Bartens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Lawrence A. Pervin dkk., *Psikologi Kepribadian: Teori dan Penelitian* (terj. A. K. Anwar, Personality: Theori and Research) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- M. Bisryi, “Mempertimbangkan Pendekatan Baru,” dalam *Jurnal Edukasi*, (Sumenep: Dinas Pendidikan, Nomor 05, 2006)
- Muhmedayeli, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011)
- Review book of The Psychology Of Character, dalam jurnal *The British Medical* (Jstore), Vol. 1, No. 34499
- Wiiliam Brown, *The Psychology of character* (London: University of Oxford, 1925)
- Ziauddin Sardar, *The Future of Muslim Civilisation*, Terj. Rahmani Astuti, *Rekayasa Masa depan Islam* (Bandung: Mizan, 1989)



KAMPANYE JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
(STUDI DESKRIPTIF TENTANG KAMPANYE SOSIAL YANG
DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA TASYAKUR
DAERAH YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015)

Nurbayti¹

¹*Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*
Email: Nurbayti_44@yahoo.co.id

ABSTRAK

Organisasi agama JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) sampai saat ini belum juga bisa diterima di dalam kelompok masyarakat, statmen sesat yang terus dilekatkan pada kelompok tersebut memicu terjadinya konflik antara pengikut dan penentang Jemaat Ahmadiyah. Selain ajaran yang dinilai keluar dari syariat Islam, tidak adanya upaya membangun komunikasi antara pengikut Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat umum ditengarai sebagai pemicu terjadinya konflik serta keberpihakan pemerintah dalam memperlakukan pengikut Jemaat Ahmadiyah. Berangkat dari kondisi sosial masyarakat serta regulasi pemerintah yang dianggap mendiskreditkan kelompok minoritas, Jemaat Ahmadiyah pada akhirnya mengambil inisiasi untuk melakukan komunikasi terbuka dengan masyarakat Indonesia dengan jalan kampanye, yang dimulai dari tahun 2013-2015 di beberapa daerah yang ditunjuk oleh JAI. Peneliti sendiri mengambil periode I kampanye, yakni tahun 2013-2015 dengan misi “*Meluruskan Kesalah Fahaman Terhadap Jemaat Ahmadiyah*” di Yogyakarta. Metodeologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang mana metode ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data upaya kampanye JAI baik yang sedang terjadi maupun yang sudah berlangsung. Dari hasil pengumpulan data di lapangan, JAI Yogyakarta selama melakukan 5 kali kampanye tidak menemukan kesulitan dalam mencari saluran komunikasi dan partisipan, akan tetapi kendala terbesar yang dihadapi JAI adalah kurangnya dana dari pusat yang menyebabkan kurangnya jumlah partisipan.

Kata Kunci: Kampanye, Jemaat Ahmadiyah, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 menteri tahun 2008 yang berisi larangan penyebaran ajaran dan peribadatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, sedikit banyak menambah beban baru bagi Jemaat Ahmadiyah yang hidup dan bermukim di Indonesia. Tujuan pembentukan SKB salah satunya ialah untuk meredakan konflik antara pengikut Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat non-Ahmadiyah di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono, namun yang terjadi konflik bukanya meredah, sebaliknya konflik semakin melebar karena JAI¹ tidak mau keluar dari keyakinannya.

¹ JAI adalah singkatan dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia, singkatan ini adalah yang membedakan antara Jemaat Ahmadiyah Qadian dan Lahore, Jemaat Ahmadiyah Qadian disingkat menjadi JAI dan Jemaat Ahmadiyah Lahore disingkat GAI atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia.



Konflik besar kerap bermunculan hampir di tiap daerah yang dihuni oleh kelompok JAI. Setara Institute mencatat, pada kurun tahun 2008-2010 saja, ada 276 kali aksi kekerasan atas Jemaat Ahmadiyah. Terbanyak yaitu pada tahun 2008, terdapat 193 kasus atau 73% total kekerasan atas kaum minoritas di Indonesia. Pada tahun 2009 dan 2010, Ahmadiyah *diganyang* sebanyak 33 kali dan 50 kali. (<http://sorot.news.viva.co.id/news/read/204268-ahmadiyah--darah-dan-ibadah> diakses tanggal 22 Februari 2016)

Selain hasil dari riset Setara, Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga melakukan riset sendiri terkait maraknya konflik yang terjadi, JAI menemukan fakta-fakta bahwa salah satu dari sekian banyak yang menjadi sumber konflik yakni dipicu oleh informasi yang selama ini didapatkan oleh masyarakat seputar Jemaat Ahmadiyah adalah tidak benar, hal ini disebabkan kecenderungan masyarakat memperoleh informasi seputar JAI lebih banyak dari media baru (internet) yang mana internet 90% memuat berita tidak benar, disamping itu masyarakat juga lebih banyak memperoleh informasi dari kelompok-kelompok orang yang tidak begitu paham dengan JAI atau parahnya lagi kelompok-kelompok yang memang secara subjektif tidak menyukai JAI. (Wawancara dengan Ketua Badan Tasyakur Nasional Jemaat Ahmadiyah tanggal 20 Mei 2015 jam 16.00 WIB di Kantor JAI Yogyakarta)

Berangkat dari sanalah, JAI membuat sebuah rencana besar jangka panjang guna melakukan pendekatan terhadap *Ghair*² salah satunya yakni dengan metode kampanye. Kampanye ini dianggap oleh Jemaat Ahmadiyah sebagai gerbang informasi sekaligus klarifikasi atas permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi selama ini di tanah air.

Ada 12 kota besar yang dijadikan lokasi kampanye oleh Jemaat Ahmadiyah, salah satunya yakni Yogyakarta. Selain Yogyakarta menjadi salah satu lokasi bermukimnya JAI, kondisi Yogyakarta saat telah mengalami pergeseran dengan tingkat intoleransi yang cukup tinggi. Penilaian ini berangkat dari hasil riset yang dilakukan oleh Stara *Institute*, JAI memperoleh data bahwa Yogyakarta masuk pada daerah rawan konflik. Walaupun beberapa tahun ini Jemaat Ahmadiyah tidak diserang di Yogyakarta, namun penyerangan-penyerangan terhadap kelompok minoritas lain, seperti pesantren Waria pada tahun 2015, penyerangan pada saat kebaktian umat katolik tahun 2014, diistilahkan oleh kelompok Ahmadiyah kondisi Yogyakarta itu seperti duri dalam sekam, yang mana sewaktu-waktu konflik bisa saja kembali pecah, tinggal menunggu waktu saja kapan Jemaat Ahmadiyah akan mendapat giliran. (wawancara dengan Rizki Baihaqi, Koordinator lapangan tanggal 20 Mei 2016 di Kantor JAI Yogyakarta)

1. Rumusan Masalah

“Bagaimanakah Kampanye Sosial Jemaat Ahmadiyah Indonesia terhadap masyarakat non- Ahmadiyah di Yogyakarta tahun 2014-2015?”

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Pelaksana Tasyakur Daerah Yogyakarta tahun 2014-2015.

² Kata *Ghair* ditujukan oleh Jemaat Ahmadiyah untuk kelompok masyarakat yang bukan dari Jemaat Ahmadiyah.



3. Informan

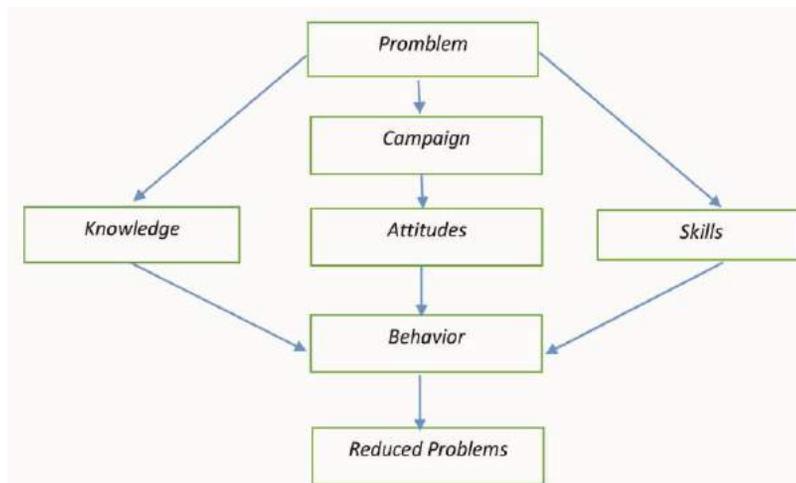
Pihak- pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kampanye di Yogyakarta tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua BPT : Ahmad Saiful Mutaqi, IAI, Ir. Mt
- b. Kepala Bidang Seminar : Didit Haribarianto
- c. Ketua KPD Yogyakarta : Sayfullah
- d. Koordinator Lapangan : Rizqi Baihaqi Ahmadi, S. Komp

4. Kerangka Teori

a. Kampanye Sosial

Jika kita membahas dan menganalisa *Ideologically or oriented campaigns* atau kampanye sosial, maka model yang paling mendekatinya adalah model yang dikembangkan oleh Leon Ostergaard, seorang teoritis dan praktisi kampanye kawakan dari Jerman (Klingemann, 21: 2002). Sepanjang hidupnya Ostergaard telah terlibat dalam puluhan program kampanye perubahan sosial di negaranya, jadi model Ostergaard bukanlah hasil dari analisa teks melainkan dari analisa beliau dilapangan. Diantara model kampanye yang ada, model ini paling pekat sentuhan ilmiahnya



Bagan 1.1: Model Kampanye Ostergaard

Problem: Menurut Ostergaard sebuah rancangan program kampanye untuk perubahan sosial yang tidak didukung oleh temuan-temuan ilmiah, tidaklah layak untuk dilaksanakan, alasannya karena program kampanye semacam itu tidak akan menimbulkan efek apapun dalam menanggulangi masalah sosial yang dihadapi. Oleh karenanya langkah pertama yang harus dilakukan oleh sumber kampanye (*decision maker*) adalah mengidentifikasi masalah faktual yang dirasakan, kemudian dicari hubungan sebab akibat dengan fakta- fakta yang ada.

Campaign; Tahap kedua yakni pengelolaan kampanye, yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dalam tahap ini riset sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi

karakteristik khalayak sasaran untuk merumuskan pesan, aktor kampanye, saluran komunikasi, hingga teknis pelaksanaan kampanye sosial.

Knowledge, attitude, skill, behavior; pada tahap ini, seluruh isi program kampanye (*campaign content*) diarahkan untuk membekali dan mempengaruhi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan khalayak sasaran, ketiga aspek ini dalam literatur ilmiah dipercaya dapat menjadi persyaratan untuk terjadinya perubahan perilaku. Dengan kata lain, perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan khalayak akan memberikan pengaruh pada perubahan perilaku.

Evaluasi; pada tahapan ini akan dievaluasi apakah pesan-pesan kampanye sampai pada khalayak (*received*). Apakah mereka dapat mengingat pesan-pesan tersebut? Apakah mereka dapat menerima isi- isi pesan tersebut (*accepted*)?

Reduce problem; tahap ini adalah tahap evaluasi penanggulangan masalah, disebut juga sebagai tahap pasca kampanye, dalam hal ini evaluasi diarahkan pada keaktifan kampanye dalam menghilangkan atau mengurangi masalah sebagaimana yang telah diidentifikasi pada tahap pra kampanye.

Model adalah representasi suatu fenomena, baik nyata ataupun abstrak, dengan menunjukkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut (Mulyana, 2000), jadi model bukanlah fenomena itu sendiri, model hanyalah gambaran tentang fenomena atau realitas yang telah disederhanakan. Sehingga tidak semua masalah harus sesuai atau sama persis dengan dengan model tersebut, karena model hanya mengambil aspek dan ciri-ciri tertentu dari realitas, oleh karenanya sebuah konstruksi model tidak pernah sempurna. Dalam pelaksanaan kampanye terdapat banyak sekali model yang digagas oleh para peneliti sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

b. Kerangka Konsep

Melalui kerangka konsep, peneliti mengambil model kampanye sosial Ostergaard dan memodifikasinya dengan teori kampanye lain yang sesuai dengan permasalahan di lapangan. Adapun untuk menyesuaikan dengan permasalahan kampanye JAI di lapangan, peneliti memodifikasi konsep Ostergaard dengan beberapa indikator masalah yang didapatkan dari teori-teori kampanye yang mendukung.



Gambar: Kerangka Konsep yang Diadopsi dari Model Kampanye Ostergaard



c. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (L.J. Moleong, 2011:04). Sedangkan pola penelitian yang digunakan yakni deskriptif, yang dimaksud pola deskriptif menurut Best 1982 (dalam Sukardi, 2013: 34), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.

d. Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian yang diambil adalah di Yogyakarta, pengambilan lokasi tersebut, berdasarkan pertimbangan, Yogyakarta adalah daerah yang terkenal dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi, akan tetapi belakangan ini sering terjadi tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas oleh kelompok-kelompok radikal.

B. PEMBAHASAN

1. Data

Melalui pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pengelolaan kampanye sosial JAI dijalankan oleh kepanitiaan yang dibentuk khusus oleh Amir Nasional (Ketua Umum Jemaat Ahmadiyah Indonesia) yang bersifat non-struktural. Sesuai dengan Surat Keputusan Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia No.267/SK/2013 Pembentukan BPT Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dalam SK tersebut dibentuklah Koordinator Seminar dan Dialog Nasional. Adapun tugas yang harus dijalankan yakni menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan Seminar Nasional dan atau Dialog Nasional Kebangsaan yang dilaksanakan tanggal 27 Mei dan 10 November setiap tahunnya. (Program Kerja Bidang Seminar dan Dialog Nasional 2013-2015: 02)

a. Visi dan Misi Kampanye JAI

Dari Surat Keputusan Amir Nasional tersebut terbentuklah, Visi besar kampanye JAI yakni *“Eksistensi Sosial Jemaat Ahmadiyah Semakin Mantab Secara Rohani dan Secara Jasmani dalam Rangka Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”* yang akan dilaksanakan tahun 2013-2025. Dalam rentang tahun yang panjang tersebut, terdapat misi kampanye yang berbeda-beda, yang mana tiap misi kampanye dibagi per 1 periode yang terdiri dari 2 tahun. Adapun misi kampanye di Periode I yakni tahun 2013-2015 yakni *“Menghilangkan Kesalah Fahaman Terhadap Jemaat Ahmadiyah”*.

b. Melalui Tindakan Komunikasi yang Terorganisir

Untuk memudahkan jalannya kampanye, JAI membuat panitia non structural, yang khusus mengurus kampanye JAI yang diberi nama Badan Pengurus Tasyakur (BPT) untuk tingkat Nasional. Untuk membantu BPT di daerah JAI juga membentuk badan kampanye daerah yang diberi nama Ketua Penyelenggara Daerah (KPD).

c. Lokasi Kampanye

Kampanye Jemaat Ahmadiyah dilakukan di 12 kota besar di Indonesia, salah satunya yakni Yogyakarta. Di kota ini walau konflik jarang sekali terjadi akan tetapi bagi Jemaat

Ahmadiyah, Yogyakarta juga perlu dijadikan lokasi kampanye disamping Jemaat Ahmadiyah memiliki massa di Yogyakarta, Yogyakarta juga dinilai rawan terjadinya penyerangan- penyerangan terhadap kelompok Minoritas. Selain itu Yogyakarta juga sekaligus dijadikan kota perintis kampanye karena dinilai mendukung dari aspek Infrastruktur dan SDM serta kondisi sosial masyarakat Yogyakarta sendiri.

KOTA PENYELENGGARA DAN LIVE IN							
KOTA PENYELENGGARA	SEMINAR	DIALOG	BEDAH BUKU	IPS	PAMERAN	JUMLAH	
JAKARTA				1	1	2	
BANDUNG DSK	2	3	5			10	
SEMARANG DSK	2	3	3			8	
JOGJAKARTA	2			1	2	5	
SURABAYA	1		1			2	
MATARAM	1					1	
MEDAN	1					1	
MAKASAR	1					1	
	JUMLAH	10	6	9	2	3	30
	JUMLAH PESERTA	4,100	1,500	2,000	1,200	1,700	10,500
KOMUNITAS KEGIATAN LIVE IN							
KRUCIL						1	
MANISLOR						1	
GONDONG						1	
SEMARANG						1	
JOGJAKARTA *)						1	

d. Menentukan Saluran Komunikasi

Sesuai dengan SK Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2013 di atas, bahwa Badan Penyelenggara Tasyakur atau BPT harus atau wajib melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Seminar dan Dialog Nasional, artinya langkah strategi kampanye baik BPT Nasional dan KPD Jogja tidak melakukannya seorang diri, dengan kata lain ada pihak luar yang diajak terlibat dalam program kampanye (yang diajak bekerja sama). Hadirnya pihak luar ini tidak lain untuk mempermudah jalannya kampanye JAI di Indonesia.

“Jika kami melibatkan pihak luar; pertama yakni akan membantu kita menjangkau peserta (audiens) yang akan berpartisipasi dalam live in maupun seminar dan jika kami mengajak pihak Universitas untuk menjadi pihak ke dua maka hal tersebut atau acara kampanye ini akan lebih kepada studi keilmuan, sebuah tahapan untuk menambah wawasan, artinya kajian- kajian yang nanti dilakukan adalah untuk menambah wawasan. Lalu yang ke dua adalah jika dilihat dari sisi pihak ke dua, maka ini tidaklah seperti aksi doktrinasi yang diberikan oleh pihak pertama yakni Jemaat, akan tetapi nantinya akan terlihat bagaimana pihak yang diajak kerja sama mampu mengajak audiens untuk melihat pihak pertama langsung dari dalam (masuk kepemukiman berinteraksi, diskusi, dll) dengan kata lain agar terlihat lebih netral.” (Wawancara dengan Rizki tanggal 15 Juni 2016 di kantor JAI Cab. Jogja)

e. Jumlah Khalayak Sasaran Kampanye yang Besar

Dari 5 kali penyelenggaraan kampanye, secara kuantitas Jemaat Ahmadiyah menargetkan lebih kurang 250 undangan untuk Seminar dan Dialog Namun dalam



perjalanannya yang hadir selalu melampaui target undangan yang direncanakan. Sedangkan untuk *live in*, KPD Yogyakarta hanya mampu mendanai 30-20 peserta saja.

“Kami memandang mahasiswa (akademisi) hidup mereka masih lama, mereka akan tumbuh menjadi orang yang sadar akan bangsanya, dan suatu waktu mereka akan menjadi seorang pemimpin, kita berharap ketika mereka suatu hari menjadi pemimpin dan bersentuhan dengan kita dan dengan informasi yang benar tentang Ahmadiyah, maka perilaku mereka tidak akan seperti memimpin- pemimpin saat ini yang tidak mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Oleh karenanya kita mengajak kepada elite mahasiswa tadi untuk memberikan pengertian kepada mereka (orang yang belum mengenal Jemaat Ahmadiyah). Karena poin yang menjadi landasan berpikir orang Ahmadiyah dimanapun mereka berada adalah bukan tipe penghianat negara, dan dia pasti mencintai negaranya, dan itu sudah 100%, oleh karenanya kenapa elite mahasiswa yang dipilih di sini karena kita menaruh harapan pada mereka, karena mereka adalah generasi di masa depan.

Selain itu Saifudin menambahkan, selain target tersebut diatas dalam kampanye periode awal ini BPT juga menargetkan orang-orang Jemaat Ahmadiyah sendiri, mengingat yang selama ini terjadi anggota Jemaat Ahmadiyah cenderung tertutup dan susah untuk berbaur dengan komunitas di luar kelompoknya, hal ini juga ditegaskan kembali oleh Didit kabit Seminar, orang- orang Jemaat Ahmadiyah juga perlu menjadikan kampanye ini sebagai media atau bahan pembelajaran untuk lebih terbuka dan membaur dengan masyarakat pada umumnya. (wawancara dengan Pak UUT tanggal 16 Mei 2016 dan Pak Didit tanggal 12 Juni 2016 di Kantor JAI kota Jogja)

f. Strategi Pelaksanaan Kampanye Sosial Badan Penyelenggara Daerah Yogyakarta

Dalam perjalanan KPD mencari lembaga- lembaga yang bersedia membantu atau menjadi saluran komunikasi antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat Yogyakarta. Hal pertama yang dilakukan saat menjalin kerja sama dengan Pusat Studi yakni berangkat dari misi kampanye Periode I yang ingin dilaksanakan, lantas kemudian dari konsep tersebut KPD mengajukan/ pada Pusat Studi yang ada di perguruan tinggi, Pusat Studi mana yang kiranya sesuai dengan misi kampanye dan bersedia diajak kerja sama dan menyanggupi kesepakatan kerja. Jika kesepakatan sudah terbentuk maka kedua belah pihak mulai membuat MOU yang kemudian mendiskusikan *brand storming* acara sesuai dengan visi misi konsep dasar kampanye JAI diakhiri dengan menghitung anggaran, jumlah peserta kampanye, tema, waktu dan tempat

Dari pencarian tersebut, terdapatlah tiga Lembaga Penelitian/ Pusat Studi yang berhasil diajak kerja sama. Sesuai dengan target KPD tiga Pusat studi ini berdiri dibawah perguruan tinggi, di antaranya yakni: DC³ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Sociology Research Center* (SOREC) Fisipol Universitas Gadjah Mada dan LSM Humanity First

³ DC- UIN Sunan Kalijaga adalah merupakan salah satu pusat studi yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berfungsi sebagai wadah pengembangan keilmuan untuk kemajuan peradaban. DC adalah singkatan dari *Dialogue Center* yang berada di bawah naungan Program studi Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga.



Indonesia dan yang terakhir adalah ISAI⁴ (*Institute Of Southeast Islam*) UIN Sunan Kalijaga.

Pada periode 2013-2015 terjadi 5 kali kampanye, untuk lebih mempermudah pemaparan peneliti akan membahas satu persatu bentuk kampanye KPD Yogyakarta berdasarkan urutan kampanye paling pertama antara lain:

- 1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; dengan menggandeng Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Dialog Center yakni dengan program kerja yang berbentuk Seminar.
- 2) Universitas Gajah Mada; dengan mengadakan Internasional Peace Symposium dalam bentuk seminar dengan menggandeng Fakultas Ilmu sosial Ilmu politik dan LSM Humanity Firs.
- 3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Dengan menggandeng lembaga penelitian Studi Islam Asia Tenggara (ISAI) dengan program kerja *Study eskursi (live in)* sebanyak 3 kali dalam tempo 2 tahun yang diikuti dengan seminar hasil penelitian *live in* sebanyak 3 kali.

Untuk penjelasan terperinci apa isi seminar dan bagaimana penyampaian seminar dilakukan oleh KPD Yogyakarta akan peneliti uraikan satu persatu.

1) **Kampanye Sosial I “Seminar Kebangsaan” Kerja Sama dengan DC UIN Sunan Kalijaga**

- a) Tema Kampanye, Waktu, Lokasi dan Bentuk Kerja Sama

Kali pertama kampanye KPD Yogyakarta terjadi pada tanggal 20 Mei 2014, dimana ini merupakan semester I di periode pertama kampanye Badan Penyelenggara Tasyakur Daerah Yogyakarta. Bentuk kampanye yang digunakan berupa seminar, KPD mengambil inisiasi menggunakan metode seminar sebagai sarana kampanye, karena seminar bersifat terbuka untuk umum, menciptakan komunikasi yang langsung dengan partisipan, serta mampu menyerap partisipan secara masif. Pemilihan tema yakni “Seminar Kebangsaan” yang merupakan hasil diskusi bersama antara DC-UIN dan KPD Yogyakarta.

Lokasi seminar yang dipilih yakni terletak di kampus UIN Sunan kalijaga tepatnya di Convention Hall Lt.1 Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pukul 8.30 s/d 12.30 WIB.

- b) Jumlah Partisipan

Untuk peserta seminar, DC-UIN beserta KPD Yogyakarta tidak memungut biaya apapun bagi partisipan. Adapun partisipan yang menjadi target yakni Tokoh Agama, Akademisi, LSM, Pemerhati Pluralisme, Mahasiswa, Jurnalis Cetak dan Elektronik dan Aparat Pemerintahan. Jumlah undangan yang disebar pada seminar tersebut baik dengan mengirim undangan langsung, via media elektronik, maupun poster ke instansi- instansi, ditargetkan peserta yang akan hadir yakni sejumlah 250 undangan akan tetapi yang hadir dalam seminar mencapai angka 480 orang, antusias partisipan dalam kampanye JAI ini tentu diluar dari ekspetasi KPD Yogyakarta, selain

⁴ISAI (*Institute Of Southeast Islam*) UIN Sunan Kalijaga ialah merupakan Pusat studi dan kajian data Islam Asia Tenggara yang berdiri tahun 2014. Di pusat Studi ini, banyak membahas tentang isu- isu yang berkaitan dengan Islam di Asia Tenggara baik yang bersinggungan dengan politik, ekonomi, budaya dll.



c) Materi yang Diusung dan Pemateri Seminar

Pada tema yang diusung pada kampanye Jemaat Ahmadiyah pertama kali yakni *“Membangun Kebersamaan dan Perdamaian Menuju Terwujudnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Indonesia”*. Materi ini bertujuan untuk mengguah peserta seminar untuk berfikir terbuka dan menyadari bahwa Jemaat Indonesia juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia, memiliki hak yang sama sebagai warga negara dan terlindungi secara konstitusi negara. Pembukaan diisi oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, *Key Note Speaker* dibuka oleh Sri Sultan HB X, sedangkan untuk pemateri diisi oleh H. Abdul Basith Sy. (Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia), Dr. Abdul Gafar Karim. Pada sesi ke II masuk pada sub tema *“Spirit perdamaian di Indonesia”* pada Sessi ke ini, materi- materi yang dibahas atau disampaikan mulai terlihat dan mengerucut pada pembahasan inti yakni tentang kajian agama Islam serta kondisi, masalah, dan harapan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. adapun pematerinya antara lain: Prof. Dr. H Iskandar Zulkarnain, KH. Abdul Muhaimin, Zuhairi Misrawi.

Dari seluruh rangkaian Seminar Kebangsaan Jemaat Ahmadiyah, ditutup dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta seminar, yang dimotori oleh Drs. Mochamad Sodik, M.Sc yang merupakan salah satu tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga.

2) **Kampanye ke II “Internasional Peace Symposium” (Kerja Sama dengan Pusat Studi Sociology Research Center (SOREC) Fisipol Universitas Gadjah Mada dan LSM Humanity First Indonesia)**

a) Konsep Simposium

Berbeda dengan Seminar Kebangsaan sebelumnya yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga, *Peace Symposium* merupakan acara Internasional Jemaat Ahmadiyah dunia untuk menyuarakan perdamaian di tiap negara, dalam rangka mengusung inisiatif khusus untuk menyuarakan toleransi, saling memahami, saling menghormati dan persatuan demi dunia yang damai. Bermarkas di London Inggris pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Masroor Ahmad (*Khalifah* Jemaat Ahmadiyah saat ini) telah banyak melakukan aksi perdamaian yang diberinama *Peace Symposium* ke berbagai negara, seperti Kanada, Jerman, Belanda dan Inggris, serta mengirim pesan khusus bagi kepala pemerintahan termasuk Tionghoa, Rusia, Amerika, Israel, Iran Inggris, Perancis, Jerman dan Saudi Arabia. (wawancara dengan Ahmad Saifudin tanggal 17 April 2016)

Saifudin selaku ketua BPT menambahkan di Indonesia sendiri Internasional *Peace Symposium* sama sekali belum pernah diadakan sebelumnya, oleh karenanya Amir Nasional memandatkannya pada BPT Nasional yang dibantu oleh KPD Yogyakarta. Pada kesempatan wawancara tanggal 12 Juni 2016 di kantor JAI Yogyakarta dengan ketua bidang seminar Didit Hari Barianto, peneliti menanyakan mengapa *Peace Symposium* diambil menjadi bagian dari rangkaian acara kampanye periode awal ini, beliau menjawab:

“Sebenarnya bukan dipilih ya mbak, akan tetapi ini adalah merupakan program dari Khalifah kami, dalam rangka untuk mensuarakan Love For All Hatred For None di seluruh Dunia, termaksud di Indonesia.

Kesimpulannya adalah *Peace Symposium* merupakan projek kampanye perdamaian yang diprakaryai oleh Khalifah Jemaat Ahmadiyah, namun dimasukan menjadi rangkaian acara kampanye BPT dan KPD Yogyakarta. Pernyataan ini juga dikuatkan kembali oleh



ketua BPT Ahmad Saifudin melalui wawancara langsung tanggal 16 Mei 2016 di Kantor JAI Yogyakarta:

“Dalam periode pertama kembali kita (JAI) mengadakan seminar yang bertajuk Internasional Peace Symposium di UC- UGM, kami mengambil contoh dari Khalifah kami ketika beliau mengkampanyekan perdamaian melalui titik- titik penting dunia, jadi kami yang berada di sini (Indonesia) juga ingin ikut mengadakan acara yang sama di level Indonesia. Bagaimana caranya mencontohkan hal tersebut di Indonesia, dan hal ini kami lakukan dengan mengajak kerjasama FISIPOL UGM (SOREC), pihak tersebutlah yang menggarap seterusnya bersama mas Didit (KABID Seminar).”

b) Waktu dan Tempat

Kampanye periode I di semester ke II lewat Simposium dilakukan bukan di bulan November sesuai Surat Keputusan, melainkan di bulan Oktober, tepatnya tanggal 8 Oktober 2014, sedangkan untuk lokasi kampanye BPT dan SOREC menyepakati diadakan di Club Hall Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

c) Latar Belakang Pemilihan Tema Simposium.

Tema yang diusung dalam kampanye *Peace Symposium* adalah *“Wacana dan Praktik-Praktik Multikulturalisme di Indonesia”*. Dalam kesempatan yang sama Ade memaparkan, pemilihan tema ini dilatar belakangi oleh isu yang saat itu banyak berkembang, di mana ide-ide pengurus beririsan pada wacana tentang, multikulturalisme dan perdamaian, lantas kemudian bagaimana dua entitas ini bisa dirangkai untuk mengisi wacana perdamaian, sehingga multikulturalisme dapat didorong untuk menciptakan perdamaian.

d) Jumlah Partisipan

Seperti halnya kampanye I, pada kampanye ke II BPD dan KPD Yogyakarta tidak memungut biaya pada partisipan. Target partisipan Simposium adalah 250 orang, yang mana undangan disebar keberbagai kalangan diantaranya adalah: Mahasiswa, Staf pengajar sosiologi Fisipol UGM, Para jurnalis cetak dan elektronik, kelompok masyarakat sipil yang bergerak di isu HAM, Konflik, dan Pluralisme, terakhir Pemerintah Daerah, akan tetapi seperti pada Kampanye I, partisipan melebihi kuota, yang mana partisipan yang hadir lebih kurang 300 orang.

e) Komunikator (Pemateri)

Ada satu pemateri yang menjadi *“gong” key note speaker* dalam simposium, yakni Dr. Ifthikar Ayaz OBE, sebagai profil singkat, beliau merupakan Wakil Presiden *The Pacific Forum* Perdamaian, *Senator World Nation Forum*, dan Ketua Komite Internasional Hak Asasi Manusia (*International Human Rights Committee*) PBB yang khusus menangani hak-hak Minoritas, selain itu ada Romo Carolus dengan Yayasan Sosial Bina Sejahtera, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Dr. Hj. Siti Ruhaini (*Sociology lecturer, finished her degree in Islamic Law*), dan beberapa pemateri lainnya yang konsen terhadap isu HAM dan Multikulturalisme.

f) Materi Simposium dan Sistem Acara

Sistem acara dibagi menjadi 2 bagian utama, yakni Sesi I membahas tentang *“Wacana Multikulturalisme dan Perdamaian”* dan Sesi ke II tentang pemahaman *“Proses*



Pembelajaran (Lessons Learned) Multikulturalisme dan Perdamaian di Indonesia”. sebagai acara penutup diakhiri dengan sesi Tanya jawab seputar materi seminar.

3) Kampanye dengan Metode *Live In* (tinggal bersama warga JAI)

Pada kesempatan kampanye ke III KPD Yogyakarta yang bekerja sama dengan ISAI (Institute Of Southeast Asia Islam) UIN Sunan Kalijaga melakukan kegiatan yang berbeda dari dua kegiatan kampanye sebelumnya, yakni mengusung konsep “*Live In*” yang mana para peserta diseleksi dan dipersiapkan untuk tinggal di pemukiman Jemaat Ahmadiyah, berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan warga JAI di lokasi pemukiman yang sudah ditentukan. Saat diwawancara dengan Rizki selaku koordinator lapangan KPD Yogyakarta, alasan dasar kenapa dipilihnya *live in* sebagai media kampanye, beliau menjawab bahwa JAI ingin menunjukkan kepada masyarakat wajah JAI yang sebenarnya, karena dasar dari isu yang beredar dimasyarakat yang mengatakan bahwa JAI dikatakan cenderung menutup diri, oleh sebab itu lewat *live in*, JAI ingin merubah paradigma tersebut dengan membuka diri dan mempersilahkan *Ghair* mengamati JAI secara langsung.

a) Munculnya Ide dan Alasan Kampanye dengan Metode *Live In*

Awal mula konsep *live in*, ialah merupakan hasil *brand storming* antara KPD Yogyakarta dengan pihak ISAI. Dikonfirmasikan secara terpisah dengan pihak ISAI Ahmad Anfasul Marom yang merupakan wakil direktur ISAI kelahiran Bojonegoro 07 November 1981, dari hasil wawancara tanggal 20 Juni 2014 beliau memaparkan kronologis mengapa konsep kampanye JAI yang ke III berbeda dengan konsep kampanye sebelumnya:

“Ketika mereka (KPD Jogja) ke ISAI, mereka menanyakan apa kira-kira konsep yang ditawarkan oleh ISAI untuk keberhasilan kampanye JAI? Maka kami menawarkan live in, yang tadinya mereka menginginkan lebih kepada acara yang besar, masiv dan mengundang orang banyak, dilihat banyak orang, punya branding dsb, pada akhirnya saya menegaskan bahwa hal tersebut tidak semudah itu, karena tidak akan menghasilkan impak apapun, karena satu seminar selesai dalam satu hari.”

Dalam kesempatan wawancara tersebut beliau menambahkan, bahwa konsep *live in* tersebut ialah merupakan hasil ide dari beliau sendiri, yang pada awalnya KPD Yogyakarta selaku badan pengurus kampanye JAI Yogyakarta meragukan metode kampanye dengan cara *live in*. Walau dari pihak ISAI menyatakan *live in* lebih efektif dibandingkan seminar, hal tersebut masih diragukan oleh pihak KPD Yogyakarta, karena bagi kelompok minoritas seperti JAI bukanlah hal yang mudah menerima “orang asing” masuk ke dalam komunitasnya, untuk itu Saifulah selaku ketua KPD Yogyakarta mempertanyakan jaminan keamanan kepada Anfasul Mahrom, dengan sistematis Anfasul Mahrom pun akhirnya menegaskan bahwa:

“Saya meyakinkan kepada mereka bahwa saya sendiri selaku wakil direktur yang akan menangani langsung selama berlangsungnya acara live in. Solusinya adalah, kita akan memberikan short cours dulu sebelum mereka berangkat kelapangan, dengan membekali mereka seputar info Keahmadian dan apa yang akan mereka lakukan selama di sana, minimal mereka membuat satu tulisan abstrak apa yang ingin mereka lakukan, dll.”



b) Sistem Kepanitiaan antara KPD Yogyakarta dengan ISAI's.

Sistem kepanitiaan pada kampanye dengan metode live in, sama halnya seperti yang terjadi pada kampanye dengan metode seminar, dimana pihak yang diajak kerja sama oleh JAI belaku sebagai panitia utama, sedangkan JAI berlaku sebagai panitia bayangan saja. Hasil wawancara dengan Rizki, tanggal 7 Juni 2016 mengatakan bahwa:

“Skenario dari kami adalah, kami menjadi perantara, dengan kata lain, saya bertugas seperti panitia bayangan yang memastikan hal yang terjadi di lapangan itu memang sesuai dengan koridor kerja sama awal atau tidak, seperti panitia aktif akan tetapi saya tidak berpartisipasi di lapangan (hanya mengawasi) sekaligus sebagai penghubung antara pihak JAI di lokasi studi erskursi dengan pihak ISAI'S”

c) Sistematika Perekrutan Peserta *Live In*

Untuk mejaring peserta *live in*, ISAI's dan KPD Yogyakarta memberlakukan beberapa tahapan kualifikasi dan pembekalan sebelum peserta turun ke lapangan. Kriteria peserta *live in* menjadi salah satu konsentrasi terpenting. Mulanya *live in* (angkatan I) diperuntukan untuk semua golongan, antara lain masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, jurnalis, kelompok agama, dll. Perubahan kriteria peserta mulai terjadi setelah *live in* di adakan untuk kali ke II dan ke III yang mana sistem penyaringan mulai dikhususkan untuk mereka yang sedang atau telah menempuh Pasca Sarjana atau minimal lulusan Strata 1, perubahan ini dilatar belakangi oleh tujuan KPD Yogyakarta dan ISAI's yang ingin menseminarkan tulisan para peneliti kepada masyarakat umum, sehingga mereka yang minimal telah lulus S1 dianggap memiliki bekal ilmu yang cukup untuk melakukan tahap penelitian dan membuat sebuah tulisan yang baik dan objektif.

d) Tingginya Minat Partisipan

Keterangan yang didapatkan dari pihak ISAI's Anfasul Mahrom, jumlah abstrak yang masuk pada panitia (ISAI's) berjumlah ratusan (sayang angka pastinya tidak disebutkan karena beliau lupa jumlah pastinya berapa), namun yang diambil hanya kisaran 32 di live in I dan 20 di live II dan III, hal ini dilatar belakangi oleh kurangnya dana yang dimiliki oleh KPD Yogyakarta, kurang nya dana ini dipicu salah satunya oleh BPT tidak mendanai Live in II dan III.

e) Pelaksanaan *Live in*.

Live In I: Studi Eskursi & FGD (Fokus Group Discussion) “Mengkaji Jemaat Ahmadiyah dalam Perspektif Aqidah, Syariah dan Kebangsaan”.

Live in pertama kali dilakukan pada tanggal 27- 30 November di Krucil Jawa Tengah, itu artinya pelaksanaan kampanye live in pertama terjadi di semester ke II periode pertama. Sedangkan untuk pemilihan lokasi Krucil Jawa tengah tidak terlepas dari pemilihan tema *live in* yakni “*Mengkaji Jemaat Ahmadiyah dan prespektif Aqidah, Syariah dan Kabangsaan*” menurut pak Saifulah tema ini sengaja dipilih merujuk pada misi kampanye periode pertama yakni menghilangkan kesalah fahaman terhadap Jemaat Ahmadiyah, oleh kerannya hal pertama yang lakukan yakni melihat espek akidah, agar orang tidak salah faham maka harus diberitahu bukti akidah Ahmadiyah, dan dari sanalah Kricil Banjarnegara Jawa Tengah terpilih menjadi lokasi *live in*, karena Jemaat Ahmadiyah wilayah Krucil dalam urusan aqidah terbilang unggul.



Live In Ke II: Short Reasearch: Field Research for Young Intellectuals (Live In II)
“Mengkaji Konsep dan Sistem Khilafah Ahmadiyah” Tanggal 18 Mei- 10 Juni 2015)

Pada *live in* angkatan ke II ini, KPD Yogyakarta tetap menggandeng ISAIIs sebagai panitia utama penyelenggara. Dalam penggarapan konsep *live in* ke II ada yang sedikit berbeda, baik ISAIIs maupun KPD membuat *live in* ke II lebih pada konsep *Short Reasearch* yang mana nantinya peserta *live in* tidak hanya membuat abstrak dan sekedar tulisan, akan tetapi dibuat lebih serius dan mendalam seperti penelitian pendek pada umumnya dan diakhir penelitian hasil tulisan- tulisan terbaik karya peneliti muda akan di seminarakan secara terbuka untuk didengar dan dilihat oleh publik.

Live in ke II dijalani pada tanggal 18 Mei dengan mengambil tema besar yakni “*Konsep Khilafah Ahmadiyah: Doktrin dan Organisasi*” tema ini sengaja diangkat karena pada saat itu isu ISIS dan beberapa organisasi islam politik sangat santer dieritakan, sehingga sedikit banyak berpengaruh pada JAI di Indonesia, lewat tema tersebut, JAI ingin menjelaskan kepada peserta *live in* bahwa organisasi JAI adalah murni organisasi Islam religi bukan politik seperti ISIS dan sejenisnya. Adapun lokasi *live in* yang dipilih adalah komunitas JAI di kampung Gondrong Tanggerang Banten. Saat itu peserta *live in* sebanyak 20 orang diberangkatkan pada tanggal 21- 24 Mei 2015, dan selama waktu tersebut, peserta bebas berinteraksi dan meneliti sesuai dengan abstrak yang dikirimkan kepihak panitia.

Live In III. Study On The Minority Group dan Seminar Nasional “Ahmadiyah di Tengah Cita- Cita Toleransi Keberagaman di Indonesia” tanggal 10 Oktober- 12 November 2015

Kampanye di semeseter ke IV atau semester terakhir di periode pertama kampanye BPT, kembali KPD Yogyakarta mengambil metode kampanye *Live in*, yang diselenggaran di Kuningan Jawa Barat tepatnya di desa Manis Lor sisi timur kaki gunung Ciremai. *Live in* ke III mengangkat tema “*Ahmadiyah di Tengah Cita- Cita Perdamaian*” tema ini dipilih untuk menyikapi konflik yang kerap terjadi antara jemaat Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah, jika sebelumnya pada *live in* I KPD Yogyakarta mengajak peserta *live in* untuk melihat lebih dekat bagaimana sistem akidah dalam Jemaat, *live in* ke II KPD kembali lagi mengajak peserta untuk melihat sistem kepemimpinan Jemaat atau Kekhalifahan Jemaat yang non-politik I, pada kesempatan *live in* ke III KPD Yogyakarta mengajak peserta untuk melihat bagaimana Jemaat Ahmadiyah ingin sekali hidup dalam kedamaian cinta kasih dan saling toleransi antar umat beragama. Lokasi *live in* yang dipilih oleh KPD yakni berdasarkan rembukan dengan ISAIIs, karena ISAIIs kembali lagi diajak oleh KPD Yogyakarta untuk menjadi panitia utama. Lokasi tersebut dipilihlah yakni Manis Lor Kuningan Jawabar, mengapa lokasi ini, yang pertama Manis Lor merupakan daerah di mana komunitas Jemaat yang sangat masiv di Indonesia, yang kedua oleh karena komunitas ini sangat masiv mengakibatkan sering terjadinya konflik antara penduduk Jemaat dengan Non-Jemaat, bahkan kesenjanganpun sering terjadi antara pemerintahan Kuningan dengan Jemaat Ahmadiyah.

Tanggal 22- 25 Oktober 2015, peserta *live in* diberangkatkan, sebanyak 20 peserta yang lolos seleksi dipersilahkan berinteraksi dengan siapa saja sesuai dengan tema abstrak, yang mana hasil peneltian mereka dipilih yang terbaik dan dipresentasikan pada seminar Nasional JAI yang dilaksanakan di UIN tanggal 12 November 2015.



2. Analisis Data

Secara garis besar diukur dari kerangka teori, pelaksanaan kampanye KPD Yogyakarta sudah sangat terorganisir dan terstruktur, hanya yang saya ingin kritisi di sini yakni kurangnya koordinasi yang baik antara KPD Yogyakarta dengan BPT Nasional, hal ini terbukti dari pengakuan KPD Yogyakarta yang dua kali pengadaan kampanye di semester ke tiga dan ke empat sama sekali tidak mendapatkan pendanaan dari BPT Nasional, yang mengakibatkan KPD Yogyakarta harus menggelontorkan dana pribadi agar kampanye tetap terlaksana. Hal yang menjadi koreksi besar KPD adalah, ketika mengajak kerja sama pihak luar, haruslah terlebih dahulu mengkoordinasikan semua hal termasuk anggaran dana ke BPT, karena yang terjadi adalah, KPD mengajak kerja sama pihak luar dan telah membuat konsep acara, dan telah merekrut peserta, akan tetapi KPD tidak mengetahui seberapa besar dana yang di sediakan oleh BPT, tidak adanya komunikasi yang baik antara BPT dan KPD berimbas pada dikurangnya jumlah peserta yang ikut dalam *live in*.

Sengakan untuk tema kampanye sendiri, dari ke lima kampanye, hanya satu tema yang tidak sesuai misi dan visi kampanye yakni Tema yang diangkat dalam simposium yang hanya menjelaskan multikulturalisme dan wacana perdamaian di Indonesia tanpa khusus membahas Ahmadiyah, baik dalam konten materi maupun pembuatan poster yang dibagikan ke khalayak tidak ada satu pun yang menjelaskan bahwa yang ingin ditampilkan adalah wajah JAI. Di luar dari simposium selebihnya semua tema berusaha menjelaskan posisi dan kondisi Ahmadiyah baik dalam kajian agama, sosial masyarakat, dan ketatanegaraan.

Sedangkan dari sisi khalayak, kendala terbesar kampanye untuk mendapatkan peserta yang banyak dan beragam terletak pada seberapa banyak dana yang dimiliki oleh penyelenggara, hal ini juga dihadapi oleh KPD Yogyakarta, karena minimnya dana yang turun dari pusat, sehingga angka partisipan yang mampu diikuti sertakan diluar dari harapan. Sebagai salah kasus adalah, sangat sedikitnya partisipan *live in* yang mampu diberangkatkan yakni sebanyak 30-20 orang saja. Namun untuk menutupi ini semua, KPD Yogyakarta, membuat seminar hasil penelitian, untuk diceritakan kepada audiens lain yang tidak ikut andil dalam *live in*.

Yang terakhir kekurangan dari kampanye ini ialah, selama kurun satu periode pelaksanaan kampanye, tidak ada evaluasi kinerja kerja program- program yang sudah di jalankan, baik seminar, *symposium*, maupun *live in*. Hal ini diakui oleh Rizki selaku coordinator lapangan, seluruh program kampanye dalam satu periode tersebut tidak pernah ada dilakukan rapat evaluasi khusus antara BPT dan KPD Yogyakarta, interen KPD Yogyakarta maupun KPD Yogyakarta dengan pihak luar, sehingga jika adapun hal yang ingin dikoreksi semua berjalan ketika hendak membuat program kerja selajutnya dan sudah bekerja sama dengan pihak luar, sehingga tidak mengherankan jika dalam dua kali kampanye tidak di danai oleh BPT karena KPD Yogyakarta, selalu membuat program kerja tanpa dirapatkan dan dirembukan dahulu dengan BPT, sehingga terkesan KPD dan BPT berjalan masing- masing.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan di atas maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye yang diselenggarakan oleh JAI di Daerah Yogyakarta tidak mendapati kendala seperti yang ditakutkan oleh JAI yakni penyerangan tiba- tiba oleh kelompok masyarakat yang kontra terhadap mereka, semua berjalan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan, akan tetapi masalah justru datang dari interen JAI sendiri



khususnya BPT dan KPD Yogyakarta, yang mana kurangnya koordinasi antara ke dua badan ini berakibat pada dua kali penyelenggaraan kampanye mengalami kendala yang sama, yakni tidak adanya dana yang turun dari pusat untuk membiayai kampanye, hal lain yakni baik BPT maupun KPD tidak melihat kembali misi dan visi sebagai landasan bekerja sehingga kampanye *Symposium* yang diadakan keluar dari misi kampanye 2013-2015, dan hal yang paling utama adalah BPT dan KPD Yogyakarta sama sekali tidak pernah melakukan evaluasi kerja sepanjang tahun 2013-2015, hal ini tentunya berakibat pada tidak adanya catatan evaluasi kerja serta saran dan rekomendasi untuk kampanye selanjutnya.

D. SARAN

Adapun saran yang menjadi masukan dari keseluruhan kinerja kampanye BPT dan KPD Yogyakarta di periode I adalah: Baik BPT maupun KPD Yogyakarta harus melihat kembali misi kampanye sebelum menentukan tema kampanye seperti yang terjadi pada simposium, di mana tema dan misi kampanye tidak sejalan walaupun pada umumnya materi *symposium* menyinggung wacana dan praktek perdamaian di Indonesia akan tetapi sama sekali tidak menyinggung aspek kondisi Jemaat Ahmadiyah secara khusus. Sedangkan untuk *live in*, BPT dan KPD Yogyakarta, harusnya mematangkan konsep dan anggaran di ranah intern sebelum mengajak pihak luar untuk bekerja sama dan menjangkau peserta *live in*. Kurangnya koordinasi antara BPT dan KPD Yogyakarta dalam perencanaan pendanaan kampanye tentu akan berakibat fatal jika hal ini terjadi kembali pada program kerja selanjutnya. Dan untuk Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta, harus mulai membuka diri dan berbaaur dengan masyarakat umumnya, kerana selama ini yang terjadi adalah eksklusifitas yang dibangun oleh Jemaat Ahmadiyah ialah merupakan salah satu hambatanterbangunnya komunikasi yang sehat antar keduanya.

REFERENSI

- Ahmad Munawar, Drs. *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: SUKA-Pres
- Appelbaum Ronald L., & Anatol K.W.E (1974). *Strategies For Persuasive Communication*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Bogdan, R.C dan Taylor. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu- Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Jhonson-Cartee, Karen S. & Gary A. Copeland. (1997). *Inside Political Campaigns*. Westport, Connecticut- AS: Praeger.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Klingemann, Hans-Dieter., & Andrea Rommele. (2002). *Public Information Campaign & Opinion Research*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Larson, Charles U., 1992, *Persuasion; Reception and Responsibility*, California: Wardworth Publishing Company.
- Munawar Ahmad,. 2013, *Candy's Bowl: Politik Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA-Press
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya



- McQuail, Dennis M. & Windahl, Seven. (1993). *Communication Models: For Study Of Mass Communication Second Edition*. New York: Longman
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Perloff, Richard M. *The Dynamics of Persuasion*. (1993) New Jersey: L. Erlbaum Associates.
- Pfau, Michael dan Roxanne Parrot. (1993) *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rogers, E.M., & Storey J.D. (1987). *Communication campaign*. Dalam C.R Berger & S.H Chaffe (Eds.), *Handbook of Communication Science*. New Burry Park, CA: Sage
- Ruslan, Rosady, S.H., M.M. (2013) *Kiat dan Strategi Kampanye Publick Relation*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani.2008. *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sukardi, Prof. (2013) *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas, Implementasi dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Bumi Akasara
- Schenk, Michael dan Thomas Dobler. (2002) *Towards a Theory of campaigns: The role of Opinion Leaders*. Dalam Klingemann dan Rommele 2002 *Public Information Campaign & Opinion research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Stone, Gerald., M. Singletary & V.P Richmond. 1999. *Clarifying Communication Theories: A Hand-on Aproach*. Ames AS: Lowa State University.
- Venus, Antara Drs, MA. (2009). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- <https://akkbb.wordpress.com/2008/05/14/warga-ahmadiyah-lombok-cari-perlindungan-ke-bali/> (akses tanggal 24 Februari 2016)
- <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/204268-ahmadiyah--darah-dan-ibadah> diakses tanggal 22 Februari 2016)
- <http://ahmadiyah.org/gerakan-ahmadiyah-dalam-krisis/> (diakses tanggal 07 Maret 2016)
- http://www.andreasharsono.net/2010/02/ahmadiyah-rechtstaat-dan-hak-asasi_18.html (diakses 07 Maret 2016)



PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MELALUI PROGRAM *VOCATIONAL EDUCATION* (VE) UNTUK MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY* (AEC)

Merriam Modeong¹

¹*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
E-mail: merriamisty.modeong@gmail.com*

ABSTRAK

Indonesia sebagai bagian dari negara ASEAN saat ini dihadapkan pada *Asean Economic Community* (AEC) yaitu program pembentukan sistem perdagangan bebas. Pada tahun 2020 AEC memiliki visi untuk membentuk ASEAN menjadi pasar yang berbasis produksi tunggal agar dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, baik diranah sosial maupun ekonomi. Salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan ini adalah dengan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan mumpuni. Di antara usaha untuk melahirkan tenaga kerja berkompeten ialah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sebagai salah satu bidang yang memiliki performa yang baik untuk mendongkrak perkembangan ekonomi di Indonesia. Subjek yang paling tepat untuk mengembangkan kompetensi pada ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pemuda. Karena pemuda adalah bibit yang paling layak dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang terampil. Pengembangan kompetensi pemuda Indonesia terhadap iptek salah satunya dengan menyalurkan mereka pada pendidikan yang berbasis kejuruan atau *vocational education* (VE). Dimana, pendidikan kejuruan menjanjikan pemuda Indonesia yang terampil terhadap iptek, sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi dan terhindar dari citra pengangguran. Pembelajaran pada pendidikan kejuruan menekankan pada lima kompetensi utama, yaitu kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), kebutuhan profesional (*professional needs*), kebutuhan generasi masa depan (*vision*), dan kebutuhan ilmu pengetahuan (*scientific*). Melalui program VE, pemuda Indonesia bisa memiliki kapabilitas untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya.

Kata Kunci : *Asean Economic Community*, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, *Vocational Education*

A. PENDAHULUAN

Problem perekonomian masih selalu menjadi perbincangan hangat untuk mengantisipasi kebutuhan yang terus meningkat pada setiap individu. Apabila suatu negara memiliki banyak masalah perekonomian, maka masyarakatnya dianggap tidak sejahtera. Problem ini pun yang menjadi dasar terbentuknya ASEAN untuk menciptakan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yang dirancang ASEAN dimulai pada tahun 1992 dengan bentuk perdagangan barang atau disebut dengan AFTA, kemudian dilengkapi dengan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Jasa (AFAS) pada tahun 1995 dan perjanjian Kawasan Investasi ASEAN (AIA) pada tahun 1998. Selanjutnya untuk memperdalam integrasi ekonomi, *Asean Economic Community* (AEC) dibentuk sebagai



upaya untuk menciptakan pasar terpadu dan basis produksi melalui aliran bebas barang, jasa, investasi asing, tenaga kerja terampil, dan aliran bebas dari capital (Chia, 2013, p.4).

Problem perekonomian memang merupakan topik yang sangat sensitif. Sedikit saja terdapat masalah, maka pertumbuhan ekonomi di suatu negara akan terhambat. Kemiskinan, pengangguran, bahkan kesenjangan penghasilan adalah masalah-masalah perekonomian yang sering kali muncul. ASEAN yang merupakan organisasi geo-politik dan ekonomi melakukan kerjasama antar negara-negara bagian Asia Tenggara dengan tujuan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 2003 ASEAN di Bali, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengintegrasikan ekonomi mereka pada tahun 2020 dan mendirikan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) (Hew, 2007, p.2). Hal ini dilakukan sebab daya saing ekonomi di negara ASEAN telah terkikis, sehingga ASEAN penting untuk mengikuti jejak negara berkembang di kawasan Asia seperti China dan Jepang dengan tujuan untuk mempercepat integrasi ekonomi.

AEC menjadi kesempatan produktif bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara ASEAN. Sebab Indonesia memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan berpeluang besar menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia dapat memperdagangkan produk lokal dengan kualitas yang baik, serta ikut bersaing dengan negara ASEAN lainnya. Untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu merancang dan memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada era 21.

AEC bukan sekedar kontes perdagangan bebas dengan produk-produk berkualitas, tetapi adanya program ini tidak luput dari dua ketentuan yang memberi dampak besar terhadap perdagangan, yaitu tenaga kerja terampil dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi (iptek). Mengarahkan warga Indonesia untuk terampil tidaklah mudah, dikarenakan oleh budaya, sejarah, agama, ekonomi, dan politik yang beragam (Hartono, 2010, p.15). Untuk itu perlunya persiapan yang baik agar dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Di antara usaha untuk melahirkan SDM berkualitas ialah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai salah satu bidang yang memiliki performa yang baik untuk mendongkrak perkembangan ekonomi serta dapat menguatkan basis industri Indonesia.

Alur kemajuan iptek berkembang pesat setiap tahun, sebab iptek merupakan bidang ilmu yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Realitanya peralatan teknologi saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan, artinya manusia menggunakannya hampir setiap saat untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas mereka. Akhirnya peralatan teknologi tidak bisa dipisahkan oleh manusia dan pengembangan terhadap bidang ilmu ini dianggap sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan perekonomian negara. Namun penggunaan teknologi tanpa pengetahuan yang baik juga akan berdampak buruk. Untuk itu, penggunaan iptek harus didasarkan ilmu yang tepat terhadap penerapannya.

Konsep ilmu pengetahuan tidak bisa terlepas dari pendidikan, karena pendidikan merupakan satu-satunya wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seseorang. Renstra Kemendikbud tahun 2015-2019 menguraikan tentang penyesuaian dan perbaikan tema mengikuti kondisi terkini agar tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada setiap tahunnya. Selain itu, Rencana Pembangunan Pendidikan



Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) juga menguraikan empat periode tema pembangunan pendidikan selama periode 2005-2025, dan pada tahun 2016 ini rencana pembangunan nasional telah masuk pada periode ketiga.

Pembangunan pendidikan periode ketiga direncanakan sebagai tahap pendidikan yang menyiapkan pemuda Indonesia untuk memiliki daya saing regional. Pada periode ketiga ini dimaksudkan agar pemuda bisa memiliki kualitas dan tidak tertinggal dengan perkembangan zaman, dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pemuda diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat di masyarakat dengan tetap mengandalkan iptek yang dimiliki.

Jenis pendidikan yang menghasilkan SDM terampil adalah pendidikan kejuruan atau *vocational education* (VE). VE merupakan pendidikan yang berorientasi terhadap lingkungan pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil pada bidang keahlian tertentu. Seperti yang diuraikan oleh Lucas, *et.al* (2012, p.37) tujuan dari VE adalah pengembangan kompetensi kerja pada bagian kejuruan yang dipilih. Dengan kata lain, pendidikan kejuruan memungkinkan orang untuk belajar bagaimana melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuan standar yang ditetapkan di tempat dimana mereka berkembang. Hasil utama dari pendidikan kejuruan adalah menghasilkan lulusan terampil yang mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian mereka (Modeong, 2016, p.3). Sehingga dengan adanya tenaga kerja terampil akan memperkuat posisi industri yang akan memicu pertumbuhan perekonomian negara.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Iptek melalui Vocational Education (VE)

Aktivitas yang bersentuhan langsung dengan peralatan teknologi saat ini tidak sulit ditemui. Teknologi mulai memperoleh kepopulerannya pada saat memasuki abad ke-20. Bain (1937, p.860) menyatakan bahwa *technology includes all tools, machines, utensils, weapons, instruments, housing, clothing, communicating and transporting devices and the skills by which we produce and use them*. Teknologi bukan hanya sekedar alat komunikasi yang selalu dibawa dan digunakan manusia saat ini, melainkan meliputi semua alat yang bekerja untuk memberikan kemudahan bagi seluruh aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, senjata, alat komunikasi, alat transportasi, dan lain sebagainya.

Manusia cenderung lebih sering menggunakan teknologi dengan tujuan yang beragam (Ferrari, Punie, & Redecker, 2012, p.81). Sehingga perkembangan iptek menjadi sebuah berita yang ditunggu-tunggu guna untuk memperbaharui peralatan dan fungsinya yang sudah ada. Adanya peralatan teknologi beserta pembaharuannya tidak lain untuk menjadi tangan kedua manusia untuk melakukan aktivitas. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik manusia, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sehingga tidak memakan waktu banyak untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain memberi dampak yang berarti bagi kehidupan sosial dan budaya manusia, iptek juga menjadi salah satu aspek penentu dalam perkembangan ekonomi negara.

Perkembangan iptek yang semakin maju menuntut institusi pendidikan untuk terus mengikuti jejak perkembangannya dan menjadikan salah satu tujuan dari pembelajaran. Mengingat pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan dan menyediakan SDM terampil agar mampu bertahan hidup terlebih pada kondisi perekonomian yang semakin melambung. Melalui pendidikan, peserta didik bisa memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu yang dipelajari. Pendidikan juga



memungkinkan peserta didik untuk memiliki kompetensi. Tilaar (2006) menguraikan pendidikan memiliki fungsi preparatoris dan antisipatoris adalah bahwa disamping mempersiapkan peserta didik sebagai generasi masa depan (tenaga kerja), pendidikan juga menyiapkan peserta didik utkantisipasi kemungkinan masa depan dengan membekali kemampuan dan tingkah laku yg diperlukan.

Jenis pendidikan yang paling tepat untuk mengembangkan kompetensi pada bidang keahlian tertentu adalah pendidikan kejuruan (VE). Maclean & Wilson (2009, p.1443) menyebutkan bahwa untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan iptek diperlukan keterlibatan VE, sebab peran VE sangat memungkinkan untuk mewujudkan tenaga kerja nasional dengan keterampilan dasar. VE memiliki berbagai macam program yang sangat berbeda dengan pendidikan menengah pada biasanya. Seperti yang diuraikan oleh Pilz (2012:12) bahwa program-program pada pendidikan kejuruan secara khusus ditargetkan untuk persiapan bekerja.

Sementara itu, Kasubdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI, Dr Ir M Bakrun Dahlan menyebutkan bahwa untuk bisa bersaing di dunia kerja, siswa harus memiliki lima elemen kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, yaitu (I) kebutuhan masyarakat (*societal needs*), (II) kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), (III) kebutuhan profesional (*professional needs*), (IV) kebutuhan generasi masa depan (*vision*), dan (V) kebutuhan ilmu pengetahuan (*scientific*).

- (I) Osuala (1981) menyatakan bahwa VE adalah suatu bentuk pendidikan yang meliputi persiapan untuk bekerja di industri guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*societal needs*) yang beragam. *Societal needs* bisa diwujudkan dengan menilai relevansi dan kesesuaian pembelajaran pada VE dengan kondisi kebutuhan lingkungannya, sebab masyarakat saat ini menuntut lulusan yang bisa diandalkan dalam lingkungan (Mishra & Bartram, 2002, p.95), bukan lulusan yang hanya sekedar memiliki ilmu. Untuk itu, pembelajaran pada VE menekankan pada kondisi kebutuhan masyarakat. Inilah alasan mengapa pendidikan kejuruan perlu menyediakan program pembelajaran yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat.
- (II) Melalui pendidikan kejuruan, peserta didik dibekali dengan pembelajaran berbasis tempat kerja. Artinya, pembelajaran di sekolah tidak jauh berbeda dengan praktik di tempat kerja. Kurikulum yang digunakan di sekolah harus mengikuti permintaan pasar kerja (*industrial needs*). Kerjasama antar pihak sekolah dengan industri memungkinkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti dijelaskan Unesco (2012, p.6) bahwa hubungan yang efektif antara pihak sekolah dan industri akan memungkinkan kurikulum dan metode pengajaran yang up-to-date dan relevan. Selanjutnya, pada VE peserta didik diajarkan teori dan praktik nyata. Praktik nyata merupakan praktik langsung dengan peralatan yang dipelajari pada teori. Setelah melakukan pembelajaran dengan praktik nyata di lingkungan sekolah, peserta didik yang berlatih di VE kemudian melakukan praktik lapangan atau magang. Praktik lapangan dimaksudkan untuk memaksimalkan orientasi siswa terhadap alat-alat yang akan digunakan di tempat kerja, sehingga siswa akan terbiasa dengan penggunaannya. Hal ini juga memberikan peluang bagi peserta didik untuk bisa direkrut industri sebagai calon pekerja selama peserta didik tersebut memiliki kriteria seperti yang dibutuhkan oleh industri (Dittrich & Abdullah, 2012, p.122).



- (III) VE tidak hanya sekedar menyiapkan peserta didik yang mampu mengoperasikan peralatan-peralatan praktik dengan kemampuan standar, namun VE juga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional (*professional skill*). Hal ini ditempuh melalui praktik lapangan. Seperti yang dijelaskan pada poin *industrial needs*, dimana salah satu pembelajaran pada VE adalah pembelajaran yang melibatkan industri sebagai tempat belajar siswa. Melalui industri, siswa menggunakan ruang kerja untuk belajar. Unesco (2012, p.6) menjelaskan bahwa peserta didik yang belajar di industri merupakan cara efektif untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan terampil.
- (IV) Praktik VE juga menekankan pada kebutuhan generasi masa depan (*vision*). Artinya VE harus bisa menghasilkan produk yang berguna untuk generasi mendatang, karena tanpa kualitas, masyarakat tidak akan mampu menghadapi tantangan global yang terus berkembang setiap saat (Unesco, 2012, p.9).
- (V) Kompetensi terakhir yang harus dimiliki oleh peserta didik yang berproses di VE adalah kompetensi untuk kebutuhan ilmu pengetahuan (*scientific*). VE tidak hanya sekedar menghasilkan produk masa depan, melainkan juga produk-produk yang berfaedah bagi ilmu pengetahuan lainnya, seperti ilmu pengetahuan fisika dan informasi, biologi dan ilmu kesehatan, sosial, dsb. Kerre (2008) mengungkapkan bahwa dunia saat ini ditandai dengan eksplorasi ilmiah dan teknologi yang luar biasa. Sebagai generasi masa depan, kita memerlukan pemikiran ilmiah, penalaran, dan kemampuan untuk membuat keputusan. Karena melek ilmiah dan teknologi merupakan kebutuhan yang mendesak pada abad 21.

Lima elemen kompetensi ini diharapkan melekat pada jiwa-jiwa pemuda Indonesia. Industri Indonesia harus berkembang dan menyesuaikan tuntutan masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, diperlukan tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan industri tempat mereka akan berkarir, serta mampu mencapai tujuan integrasi ekonomi bangsa.

Konsep ini sesuai dengan tujuannya VE seperti yang diuraikan oleh Billet (2011, p.137), diantaranya: (1) membantu individu agar terlibat secara efektif dalam kehidupan kerja; (2) menghasilkan perubahan terhadap emansipasi masyarakat; (3) mendukung kesinambungan perusahaan tertentu; dan (4) mendukung kinerja ekonomi nasional. Selain itu, Visi Misi Presiden RI juga membahas salah satu tujuan dalam masa kepemimpinannya yang terkandung dalam Nawa Cita ke-6, bahwa pada masa pemerintahan Presiden RI 2014-2019 akan membangun sejumlah Science dan Techno Park (STP) di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Oleh karena itu, VE sebagai salah satu jenis pendidikan menengah diharapkan mampu meningkatkan keterampilan sesuai yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan serta mampu mengurangi kesenjangan dan kontradiksi dalam masyarakat melalui pendidikan yang dimiliki guna untuk membawa perubahan (Modeong, 2016, p.4).

2. SDM Muda Terampil untuk ASEAN Economic Community

Sesuai dengan tujuan utamanya, AEC akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. AEC memberi kesempatan produktif buat Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Jumlah penduduk Indonesia yang besar menjadi salah satu potensi keikutsertaan terhadap AEC. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dengan berbagai jenis suku, bahasa



dan adat istiadat yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia ketiga (4,5%) setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India (Kemendag, 2015). Hal ini menjadi salah satu modal Indonesia untuk ikut dalam persaingan dengan negara ASEAN lain pada program AEC.

Melalui jumlah populasi yang besar, Indonesia diharapkan mampu menghasilkan SDM dengan kualitas yang baik serta dapat diandalkan sebagai subjek penentu suksesnya industri Indonesia pada AEC. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian terpenting yang bertugas mengelola dan mengembangkan SDA, sains, dan teknologi untuk mendorong peningkatan perekonomian di suatu negara. Di beberapa negara berkembang saat ini telah menghasilkan SDM dari kalangan pemuda. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan ilmu pengetahuan bisa bersifat *continuitas*. Artinya, anak-anak muda yang belajar juga bisa bersaing melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang diterima dari bangku sekolah, serta ikut mengendalikan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

SDM yang dihasilkan melalui VE diakui mampu menjadi kunci untuk menghadapi AEC. Bodnar dan Hopwood (2012, p.24) menguraikan bahwa SDM adalah manusia yang secara psikologi memiliki suatu perilaku (*behavior*) dan kemampuan tertentu yang melekat pada dirinya, sehingga aspek keperilakuan dalam konteks manusia sebagai pengguna (*user*) menjadi penting sebagai faktor penentu keberhasilan pemanfaatan suatu ilmu. Artinya, perkembangan iptek secanggih apapun jika tidak disertai oleh pengguna yang terampil maka tidak akan ada dampak yang begitu berarti yang dirasakan oleh *user*. Indonesia harus kembali fokus pada perbaikan perekonomian dalam negeri. Sebab Indonesia memiliki kompetensi yang besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian negara. Dengan begitu cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur akan tercapai.

Survei tentang sisi positif Indonesia diungkap oleh Legatum Institute dalam *The Legatum Prosperity Index 2015*. Survei tersebut menyatakan bahwa selain sisi ekonomi, kemajuan manusia bisa dicapai dengan memberikan kesempatan kepada warganya (Kemenkeu RI, 2015). Berupa kesempatan berkarya, mengeksplorasi potensi dalam diri pemuda Indonesia, hingga kesempatan untuk mengembangkan suatu ilmu. Ilmu yang baik adalah ilmu yang tidak hanya sekedar pemahaman teori, melainkan pengaplikasiannya terhadap masyarakat.

Ilmu yang dikembangkan melalui VE memberi jaminan bagi perkembangan masyarakat. Dimana pada VE sangat menekankan pada keterampilan individu. Pelatihan keterampilan sangat penting, terutama di lingkungan dengan kondisi ekonomi yang rapuh, sehingga perlu adanya pembelajaran dengan praktik yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Kekurangan keterampilan di kawasan Asia merupakan masalah sikap dan dukungan. Pemuda sekarang ini lebih mengejar pekerjaan kerah putih sebagai pilihan untuk berkarir (Majumdar, 2011, p.39), dibanding mengejar dan menguasai keterampilan untuk menjadi SDM produktif. Hal ini yang menjadi kendala pengembangan SDM di Indonesia. Sebab, masih sedikit keinginan pemuda yang ingin berkarir di VE. Performa sekolah menengah dominan berkembang di pendidikan umum sebagai pilihan peserta didik, padahal VE juga menawarkan keuntungan yang baik untuk negara.

Seperti yang diungkapkan Anane (2013, p.117), bahwa "*Vocational Education (VE) systems play a vital role in the social and economic development of a nation*". Yang



bermakna bahwa pendidikan berbasis kejuruan (VE) memainkan peran penting untuk menghasilkan SDM muda terampil dalam pembangunan suatu bangsa. Sehingga melalui program VE, pemuda Indonesia bisa memiliki kapabilitas untuk bersaing dengan negara ASEAN lainnya dalam kontes ASEAN Economic Community.

C. IMPLIKASI

Persaingan industri antar negara ASEAN menjadi sebuah tuntutan bagi Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam program AEC. Paper ini memberi rekomendasi terhadap suksesnya program pasar pembentukan sistem perdagangan bebas bagi Indonesia, melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bidang ilmu yang terus berkembang mengikuti zaman. Pengembangan iptek tidak pernah luput dari SDM terampil. Sebab SDM merupakan bagian terpenting yang bertugas mengelola dan mengembangkan SDA, sains, dan teknologi, selain itu SDM dapat mendorong peningkatan perekonomian di suatu negara.

Untuk menghasilkan SDM terampil bisa dibidik pada pendidikan kejuruan (VE). Dimana saat ini lebih banyak anak muda yang kreatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga, melalui pendidikan kejuruan, kompetensi yang ada pada anak muda dapat digali dan dikembangkan. Pembelajaran pada VE memperkenalkan siswa pada dunia kerja nyata, dimana siswa tidak sekedar belajar di sekolah melainkan juga belajar langsung di industri kerja. Hal ini yang memberikan nilai *plus* pada VE. Sebab VE dikenal mampu menghasilkan tenaga kerja terampil, lulusan dari VE juga diakui mampu bersaing di dunia industri.

Indonesia membutuhkan anak muda yang terampil. Kondisi negara saat ini memperlihatkan banyak sekali pengangguran dari kalangan anak muda. Perekonomian negara akan semakin menurun jika anak mudanya tidak berproses. Seperti diungkapkan salah satu Mahfudzat “Syubbanul yaum rijalul ghad”, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sebab pemuda akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang, untuk itu harus dipersiapkan dengan baik dan matang, sehingga peran pemuda hendaklah direvitalisasi sejak dini.

REFERENSI

- Anane, C. A. (2013). Competency based training: quality delivery for technical and vocational education and training (tv et) institutions. *Educational Research International*, 2 (2).
- Bain R. (1937). *Technology and state government*. American Sociological Review 2.
- Billett, S. (2011). *Vocational education: purposes, traditions and prospects*. London: Springer.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2012). *Accounting information systems*. New Jersey: Prentice Hall.
- Chia, S. Y. (2013). *The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects*. Tokyo, Asian Development Bank Institute.
- Ferrari, A., Punie, Y., & Redecker, C. (2012). *Understanding digital competence in the 21st century: an analysis of current frameworks*. Saarbrücken, Springer.
- Hartono, A. (2010). *An investigation into strategic human Resource management in indonesia: A grounded research approach*. Thesis. Murdoch University.



- Hew, D. (2007). *Brick by brick: the building of ASEAN Economic Community*. Canberra: Asia Pacific Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2015). *Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/daya-saing-sumber-daya-manusia-indonesia-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean>, pada 29 Oktober 2016.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2015). Rencana strategis kementerian pendidikan nasional 2015-2019.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2016). *Lima kompetensi wajib dimiliki siswa SMK*. Diakses melalui <https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1668/lima-kompetensi-wajib-dimiliki-siswa-smk>, pada 13 Oktober 2016.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI). (2015). *Peluang dan tantangan Indonesia*. Warta Ekspor, edisi Januari 2015.
- Kerre, B. W. (2008). *Science and technology teacher education in africa: Issues in the promotion of scientific and technological literacy*. Paper.
- Lucas, B., Spencer, E., & Claxton, G. (2012). *How to teach vocational education: a theory of vocational pedagogy*. London: City & Guilds Centre for Skills Development.
- Majumdar, S. (2011). *Emerging Challenges and Trends in TVET in the Asia-Pacific Region*. Rotterdam, Sense Publisher.
- Mishra, A. K. & Bartram, J. (2002). *Perspective on distance education: Skill development through distance education*. Vancouver, The Commonwealth of Learning.
- Modeong, M. (2016). *Analisis penerimaan e-learning oleh siswa SMK di Kota Yogyakarta*. Tesis, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Osuala, E.C. (1981). *Foundation of Vocational Education: A behavioural objectives approach*. Nigeria, Conteur press Ltd Calabar.
- Pilz, M. (2012). *The future of vocational education and training in a changing world*. Wiesbaden: Springer.
- Tilaar, D. A. R. (2006). *Manajemen pendidikan nasional*. Jakarta, Remaja Rosdakarya.
- Unesco. (2012). *Strengthening TVET teacher education*. Bonn, UNESCO-UNEVOC International Centre for TVET.
- Unesco. (2012). *Transforming TVET - from idea to action*. Bonn, UNESCO-UNEVOC International Centre for TVET.
- Dittrich, J. & Abdullah, A. G. (2012). Collaboration in TVET: Proceedings of the 2nd UPI international conference on technical and vocational education and training, 2 (1).
- Maclean, R. & Wilson, D. (2009). *International handbook of education for the changing world of work: bridging academic and vocational learning*. Bonn: Springer.



INOVASI PEMUDA DALAM MENGELOLA DESA WISATA DENGAN SEGALA KETERBATASAN

Ihsan Rahmat¹

¹*Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Pascasarjana Fisipol,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Email: ihsanrrahmat@gmail.com*

ABSTRAK

Gunungkidul memiliki 12 desa wisata, 4 diantaranya mati suri. Hanya 3 desa wisata yang memperlihatkan tren positif dari sisi pengunjung dan inovasi pengelolaan desa wisata di Gunungkidul. Padahal tren desa wisata tengah menggeliat dalam dunia pariwisata. Ketidakmampuan pemerintah dan masyarakat untuk mengemas dan memasarkan produk wisata berdampak pada kemunduran berbagai potensi wisata. Disaat kritis seperti ini, pemerintah dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) justru saling menyalahkan. Pada satu sisi, Dinas Pariwisata belum memiliki model pengembangan desa wisata yang ideal. Di sisi lain, Pokdarwis tidak memiliki kemampuan untuk mengelola secara mandiri potensi wisata yang ada di desa. Tulisan ini berusaha menjembatani kedua masalah ini dengan menghadirkan Desa Wisata Ngelangeran sebagai *best practice* pengelolaan desa wisata. Ngelangeran dianggap menarik untuk dikaji karena pengelolaan desa wisatanya dilakukan oleh pemuda setempat. Berbagai inovasi baru berhasil diterapkan dalam konteks desa wisata. Padahal dari latar pendidikan, pemuda-pemuda ini tidak memiliki drajat pendidikan yang tinggi. Peneliti curiga bahwa modal sosial lah yang menjadi penghubung antara pemuda dengan inovasi. Sehingga beberapa pertanyaan penelitian dimunculkan, yakni bagaimana proses pembentukan sebuah inovasi oleh pemuda Ngelangeran yang *notabene* memiliki berbagai keterbatasan sumber daya? Bagaimana inovasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dan wisatawan? Apakah modal sosial menjadi alternatif pendukung inovasi di tengah keterbatasan sumber daya pemuda? Asumsi dasar yang digunakan dalam studi ini adalah potensi desa wisata yang besar apabila dimbangi dengan inovasi-inovasi serta kemampuan masyarakat untuk mengelola, akan menjadi desa wisata yang bernilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Argumen dalam penelitian ini adalah untuk menjadi inovatif, tidak selamanya menyangkut tentang drajat pendidikan, modal sosial merupakan solusi lain untuk menghasilkan berbagai inovasi.

Kata Kunci: Pemuda, Inovasi Desa Wisata, Modal Sosial

A. PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 tentang Sadar Wisata, serta didukung pedoman umum desa wisata oleh PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2010, banyak desa di Indonesia mulai mengeksplorasi kekayaan alam, seni dan budaya, serta corak hidup masyarakat menjadi sesuatu yang bernilai wisata. Baik kesadaran yang muncul langsung dari dalam diri masyarakat ataupun adanya dorongan dari dinas pariwisata, geliat pariwisata berbasis desa ini telah menjadi fenomena baru dalam kepariwisataan Indonesia. “*Back to nature*” ditiupkan sebagai jargon untuk memikat hati



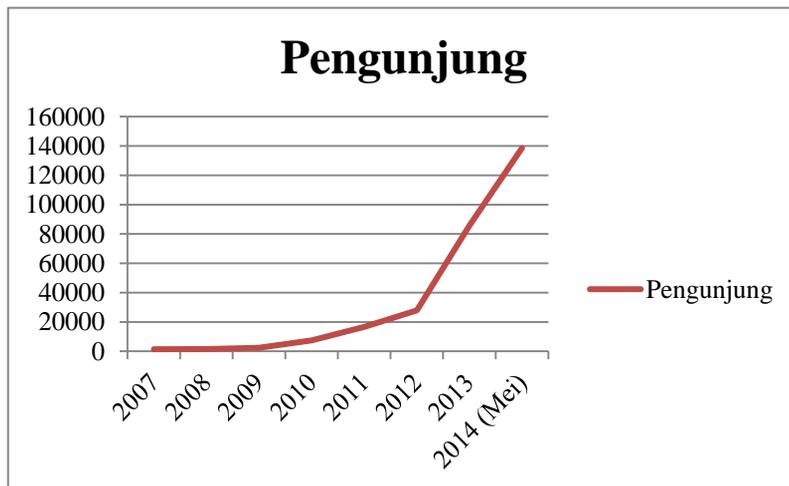
para wisatawan yang rindu akan suasana pedesaan dan bosan pada sesaknya kota, mall, bioskop, hingga wahana rekreasi buatan. Tetapi sangat disayangkan, peluang pergeseran minat wisata yang tengah menggeliat ini kurang dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku desa wisata.

Dalam data, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang dianggap menonjol pada sektor pariwisata, hingga bulan agustus tahun 2016 tercatat telah memiliki 144 desa wisata yang tersebar di lima kabupaten/kota. Dari sekian desa wisata yang terdaftar, hanya beberapa desa wisata yang dikenal oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Prevalensi yang muncul kemudian adalah desa wisata yang terkenal semakin maju dan mendapatkan banyak *income*, sebaliknya desa wisata yang sepi pengunjung lambat laun menjadi mati suri (secara kepengurusan ada, tetapi tidak ada aktifitas wisata). Data Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata (Disbupar) Gunungkidul menjelaskan bahwa dari 12 desa wisata yang ada, hanya 60 persen yang terus beraktifitas. Sisanya, sebanyak 40 persen desa wisata mengalami mati suri, yakni Desa Wisata Ngeposari, Desa Wisata Ponjong, Desa Wisata Mulo, dan Desa Wisata Bendung. Dari 60 persen desa wisata yang beraktifitas pun, hanya ada tiga desa yang dinilai terus berkembang dan menunjukkan berbagai inovasi, yakni Desa Wisata Nglanggeran, Desa Wisata Bejiharjo, dan Desa Wisata Bleberan.

Dalam merespon permasalahan ini, ada perdebatan antar aktor yang terlibat dalam desa wisata. Bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sulit berkembang mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, sedangkan Dinas Pariwisata mengklaim Pokdarwis dan masyarakat tidak serius menggarap desa wisata mereka sendiri. Disbupar Gunungkidul berargumen bahwa “walau sudah diadakan pelatihan untuk Pokdarwis yang bermasalah, tetap saja tidak menunjukkan geliat” (“Disbudpar Gunungkidul Temukan 4 Desa Wisata Mati Suri”, *Harian Jogja*, 22 Agustus 2016). Sedangkan penggiat desa wisata beralasan “perhatian dari Dinas Pariwisata sangat minim. Setidaknya masyarakat membutuhkan dukungan. Walau sudah ada pelatihan, tapi tidak serta merta langsung bisa” (“Suport Pemkab Gunungkidul Masih Minim”, *Harian Jogja*, 23 Agustus 2016).

Di luar hingar-bingar perdebatan tersebut, sebenarnya kendala utama ada pada ketidakmampuan sumber daya manusia desa untuk berinovasi dalam mengemas dan memasarkan produk wisata ke wisatawan. Klaim dukungan dari pemerintah sejatinya sangat penting, tetapi tidak mutlak dianggap sebagai penghalang dalam membangun dan mengelola desa wisata. Studi ini bermaksud menyajikan sebuah model pengelolaan desa wisata yang dibangun atas dasar kemandirian pemuda dan sebagian warga desa. Bercermin dari kesuksesan pemuda dan masyarakat Nglanggeran dalam mengelola desa wisata, banyak hal yang dapat dipelajari dan diambil contoh dalam membangun desa wisata dari titik bawah dan dengan segala keterbatasan sumber daya. Di awal pembangunan, Karang Taruna Bukit Putra Mandiri Nglanggeran bergerak secara mandiri, tanpa dukungan dari Dinas Pariwisata Gunungkidul. Pendanaan dihasilkan pemuda dari bercocok tanam, swadaya diantara mereka, hingga mengikuti berbagai lomba kepemudaan. Setiap masalah yang muncul dipecahkan secara bersama oleh pemuda dan didiskusikan ulang kepada sebagian masyarakat desa Nglanggeran. Jaringan ke pihak luar dimanfaatkan dengan baik, hingga mendapatkan berbagai bantuan seperti bibit-bibit tanaman. Dengan memanfaatkan potensi alam dan gerak pemuda yang satu visi, pembangunan desa wisata dilakukan secara swadaya lima dusun di Nglanggeran. Pemuda menginisiasi dan menetapkan program-program strategis, sedangkan sebagian masyarakat Nglanggeran bertugas sebagai pelaksana.

Desa Ngeposari yang dinilai mati suri, sebenarnya memiliki potensi wisata yang besar dibanding desa wisata lain yang ada di Gunungkidul, seperti Goa Gesing, Goa Buntet, Goa Jlamprong, Goa Thoto, Embung Jlamprong, dan sumber mata air Jragum. Sayangnya, Pokdarwis dan masyarakatnya dinilai tidak mampu mengelola dengan baik, sehingga semua potensi yang ada tidak mampu dimaksimalkan. Berbanding terbalik dengan apa yang ada di Ngelanggeran. Desa wisata ini hanya memiliki satu objek utama, yakni Gunung Api Purba. Tetapi, inovasi-inovasi yang dimunculkan mampu menjadikan desa wisata ini meraih penghargaan sebagai Kawasan Ekowisata Nasional tahun 2013 dan Desa wisata terbaik tingkat DIY tahun 2013. Adapun beberapa inovasi yang muncul: 1) merubah konsep wisata berbasis objek ke wisata berbasis lingkungan (ekowisata); 2) mengumpulkan data tentang budaya, kesenian, dan tradisi-tradisi desa, kemudian mengemasnya dalam bentuk paket wisata; 3) mengembangkan potensi desa dengan membangun curug buatan (kedung-kandang), kebun bunga amaryllis, dan kebun buah buatan; 4) membangun mini market dan gerai coklat di bawah Pokdarwis; 5) mengkonsep wisata berbasis *homestay*; 6) layanan satu pintu untuk seluruh akses wisata; dan 7) membuat kontrak kerja untuk pengurus Pokdarwis, dan mengeluarkan gaji anggota satu kali dalam satu minggu. Berbagai inovasi ini berhasil mendongkrak jumlah pengunjung. Terlihat dalam grafik, pengunjung tahun 2010 kurang dari 20.000, sedangkan empat tahun setelahnya Mei 2014 total pengunjung mencapai 138.617 dengan total pemasukan sekitar 1,5 miliar.



Grafik 1 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Desa Wisata Nglanggeran

Menariknya adalah inovasi-inovasi yang muncul diinisiasi oleh pemuda Ngelanggeran yang *notabene* mayoritas berijazah SMP dan SMA. Padahal kajian beberapa ahli menjelaskan bahwa perbedaan tingkat pendidikan seseorang memberikan kesempatan yang berbeda pula untuk menjadi inovatif (Xerri & Brunetto, 2011; Leong & Rasli, 2014). Ada kecurigaan bahwa kemampuan pemuda Desa Wisata Ngelanggeran disebabkan oleh faktor modal sosial. Kebiasaan pemuda untuk berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, bertukar pikiran, mempercayakan tugas kepada rekan lain, memiliki visi yang satu yakni



membangun ekonomi desa, serta membangun jaringan dengan berbagai pihak, diyakini sebagai cara pemuda untuk menghasilkan berbagai inovasi baru dalam dunia pariwisata.

Para ahli sepakat bahwa inovasilah yang sanggup membawa organisasi bertahan dalam jangka panjang menuju *competitive advantage* (De Spiegelaere, Van Gyes, De Witte, Van Hootegeem, 2015; Wang & Tsai, 2014; De Jong & Den Hartog, 2010) dan *sustainable tourism* (Ali & Frew, 2013; Hjalager, 2009; Sundbo, Orfila-Sintes, & Sørensen, 2007). Keadaan yang cepat berubah, batas wilayah yang semakin mudah dijangkau dengan kecanggihan transportasi, serta mudahnya menjangkau sesuatu dengan bantuan teknologi, menjadi alasan betapa pariwisata membutuhkan inovasi untuk bertahan dalam waktu yang lama. Hjalager (2009) mengatakan bahwa inovasi merupakan persyaratan mutlak untuk beroperasi di lingkungan pariwisata yang kompetitif, bahkan sampai ke titik bahwa daya saing organisasi dalam sektor pariwisata tergantung pada pencapaian inovasi (Orfila-Sintes & Mattsson, 2009, Novelli et al, 2006; Sundbo et al., 2007).

Kasus pengelolaan desa wisata Ngelanggeran melalui berbagai inovasi dianggap sebagai *best practice*, dapat menjadi cermin bagi desa wisata lain yang kesulitan dalam membangun dan mengembangkan potensi-potensi desa. Studi ini diharapkan dapat mengisi kekosongan model pengelolaan desa wisata. Mengingat hingga saat ini Dinas Pariwisata masih belum memiliki model pengelolaan desa wisata yang ideal, yang dapat dijadikan contoh oleh desa wisata lain. Pemerintah justru terjebak pada pendapat klise bahwa pengelolaan desa wisata sepenuhnya diserahkan pada masyarakat. Penyeimbangan ini bisa berlaku apabila masyarakat desa di Indoensia bersifat homogen dalam segala hal, tetapi kenyataannya tidak.

Bertolak dari problematika di atas dan kecurigaan awal peneliti, studi ini berusaha mendeskripsikan bagaimana proses pembentukan sebuah inovasi oleh pemuda Ngelanggeran yang *notabene* memiliki berbagai keterbatasan sumber daya? Bagaimana inovasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dan wisatawan? Selain itu, studi ini juga berusaha menjawab kecurigaan apakah modal sosial menjadi alternatif pendukung inovasi di tengah keterbatasan sumber daya pemuda? Asumsi dasar yang digunakan dalam studi ini adalah potensi desa wisata yang besar apabila dimbangi dengan inovasi-inovasi serta kemampuan masyarakat untuk mengelola, akan menjadi desa wisata yang bernilai ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Argumen dalam penelitian ini adalah untuk menjadi inovatif, tidak selamanya menyangkut tentang drajat pendidikan, modal sosial merupakan solusi lain untuk menghasilkan berbagai inovasi.

B. METODE DAN BATASAN

Bermaksud menjaga etika dan kemurnian dalam kajian kualitatif, studi ini didesain sesuai dengan kebutuhan peneliti. Desa wisata merupakan sebuah lokus kajian yang sangat besar. Creswell (2013) menjelaskan bahwa satu lokus atau masalah dapat didekati melalui berbagai pendekatan penelitian, yang pada akhirnya mendapatkan temuan atau deskripsi yang berbeda-beda. Karena itu, studi ini mengambil pendekatan kasus inovasi pada desa wisata di Ngelanggeran. Ada beberapa alasan memilih Desa Wisata Ngelanggeran sebagai lokasi penelitian, yakni: 1) proses inovasi yang mereka lakukan tergolong berbeda dari pelaku inovasi pada umumnya; 2) mereka berinovasi di tengah keterbatasan sumber daya; 3) menyadari keterbatasan tersebut, bekerja secara tim menjadi pilihan terbaik; dan 4) karakteristik masyarakat Ngelanggeran hampir sama dengan masyarakat di desa wisata lain.



Harapannya, proses inovasi yang muncul di Ngelangeran dapat menjadi model bagi desa wisata lain.

Merunut pada pengalaman Creswell (2009), penting untuk menceritakan setiap strategi yang digunakan peneliti dalam menghasilkan kajian kualitatif. Klaim inovasi yang memanfaatkan modal sosial muncul dari pra studi yang peneliti lakukan. Sebelumnya, peneliti fokus pada kajian dokumentasi yang disajikan koran lokal tentang kesulitan beberapa desa wisata untuk berkembang. Sebagaimana kajian kualitatif pada umumnya, peneliti mencoba melakukan pra-studi ke beberapa desa wisata di Gunungkidul. Pra-studi dilakukan dengan cara observasi dan melakukan beberapa wawancara singkat dengan pelaku desa wisata. Pertanyaan yang peneliti ajukan bersifat terbuka dan tidak mendetail (Creswell, 2013). Data-data yang peneliti peroleh, kemudian ditranskrip dan diproblematikasi. Problematikasi ini bertujuan untuk merumuskan apa yang menjadi permasalahan utama dan menyesuakannya dengan minat studi peneliti (Morsee, 1994). Melalui pra-studi seperti ini peneliti berharap dapat menentukan sesuatu yang benar-benar menjadi masalah dalam pengelolaan desa wisata.

Pada tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Dua teknik digunakan karena saling melengkapi. Pada awalnya, peneliti menentukan beberapa kriteria informan, yakni: telah menjadi pengelola sejak pertama desa wisata didirikan, ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap proses dalam pelaksanaan program desa wisata, dan bersedia memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan teknik *purposive* dan *snowball* ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-dept interview*) pada “tim perumus” program desa wisata yang berjumlah 12 orang, yakni Heru, Lilik, Sugeng, Aris, Hartono, Suranto, Sugianto, Mursidi, Trianto, Triana, Sumbodo, dan Ribus. Wawancara dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*). Peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan terbuka (*open-ended*), kemudian peneliti mengembangkan sub-sub pertanyaan sesuai dengan jawaban informan (*ice-breaker*). Dan diakhir wawancara, peneliti akan mengajukan pertanyaan “Siapa yang harus saya kunjungi untuk mendapatkan informasi lebih?”, dengan cara *snowball* inilah peneliti menemukan 12 perumus inovasi Desa Wisata Ngelangeran.

Seluruh hasil interview atau data mentah ditranskrip. Kemudian peneliti mulai membaca keseluruhan data dengan seksama. Apabila terdapat beberapa penjelasan yang kurang jelas, pertanyaan yang timbul setelah pembacaan transkrip untuk pendalaman, atau butuh klarifikasi ulang, peneliti akan kembali ke lokasi untuk melakukan interview kembali. Setelah tahap pembacaan transkrip interview, peneliti melanjutkan pada tahaan *coding* data. Menyisir dan menemukan hasil wawancara yang mendukung kajian peneliti. Hasil *coding* ini kemudian dianalisa secara mendalam, sehingga yang ditampilkan dalam pembahasan bukan lagi hasil-hasil petikan wawancara. Terakhir, hasil analisa pada bab pembahasan akan di-*drawing* dalam satu kerangka penelitian yang utuh. Hasil *drawing* yang utuh akan menghasilkan benang merah penelitian dan menuliskannya dalam bentuk kesimpulan akhir.

C. TINJAUAN TEORITIS

1. Transformasi Sosial Pemuda

Menyoal transformasi sosial pemuda sebenarnya berbicara tentang bagaimana memahami pemuda dalam masa perubahan. Oleh karena itu, mencermati paradigma kepemudaan yang berkembang merupakan cara awal untuk memahami perubahan tersebut. Kata “pemuda” dapat dimaknai dari berbagai paradigma, yakni: 1) paradigma patologi atau



cara pandang orang dewasa yang menganggap pemuda sebagai objek. Perspektif ini mengikuti teori yang berkembang, misalnya teori Griffin tentang *stom and stress* (dalam Margono, 2011) menganggap pemuda sebagai objek pubertas yang cukup mendominasi fenomena stress; 2) paradigma transisi memandang pemuda sebagai masalah sosial; dan 3) paradigma keagenan yang memandang pemuda sebagai subjek yang aktif dalam membentuk identitas.

Dengan adanya konstruk paradigma di atas, maka kita dapat mencermati fenomena pemuda dalam konteks desa wisata. Margono (2011) menjelaskan bahwa ketiga paradigma ini dipengaruhi oleh setting sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang baik di lingkup lokal maupun global. Ketika paradigma patologi atau transisi yang menonjol, maka akan terlihat sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya mendikte arah pemuda. Sebaliknya, apabila paradigma keagenan yang ditonjolkan, maka akan diketahui bagaimana pemuda mengkonstruksi diri atas setting sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berjalan.

Dalam agenda pembangunan, paradigma keagenan menjadi modal yang sangat penting. Karena sesungguhnya apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan dapat tersampaikan. Sehingga harapannya kemudian adalah pemuda mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap proses pembangunan. Dalam memahami kontribusi keagenan pemuda, World Bank (2007) memberikan tiga pendekatan, yakni: 1) hal dasar yang perlu dipahami adalah merubah cara pandang sosial tentang kaum muda. Dalam pemahaman ini menempatkan pemuda sebagai sesuatu yang menjadi perhatian, sudah saatnya kaum muda diperhatikan dan diperlukan sebagai subjek agen; aktif dan asset dalam *social engagement*; 2) berbaur dengan kaum muda dalam setiap perencanaan program dan kebijakan pembangunan dengan tidak membeda-bedakan struktur atau status sosial. Sehingga kaum muda penyandang difabel, kaum muda miskin, beda ras, agama, suku mendapat perhatian dalam pembangunan; dan 3) kolaborasi dengan kaum muda, mendukung kepemimpinan kaum muda dalam inisiasi yang dibuat kaum muda tanpa adanya dominasi kaum dewasa.

2. Inovasi Pariwisata

Setiap ahli memiliki ruang lingkup dan penafsiran yang berbeda tentang inovasi, tetapi pada hakikatnya mereka sepakat bahwa dalam inovasi harus memunculkan sesuatu barang atau jasa yang baru (Tushman & Nadler, 1986; Tidd & Bessant, 2009; Bekkers *et al.*, 2011; Idrissi *et al.*, 2012; Nazari *et al.*, 2013; Hanna *et al.*, 2014). Perbedaannya terletak pada kata “baru”, yang meliputi baru dalam hal tujuan, proses, hasil, tingkat kebaruan, dan kemampuan. Perlu menjabarkan makna inovasi lebih spesifik guna memahami realita desa wisata yang tengah berkembang (Hjalager, 2009).

- a. Inovasi sebagai sebuah tujuan dipandang dari dua sudut, yakni: a) inovasi makro berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara; dan b) inovasi mikro dilihat dari sisi perusahaan.
- b. Inovasi sebagai suatu proses dapat ditinjau dari rantai nilai inovasi. Rantai nilai inovasi menjelaskan transformasi ide menjadi hasil yang dapat dikomersialisasikan. Rantai nilai inovasi terbagi dalam tiga fase, antara lain: 1) penciptaan ide; 2) kenversi ide; 3) difusi ide.
- c. Inovasi sebagai sebuah hasil dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, diantaranya produk, jasa atau layanan, proses, pasar logistik dan organisasi. Inovasi produk merupakan pengembangan dan pengenalan produk baru, seperti desain baru,



pengemasan baru ataupun sistem baru. Sedangkan inovasi jasa diartikan sebagai perubahan cara untuk melayani pelanggan dan layanan baru.

- d. Inovasi sebagai sebuah kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen melalui *output* yang dihasilkan oleh perusahaan, dalam memahami dan merespon lingkungan eksternal. Oleh karena itu, inovasi juga diartikan sebagai penyesuaian ide menjadi pengembangan produk atau jasa meliputi fitur, kualitas, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- e. Inovasi pada tingkat kebaruan dipandang dari sisi radikal dan inkremental. Inovasi radikal merupakan penciptaan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Sedangkan inovasi inkremental merupakan perubahan kecil, yang berupa modifikasi, perbaikan, penyederhanaan, konsolidasi dan peningkatan dari yang sudah ada.

Dalam studi pariwisata, konsep inovasi merupakan sebuah kajian baru (Aldebert, Dang, & Longhi, 2011; Hjalager, 2010; Martínez-Ros & Orfila-Sintes, 2009; Novelli, Schmitz, & Spencer, 2006; Stamboulis & Skayannis, 2003), dan minat peneliti masih rendah (Souto, 2015; Sundbo et al., 2007). Sehingga masih banyak hal yang perlu dieksplorasi, misalnya pertanyaan kritis Hjalager (2009) tentang bagaimana sistem inovasi dibuat, dipelihara dan dipertahankan berguna bagi kepentingan masyarakat sekitar dan wisatawan? Pertanyaan embrio seperti ini masih belum tereksplorasi dan menjadi esensi dari agenda penelitian pariwisata baru.

Souto (2015) menjelaskan bahwa inovasi pariwisata dapat dimaknai sebagai sarana untuk memperoleh *competitive advantage*. Keunggulan bersaing ini menjadi alasan mutlak sebuah industri pariwisata untuk berinovasi. Inovasi pariwisata dapat dikategorikan dalam empat bagian, yakni produk, proses, organisasi / manajerial, dan marketing (OECD dalam Hall, 2009). Hjalager (2009) melengkapi pendapat OECD dengan memasukkan institusional sebagai bagian dalam inovasi pariwisata. Dari kelima bagian ini, inovasi distribusi dan kelembagaan lah yang menjadi ciri khas inovasi pariwisata. (Hjalager, 2009). Lebih singkat, Souto (2015) hanya membagi inovasi pariwisata menjadi dua, yakni inovasi teknologi dan inovasi non-teknologi. Hjalager (2009) berpandangan bahwa inovasi pariwisata condong pada bentuk inovasi non-teknologi, karena termasuk dalam klaster industri.

3. Modal Sosial

Modal sosial sangat erat kaitannya dengan masyarakat atau komunitas yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Modal sosial atau *social capital* merupakan satu terminologi yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial untuk memperkaya pemahaman tentang masyarakat dan komunitas. Putnam (dalam Field, 2003) menjelaskan bahwa modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial, yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial yaitu partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Jaringan sosial harus menyapai syarat tertentu, yakni adanya hubungan timbal balik atau resiprositas antar pelaku (Bourdieu dalam Field, 2014). Hanya saja, Bourdieu melihat modal sosial sebagai asset yang dimanfaatkan oleh kelompok elit, khususnya mereka yang memiliki modal finansial (Field, 2003). Berbeda dengan Bourdieu, Putnam lebih memandang modal sosial melekat pada struktur sosial, sehingga setiap pelaku yang memanfaatkan kepercayaan, norma perilaku, jaringan sosial, atau kombinasi dari ketiganya, dapat disebut sebagai pemilik modal sosial.

Terdapat beragam unsur dalam modal sosial. Unsu-unsur ini mengikuti kondisi lokal dan tujuannya (Narayan dan Cassidy, 2001). Beberapa unsur modal sosial yang telah



teridentifikasi adalah kepercayaan, jaringan sosial, saling tukar kebaikan, norma sosial, nilai-nilai sosial, dan tindakan yang proaktif (Hasbullah, 2006). Keenam unsur ini dipandang sebagai syarat dari terbentuk dan terbangunnya kekuatan modal sosial di suatu masyarakat atau komunitas. Dasgupta dan Serageldin (2000) memandang dari sekian banyak unsur modal sosial, kepercayaan lah yang terpenting. Sikap saling mempercayai memungkinkan masyarakat dapat saling bersatu dengan yang lain dan akan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial (Fukuyama, 2002). Pada masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi (*high trust*) dan *spectrum of trust* yang lebar (panjang) akan memiliki modal sosial yang kuat (Supriono dkk, 2010). Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah (*low trust*) atau memiliki *spectrum of trust* yang sempit (pendek), maka potensi modal sosialnya lemah.

Putnam memperkenalkan perbedaan antara dua tipe modal sosial, yakni menjembatani (inklusif) dan mengikat (eksklusif). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas, sedangkan modal sosial yang inklusif cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Woolcock dan Narayan (2000) mengembangkan tipe modal sosial ini menjadi tiga, yaitu:

- a. Modal sosial yang mengikat (*bounding social capital*), yaitu tipe modal sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam sistem suatu sistem kemasyarakatan. Umumnya ikatan ini didasarkan pada nilai, kultur, persepsi, dan tradisi adat istiadat termasuk di dalamnya hubungan kekerabatan
- b. Modal sosial yang menjembatani (*bridging social capital*), merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atau berbagai macam karakteristik kelompoknya. Modal sosial ini dapat muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun suatu kekuasaan dari kelemahan yang ada melalui ikatan berupa institusi atau suatu mekanisme.
- c. Modal sosial yang menghubungkan (*linking social capital*), merupakan hubungan sosial yang memiliki karakter adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat, seperti yang sepenuhnya berada di luar komunitas. Hal ini mendorong anggotanya memanfaatkan banyak sumber daya dari yang tersedia dalam komunitas.

Dalam praktik, modal sosial biasanya berjalan dalam lingkup keluarga, pendidikan, perkumpulan masyarakat, dan bentuk organisasi yang memiliki banyak anggota (Healey, 2001). Sehingga menurut Grave dan Benassi (2004) modal sosial sangat berpengaruh terhadap produktivitas individual dalam suatu kegiatan ekonomi di mana modal sosial dapat diartikan sebagai arah dalam mencapai keberhasilan.

Dalam mewujudkan suatu modal sosial dengan relasi antar individu dengan individu lainnya, maka pilihan individu untuk mengadakan hubungan sosial sangatlah penting. Dalam konteks pilihan relasi sosial, tergantung pada pilihan rasional masing-masing individu. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki potensi untuk mengembangkan modal sosial yang dimiliki, karena modal sosial terdapat dalam diri setiap manusia (Soetomo, 2008; 268). Perbedaannya terletak pada besar, kecil, dan variasi kandungannya. Perbedaan lain juga terletak pada identifikasi dan pemanfaatannya. Namun apabila modal sosial dalam masyarakat tidak dimanfaatkan, maka menimbulkan resiko yang besar dalam masyarakat tersebut, bahkan berujung konflik.



4. Desa Wisata

Dalam bahasa internasional, desa wisata disebut juga dengan pariwisata pedesaan atau *tourism village* (Neumeier & Pollermann, 2014; Lang & Xie, 2013). Cukup banyak definisi tentang pariwisata pedesaan, Inskeep (1991) mendefinisikan “*where small group of tourist stay in or near traditional, often remote village and learn about village life and the local environment*” (Demartoto & Utami, 2009). Inskeep (1991) lebih memandang pariwisata pedesaan sebagai tempat para wisatawan mengetahui dan mempelajari cara hidup masyarakat desa (Demartoto & Utami, 2009). Cara pandang seperti ini, mewajibkan desa wisata untuk memenuhi dua hal, yakni: 1) tuntutan wisatawan untuk menikmati, mengenal dan menghayati, mempelajari kekhasan desa dengan segala daya tariknya; 2) tuntutan kegiatan hidup masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat, dan sebagainya), sehingga dapat terwujud suatu kegiatan wisata yang rekreatif dan terpadu dengan lingkungan (Demartoto & Utami, 2009). Pandangan ini yang memberikan titik beda antar wisata dipertanian dengan wisata pedesaan, di mana wisata desa lebih menonjolkan kearifan lokal masyarakat dibanding objek-objek wisatanya.

Demartoto dan Utami (2009) mengungkap dua unsur penting yang harus ada dalam desa wisata, yakni: 1) akomodasi, yakni sebagai tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk; dan 2) atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam kegiatan. Tetapi, Nurhayati (1992) memandang akomodasi dan atraksi tidak cukup untuk mengintegrasikan pariwisata ke desa. Harus ada fasilitas pendukung yang mampu menyatukan setiap tradisi desa yang berlaku sejak lama dengan kondisi lingkungan saat ini.

Dalam pandangan yang lebih luas, wisata pedesaan tidak hanya menyajikan keunikan tradisi desa kepada wisatawan, tetapi objek lain seperti kekayaan alam juga dimasukkan ke dalam wisata pedesaan, bahkan objek yang sengaja dibuat-buat. Perkembangan ini tidak lagi membatasi makna wisata pedesaan sebagai wisata yang hanya mengetahui dan mempelajari cara hidup masyarakat desa.

D. PEMBAHASAN

1. Pembangunan Desa Wisata melalui Saluran Modal Sosial

Tumbuh dan berkembangnya Desa Wisata Nglanggeran tidak dapat dipisahkan dari pemuda Karang Taruna Bukit Putra Mandiri Nglanggeran. Embrio desa wisata lahir dari tangan pemuda. Klaim ini disepakati oleh Pokdarwis Nglanggeran, bahkan ada yang mengatakan tidak akan ada desa wisata jika pemuda tidak bergerak. Pemuda memiliki “*bargaining position*” yang kuat, walau kemudian diketahui bahwa proses untuk mendapatkan pengakuan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam upaya membangun desa wisata, bukan hal mudah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyatukan persepsi kalangan pemuda. Paradigma patologi dan transisi muncul. Ada anggapan dari masyarakat bahwa kumpulan-kumpulan yang dilakukan pemuda hanyalah menambah masalah bagi keluarga dan desa.

Adapun Suranto dan Mursidi sebagai pelopor karang taruna, mencoba menginisiasi beberapa kegiatan kekarangtarunaan, seperti: olahraga, kesenian, dan acara-acara seputar kemerdekaan. Melalui acara ini, pemuda lebih sering berkumpul untuk membicarakan berbagai aspek acara. Mengaktifkan kegiatan karang taruna berdampak positif pada rencana



sebagian pemuda untuk memberdayakan potensi alam gunung Ngelanggeran. Walau, semangat pemuda ini justru mendapat stigma negatif dari sebagian masyarakat, “*batu berbukit ini, siapa yang mau lihat?*”

Tidak adanya inovasi, baik dalam hal pemasaran, kelembagaan, produk pengemasan wisata, hingga fasilitas sarana-prasarana yang memadai, berujung pada kegagalan pemuda dalam mengelola objek wisata gunung Ngelanggeran. Inovasi yang paling mendasar dalam industri perencanaan adalah bagaimana menata kelembagaan. Pada tahap ini, pemuda berbuat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tanpa adanya transfer pengetahuan dari luar (*classical plan*). Pengelolaan hanya berputar pada masalah parkir, uang masuk wisata yang dipatok sangat rendah, serta memberikan fasilitas MCK (mandi cucui kakus) seadanya. Kegiatan yang kurang perencanaan ini setidaknya berlangsung hingga tahun 2002.

Pemuda Ngelanggeran menganggap kegagalan pengelolaan objek wisata disebabkan oleh kondisi keuangan karang taruna yang sangat minim. Identifikasi masalah ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemuda. Dari sini, pemuda mulai meminjam sebuah rumah kosong warga sebagai *basecamp*. Setiap malam mulai diadakan pertemuan guna membahas masalah utama penyebab sepi pengunjung ke objek wisata. Pembicaraan dilakukan secara santai, dan jauh dari kesan formal. Pertemuan mala mini tidak dianggap sebagai sebuah beban moral, lebih pada kumpul-kumpul mengisi waktu malam sambil diiringi musik gitar. Membangun interaksi sosial informal ini ternyata menarik minat pemuda lain untuk ikut bercengkrama. Pemuda yang baru ikut kumpul, terbawa arus dalam pemecahan masalah di objek wisata. Sehingga pada muncul kesepakatan di antara pemuda untuk membuka jalur pendakian dari sisi selatan. Pembukaan jalur pendakian ini merupakan inovasi pertama pemuda dengan memanfaatkan gotong royong warga. Hal ini dinilai baru karena kemampuan pemuda untuk membuka jaringan dengan kepala desa dan setiap kepala RT di tiga dusun Ngelanggeran.

Selama pembukaan jalur pendakian, pemuda tetap berkumpul di malam hari guna membahas beberapa agenda strategis, seperti: mencari tambahan biaya untuk pembangunan MCK dan penghijauan gunung. Untuk biaya pembangunan MCK, pemuda mencoba hal baru dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar gunung, kemudian menanam beberapa komoditi yang bernilai jual, seperti: lada, pisang, kunyit, dan jahe. Penanaman ini sekaligus mencari solusi atas penghijauan gunung. Meskipun membutuhkan waktu beberapa bulan, visi bersama lah yang membuat pemuda komitmen mengelola objek wisata. Lilik mengungkapkan “kami di sini telah berkomitmen, apapun yang terjadi, kami tidak akan meninggalkan dari desa”. Masalah penghijauan, pemuda sepakat menunjuk Triatna dan Mursidi ke Dinas Perhutanan untuk meminta bantuan bibit-bibit pohon jati. Triatna menjelaskan bahwa pemuda mempercayakan tugas itu kepada dirinya, padahal dirinya hanya lulusan SD. Kepercayaan ini dibalas Triatna dengan membawa 200 bibit pohon jati ke Ngelanggeran.

Meskipun satu per satu penataan kawasan mulai terlihat, tidak serta-merta objek wisata ini ramai pengunjung. Mursidi menjelaskan salah satu penyebabnya adalah buruknya pemasaran, dan di satu sisi masyarakat belum familiar dengan objek wisata di desa. Tahun 2003 trend wisata baru mulai mengarah ke rekreasi buatan seperti mall, bioskop, water boom, dan lainnya. Akhirnya pengelolaan objek wisata ini fakum hingga tahun 2006. Di tahun 2006, gempa Jogja yang meluluhlantakkan 90% rumah penduduk di Ngelanggeran, ternyata memiliki keuntungan sendiri. Bantuan dalam bentuk barang dan tenaga banyak berdatangan ke Desa Ngelanggeran, situasi ini secara tidak langsung mengaktifkan kembali



Karang Taruna yang bertahun-tahun fakum. Pemuda berkumpul untuk menyalurkan bantuan dan membatu kegiatan *trauma healing* dari berbagai LSM. Karena terlalu sering berkumpul, muncul kembali keinginan untuk melanjutkan pengembangan objek wisata. Kali ini datang dari inisiatif anak muda Nglanggeran bernama Sugeng.

Di tangan Sugeng dan beberapa pemuda yang dulu pernah membangun objek wisata ini, sedikit demi sedikit mulai menerapkan manajemen pariwisata pada objek wisata. Sistem manajemen pariwisata yang mereka terapkan ini muncul berkat adanya *focus group discussion* antar pemuda setiap malam. Dalam grup diskusi inilah semua masalah diselesaikan dan dari ruang diskusi ini juga muncul fokus pengembangan objek wisata menjadi desa wisata. Di tahun 2009, nama objek wisata gunung Nglanggeran berubah nama menjadi Gunung Api Purba Nglanggeran. Seiring berubahnya model pariwisata yang fokus dari objek wisata ke subjek, berbagai sistem baru mulai diujicoba. Sistem manajemen satu pintu yang biasa muncul di organisasi pelayanan publik, mulai diterapkan dalam desa wisata. Sistem manajemen satu pintu ini merupakan sistem yang memadukan seluruh aktifitas yang berlangsung di desa wisata, mulai dari pemesanan paket wisata, pemesanan *homestay*, pemesanan tiket masuk wisata, hingga berbagai koordinasi lain, berpusat pada kesekretariatan Pokdarwis. Sugeng menjelaskan bahwa salah satu alasan diterapkannya manajemen satu pintu adalah untuk menghindari adanya perebutan wisatawan oleh pemilik *homestay*. Cara kerjanya adalah wisatawan meminta *homestay* ke sekretariat Pokdarwis, kemudian pihak sekretariat lah yang menentukan *homestay* mana yang bisa ditempati. Manajemen seperti ini ternyata membuahkan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat pemilik *homestay*.

Perjuangan pemuda ternyata tidak sampai di situ. Pemuda juga berhasil menyatukan lima komunitas yang ada di desa Nglanggeran ke dalam payung Pokdarwis. Di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Semua yang berkembang di desa wisata Nglanggeran berawal dari antusiasme pemuda yang yakin bahwa desa wisata ini akan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Hingga hari ini, telah ada 146 pemuda yang masuk dalam struktur keanggotaan Pokdarwis, mereka digaji berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati di awal, dan mereka terus mengadakan perbaikan di berbagai sektor.

2. Pemuda Memberdayakan Masyarakat

Teori-teori tentang pemuda banyak menjelaskan fenomena pemuda sebagai objek dan seringkali menimbulkan masalah sosial. Tetapi tidak banyak pengalaman penelitian yang menjelaskan sekelompok pemuda sebagai subyek yang mampu memberdayakan dan mengangkat ekonomi satu desa. Kasus pada Desa Wisata Nglanggeran telah memberikan pengetahuan tambahan bahwa pemuda memiliki posisi tawar dalam masyarakat apabila memiliki kesadaran untuk bergerak. Perubahan pola dari digerakkan ke penggerak, telah menimbulkan efek yang luar biasa. Pola digerakkan mengandung makna keterpaksaan, sehingga butuh kontrol untuk menjaganya. Berbeda halnya dengan paradigma pemuda sebagai penggerak, kesadaran dalam diri tumbuh dan tidak membutuhkan kontrol dari pihak manapun. Fenomena ini yang berhasil ditangkap oleh pemuda Nglanggeran. Bergerak membangun desa wisata, kemudian membangun jaringan dengan komunitas lain dalam desa. Pemuda berhasil menyatukan lima komunitas di bawah bendera Pokdarwis. Lima komunitas itu adalah pemuda karang taruna, pemerintah desa, PKK, kelompok tani, dan yang terakhir muncul adalah komunitas *homestay*.



Aris dan Sugeng menjelaskan bahwa komunikasi dengan seluruh komunitas muncul lantaran ada perubahan agenda pariwisata yang awalnya mengandalkan objek ke pariwisata yang menyeluruh. Pelibatan berbagai aktifitas masyarakat membutuhkan koordinasi antar komunitas, misalnya dalam pembuatan paket wisata mengolah pupuk kandang, Pokdarwis membutuhkan bantuan dari komunitas tani. Begitu juga dalam hal penginapan wisatawan, Pokdarwis membutuhkan *homestay* penduduk. Relasi antara Podarwis dengan komunitas-komunitas ini berdampak pada penambahan *income* untuk Pokdarwis sendiri dan komunitas penggiat.

Sugeng menambahkan bahwa relasi antar komunitas terbangun dengan mudah, karena warga desa pada dasarnya memiliki banyak kesamaan. Kesamaan atas dasar pengalaman-pengalaman sosial turun-temurun (*repeated social experience*), dan ada pula yang dibangun berdasarkan orientasi dan tujuan dengan pengelolaan organisasi yang lebih baik. Pelibatan warga dalam jaringan sosial yang akan menjadi satuan sosial/organisasi lokal, maka terciptalah apa yang disebut dengan kemampuan warga kolektif mengalihkan kepentingan 'saya' menjadi 'kita' terbangunlah kekompakan dan solidaritas antar warga. Jaringan sosial terdiri dari lima unsur yang meliputi: adanya partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerjasama dan keadilan.

Kemudahan dalam membangun jaringan ini disebabkan oleh masyarakat mulai melihat masa depan dari desa wisata yang mulai digarap pemuda. Selain itu, strategi yang dilakukan oleh pemuda desa untuk merebut simpati masyarakat adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Jatilan. Jatilan ini adalah tradisi lama masyarakat desa, atau masyarakat luar Jawa lebih mengenalnya dengan Jaran Kepang atau Kuda Kepang. Kesuksesan pemuda dalam menyelenggarakan acara saklar ini mulai mendapat perhatian dari juru kunci gunung merapi Nglanggeran. Dan pada akhirnya masyarakat mulai mengakui keberadaan pemuda. Simpati dan pengakuan masyarakat inilah yang kemudian memudahkan pemuda untuk mengembangkan objek wisata menjadi desa wisata.

Tapi dari pola hubungan relasi komunitas ini yang terbaca adalah relasi antar komunitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya: 1) komunitas pelopor harus mendapatkan pengakuan dari komunitas lain, ini menandakan bahwa kesamaan visi-misi saja tidak cukup untuk membangun relasi komunitas; 2) relasi antar komunitas tidak akan tergabung tanpa adanya komunitas pelopor, dalam artian komunitas yang mau berjibaku meyakinkan komunitas lain; 3) adanya kesadaran dari komunitas lain bahwa penyelenggaraan barang publik membutuhkan dukungan bersama.

3. Proses Inovasi Desa Wisata

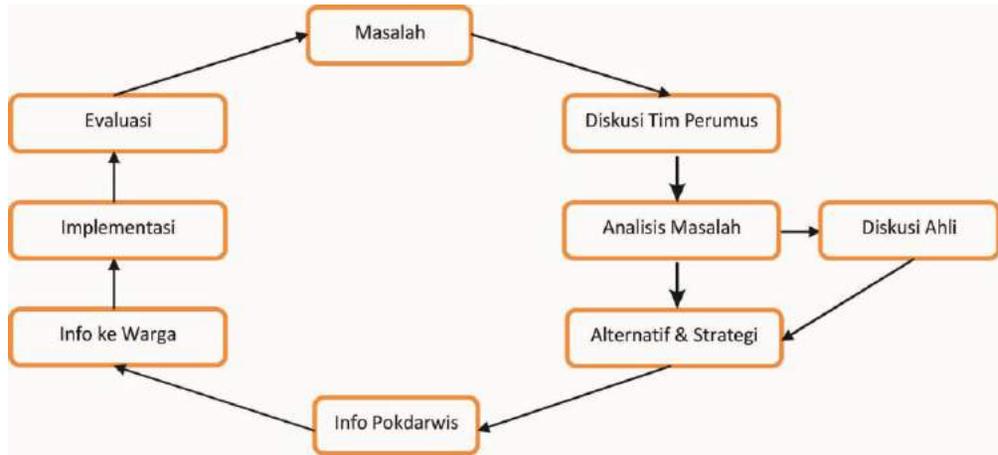
Ada berbagai cara untuk menghasilkan inovasi, pendidikan salah satunya. Tetapi tidak mutlak untuk menjadi seseorang yang inovatif harus memiliki drajat pendidikan tertentu. Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran memberikan perspektif lain untuk menjadi inovatif. Sadar akan kelemahan individu, Pokdarwis menggunakan media tim untuk memecahkan berbagai masalah, sekaligus menemukan berbagai hal baru dalam konteks desa wisata. Tim yang dibangun berukuran kecil. Tim kecil ini disebut sebagai tim perumus, yang nantinya bertugas memaksimalkan berbagai rencana dalam pemecahan masalah. Mereka membangun tahap pemecahan masalah dari tim perumus hingga disetujui oleh masyarakat Nglanggeran.

Berdasarkan data-data yang peneliti himpun dari tiap-tiap individu yang berada dalam struktur tim perumus, peneliti dapat mendeskripsikan sebuah proses kerja inovasi yang



memfaatkan modal sosial. Proses kerja hingga menemukan sesuatu yang baru dalam desa wisata dilaksanakan dalam waktu yang lama, tidak serta merta. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan mendeskripsikan setiap proses kerja yang dilalui berdasarkan pengalaman Pokdarwis Ngelangeran.

- a. Adanya sebuah masalah. Inovasi seringkali berawal dari sebuah masalah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari kebutuhan Pokdarwis sendiri, misalnya pada kasus kontrak kerja. Masalah bisa datang dari internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Sejauh ini, Pokdarwis mengaku seringkali menemukan masalah dari keluhan pengunjung. Masalah tidak langsung sampai ke tim perumus, tetapi bergulir diantara anggota Pokdarwis. Hingga pada tahap tertentu, tim perumus merasa perlu membahas dan memecahkan masalah.
- b. Tim perumus akan berkumpul di sekretariat untuk membahas masalah ini. Suasana yang dibangun jauh dari kesan formal. Lebih kepada membangun komunikasi yang informal. Mereka membahaskannya dengan istilah “*relax*”, agar setiap pendapat yang muncul bisa tersampaikan dengan sempurna.
- c. Hasil diskusi kemudian dicermati. Tujuannya adalah memilih beberapa alternatif yang mungkin untuk diterapkan dan sumber daya yang dimiliki Pokdarwis mampu untuk melaksanakan alternatif tersebut. Pada tahap ini, permasalahan yang sulit biasanya Pokdarwis meminta pendapat dari pihak di luar desa. Misalnya pada kasus pembentukan ekowisata, Pokdarwis meminta pendapat dari pihak Ekonomi Kerakyatan UGM.
- d. Apabila alternatif yang ditawarkan oleh tim perumus sekiranya mampu dilaksanakan oleh sumber daya Pokdarwis, maka alternatif tersebut akan dipecah ke dalam strategi-strategi penerapan lapangan.
- e. Alternatif dan strategi yang telah dirumuskan oleh tim perumus, akan didiskusikan pada forum mingguan Pokdarwis. Tujuannya untuk mendengar pendapat dari seluruh anggota Pokdarwis. Apabila ada masukan baru dari anggota, maka alternatif ataupun strategi akan dikaji ulang.
- f. Apabila Pokdarwis telah satu suara menentukan satu kebijakan, maka Pokdarwis akan mengumumkan rencana aksi ke seluruh warga desa pada forum bulanan selasa kliwon. Pengumuman ini bertujuan untuk memberitahu seluruh warga tentang agenda Pokdarwis kedepannya. Di sisi lain, dengan adanya pengumuman ini, Pokdarwis berharap agenda yang mereka gulirkan didukung oleh masyarakat, sehingga masyarakat merasa menjadi bagian dari pengambilan kebijakan tersebut.
- g. Implementasi inovasi. Keterlibatan anggota Pokdarwis dalam implementasi berdasarkan pada agenda yang telah ditetapkan. Misalnya dalam membuat gerai coklat, yang bertanggung jawab pada tahap implementasi adalah komunitas PKK.
- h. Evaluasi. Semua agenda yang telah berjalan untuk satu inovasi, akan dievaluasi kembali oleh tim perumus. Apabila muncul masalah baru atau agenda inovasi yang tidak berjalan, maka tim perumus akan mendiskusikan kembali. Siklusnya kembali seperti penetapan alternatif pada tahap sebelumnya.



Grafik 2. Proses inovasi dalam konteks desa wisata

E. KESIMPULAN

Ada beberapa catatan akhir yang perlu peneliti tegaskan kembali. Pertama terkait dengan pemuda, stigma negatif yang dilemparkan kepada mereka muncul dari masyarakat. Ada ketidakpercayaan yang muncul dikalangan masyarakat ketika pemuda beraktifitas sesuai dengan keinginannya, walau aktifitas tersebut bersifat positif. Butuh bukti untuk merubah pandangan masyarakat terhadap pemuda. Dari proses inilah keagenan akan muncul, yang menjelaskan bahwa apa yang tengah dikonstruksi oleh pemuda merupakan sebuah pembentukan identitas. Kedua terkait dengan modal sosial yang menjadi penghubung antara individu atau tim dalam organisasi dengan inovasi. Peneliti mencatat, setidaknya ada empat unsur yang dimanfaatkan Pokdarwis selama berproses dengan inovasi, yakni: kuatnya interaksi informal, kepercayaan tugas pada tiap anggota, visi bersama, dan jaringan sosial yang kuat. Melalui unsur modal sosial ini, beragam inovasi telah dimunculkan, dan menjawab kecurigaan peneliti bahwa untuk menjadi inovatif, tidak selamanya menyangkut tentang derajat pendidikan, modal sosial merupakan solusi lain untuk menghasilkan berbagai inovasi. Terakhir terkait proses inovasi tim dalam konteks desa wisata. Ini merupakan model terbentuknya sebuah inovasi yang dihasilkan melalui diskusi panjang dan persetujuan dengan semua pihak. Masyarakat desa memiliki berbagai keterbatasan untuk maju, tetapi melalui kerjasama dan komitmen yang tinggi, bukan hal mustahil membangun tim untuk menghasilkan inovasi.

REFERENSI

- Aldebert, B., Dang, R. J., & Longhi, C. (2011). Innovation in the tourism industry: the case of Tourism. *Tourism Management*, 32, 1204-1213.
- Ali, A., & Frew, A. J. (2014). ICT and sustainable tourism development: An innovative Perspective. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 5, 2-16.
- Busan, R. (2006). Analisis pengaruh dimensi wisata terhadap loyalitas wisatawan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3, 1-14.



- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (California; Thousand Oaks).
- _____. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. (Thousand Oaks, California).
- Dasgupta, P., & Serageldin, I. (2000). *Social Capital: A Multi-faceted Perspective*. (The World Bank: Washington).
- Demartoto, A., & Utami, T. (2009). Dampak sosial, budaya, dan ekonomi pembangunan pariwisata pedesaan. A. Demartoto, (Ed.). *Pembangunan pariwisata berbasis desa* (Sebelah Maret University Press; Surakarta).
- De Jong, J., & den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work. *Creativity and Innovation Management, 19*, 23-35.
- Field, J. (2003). *Social Capital*. (Routledge; London)
- Hall, C. M. (2009). Innovation and tourism policy in Australia and New Zealand: never the twain shall meet? *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1*, 2–18.
- Healy, T. (2001). Health Promotion and Social Capital. *Conference Paper*. International Evidence for the impact of Social Capital on Well Being. National University of Ireland, Galway.
- Hjalager, A. (2010). A review of innovation research in tourism. *Tourism Management, 31*, 1-12.
- Lang, L. Y., & Xie, K. (2013). The Analysis of Tourism Village's Residential Pattern. *Applied Mechanics and Materials, 10/2013*, 438-439, 1840.
- Leong, C. T., & Rasli, A. (2014). The relationship between innovative work behavior on work role performance: An empirical study. *Social and Behavioral Sciences, 129*, 592-600.
- Margono, S. A. (2011). Pemuda dan transformasi pasca orba. In M. N. Azca, S. A. Margono & L. Wildan, (Eds.), *Pemuda pasca orba: Potret kontemporer pemuda Indonesia*. (Yousure, Yogyakarta).
- Martínez-Ros, E., & Orfila-Sintes, F. (2009). Innovation activity in the hotel industry. *Technovation, 29*, 632-641.
- Morse, J. M. (1994). Designing funded qualitative research. In NK Denzin & Y. S. Lincoln, (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*. (Thousand Oaks, California).
- Narayan, D., & Cassidy, M. F. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: Developmeny and validation of a social capital inventory. *Current Sociology, 49*, 59-102.
- Neumeier, S., & Pollermann, K. (2014). Rural tourism as promoter of rural development – prospects and limitations: Case study findings from a pilot project promoting village tourism, *European Countryside, 6*, 270-296.
- Novelli, M., Schmitz, B., & Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. *Tourism Management, 27*, 1141–1152.
- Orfila-Sintes, F., & Mattsson, J. (2007). Innovation behavior in the hotel industry. *Omega, 37*, 380–394.
- Stamboulis, Y., & Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for experience-based tourism. *Tourism Management, 24*, 35-43.



- Souto, J. E. (2015). Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation. *Tourism Management*, 51, 142-155.
- Spiegelaere, S., Van Gyes, G., De Witte, H., & Van Hootehem, G. (2015). Job design, work engagement and innovative work behavior: A multi-level study on Karasek's learning hypothesis. *Journal of Management Revue*, 26, 123-137.
- Sundbo, J., F. Orfila-Sintes., & F. Sørensen (2007). The innovative behaviour of tourism firms—Comparative studies of Denmark and Spain. *Research Policy*, 36, 88–106.
- Wang, C., & Tsai, C. (2014). Managing innovation and creativity in organizations: An empirical study of service industries in Taiwan. *Service Business*, 8, 313-335.
- Xerri, M., & Brunetto, Y. (2011). Fostering the innovative behaviour of SME employees: A social capital perspective. *Research and Practice in Human Resource Management*, 19, 43-59.



TRADISI ISLAM DAN PENDIDIKAN HUMANISME: UPAYA TRANSINTERNALISASI NILAI KRAKTER DAN MULTIKULTURAL DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA

Irwan Ledang¹

¹UIN Sunan Kalijaga Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: Irwan_ledangi@yahoo.com

ABSTRAK

Heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Itulah yang dimiliki oleh Masyarakat Indonesia, Keragaman ini merupakan potensi besar dalam pembangunan bangsa sekaligus menjadi potensi kerawanan konflik sosial. Setidaknya ada dua hal yang dapat dipakai dalam menengahi dan mencegah terjadinya konflik sosial di Indonesia. Pertama, peran Islam sendiri terdapat gagasan tentang humanisme, toleransi, menghargai perbedaan dan sebagainya. Islam merupakan suatu agama yang diturunkan sebagai *rahmatan lil alamin* bagi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Kedua peran pendidikan yang humanis. Pendidikan humanis menekankan pemanusiaan manusia. Pendidikan humanis memberi keseimbangan dalam kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Untuk mewujudkan konsep pendidikan yang humanis, diperlukan sikap transinternalisasi nilai multikultural dan nilai karakter dalam membentuk masyarakat dan generasi muda yang berahlak mulia dan menerima keragaman dari semua unsur. Keduanya diyakini dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis dan demokrasi sehingga mampu menutupi potensi konflik di Indonesia.

Kata Kunci: Tradisi Islam, Pendidikan Humanisme, Transinternalisasi Nilai, Karakter, Multikultural

A. PENDAHULUAN

Dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat majemuk, baik dilihat dari aspek sosial, budaya, suku bangsa, ras, aliran, dan agama; oleh karenanya masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang *multicultural*. Kondisi seperti ini, sebagai bangsa, Indonesia dituntut untuk mampu merekonstruksi kebudayaan nasional yang dapat menjadi *perekat* atau *integrating force* terhadap keragaman dan heterogenitas kehidupan social budaya, terlebih dalam kehidupan beragama.

Kesadaran tentang multikulturalisme sudah muncul sejak Negara Indonesia terbentuk dan digunakan oleh para pendiri bangsa untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia masa kini konsep multikulturalisme menjadi sebuah konsep baru dan asing. Hal ini dikarenakan kesadaran tentang konsep multikulturalisme yang dibentuk oleh pendiri bangsa ini tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan, persatuan dan stabilitas Negara yang kemudian muncul dalam *monokulturalisme* yang menjadi tekanan utama dan akhirnya semuanya memaksakan pola yang berkarakteristik penyeragaman dalam berbagai aspek system social, politik dan



budaya. Kenyataan seperti ini berakibat wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia sangat rendah yang pada gilirannya memunculkan konflik antar etnis, dan konflik yang bersifat horizontal pada akar rumput.¹

Konflik terjadi ketika dua atau lebih pihak menganggap bahwa kepentingan-an mereka tidak sesuai dengan kepentingan satu sama lain; mengungkapkan sikap bermusuhan atau mengejar kepentingan-kepentingan mereka dengan mengambil tindakan yang menyakiti pihak lain.² Pihak-pihak ini dapat berupa individu, kelompok kecil atau besar dan negara. Masalah konflik juga menjadi fenomena yang seakan menjadi biasa dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan kondisi Negara Indonesia yang serba multi dengan segala macam kemajemukan dan heterogenitas.³

Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan untuk mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Banguna konsep-konsep ini harus dikomunikasikan diantara berbagai stakeholder yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideology ini. Kiranya pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk dapat mensosialisasikan dan memfungsikan konsep multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Islam dalam konteks *rahmatan lil 'alamin* mengayomi adanya kemajemukan dalam kehidupan alam dan manusia. Bahkan, Nabi Muhammad SAW ketika membangun masyarakat Madinah juga dilandasi atas kemajemukan suku, budaya, dan agama. Demikian pula halnya sejarah gerakan Islam yang dibawa oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya di tanah Jawa sangat menghargai budaya lokal setiap masyarakat. Sejumlah realitas ini menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan keseimbangan yang pantas antara gagasan tentang pertanggungjawaban pribadi dan realitas keberagaman. Menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk dengan tegas melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan.⁴ Dradisi Islam ini tidak dapat terjewantahkan jika tidak dapat diaktualisasikan lewat pendidikan yang humanis kepada masyarakat.

Pendidik sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan, di era kemajemukan dan era multikultural akan selalu berhadapan dengan permasalahan bagaimana agar masing-masing tradisi keagamaan tetap dapat meneruskan, melanggengkan, melestarikan, mengalihgenerasikan, mempertahankan serta mewariskan kepercayaan dan tradisi yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang mutlak, namun pada saat yang sama juga menyadari sepenuhnya keberadaan kelompok tradisi keagamaan lain yang juga berbuat serupa. Disinilah perlunya pengakuan akan keragaman etnis, suku dan budaya menjadi penting ditumbuhkan pada peserta didik.

Pertanyaannya adalah, program pendidikan yang bagaimanakah yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersifat majemuk ini? Tidak lain hanyalah mentransformasi dan internalisasi nilai multikultural dan pendidikan karakter lewat pendidikan yang humanism yang mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam

¹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 16.

² *Ibid...*, 18

³ Dawam, Ainurrafiq *Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Menuju Pendidikan Multikul-tural*, (Yogyakarta: Inspeal Ahisakarya Press, 2003), 77.

⁴ Haekal, Muhammad Husein, Hayat al Muhammad. Terjemahan Ali Auda, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1990), 20.



kemajemukan masyarakat dan budaya, serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Pendidikan humanis harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini dengan mengedepankan kebersamaan dalam pluralitas di atas dasar prinsip-prinsip toleransi dan anti terhadap segala bentuk kekerasan. Sifat toleransi, hormat-menghormati, sopan santun, jujur, berlaku adil, dan tolong-menolong adalah cermin sifat dasar bangsa Indonesia yang majemuk, dan merupakan bentuk nilai-nilai karakter orang Indonesia yang mulai tereliminir dari proses pendidikan saat ini.

Menafikan keberadaan tradisi-tradisi agama di muka bumi, baik di Barat apalagi di Timur, merupakan pekerjaan yang sia-sia. Masing-masing mempunyai hak hidup yang sama; masing-masing mempunyai cara untuk mempertahankan tradisi dan identitasnya sendiri-sendiri dengan berbagai cara yang bias dilakukan. Cara yang paling tepat adalah melalui jalur *pendidikan*, karena ia merupakan alat yang paling efektif untuk meneruskan, melanggengkan, melestarikan dan mempertahankan tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari abad yang satu ke abad yang lain.

Dalam masyarakat ditemukan perbagai individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda, demikian pula dalam pendidikan, diversitas tersebut tidak bisa dielakkan. Diversitas budaya itu bisa ditemukan di kalangan peserta didik maupun para guru yang terlibat-secara langsung atau tidak dalam satu proses pendidikan. Diversitas itu juga bisa ditemukan melalui pengkayaan budaya-budaya lain yang ada dan berkembang dalam konstelasi budaya, lokal, nasional dan global. Diversitas budaya ini akan mungkin tercapai dalam pendidikan jika pendidikan itu sendiri mengakui keragaman yang ada, bersikap terbuka (*openess*) dan memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada untuk terlibat dalam satu proses pendidikan.⁵

Oleh karena itu, pendidikan yang humanis yang memiliki nilai karakter dan multikulturalisme yang harus dikembangkan di Indonesia sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan yang mengakar pada kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai agama. Masalah utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah peran Islam dan pendidikan humanis dalam meresolusi konflik sosial yang sangat rentang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dengan akar budaya yang beraneka ragam. Namun, di sisi lain, keanekaragaman itu dapat menjadi nilai perekat dalam proses interaksi sosial jika dibangun di atas nilai-nilai agama yang universal serta proses pendidikan yang humanis berdasarkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia. Masalah akan dibahas dari aspek sosial historis Islam dan pendidikan yang memanusiakan manusia, terutama pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural dan karakter bangsa sebagai cerminan utama masyarakat Indonesia.

Dari pijakan diatas, penulis merasa perlu dikaji lebih mendalam terkait “Tradisi Islam dan Pendidikan Humanisme, Upaya Transinternalisasi Nilai Karakter dan Multikultural Dalam Resolusi Konflik Sosial Masyarakat di Indonesia

B. PEMICU KONFLIK

Jika dilihat dari aspek sosial budaya dan geografis, kemajemukan Indonesia dapat dibagi dalam dua dimensi besar. Pertama, kemajemukan vertikal yang tergambar dalam struktur masyarakat yang memiliki perbedaan lapisan dan strata sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua, kemajemukan horisontal yang tergambar dari adanya kesatuan-

⁵ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural....*,47



kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat dan kedaerahan (letak geografis). Realitas kemajemukan ini menjadi potensi besar bagi bangsa Indonesia sekaligus potensi konflik dalam kerawanan sosial sebab sangat rawan terjadinya pertentangan berbagai kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa peristiwa muncul dan bergejolak karena adanya pertentangan dengan membawa isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) sehingga dengan cepat menyebar menjadi konflik sosial yang menegangkan dan meresahkan, dan agama sering kali menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat yang majemuk.

Dalam kajian Badan Litbang Kementerian Agama RI disebutkan bahwa berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi pada awalnya bukan konflik agama, tetapi banyak faktor-faktor sosial yang sering terkait kemudian agama dibawa sebagai faktor legitimasi sekaligus untuk menutupi akar konflik yang sebenarnya.⁶ Oleh karena itu, isu agama menjadi sensitif untuk melakukan pembelaan diri dari kelompok-kelompok lain. Berbagai peristiwa ketika terjadi penyerangan terhadap agama atau kelompok agama tertentu, orang-orang yang menyerang biasanya berargumentasi bahwa penyerangan itu mereka lakukan demi membela agama yang dianutnya.⁷

Sensitivitas masyarakat majemuk dalam label agama yang bisa menjadi faktor penyebab dan akar terjadinya konflik dalam masyarakat terjadi karena hal-hal berikut. Pertama, adanya klaim kebenaran mutlak (*absolute truth claims*); klaim kebenaran mutlak harus ditujukan ke dalam diri sendiri atau intensional penganut agama itu sendiri, bukan dipakai dalam menilai agama lain. Kedua, adanya ketaatan buta (*blind abedience*), yaitu dengan mengesampingkan akal sehat dan sikap kritis dalam memahami ajaran agama. Ketiga, adanya tujuan akhir membenarkan apa pun dalam mencapai tujuan (*the end justifies the means*). Biasanya hal ini dikobarkan ketika menghadapi konflik antarpemeluk agama.⁸

Faktor-faktor ini menjadikan konflik-konflik sosial yang terjadi tampak lebih permanen dan sulit untuk diselesaikan karena menyimpan dendam yang mendalam, apalagi jika berpatokan bahwa mati dalam membela agama adalah perbuatan terpuji dan mati syahid. Hasil penelitian Balitbang Kementerian Agama RI memandang bahwa akar masalah terjadinya konflik sosial di Indonesia dilatarbelakangi oleh tiga hal. (1) Adanya krisis di berbagai bidang yang terjadi beberapa tahun lalu. Selain menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintahan, birokrasi dan militer yang selama bertahun-tahun terlanjur memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati sebagian masyarakat, juga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antarberbagai kelompok masyarakat. (2) Adanya perbedaan kepentingan, baik perseorangan maupun antar kelompok seperti, ekonomi, sosial, politik, ketertiban, dan keamanan. Kesenjangan ini mempermudah pengikot agama tersebut dalam arus persaingan, pertentangan, dan bahkan permusuhan

⁶M. Atho Mudzhar, *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Depag, 2004) 13

⁷Sopamena Daniel, "Mendefinisikan Indonesia; Politik Identitas dalam Koridor Demokrasi Perspektif Komunitas Agama". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional tanggal 26 Desember 2007, di Aula PPS UIN Alauddin Makassar. 3

⁸Ahmad M Sewang, "Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama. Upaya ,Mengatasi Konflik Sosial", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional, STAIN Datokarama Palu, tgl 20 Desember 2004.



antarkelompok.⁹ (3) Akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula faham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusivitas dan sensitifitas kepentingan kelompok.

Apapun akar masalahnya dalam suatu konflik sosial pada hakikatnya tetap merugikan semua pihak, terutama kalangan masyarakat bawah sehingga yang dibutuhkan adalah revitalisasi dan proses transformasi nilai dengan lebih mengedepankan hal-hal berikut. (1) Pemahaman fungsional agama dan perubahan pendekatan dari pendekatan misteri menjadi pendekatan yang rasional dan fungsional sehingga nuansa agama menyatu dengan kehidupan, termasuk di dalamnya transformasi nilai agama, penafsiran, dan reaktualisasi sesuai dengan perkembangan masyarakat agar agama tetap dirasakan manfaatnya dan berfungsi dalam kehidupan. (2) Nilai-nilai luhur bangsa, kesadaran atas kemajemukan, dan perlunya sikap inklusif dalam beragama adalah nilai-nilai dasar yang harus dibangun secara sistematis lewat pencerdasan pendidikan dan pembelajaran yang humanis.

C. ISLAM DAN PERDAMAIAN

Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*) dengan fitrahnya, setiap manusia dianugerahi kemampuan dan kecenderungan bawaan untuk mencari, mempertimbangkan, dan memahami kebenaran, yang pada gilirannya akan mampu mengakui Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kemampuan dan kecenderungan inilah yang disebut sebagai sikap hanif. Atas dasar prinsip ini, Islam menegaskan prinsipnya bahwa setiap manusia adalah *homi religios*.

Islam pada esensinya, memandang manusia dan kemanusiaan sangat positif dan optimistik, menurut Islam, manusia berasal dari satu asal yang sama: Nabi Adam dan Hawa. Meskipun nenek moyangnya sama namun dalam perkembangannya kemudian pecah menjadi suku-suku, berkaum-kaum, atau berbangsa-bangsa, lengkap dengan segala kebudayaannya dan peradaban khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada selanjutnya mendorong mereka untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu sama lain. Inilah yang kemudian oleh Islam dijadikan sebagai landasan prespektif “kesatuan umat manusia” yang pada gilirannya akan mendorong solidaritas antara manusia.¹⁰

Konsep perdamaian dalam Islam sangat jelas dan tegas karena perkataan Islam itu sendiri secara etimologis berasal dari kata *aslamayuslimu-islam* yang berarti ketundukan (*submission*), juga kedamaian atau perdamaian (*peace*) yang dapat bermakna ketundukan secara total kepada Tuhan serta perdamaian dengan sesama manusia dan juga rasa kedamaian dengan Tuhan.¹¹ Islam dalam terminologi ini bermakna menghantarkan manusia pada keselamatan dan kedamaian, baik kepada Tuhan maupun sesama mahluknya. Perdamaian juga dapat bermakna norma, sebuah nilai yang bersumber pada keesaan dan universalitas Tuhan, yaitu sebuah sistem nilai dan sebuah manifestasi dari keesaan Tuhan ke dalam kehidupan manusia dan masyarakat.¹²

Tuhan menurunkan Islam di muka bumi sebagai petunjuk yang mengarah pada kehendak Tuhan, yaitu kedamaian di bumi dan bukan sekadar persoalan keyakinan terhadap

⁹M. Atho. Mudzhar, *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, 14-15

¹⁰ Muhammad Tang, dkk, *Pendidikan Multikulturalisme*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009) 70-71

¹¹ Agus Moh. Najib, 2011. “Hubungan Antar Agama” dalam *Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*, (Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN) 41-42

¹² A. Maftuh. Abegebriel, *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*. (Yogyakarta: Sr-Ins Publishing, 2004) 401



kitab suci, tetapi merupakan persoalan implementasi terhadap titah suci dan realisasi perintah Tuhan.¹³ Banyak ayat al-Qur'an yang menjadi petunjuk dan memerintahkan manusia agar mengusahakan dan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat yang salah satunya dengan cara saling memahami dan menghargai dalam beribadah dan berkomunikasi. Untukmu agamamu dan untukku agamaku (Q.S.109:60). Tidak ada paksaan dalam agama (Q.S. 2:256). Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Q.S.30:22). Universalitas nilai-nilai Islam tersebut mempertegas bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam perbedaan. Tuhan tidak menjadikan komunitas manusia dalam kondisi yang seragam, melainkan Tuhan menjadikan manusia terdiri dari beberapa suku, agama, bahasa, kultur, status sosial, dan lainnya.

Dengan kondisi yang heterogen akan tercipta kehidupan yang inovatif, kreatif dan kompetitif. Allah berfirman: “Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menciptakan kalian satu umat saja. Tetapi, Allah hendak menguji kalian dengan pemberian Nya itu (yakni keragaman dan heterogenitas) kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan (Q.S.5:48). Adanya pengakuan dalam Islam terhadap nabi-nabi dan agama-agama terdahulu sebelum Islam menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam meyakini dan menghargai perbedaan serta kemajemukan. Tuhan telah mengutus para nabi terdahulu juga untuk kedamaian umat manusia. Kesamaan misi para nabi ini bisa dikatakan bahwa perdamaian merupakan sebuah kode etik universal. Artinya, umat Islam harus mampu hidup dalam masyarakat yang plural karena sesungguhnya kemajemukan merupakan rahmat Tuhan. Umat Islam harus selalu bersikap *Inklusive* bukan *eksklusive*. Sikap seperti inilah yang sangat diperlukan di dalam masyarakat yang majemuk.

Komitmen Islam tentang perbedaan dan kemajemukan telah mengajarkan manusia untuk mewujudkan perdamaian secara menyeluruh (Q.S.2:208). Konsep dasar al-Qur'an tentang perdamaian yang menjadi rujukan utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam yang damai dan toleran telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw ketika Islam berkuasa di Madinah dengan memperlakukan secara baik pemeluk agama lain meskipun Nabi ketika berada di Makkah sering mendapatkan perlakuan kasar dari kaum kafir Makkah. Bahkan, Nabi Muhammad saw membuat suatu konstitusi sebagai aturan formal yang disebut Piagam Madinah, yaitu sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad saw yang berisi suatu perjanjian formal antara dirinya dan semua suku dan pembesar Madinah pada tahun 622 Masehi dengan tujuan menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama.¹⁴

Kondisi sosial masyarakat Madinah yang pernah dipimpin Nabi Muhammad saw memiliki kesamaan pluralitas dengan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, adat istiadat dan agama. Artinya, konsep dan formulasi ajaran Islam pada masa nabi yang penuh kedamaian dan toleransi serta hidup dalam keharmonisan dalam keragaman budaya dan agama, harus pula bisa menjadi konsep ajaran Islam yang damai dan toleran di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini, baik yang berlatar belakang politik, ekonomi suku dan agama, yang kemudian mengatasmakan Islam sesungguhnya bukan merupakan konsep dasar

¹³ Baidowi, Ahmad, *Teologi Perdamaian, Landasan Islam tentang Masyarakat Tanpa Kekerasan*. (Yogyakarta: UIN Press, 2006) 126

¹⁴ Agus Moh. Najib, “Hubungan Antar Agama” dalam *Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*. (Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN, 2011) 47



Islam, dan bukan merupakan ajaran Islam. Islam adalah agama perdamaian dan anti terhadap segala bentuk kekerasan serta sangat menghargai perbedaan dan kemajemukan sosial masyarakat. Hanafi, mengemukakan adanya dua syarat untuk mewujudkan perdamaian yang sesungguhnya. *Pertama*, manusia harus mampu menciptakan perdamaian internal atas perdamaian dalam jiwa. Artinya, setiap orang harus menciptakan rasa aman dan rendah hati dengan tunduk kepada kitab suci.

Perdamaian dalam jiwa inilah akan menjadi manifestasi keimanan, kesalehan, kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, kedermawanan, kesabaran, dan kesederhanaan. *Kedua*, dengan perdamaian jiwa ini akan tercipta perdamaian eksternal. Artinya, perdamaian bukan hanya bertujuan untuk meneguhkan kekuatan atau kekuasaan melainkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, kesetaraan dan sebagainya. Kemiskinan, kesengsaraan, kelaparan, pengangguran, diskriminasi, eksploitasi, rasisme, *apartheid*, dan semacamnya merupakan sumber penghancur perdamaian. Oleh karenanya, jika ingin menciptakan sebuah perdamaian abadi, faktor-faktor pendukung penghancur perdamaian harus juga dieliminir, bahkan dihilangkan sama sekali. Nilai-nilai universalitas Islam telah memberi rujukan yang komprehensif terhadap makna konsep perdamaian yang penuh toleransi sebagaimana dipraktekkan Nabi Muhammad saw beserta para sahabatnya yang kemudian melahirkan suatu model tatanan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

Sebagai manifestasi perdamaian dalam konteks Islam di Indonesia, selain perlunya penegasan kembali nilai-nilai universal Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, juga perlu diperkuat instrumen regulasi yang mengatur hubungan antaragama karena di Indonesia urusan agama memiliki cakupan yang luas, bahkan meliputi semua sektor kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk bernegara sehingga kompetensi masing-masing perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi hubungan antarnegara dan agama maupun antar sesama agama dan umat beragama. Hubungan umat beragama yang sempat kelam di beberapa daerah di Indonesia dapat ditemukan solusi terbaik untuk sebuah kehidupan yang bermartabat, berbudaya dan damai.

Maka, menjadi keharusan bagi kita bersama untuk memikirkan bersama upaya pemecahannya (*solution*). Termasuk pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Pendidikan sudah selayaknya berperan dalam menyelesaikan masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Minimal, pendidikan harus mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan, dan selayaknya pula, pendidikan mampu memberikan tawaran-tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara men-*desing* materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, mengormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural. Suda selayaknya pendidikan berperan sebagai media transformasi sosial, budaya dan multikulturalisme.¹⁵

D. PENDIDIKAN YANG HUMANIS DAN RESOLUSI KONFLIK SOSIAL

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama, seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalisasi kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan maka hendaklah perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi

¹⁵ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, 4-5



multikultural yang efektif. Setiap anak seyogianya harus beradaptasi diri dengan lingkungan sekolah yang multikultural.

Salah satu penyebab utama kegagalan pendidikan nasional sebagai perekat kohesi sosial untuk menghasilkan generasi bangsa yang dapat hidup secara damai di negaranya sendiri karena kekeliruan memilih paradigma pembangunan nasional masa lampau yang berpijak pada *unity in uniformity*.¹⁶ Konsep pembangunan menekankan keseragaman dan persatuan dalam bentuk kesamaan pada seluruh sendi-sendi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Pembangunan diarahkan pada sistem sentralisasi, termasuk dalam pendidikan ditekankan pada penyeragaman besar-besaran, mulai dari kurikulum materi dan buku-buku sumber belajar yang digunakan meskipun peserta didik memiliki latar belakang budaya, lingkungan sosial dan alam yang bervariasi.

Paradigma pembangunan dengan keharusan penyeragaman (*uniformity*) selama berpuluh-puluh tahun setelah memasuki era reformasi seperti terlepas dari suatu belenggu besar yang mengikat. Keanekaragaman dan kemajemukan budaya, adat istiadat, kehidupan sosial mulai ditampilkan dan akibat dari euforia yang berlebihan itu berdampak adanya gesekan-gesekan sosial dan merupakan bibit unggul untuk melahirkan konflik sosial jika tidak dikelola dan disikapi secara arif dan bijaksana sebagai suatu keniscayaan dari sebuah masyarakat yang majemuk. Kebijakan pembangunan dan pengelolaan pendidikan pada masa sekarang harus berpijak pada pluralisme kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendidikan harus diarahkan untuk menghargai potensi-potensi budaya lokal agar bisa tumbuh, dan kebhinekaan tetap berada dalam bingkai ke-Indonesiaan yang bersatu, tetapi tetap beragam, dan beragam namun dalam keutuhan.¹⁷

Pengembangan pendidikan dengan memperhatikan potensi sosial budaya masyarakat adalah bentuk pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, bersifat demokratis, mengakui persamaan derajat manusia dalam keragaman yang berbeda.¹⁸ Tidak boleh terjadi suatu komunitas yang sedang dilanda krisis kesejahteraan (konflik) seperti yang terjadi pada beberapa tempat dan daerah di Indonesia. Misalnya, negara atau oknum aparat justru sibuk mencari celah-celah untuk menindas rakyat yang sudah “sekarat” kemampuan pendapatannya melalui sejumlah produk kebijakan represif yang tidak populer, baik jangka pendek maupun jangka panjang sangat mengancam keberlanjutan hidup masyarakat atau berkarakter mendehumanisasikan manusia Indonesia. Reformasi dan transformasi pendidikan dari pendidikan dan perilaku otoritatif kepada pendidikan yang humanis dengan mengakui karakteristik dan latar belakang sosial budaya peserta didik adalah bagian upaya mencapai cita-cita *education for all* secara adil dan berkelanjutan.

Pendidikan humanis menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan, yaitu pengakuan terhadap hak dasar, keragaman dan potensi yang dimiliki serta didasarkan atas keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai positif dalam dirinya sebagai hasil interaksi sosial dan budaya. Riyanto menekankan pendidikan humanis adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi dan antarpribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah.¹⁹ Pendidikan

¹⁶Hafid, Abbas, *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003) 65

¹⁷ *Ibid*,...67

¹⁸Samsul, Muhammad Syaifudin dan Nizar, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010) 49

¹⁹ Riyanto, Theo. *Pembelajaran sebagai Pembimbingan Pribadi*. (Jakarta: Grasindo, 2002) 10



yang baik tidak sekedar mengasah kecerdasan intelektual semata, tetapi juga menyelaraskan kecerdasan emosional, sosial dan spiritual sehingga memberi keseimbangan pada diri anak dari aspek individualitas kepada aspek sosialitas atau kepekaan dalam kehidupan bersama sebagai suatu sistem masyarakat.

Oleh karena itu, Spranger menekankan bahwa manusia akan menjadi sungguh-sungguh manusia jika ia mengembangkan nilai-nilai rohani (nilai-nilai budaya) yang meliputi nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan dan politik²⁰ Naluri dasar manusia sesungguhnya adalah setiap manusia ingin diperlakukan secara manusiawi. Keharusan itu diwujudkan dalam komitmen kemanusiaan kepada budaya tanpa kekerasan dan budaya yang menghargai hidup, budaya solidaritas dan tata cara ekonomi yang adil, budaya toleransi dan hidup yang benar, serta budaya kesamaan hak dan komitmen laki-laki dengan perempuan.²¹ Menurut Barnadib, konsep dasar pendidikan nasional yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan nasional yang humanis, pendidikan yang mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki daya cipta, karsa dan karya dan mengembangkan semua daya secara seimbang tanpa menitikberatkan pada satu daya saja. Jika itu yang dilakukan, akan terbentuk manusia yang kurang humanis atau manusiawi.²²

Taman Siswa tidak memisahkan diri dengan masyarakat luas, ia harus menghubungkan diri dengan masyarakat di sekitarnya kalau ingin mengabdikan pada kepentingan masyarakat semurni-murninya. Filosofi dan tujuan dasar didirikannya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro adalah ingin mewujudkan suatu lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa yang hidup dan mengakar dalam masyarakat. Artinya, pendidikan yang sesungguhnya dalam konsep awal pembangunan pendidikan nasional adalah (1) sebagai proses pewarisan, penerusan atau enkulturasi, dan sosialisasi perilaku sosial yang telah menjadi model panutan masyarakat lingkungannya secara baku; (2) sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya situasi atau potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh anak yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka pada suatu zaman dan tempat mereka harus *survival*.²³

Beberapa uraian yang dikemukakan di atas tampak bahwa kalangan tokoh-tokoh perintis dan peletak dasar pembangunan bangsa, khususnya pembangunan bidang pendidikan telah menempatkan muara pendidikan nasional yang akan dibangun selaras dengan filosofi dasar masyarakat Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur, budaya, adat istiadat dan agama. Namun, dalam perkembangan selanjutnya nilai-nilai dasar pengembangan pendidikan itu mulai tereliminir akibat pengaruh budaya-budaya luar yang tidak searah dengan semangat nilai-nilai sosial budaya dan kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu, konsep dasar pendidikan nasional yang mengakar pada nilai sosial dan budaya sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Indonesia yang majemuk perlu dipertegas kembali sebagai solusi terjadinya gesekan-gesekan sosial yang berpotensi melahirkan konflik dengan mengembangkan pendidikan multikultural dan pendidikan karakter bangsa.

²⁰ *Ibid.*,...20

²¹ Ishak. Ngeljaratan, "Artikulasi Nilai Keadilan Melalui Sikap dan Perilaku Budaya", dalam Hamka Haq (ed) *Damai; Ajaran Semua Agama*. Makassar: Al-Ahkam, 2004

²² Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1998) 38-39

²³ H.A.R., Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2005) 117

E. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Multikulturalisem berkenaan dengan budaya, merujuk pada keragaman yang ada, dan berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Proses dan cara bagaimana multikulturalisme sebagai doktrin normatif menjadi ada dan implementasi gagasan-gagasan multikultural yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan politis, dalam hal ini kebijakan-kebijakan pendidikan. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang memprhatikan secara sungguh-sungguh latar belakang peserta didik/orang lain, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama dan budaya.²⁴ Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku (*mode of action*) peserta didik terhadap keragaman agama, budaya dan masyarakat.²⁵ Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk memberikan persamaan hak di tengah keragaman masyarakat, seperti hak berekspresi, menyatakan pendapat, berkelompok, dan hak-hak dalam sosial budaya, termasuk hak mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang (*education for all*). Pendidikan multikultural menanamkan kesadaran akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*), dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial.²⁶

Konsep pendidikan multikultural menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua orang yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasipluralistik yang diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Secara global, pendidikan multikultural telah direkomendasikan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui UNESCO pada tahun 1994 yang dinyatakan sebagai berikut. (1) Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerjasama dengan yang lain. (2) Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. (3) Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.²⁷

Dalam konteks Indonesia, gagasan multikultural muncul setelah rezim orde baru jatuh dan puncaknya ketika K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden Republik

²⁴A. Dardi Hasyim, dan Yudi Hartono, *Pendidikan Multikultural di Sekolah*. (Surakarta: UNS-Press, 2009) 28

²⁵Muhammad Arif, *Arti Penting Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural*. Yogyakarta: UIN-Press, 2010) 192

²⁶ Imron. Mushadi, *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. (Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009) 50

²⁷W.I.M Poli, *Hubungan Antar Manusia dan Penanganan Konflik*. Makassar: Ahkam, 2004) 146-147



Indonesia. Gusdur secara nyata memberi ruang yang luas untuk mengakui semua hak-hak dasar dan sosial budaya rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mengakui keberadaan budaya dan keyakinan masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia. Konsep multikultural kemudian diharapkan terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, tetapi mampu hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan tradisi, adat maupun budaya, dan yang paling utama adalah mengembangkan sikap tolong-menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam dari ajaran masing-masing agama.²⁸

Konsep multikultural yang mengedepankan persamaan dan kesetaraan hak dalam perbedaan mendorong lembaga pendidikan untuk mengaplikasikan secara sistematis dan terencana dalam prektek pendidikan sebab dengan paradigma pendidikan multikultural akan mampu membangun kohesifitas, solidaritas dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama dan budaya. Artinya, nilai-nilai multikultural jika ditanamkan sejak dini kepada anak akan membantu mereka untuk mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Pemahaman nilai-nilai multikultural yang dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya gesekan-gesekan antarpribadi maupun antarkelompok sosial yang dapat mengarah kepada konflik sosial.

Dengan demikian, setiap orang akan menyadari bahwa manusia dilahirkan memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, suku, dan agama yang berbeda. Perbedaan adalah suatu keniscayaan dan merupakan *sunatullah*, hukum alam yang harus diterima setiap orang. Dengan demikian, akan muncul rasa penghargaan dan perlakuan antarsesama secara manusiawi, yaitu suatu model perlakuan dan interaksi yang selalu dipandang dari sisi dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism values*). Sebagaimana James Banks yang dikutip Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si dalam makalahnya yang berjudul “*Pendidikan Multikultural Dalam Pluralisme Bangsa*” menyebutkan bahwa, sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan, Bangsa menjelaskan bahwa siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbdada-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan.

Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandang pandangnya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan.

Beberapa tawaran pendekatan yang dapat dipakai dalam praktik pendidikan multikultural sebagai bentuk perwujudan pendidikan yang humanis antara lain sebagai berikut. (1) Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang berbeda secara kultural dilakukan dengan menitikberatkan agar dapat terjadi perubahan kultural yang damai. (2) Memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan dan mendorong peserta didik memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi, dan mau menerima orang lain. (3) Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. (4) Pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial

²⁸M. Atho Mudzhar, *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*. (Jakarta: Puslitbang Depag, 2004) 18-19



dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antarkelompok antarkelompok. (5) Pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial.²⁹

Peran pendidikan multikultural akan menciptakan kesadaran pluralitas agama dan budaya dengan menumbuhkan perasaan berbagi kemanusiaan dengan orang-orang yang secara fundamental berbeda orientasi idologinya sehingga pendidikan multikultural diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan terjadinya disharmoni di dalam masyarakat. Keharusan untuk berbagi itu membuat kita untuk memikirkan kembali alat-alat kultural dan sosial agar mampu bertahan (*survive*) dengan perdamaian, kebebasan, dan martabat kemanusiaan. Manusia dilarang mengemas atau memperlakukan dirinya sebagai penyakit di masyarakat yang mengakibatkan adanya hal-hak sesama manusia menjadi korban.

F. PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja sama secara damai. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, tanggung jawab pribadi, perasaan senasib, sepenenderitaan, pemecahan konflik secara damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam pendidikan karakter.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyiapkan generasi unggul yang sanggup bersaing dengan sumber daya manusia bangsa lain, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, budaya, dan moral agama.³⁰ Orang yang kehilangan karakter akan menjadi orang-orang yang tidak mempunyai harga diri dan tidak memiliki keberanian, kehilangan sifat dan sikap patriotisme, dan tidak sanggup menyampaikan kebenaran.³¹ Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Nasional berharap agar pendidikan dapat mengembangkan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran, dan tubuh anak.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³³ Rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut menggambarkan bahwa lima dari delapan potensi peserta didik yang harus dikembangkan dalam pendidikan sangat dekat dengan pembangunan karakter anak. Sebenarnya, nilai-nilai karakter yang hendak dibangun di atas sudah ada di dalam nilai-nilai Pancasila, yakni nilai-nilai yang hakikatnya digali dari kebudayaan-kebudayaan daerah.

²⁹ Munib, Achmad, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Semarang: UNNES-Press, 2009) 30

³⁰ Bashori. Muchsin, at. All, *Pendidikan Islam Humanistik; Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2010) 145

³¹ Hasan, Muhammad Tolchah, *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bangun Prakarya, 1996) 43

³² Imam Barnadib, *Pendidikan Perbandingan*, 90

³³ Departemen Agama RI. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam) 37



Oleh karena itu, menurut Tilaar pendidikan karakter Indonesia semestinya mengembangkan nilai-nilai yang kita sepakati bersama yang mempersatukan Indonesia sehingga akan menjadi karakter yang khas bangsa Indonesia yang hidup dalam budaya multikultural.³⁴ Nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber dari kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai agama harus dibangun dan dimulai dari rumah tangga dan keluarga sebagai lembaga pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama, kemudian diteruskan dengan pendidikan di sekolah (pendidikan formal) dan di masyarakat (nonformal). Pendidikan karakter di sekolah penekanannya tidak hanya pada aspek pengetahuan (*knowledge*), tetapi yang lebih penting adalah penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti luhur, dan sebagainya, baik dilakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah.

Penanaman nilai-nilai di lingkungan masyarakat juga menjadi domain penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter karena masyarakat memiliki peran penting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanaman nilai-nilai etika dan estetika dalam membentuk karakter. Oleh karena itu, efektivitas pendidikan karakter akan terwujud jika ada sinergitas dan keterpaduan ketiga unsur di atas (keluarga, sekolah, dan masyarakat) dalam menanamkan nilai-nilai karakter. Menurut Megawangi, setidaknya terdapat sembilan pilar sebagai bentuk nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan dan ditanamkan, yaitu: (a) cinta pada Tuhan dan kebenaran; (b) tanggung jawab; kedisiplinan dan kemandirian; (c) amanah; (d) hormat dan santun; (e) kasih sayang; kepedulian dan kerjasama; (f) Percaya diri; kreatif dan pantang menyerah; (g) keadilan dan kepemimpinan; (h) baik dan rendah hati; dan (i) toleransi dan cinta damai.³⁵

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah sebagai berikut. (1) Desain berbasis kelas, berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar. (2) Desain berbasis kultural sekolah, yang berusaha membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai-nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri peserta didik. (3) Desain berbasis komunitas, artinya komunitas sekolah tidak berjuang sendiri, tetapi masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka.

Beberapa nilai-nilai dan konsep dasar pendidikan karakter yang dikemukakan di atas jika terimplementasi dengan baik akan melahirkan sosok manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spritual. Wujud dari integrasi empat kecerdasan akan membentuk suatu pola sikap dan perilaku yang memiliki empati, arif, dan bijaksana serta bertanggung jawab, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan.

Oleh karena itu, diyakini bahwa salah satu solusi nyata bagi konflik sosial dan disharmonisasi yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan mengembangkan pendidikan karakter. Melalui pendidikan karakter akan menumbuhkembangkan sikap empati, jujur, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan manusia lain sebagai sesama makhluk Tuhan yang memiliki kodrat dan hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijunjung tinggi berdasarkan harkat dan martabatnya secara manusiawi.

³⁴H.A.R, Manifesto Tilaar, *Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, 125

³⁵Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. (Bandung: Mizan, 1999) 70



G. KESIMPULAN

Islam sangat menghargai perbedaan dan kemajemukan sosial masyarakat. Oleh karena itu, berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia, umat Islam mestinya memiliki konsep dan resolusi yang jelas sebagai perwujudan Islam yang damai. Selama ini sebagian dari umat Islam mengalami pemahaman yang keliru terhadap pesan moral agama yang bersifat universal, akan mengakibatkan timbulnya sikap truth claim, eksklusifisme, fanatisme yang berlebihan dan apologi. Sikap demikian, ketika seorang individu berhadapan dengan individu lain di luar kelompoknya, akan terjadi gesekan bahkan konflik.

Padahal secara sosial budaya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural, multi etnik dan multi agama. Disinilah arti pentingnya pendidikan berwawasan multikulturalisme dikembangkan karena realitas kemajemukan masyarakat Indonesia yang sering menimbulkan konflik sosial mengindikasikan kalau peran pendidikan belum maksimal dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas perbedaan dan keragaman sosial, pendidikan dan pengajaran agama juga khususnya Islam pada saat ini masih bernuansa era klasik-skolastik yang sifatnya terlalu menekankan *keselamatan* didasarkan pada kebaikan hubungan antara diri seorang individu dengan Tuhan-nya kurang begitu memberi tekanan yang baik antara diri individu dengan individu-individu sesamanya. Kehadiran agama dipahami sebagai rahmat bagi diri seseorang atau individu, atau setidaknya-tidaknya bagi sekelompok umat agama tertentu saja.

Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi paradigma pendidikan, dari paradigma monokultural kepada paradigma multikultural serta dari model pendidikan sentralistik kepada pendidikan yang humanis. Pendidikan yang humanis adalah pendidikan yang mengembangkan keragaman dan toleransi serta pendidikan yang menumbuh kembangkan berbagai potensi dan karakter dasar manusia seperti kejujuran, keadilan, sopan santun baik yang bersumber dari nilai-nilai budaya.

REFERENSI

- Abbas, Hafid. *Menegakkan Dimensi HAM dalam Mereposisi Arah Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Abegebriel A. Maftuh. *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*. Yogyakarta: Sr-Ins Publishing, 2004.
- Achmad, Munib. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang: UNNES-Press, 2009.
- Agus Moh Najib. "Hubungan Antar Agama" dalam *Merajut Perbedaan Membangun Kebersamaan*, Yogyakarta: Dialogue Centre Press UIN, 2011.
- Arif, Muhammad. *Arti Penting Pendidikan Agama Islam yang Inklusif-Multikultural*, Yogyakarta: UIN-Press, 2010.
- Baidowi, Ahmad, *Teologi Perdamaian, Landasan Islam tentang Masyarakat Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: UIN Press, 2006.
- Barnadib Imam. *Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Bashori. Muchsin, at. All, *Pendidikan Islam Humanistik; Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Daniel, Sopamena. "Mendefinisikan Indonesia; Politik Identitas dalam Koridor Demokrasi Perspektif Komunitas Agama". *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional tanggal 26 Desember 2007, di Aula PPS UIN Alauddin Makassar



- Departemen Agama RI. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam
- M Sewang, Ahmad. "Reaktualisasi Nilai-Nilai Agama. Upaya ,Mengatasi Konflik Sosial", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional, STAIN Datokarama Palu, tgl 20 Desember, 2004.
- Manifesto, H.A.R, Tilaar. *Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2005.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mudzhar, M. Atho. *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Depag, 2004.
- Mudzhar, M. Atho. *Kebijakan Negara dan Pembangunan Lembaga Pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antarUmat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Depag, 2004.
- Muhammad Tolchah, Hasan. *Prospek Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Bangun Prakarya, 1996.
- Mushadi, Imron. *Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*, Jakarta: Balai Litbang Agama, 2009
- Ngeljaratan, Ishak. "Artikulasi Nilai Keadilan Melalui Sikap dan Perilaku Budaya", dalam Hamka Haq (ed) *Damai; Ajaran Semua Agama*. Makassar: Al-Ahkam, 2004.
- Poli, W.I.M. *Hubungan Antar Manusia dan Penanganan Konflik*. Makassar: Ahkam, 2004.
- Samsul, Muhammad Syaifudin dan Nizar, *Isu-isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2010
- Theo, Riyanto. *Pembelajaran sebagai Pembimbingan Pribadi*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Tilaar, H.A.R, Manifesto. *Pendidikan Nasional, Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*
- Yudi Hartono, dan Hasyim *Pendidikan Multikultural di Sekolah*, Surakarta: UNS-Press, 2009.



KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN *HEDONISME ISLAMI*: DARI PEMUDA UNTUK MASYARAKAT

Aufal Khima¹ dan Ahmad Bakhrudin²

¹*Mahasiswa Pasca STAIN Kudus*
Email: aufa92barokah@gmail.com

²*Mahasiswa Pasca STAIN Kudus*
Email: abakhrudin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep manajemen dalam upaya mencetak pemuda yang unggul untuk masa depan bangsa. Penulis menggunakan penelitian yang bersifat library research dengan pendekatan hermeneutik dan ilmu manajemen. Latar Belakang penelitian ini adalah pemuda sebagai agen pembangun masyarakat dituntut menjadi aktor yang mampu merubah keadaan masyarakat dan memberi konsep baru untuk kemajuannya. Pemuda bertugas untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih dan bersifat kemanusiaan dan membangun masyarakat di segala aspek kehidupan. Hal itu terjadi karena pemuda adalah simbol masa depan. Jika suatu negara mempunyai generasi pemuda yang cerdas dan berakhlak maka masa depan negara cerah, dan sebaliknya. Sedangkan, pemuda saat ini kebanyakan telah terjebak pada praktek hedonisme barat. Mereka terbawa arus dalam pola pikir pemuasan dan kesenangan pribadi serta berpaling dari dimensi batin dan melupakan kepedulian sosial untuk perkembangan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah sangat penting adanya konsep kepemimpinan strategis yang di satukan dengan hedonisme Islami. Konsep yang diharapkan mampu mendukung proses pematangan emosi, intelektual dan juga spiritual. Karena, selain membutuhkan potensi dan lingkungan yang mendukung, pemuda juga membutuhkan konsep sebagai acuan untuk langkah maju kedepannya. Konsep implementasi kepemimpinan strategis dan hedonisme islami adalah konsep kepemimpinan strategis yang menawarkan pentingnya kepemimpinan yang bisa membangun keunggulan kompetitif, kemudian di padu dengan konsep Hedonisme Islami yang menawarkan pentingnya pendidikan iman, pengendalian hawa nafsu dan kekuatan pribadi tangguh, berkuasa dan bertaqwa yang lahir dari teladan fenomenal Nabi Sulaiman. Ini adalah langkah awal mencetak pemuda berkualitas emas dan juga berjihad islam dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Pemuda, Masyarakat, Kepemimpinan Strategis, dan Hedonisme Islami

A. PENDAHULUAN

Setelah memasuki era globalisasi, dengan kemudahan mengakses informasi, baik melalui media cetak, maupun elektronik. Tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Setiap fenomena yang ada, tentunya akan memberikan nilai positif dan negatif. Hal tersebut tergantung pada pola hidup dan pribadi masing-masing yang bersangkutan.

Akhlak merupakan gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku serta gaya hidupnya dalam masyarakat. Moral seseorang sangat berkaitan dengan gaya hidup dan



perkembangan zaman serta teknologi. Semakin canggih perkembangan zaman maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Semua perkembangan itu mengandung nilai positif dan negatif tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut.

Dalam sisi positif banyak pemuda yang semakin luas wawasannya. Selain itu, bisa menambah semangat dalam mencapai cita-cita bangsa, semakin tahu mana yang benar dan salah, iman menjadi semakin tebal dari siraman rohani dari blog yang bertema religius. Produk-produk yang dihasilkan dari perkembangan zaman telah terbukti bisa membantu pengembangan sumber daya manusia (SDM) pemuda.

Bertentangan dengan hal diatas, dalam sudut yang lain, terdapat juga sisi negatif, lebih banyak pemuda yang menyalahgunakan perkembangan teknologi informasi. Mereka mengikuti judi online, bermain game tanpa mau belajar, bersenang-senang dengan teman sebayanya, narkoba, acuh terhadap sesama karena merasa semua bisa dilakukan sendiri melalui canggihnya teknologi dan lain sebagainya.

Perbedaan itu muncul karena adanya perbedaan kebijakan pada setiap diri individu dalam memanfaatkannya. Jika individu terbiasa dengan hal baik dan dikontrol dengan hal yang baik, tentu akan terbiasa melakukan kegiatan positif yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Tapi jika personal yang bersangkutan terbiasa dengan hal yang buruk, dan tidak bisa mengontrol atau dikontrol dari hal itu, akan bisa dipastikan ada kesempatan untuk melakukan hal tercela yang akhirnya merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Dari hal diatas, tentunya muncullah beberapa keinginan untuk mengembalikan pemuda kearah yang baik atau mencetak kader-kader baru untuk dibekali hal yang baik agar menjadi individu yang bermartabat dan bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat butuh solusi yang cepat untuk menyelesaikan problem ini. Dan tentunya kita harus tahu bagaimana manajemen untuk mengajak para pemuda menjadi manusia yang baik dan dapat diunggulkan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep manajemen dalam upaya mencetak pemuda yang unggul untuk masa depan bangsa. Karena pemuda adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan Negara. Dan bertanggungjawab untuk menjadi insane-insan yang bisa memajukan negeri ini.

Penelitian ini dianggap penting karena pemuda sebagai agen pembangun masyarakat dituntut menjadi aktor yang mampu merubah keadaan masyarakat dan memberi konsep baru untuk kemajuannya. Pemuda bertugas untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat ke arah perubahan yang lebih dan bersifat kemanusiaan dan membangun masyarakat di segala aspek kehidupan. Hal itu terjadi karena pemuda adalah simbol masa depan.

Jika suatu negara mempunyai generasi pemuda yang cerdas dan berakhlak maka masa depan negara cerah, dan sebaliknya. Sedangkan, pemuda saat ini kebanyakan telah terjebak pada praktek hedonisme barat. Mereka terbawa arus dalam pola pikir pemuasan dan kesenangan pribadi serta berpaling dari dimensi batin dan melupakan kepedulian sosial untuk perkembangan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Manajemen Strategik

Manajemen strategik yang dimaksudkan disini adalah manajemen yang berkaitan dengan pengembangan SDM pemuda yaitu usaha manajerial menumbuh-kembangkan

kekuatan perusahaan atau lembaga untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

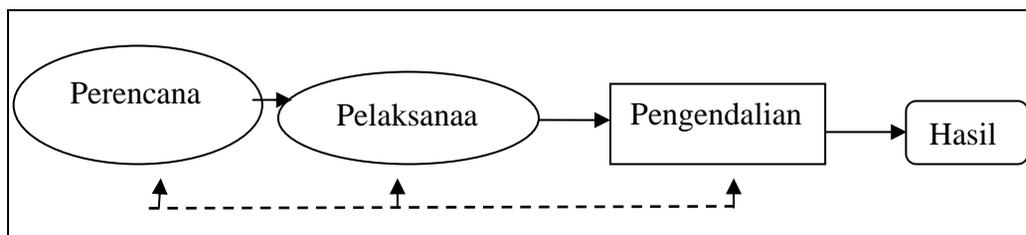
Manajemen strategik pada hakikatnya merupakan suatu proses artinya merupakan arus informasi melalui tahapan analisis yang saling terkait menuju pencapaian suatu tujuan atau cita-cita. Manajemen strategic sebagai proses arus informasi mencakup data historis, data saat ini, dan data ramalan tentang operasi dan lingkungan. Data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan nilai dan prioritas baik dari individu, maupun kelompok dan pihak-pihak yang sangat berpengaruh pada tindakan strategi.¹

2. Kepemimpinan Strategis

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi melihat kedepan, mempertahankan fleksibilitas dan memperdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategi yang diperlukan. Pada hakikatnya kepemimpinan strategi itu multifungsional, melibatkan pengelolaan melalui orang-orang, mengelola seluruh perusahaan dan meniru perubahan yang kelihatannya akan meningkatkan lingkungan persaingan saat ini. Karena kompleksitas dan hakikat global dari lingkungan ini, para pemimpin strategi harus belajar bagaimana caranya mempengaruhi perilaku manusia dengan efektif dalam lingkungan yang tidak pasti. Melalui kata-kata atau contoh pribadi, dan melalui kemampuannya untuk melihat masa depan, para pemimpin strategis yang efektif mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan orang-orang yang bekerja dengannya secara bermakna²

Fungsi kepemimpinan baru bisa dijalankan dalam sebuah masyarakat jika telah terpenuhi tiga unsur utama berikut ini : kumpulan manusia yang dimulai dari tiga orang atau lebih, terdapat tujuan kolektif yang ingin diwujudkan bersama, dan yang tidak kalah penting yaitu terdapat seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin dan mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota masyarakat yang akan merealisasikan tujuan bersama³

Kepemimpinan Strategik (strategik leadership) berhubungan dengan pengelolaan proses penyusunan strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi, yang akan berdampak pada peningkatan nilai organisasi yang dimiliki oleh para pemimpin atau pengurus. Untuk meningkatkan nilai dari para manajer harus mendorong penyusunan strategi. Untuk dapat melakukan ini, organisasi harus dapat mengalahkan para pesaingnya; organisasi haruslah memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage).



¹ A.T. Soegito, *Manajemen Strategik*, Semarang: UPGRI PRESS, 2015, hlm. 20

² R. Duane Ireland, dkk, *Manajemen Strategi: Daya Saing Dan Globalisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 181.

³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Konteporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 128.



P. Lorenge, MFS Morton dan S Goshal dalam buku Manajemen strategic mengatakan ada tiga jenis pengendalian yaitu:

- a. Pengendalian strategik
Pengendalian strategik berhubungan dengan arah stratetik yang berhubungan dengan lingkungan
- b. Pengendalian taktik
Pengendalian taktik berhubungan dengan pengukuran jangka panjang
- c. Pengendalian operasional
Pengendalian operasional berhubungan dengan aktivitas jangka pendek, dan memfokuskan pada apa yang dapat dilakukan pada saat ini untuk mencapai sukses⁴

Kepemimpinan strategik memiliki beberapa profil yang harus dilengkapi, beberapa kriterianya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pemimpin mutu berkelanjutan

Pemimpin hendaknya memiliki komitmen terhadap proses peningkatan kualitas lembaganya dan untuk itu perlu dibuat tim seperjuangan untuk mewujudkannya. Selain itu harus mempunyai mekanisme monitoring dan evaluasi keberhasilan atau membangun budaya kualitas.

- b. Perencana dan penganalisis

Pemimpin harus memiliki visi dan misi yang termuat pada program-program. Dalam pelaksanaannya meliputi merumuskan misi, mengembangkan profil lembaga, menganalisis lingkungan eksternal lembaga, menentukan strategi pengembangan, menentukan sasaran jangka panjang dan strategi umum, menetapkan sasaran tahunan dan jangka pendek, anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan

- c. Pengambil kebijakan

Pengambilan kebijakan harus sesuai dengan prosedur dan ada konsistensi antara perencanaan dengan implementasi program-program kegiatan lembaga.

- d. Berketerampilan memecahkan berbagai masalah dan penanganan konflik

Pemimpin dituntut memiliki keterampilan untuk memecahkan berbagai masalah yang ia hadapi, dalam rangka mengimplemetasikan prinsip manajemen. Sebagai inovasi perlu dilakukan pendidikan sosialisasi, menanamkan kesadaran anggota lembaga untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan, melibatkan berbagai elemen warga lembaga maupun masyarakat. Jika ada masyarakat yang memiliki sikap apriori disebabkan karena kurangnya sosialisasi, informasi dan komunikasi karena jarak antara kebijakan dan pelaksanaannya sangat pendek. Jika muncul konflik pemimpin diminta bisa membuat cara agar bisa terselesaikan

- e. Pemimpin yang bersifat partisipatif

Pemimpin bersifat partisipatif atau demokratik. Hal ini terlihat bagaimana pemimpin menggerakkan, melibatkan, memobilisasikan sumber daya manusia meliputi perencanaan,

⁴A.T.Soegito, *op.cit.* hlm.121

⁵A.T.Soegito, *Kemimpinan*, Semarang: Kepemimpinan, 2010, hlm. 119-122



pelaksanaan, penggalan sumber dana, monitoring serta evaluasi keberhasilan. Hasil konkrit adalah lahirnya partisipasi aktif masyarakat

f. Pemimpin yang professional

Pemimpin harus mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu taat asas, menghormati hak dan kewajiban warga, tanggung jawab, menjunjung tinggi moralitas, menjauhkan dari pendekatan yang bersifat birokratik

g. Pemimpin yang transformasional

Pemimpin diharapkan menetapkan berbagai kebijakan untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama pada perubahan sikap warga untuk bisa memahami program yang dilaksanakan

h. Pemimpin yang komunikatif

Komunikasi dengan masyarakat harus dibangun dengan efektif yang bisa diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi atau budaya kebersamaan, kegotong royongan, keterbukaan dan melahirkan partisipasi. Hal ini yang mendorong keberhasilan program

i. Agen pembaharuan

Pemimpin harus menjembatani antara aturan Negara dan aspirasi warga. Keberhasilannya sebagai agen perubahan membawa dampak positif dalam pelaksanaan program, Dengan ini masyarakat bisa dukungan dan partisipasi masyarakat, kelancaran pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dan juga semakin berkurangnya sikap apriori, dan apatis dari masyarakat.

Dari hal diatas, dapat dipahami bahwa pemimpin strategik adalah pemimpin yang memiliki pola berpikir dan bertindak strategis, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan tepat.

3. *Hedonisme Islami*

Kita telah mengetahui bahwa hedonisme membuat orang lupa akan tanggungjawabnya karena apa yang dia lakukan semata-mata untuk mencari kesenangan diri. Efek dari hal itu sendiri diantaranya adalah hilangnya rasa persaudaraan, sosial dan melupakan Allah.

Hal ini ditegaskan oleh Syed Muhamad Naquib al-Attas bahwa ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama namun dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia, terus menerus berubah. Sehingga dari cara pandang yang seperti inilah pada akhirnya akan melahirkan ilmu-ilmu sekular.⁶

Sedangkan, zuhud berarti tidak merasa bangga atas kemewahan dunia yang ada ditangan dan juga tidak merasa bersedih karena kehilangan kemewahan itu dari tangannya. Zuhud bukanlah suatu kependetaan atau terputusnya dari kehidupan dunia, akan tetapi merupakan hikmah pemahaman yang membuat manusia memiliki pandangan khusus

⁶ Muhammad Naquib al-Attas, *Islam And Secularism* Kuala Lumpur: Art. Printing Works Sdn. Bld, 1993, cet. II, hlm. 36.



terhadap kehidupan dunia itu, mereka tetap bekerja dan berusaha namun kehidupan tidak bisa menguasai kecenderungan kalbunya dan juga tidak membuatnya meningkari Tuhan.⁷ Karena pada hakikatnya, orang yang zuhud mengetahui esensi kekuasaan Allah bahwa semua dari dan untuk Allah, semua adalah milik Allah dan harus dibelanjakan pada jalan Allah.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu cara syaitan memasuki pintu hati manusia untuk merusak hamba Allah ialah menerusi pintu marah dan syahwat. Ini bermakna hati manusia perlu dibersihkan untuk menghindari hal tersebut. Akal yang dilengkapkan Tuhan kepada manusia merupakan khadam kepada hati. Oleh itu, hati manusia cukup mudah untuk menerima dan melihat kecantikan yang boleh membentuk sifat hamba yang sejati. Dan puncak kebahagiaan yang dicapai oleh hati manusia ialah apabila seseorang itu dapat mengimbangi kekuatan yang dikaruniakan oleh Allah yaitu kekuatan marah, kekuatan syahwat dan kekuatan ilmu.

Manusia butuh solusi antara kesenangan diri dan keikhlasan untuk mentasharufkan yang kita punya pada jalan Allah. Istilah hedonism dan zuhud yang saling bertentangan harus dileburkan menjadi *hedonisme Islami*.

Istilah “hedonism Islami” adalah untuk menjembatani pemahaman masyarakat yang sudah akrab dengan gaya hidup yang diwarnai dengan kompetisi, menggapai cita-cita, memenuhi keinginan, kebutuhan akan hiburan dan membuat siasat atau strategi untuk menang atau mencapai apa yang diinginkan. Tidaklah kita, harus merubah gaya hidup itu sepanjang tidak bertentangan dengan norma Islam, tidak lupa akan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Hal yang dirubah hanyalah apa yang ada didalam hati kita, paling sensitif tapi ditekankan oleh penulis yaitu merubah niat. Karena setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya.

Maksud dari tentang statemen diatas adalah kita berlatih dan membiasakan melakukan sesuatu dengan niat yang berhubungan dengan upaya memajukan agama dan hamba Allah. Jadi, apa yang diperoleh bukan untuk kita sendiri tapi untuk kemaslahatan agama dan umat. Karena untuk melakukan suatu ibadah tertentu dan ingin mewujudkan kemaslahatan umat juga melalui hal yang bersifat dunia terlebih dahulu, namun niat yang membedakan antara hedonisme ala barat dan hedonisme islami.

Tentunya hal diatas tidaklah mudah. Tapi kita menawarkan cara yaitu dengan pendidikan iman bagi diri sendiri dan anak kita sebagai generasi masa depan. Karena dengan kekuatan iman, kita dan generasi selanjutnya tidak akan mudah terbawa arus perbuatan negatif dari masyarakat. Selanjutnya yang penulis tawarkan adalah pelajarilah kisah Nabi Sulaiman sebagai lambang kejayaan dan ketaqwaan yang akhirnya Berjaya sampai akhir hayatnya, kemudian bandingkan dengan kisah Qarun atau Tsa’labah sebagai lambang kejayaan tanpa ketaqwaan yang akhirnya ditelan oleh kelalaian mereka sendiri pada Allah

4. Pendidikan Karakter

Menurut Hasbi Ash-shidiqi yang mengadopsi pendapat Syaikh Abdurrahman al-Bani, Yusuf Qardhawi dan al-Baidhawi, yaitu meliputi:⁸

⁷ Amin Syukur, *Zuhud Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm 3-4

⁸ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm.138-139.

- 
- 
- a. *Tarbiyah Jasminiyah*, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyetatkan tubuh serta menegakkannya supaya dapat menyelesaikan kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya.
 - b. *Tarbiyah Aqliyah*, yaitu pendidikan dalam pelajaran yang dapat mencerdaskan akal dan *menajamkan* otak, seperti ilmu berhitung.
 - c. *Tarbiyah Adabiyah*, segala rupa praktek maupun teori yang dapat meningkatkan budi dan perangai. Artinya pendidikan budi pekerti/akhlak dalam *ajaran* Islam merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar umatnya memiliki akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw .

Bertentangan dengan itu, nilai-nilai pendidikan barat seperti: (1) Sekuler yaitu memisahkan antara ilmu dengan agama. Maksudnya, pendidikan Barat lebih mementingkan ilmu dari pada agama. Mereka hanya mementingkan jasmani dan tidak memikirkan rohani. (2) Liberal artinya bebas. Maksudnya, pendidikan Barat itu bebas melakukan segala hal yang disukai, tetapi tetap mengarah akan ilmu yang dipelajarinya itu. (3) Pragmatis yaitu praktis atau bersifat sementara. Mereka menganggap bahwa ilmu itu dipelajari agar seseorang dapat menggapai cita-citanya. Mereka hanya fokus akan satu titik berat yang dituju oleh pemikirannya. Proses penggapaian cita-cita itulah yang membuat seseorang menjadi lebih terstruktur untuk menggapainya secara maksimal. (4) Materialis yaitu sebatas materi saja. Pendidikan itu hanyalah sebatas materi. Mereka tidak memikirkan apa dan bagaimana ilmu yang dipelajari ke depan. Mereka hanya tertuju pada satu tujuan yaitu hasil nilai pelajaran yang baik.

Fenomena yang terjadi saat ini, banyak orang yang meniru gaya pendidikan barat yaitu dengan mengesampingkan pengetahuan agama. Ilmu yang dicari adalah ilmu yang bisa membawa dalam tergapainya cita-cita. Disamping itu, banyak cita-cita yang diidamkan tanpa rasa kesadaran untuk membangun kembali umat Islam. Penanaman sejak kecil terhadap cita-cita yang dimiliki pemuda, hendaknya diselipi pengetahuan untuk membangun umat Islam bukan hanya untuk memajukan dirinya sendiri. Serta cara penggapaian cita-cita itu sendiri, hendaknya kita selipi dengan ritual secara islami seperti tirakat puasa sunnah, berdo'a pada Allah dan yang sejenisnya.

Upaya secara islami harus selalu di ajarkan dan di control karena kesuksesan anak tanpa suburnya iman bisa menimbulkan perbuatan yang melenceng dari agama, misalnya: jadi pengusaha tapi mendholimi pegawai, pegawai yang korupsi, menjadi hakim yang curang dan lain sebagainya.

Pendidikan Islam dan Barat di atas memperlihatkan adanya kesenjangan pola berfikir yang digunakan para ilmuwan mereka sehingga menghasilkan karakter yang berbeda. Jika sumber dan metodologi ilmu di Barat bergantung sepenuhnya kepada kaedah empiris, rasional dan cenderung materialistik serta mengabaikan dan memandang rendah cara memperoleh ilmu melalui wahyu dan kitab suci, maka metodologi dalam ilmu pengetahuan Islam bersumber dari kitab suci al-Qur'an yang diperoleh dari wahyu, Sunnah Rasulullah saw, serta ijtihad para ulama

Terdapat dua tahap dalam penerapan pendidikan yaitu pembiasaan dan pengawasan, yaitu:

a. Pembiasaan

Strategi Rasulullah saw. dalam mengajarkan pengetahuan pun ternyata juga mempertimbangkan aspek perkembangan psikologi umatnya. Di sisi lain, hal tersebut juga

diisyaratkan oleh Rasulullah saw. dalam menyuruh orang tua agar mengajarkan salat kepada anaknya pada usia tujuh tahun dan memberikan hukuman pada usia sepuluh tahun apabila anak malas atau mulai mengabaikannya.

Hadits Memerintah Anak Beribadah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خُزَّاءٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ. (هذا لفظ ابو داود ورواه أحمد و ترمذي أيضا)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “ajarkanlah anakmu tentang sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah dia jika meninggalkannya di usia 10 tahun”. (H.R. Abu Dawud)

Para Ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadits di atas. Apakah sholat itu diwajibkan bagi seorang anak kecil ketika berumur 7-10 tahun ?, kebanyakan Ulama memilih sholat tidak diwajibkan bagi anak yang masih berumur 7-10 tahun akan tetapi bagi wali wajib memerintah anaknya untuk menunaikan sholat pada umur 7 tahun dan memukulnya jika meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Hal ini agar anak terbiasa menjalankan ibadah sholat ketika sudah menginjak dewasa.⁹

Dalam hadits lain tidak menggunakan kata *علموا* tapi menggunakan kata *مروا* yang artinya perintahkanlah anakmu tentang sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah dia jika meninggalkannya di usia 10 tahun. Hadits diatas menjelaskan bahwa kewajiban bagi orang tua adalah mendidik anak dari dini dalam melakukan ibadah agar terbiasa dalam beribadah ketika sudah menginjak dewasa.

Hadits ini mengandung perintah kepada orang tua untuk melatih mendidik anak beribadah di mulai anak umur 7 tahun secara perhitungan hijriyah, dikarenakan agar anak sudah terbiasa beribadah dan bertaqwa kepada Allah, serta akan dibawa sebagai bekal masa depan kelak. Dan akan dipukul dengan pukulan yang tidak sampai membahayakan, tidak boleh memukul wajah, ketika ia meninggalkan ibadah pada umur 10 tahun. Umur 7 tahun adalah umur ideal anak dikatakan tamyiz dan pada umur 10 adalah dimana fase anak ini sudah bisa memahami hukuman jika tidak melakukan kewajiban yang bisa berakibat efek jera terhadapnya.

Ibadah yang diperintahkan oleh orang tua pada waktu itu adalah seperti sholat, puasa, sedekah, atau ibadah-ibadah yang memang yang akan di taklifkan ketika dia awal baligh. Sehingga ketika dia sudah baligh dan berkewajiban melakukan ibadah dimaksud dia sudah bisa dan terbiasa.

Hal ini mencerminkan bahwa Rasulullah SAW sudah mengimplementasikan manajemen yaitu perencanaan melalui pembiasaan agar anak terbiasa melaksanakan syariat-syariat Islam sampai dewasa kelak.

Dalam konteks Islam, salah satu misi sentral Nabi Muhammad saw. adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar utuh, tidak hanya secara

⁹ Zainuddin Abi al-Faraj Abdurrahman Ibnu Syihabuddin Al-Baghdadi, *Fathu al-Bari Li Ibn Rajab*, Maktabah Syamilah, Versi Maret 2010, Juz 5, hlm. 293.

jasmaniah tetapi juga secara batiniah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dilaksanakan dalam keselarasan dengan tujuan misi profetis nabi, yakni untuk mendidik manusia, memimpin mereka ke jalan Allah dan mengajarkan kepada mereka untuk menegakkan masyarakat yang adil, sehat, harmonis, sejahtera secara material maupun spiritual. Nabi Muhammad saw. diutus untuk mengembangkan kualitas kehidupan manusia, menyucikan moral mereka, dan membekali mereka dengan bekal-bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.¹⁰

b. Pengawasan

Urgensi pendidikan anak sangat diperhatikan oleh Islam, bahkan tanggungjawab pendidikan anak pada awalnya berada di tangan dan pundak orangtua. Berkaitan dengan tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak dapat dilihat dari firman Allah swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا أَوْ قُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهِمْ
مَلَايِكَةٌ غَالِظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
لِلَّهِ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (Q.S. at-Tahrim)

Dari kalangan sahabat banyak sekali yang menafsirkan ayat ini seperti yang penulis kutip dari kitab *Ibnu Katsir* :

Ali bin Abi Thalib R.A diriwayatkan oleh Sofyan At Tsauri dari Manshur menafsirkan ayat ini dengan “Didiklah ahlimu dengan adab dan bekalilah mereka dengan ilmu.”. Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ali bin Thalhah menafsirkan ayat ini dengan “Beramallah selalu dalam ketaatan kepada Allah, Bertaqwalah akan kemaksiatan terhadap Allah, Perintahkanlah Ahlimu dengan selalu mengingat Allah, niscaya kalian semua akan selamat dari neraka”. Imam Mujahid berpendapat dalam ayat ini mempunyai arti : “Bertaqwalah kalian semua kepada Allah dan berpesanlah kepada ahlimu untuk selalu bertaqwa kepadaNya”. Dari Qotadah berkata : “perintahkanlah ahlimu dengan taat kepada Allah, cegahlah dari kemaksiatan, dan tegakkanlah kepada mereka apa yang diperintahkan Allah, perintah dan bantulah mereka dalam menjalankan perintah Allah, ketika kamu melihat kemaksiatan diantara mereka maka segeralah mencegahnya.”¹¹

Di dalam kitab Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi beliau Imam Muhammad bin Umar bin al-Husain ar-Razi menafsirkan ayat ini dan mengutip dari beberapa mufassir lain “Jagalah dirikamu dengan tidak melakukan larangan Allah”. Imam Muqotil berpendapat dalam menafsirkan ayat ini dengan “Bagi orang Islam sudah seharusnya mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, memerintahkan dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan”.¹²

Imam Qurthubi yang selaras dengan Imam Addlohak menjelaskan bahwa di dalam ayat ini ada satu pelajaran yang sangat penting yaitu manusia harus menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari neraka. Sudah suatu kewajiban bagi laki-laki sebagai pemimpin

¹⁰ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm.5.

¹¹ Zainuddin., *Op. Cit*, Juz 8, hlm. 167

¹² Muhammad bin Umar Ar-Razzi, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Rozi*, Maktabah Syamilah, Versi Maret 2010, hlm. 4490



keluarganya untuk selalu memperbaiki diri dengan ketaatan, dan memperbaiki keluarganya sebagaimana memperlakukan seorang pemimpin terhadap anggotanya¹³

Analisis hubungan ayat dengan teori pendidikan adalah pada intinya kita diwajibkan menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka dengan cara membekali ilmu, adab, agar mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bahkan sudah sering kita dengar di dalam hadits yang akan penulis di sub akhir nanti bahwa kita harus mendidik anak kita tentang sholat, puasa dan ibadahnya lainnya pada umur 7 tahun dan memberi mereka hukuman yang tidak melukai dengan efek jera jika mereka tidak mau menjalankan ibadah dalam umur 10 tahun. Ini mengindikasikan bahwa perlunya suatu pengawasan terhadap anggota keluarga kita.

Merencanakan anak agar mampu di masa selanjutnya menjadi anak yang taat beribadah, mengawasi anak dan memerhatikan anak dalam umur tertentu dan memberi pengajaran yang proporsional, mengajari anak untuk mengevaluasi dari kesalahan penyimpangan agar berhenti dan menindak lanjuti dengan kebaikan selanjutnya.

Senada dengan itu, dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu: 1). Ketaqwaan individu, bahwa anak-anak dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa; 2). Pengawasan anak yang mencerminkan sebuah proses keberlangsungan hidup sehari-hari akan mendapatkan pengawasan dari orangtuanya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan; 3). Penerapan/supremasi aturan main jika anak melanggar norma agama dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pengawasan dalam hal ini adalah tanggung jawab orang tua, bagaimana menilai anak-anak dan mampu membiasakan diri mereka dengan akhlaq mulia yang sesuai dengan ajaran agama. Orang tua perlu menyusun strategi dan trik agar berhasil menanamkan *Islamic character* yang terinternalisasi pada jiwa anak sejak kecil.

Selain melakukan pengawasan, orang tua juga harus memberikan bimbingan¹⁴, manfaat bimbingan antara lain: 1) Fungsi Pemahaman yaitu membantu individu agar memahami jati dirinya, permasalahannya, dan lingkungannya tersebut. 2) Fungsi Preventif yaitu upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana (memberitahu mana yang akan berakibat buruk dan mana yang berakibat baik). 3) Fungsi Kuratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 4) Fungsi Pengembangan yaitu membantu individu mengembangkan potensi dalam dirinya (fisik, emosi, social, moral, spiritual) secara optimal melalui kegiatan yang positif.

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan pada anak. Dalam hal ini, anak dilatih dan dikontrol orang tua. Selain dalam belajarnya untuk mencapai unggulan ilmu pengetahuan anak juga diseimbangkan dalam mencapai keunggulan iman dan ketaqwaan.

¹³Muhammad bin Ahmad Al-Khozroji Al-Qurthubi, *Op. Cit*, juz 18, hlm. 194

¹⁴Syamsu Yusuf, *Teori Kepribadian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 229

5. Implementasi Kepemimpinan strategik dan Hedonisme Islami

a. Kepemimpinan strategik untuk semua lapisan

Kepemimpinan strategik adalah kompetensi kepemimpinan yang diperlukan kita menghadapi kondisi yang kompleks. Kepemimpinan strategik penting untuk dilakukan mengingat tantangan zaman selalu berubah. Sehingga kita butuh leader yang memiliki pola berpikir dan bertindak strategis dan visioner, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan tepat.

Pemimpin strategik sangat diperlukan untuk bisa:

- 1) Mampu membawa para pemuda beradaptasi secara cepat dengan perkembangan zaman, kearah yang positif
- 2) Mampu memotivasi pemuda untuk berprestasi
- 3) Mampu mencetak pemuda yang berdaya saing tinggi dengan Negara lain
- 4) Mendidik para bawahannya baik negeri atau swasta agar bekerja secara benar dan produktif
- 5) Menetapkan peraturan yang jelas dan konsisten
- 6) Membangun hubungan interaktif dan komunikatif dengan masyarakat
- 7) Membangun tim yang bertanggung jawab dan profesional
- 8) Mampu menjadi konselor efektif
- 9) Memberikan solusi pemecahan masalah yang ada
- 10) Menjadi pimpinan yang percaya diri, kharismatik dan dihormati

Tentunya konsep kepemimpinan strategik harus dimiliki oleh presiden, para pemimpin tiap daerah, pemimpin di sekolah, pemimpin keluarga, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan dan pada diri masing-masing pemuda, karena setiap pemuda adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar seluruh elemen kehidupan bisa mencapai hal yang cemerlang.

Kepemimpinan strategik bermanfaat untuk mencari kesempatan dan cara yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan hal ini, diharapkan mampu mencetak pemuda yang berkualitas dizaman Rasulullah, seperti: Zubair bin Awwam, Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib Muhammad Al Fatih ikut menyebarkan islam, berjuang, belajar dan taat pada agama.

b. Hedonisme Islami untuk merubah kebiasaan negatif

Dari tela'ah pada sub bab diatas, kita bisa mengambil hal penting sebagai berikut:

1) Pentingnya Pendidikan Iman

Sulaiman Abu al-Wafa al-Taftazani mengklasifikasikan sebab-sebab kegelisahan masyarakat modern. Pertama, karena takut kehilangan apa yang telah dimiliki. Kedua, timbulnya rasa khawatir terhadap masa depan yang tak disukai (trauma terhadap imajinasi masa depan). Ketiga, disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak dapat mampu memenuhi harapan spiritual. Keempat, banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Bagi at-Taftazani semua itu muncul dalam diri seseorang karena hilangnya keimanan dalam hati, menghambakan hidup kepada selain Allah SWT.¹⁵

¹⁵ Sularso sopater (ed) Keadilan Dalam Kemajemukan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm.269.



Pendidikan iman penting untuk diberikan pada anak, sejak dini sampai dewasa dan secara kontinyu, agar anak menjadi generasi yang cerdas tapi juga shalih, seperti pendidikan yang dialami Nabi Sulaiman dari keluarganya dan cara pendidikan sahabat Luqman pada keluarganya. Pendidikan iman adalah fondasi bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. Dengan iman, manusia akan jauh dari kegelisahan, ketakutan dan pelanggaran norma. Hal ini disebabkan oleh keyakinan yang mendarah daging bahwa kita adalah hamba yang nanti akan bertanggungjawab pada Sang Khaliq.

2) Tidak Berbuat Sia-Sia dan Pengendalian Hawa Nafsu

Maksudnya adalah meninggalkan hal yang bisa membuat kita lalai kepada Allah, dan beralih pada hal yang bisa membawa manfaat bagi agama dan umat. Zaman sekarang ada banyak macam kegiatan dan media aplikasi yang bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja untuk mengisi waktu kosong kita, tapi adanya ketergantungan pada hal itu merupakan suatu kerugian. Kita bisa merugi dalam waktu dan kesempatan. Waktu yang bisa digunakan untuk belajar, beribadah menjadi tertunda dan berkurang durasinya. Demikian halnya, jika kita hanya menjalani kegiatan yang bisa menghamburkan uang hanya untuk memuaskan hasrat yang kita mau. Uang yang harusnya kita bisa gunakan untuk infaq, sedekah, menabung untuk beribadah menjadi melayang sesaat tanpa pertimbangan dahulu.

Karena pendidikan iman yang kuat serta teladan yang selalu di berikan sejak kecil, setelah Nabi Sulaiman dikabulkan permintaanya oleh Allah dengan diberi sebuah kerajaan yang sangat megah, maka hawa nafsu yang ada pada diri Nabi sulaiman sudah tidak lagi disibukkan oleh keinginan terus mencari dunia, dan mengerti bahwa kenikmatan dunia ini sama sekali tidak berfaidah, sehingga saat itu juga hati nabi Sulaiman berpaling dari kegemerlapan dunia dan dunia ini sudah tidak ada artinya lagi bagi nabi sulaiman.

Pengendalian hawa nafsu harus melalui pengendalian dan pembiasaan. Imam al-Ghazali menyatakan, bahwa orang yang mengetahui tentang kebaikan, kebenaran tidak otomatis ia bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya itu, baik dan benar. Seseorang baru dapat bertindak baik, benar sesuai dengan pengertiannya itu bila yang bersangkutan senantiasa melakukan latihan. Latihan pembiasaan itulah yang dapat menyebabkan seseorang bertindak baik dan benar. Bilamana pembiasaan-pembiasaan tersebut telah tertanam dalam-dalam di dalam hati sanubari, maka barulah disebut oleh al-Ghazali dengan karakter/perangai dan akhlak. Akhlak baginya ialah sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya keluar perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan suatu pertimbangan dan pemikiran. Bilamana yang keluar darinya suatu perbuatan yang baik menurut akal dan shara', maka itu disebut dengan karakter yang baik, tetapi sebaliknya, bila yang keluar darinya adalah karakter yang jelek menurut akal dan shara', maka disebut dengan karakter yang jelek.¹⁶

3) Pribadi yang Tangguh, Berkuasa dan Bertaqwa

Nabi Sulaiman adalah seorang raja, tapi beliau tidak menggunakan kedudukannya sebagai media mendapat kenikmatan individu, dan juga berlaku adil bagi semua. Beliau juga tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengeruk harta, memperkaya keluarga dan sahabatnya. Nabi Sulaiman juga mengisyaratkan wajib mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan dunia. Hal yang penting adalah beliau tidak pernah melupakan Allah dalam hati, pikiran dan perwujudan tingkah lakunya. Beliau telah menyerahkan semua

¹⁶ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din II*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1410/1990, hlm. 52.



hidupnya untuk pengabdian pada Allah. Untuk itu, dalam setiap tindakan dan keputusan harus menjunjung tinggi asma Allah.

Nabi Sulaiman meskipun diberi kekuasaan dan kejayaan oleh Allah SWT, dia tidaklah merasa angkuh dan sombong atau dhalim. Malah, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah yang memberi semua kehebatan dan kekuasaan itu. Hal ini berbeda dengan aliran yang dianut oleh peradaban barat atau orang-orang yang tidak beriman yang mana hanya memenuhi kepuasan hidup semata untuk dijadikan perlombaan dalam stratifikasi sosial.

Nikmat-nikmat agung yang diberikan kepada Sulaiman a.s ini menunjukkan agungnya karunia Allah Ta'ala, dan Sulaiman adalah seorang nabi dan rasul, termasuk orang-orang shalih sama seperti ayahnya, Dawud a.s. Ia tidak pernah melakukan apapun selain kebaikan yang sesuai dengan tuntutan risalah, menyeru manusia untuk menyembah Allah Ta'ala dan bersyukur kepada-Nya.

Ia memohon kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun dalam doanya, ini tidaklah bermaksud agar Allah tidak memberikan permohonan itu kepada siapa pun selain dia, tapi hanya sebagai bentuk kesungguhan dan permintaan untuk diberi kekuasaan dan sebuah kerajaan yang tidak mungkin dia lepas dan dialihkan kepada orang lain, dan tidak mungkin ada orang lain yang mampu menempati kedudukannya.

Karena pada saat itu mencerminkan bahwa hanya orang yang berkuasa yang akan dipatuhi, sehingga beliau meminta kejayaan dan kekayaan yang tidak bisa ditandingi orang lain pada zaman itu kepada Allah. hal ini dimintanya agar dapat dijadikan dalil atas kenabiannya dan sebagai media dakwahnya, agar masyarakat bisa tunduk dan menyatakan masuk Islam. Hal itu tidaklah berbeda dari zaman sekarang, orang yang berkuasa adalah yang di takuti dan ditaati. Sehingga banyak orang yang berlomba mendapatkannya dan digunakan sebagai kesempatan untuk berbuat apapun.

Pendidikan iman sejak dini dan kontinyu; pengendalian hawa nafsu; dan kejayaan sebagai pengabdian diri seutuhnya hanya pada Sang Ilahi. Ketiga konsep ini adalah butir ***hedonisme Islami*** yang perlu kita kembangkan dan sebarkan pada masyarakat Islam untuk mengajak pada gaya hidup *hedonisme Islami* bukan *hedonisme barat*.

C. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah sangat penting adanya konsep kepemimpinan strategik yang di satukan dengan hedonisme Islami. Konsep yang diharapkan mampu mendukung proses pematangan emosi, intelektual dan juga spiritual. Karena, selain membutuhkan potensi dan lingkungan yang mendukung, pemuda juga membutuhkan konsep sebagai acuan untuk langkah maju kedepannya. Konsep implementasi kepemimpinan strategis dan hedonisme islami adalah konsep kepemimpinan strategik yang menawarkan pentingnya kepemimpinan yang bisa membangun keunggulan kompetitif, kemudian di padu dengan konsep Hedonisme Islami yang menawarkan pentingnya pendidikan iman, pengendalian hawa nafsu dan kekuatan pribadi tangguh, berkuasa dan bertaqwa yang lahir dari teladan fenomenal Nabi Sulaiman. Ini adalah langkah awal mencetak pemuda berkualitas emas dan juga berjihad islam dan kemanusiaan.

REFERENSI

- A.T. Soegito, *Manajemen Strategik*, Semarang: UPGRIS PRESS, 2015
_____, *Kemimpinan*, Semarang: Kepemimpinan, Semarang: Unnes Press, 2010



- Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Konteporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din II*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1410/1990
- Amin Syukur, *Zuhud Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Azymardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999
- Muhammad bin Ahmad Al-Khozroji Al-Qurthubi, *Op. Cit*, juz 18
- Muhammad bin Umar Ar-Razzi, *Tafsi Al-Fakhru Ar-Rozi*, Maktabah Syamilah, Versi Maret 2010
- Muhammad Naquib al-Attas, *Islam And Secularism* Kuala Lumpur: Art. Printing Warks Sdn. Bld, 1993, cet. II
- R. Duane Ireland, dkk, *Manajemen Strategi: Daya Saing Dan Globalisasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Sularso sopater (ed) *Keadilan Dalam Kemajemukan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Syamsu Yusuf , *Teori Kepribadian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Zainuddin Abi al-Faraj Abdurrahman Ibnu Syihabuddin Al-Baghdadi, *Fathu al-Bari Li Ibni Rajab*, Maktabah Syamilah, Versi Maret 2010, Juz 5



PENDIDIKAN SEBAGAI INSTRUMEN POKOK PERJUANGAN KEBUDAYAAN

Ardy Syihabuddin¹

¹*Resimen Mahasiswa Mahakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Gadjah Mada
Email: ipunkardy@gmail.com*

ABSTRAK

Soekarno menyatakan bahwa proklamasi 17 agustus 1945 hanyalah jembatan emas yang harus dilalui menuju cita-cita besar bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Jalan untuk mencapai cita-cita tersebut adalah dengan trisakti, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya. Oleh sebab itu kebudayaan menjadi komponen yang sangat penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara untuk diperjuangkan.

Instrumen perjuangan kebudayaan itu sendiri memang tidaklah tunggal, namun didalamnya terdapat instrumen pokok yang menjadi dasar dan syarat kunci untuk memperkokoh kepribadian bangsa Indonesia yang memang multikultural. Bangsa yang terdiri dari banyak sekali suku, agama, golongan, kepercayaan serta adat istiadat yang berbeda-beda. Instrumen pokok tersebut ialah pendidikan, dengan pendidikan generasi bangsa bisa mengerti tentang jati diri dan kedudukannya sebagai penerus estafet perjuangan bangsa, dengan pendidikan pula kebudayaan bisa tetap eksis dan mendapatkan ruang untuk terus berkembang.

Problem timbul di era globalisasi yang sudah tidak mengenal sekat seperti saat ini. Persilangan kebudayaan antar bangsa tidak dapat dihidari dan berimbas pada kehidupan masyarakat Indonesia baik diranah sosial, politik, bahkan keagamaan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kebudayaan dari luar tersebut selaras dengan kebudayaan Indonesia? apa implikasinya? Dan apa yang harus dilakukan dalam konteks saat ini?

Disinilah pendidikan berfungsi untuk mempertahankan kepribadian bangsa sekaligus instrumen filtrasi, karena sejatinya tak semua yang dari luar akan berimbas positif bagi bangsa Indonesia. Pendidikan adalah instrumen utama bagi perjuangan kebudayaan Indonesia, tak hanya sebagai benteng pertahanan melainkan juga sebagai instrumen penyebar gagasan budaya kolektifisme dan gotong royong Indonesia ke dunia Internasional. Pendidikan sangatlah penting terutama bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa, seperti kata Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan adalah alat untuk memperjuangkan kebudayaan.

Kata Kunci : Pendidikan, Kebudayaan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian yang penting bagi kehidupan manusia dalam menyambung rantai kehidupan. Teknologi, sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahkan semua ilmu pengetahuan yang ada di dunia tidak lepas dari pendidikan.



Dengan pendidikan pula ilmu dan teori-teori dapat terus tersambung dan berkembang sampai sekarang.

Dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia sudah dapat teridentifikasi bahwa pendidikan tidak lepas dari kebijakan politik. Bicara soal pendidikan di Indonesia tentu tak bisa dilepaskan dari tokoh-tokohnya sebagai pejuang pendidikan. Salah satunya Ki Hadjar Dewantara, peletak dasar pendidikan di saat bangsa masih tercengkrum penjajahan kolonial belanda, ketika rakyat belum menyadari keterjajahannya akibat terlalu lama terkungkung dalam tekanan dan ketakutan yang dilakukan belanda. Akibat kondisi obyektif semacam itu maka pendidikan pada masa itu diabdikan pada upaya mencapai kemerdekaan, dengan jalan menyadarkan rakyat Indonesia serta memberikan kemerdekaan lahir batin agar rakyat berani untuk memperjuangkan kemerdekaan. Begitu pula setelah Indonesia berhasil merdeka, beliau menjadi pelopor dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Digabungkannya antara Kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia juga bukan tanpa sebab, landasan substansialnya adalah bahwa pendidikan merupakan instrumen untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebudayaan Indonesia. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa Indonesia bukanlah negara *inlander* yang harus tunduk dengan kebudayaan asing yang justru menindas, juga bukan bangsa yang *chauvinistik*, merasa kebudayaannya lebih unggul dari yang lain sehingga punya legitimasi untuk menindas bangsa lain. Indonesia mengenal konsep sosio-nasionalisme, dimana nasionalisme termasuk dalam kebudayaannya juga berwatak perikemanusiaan.

Namun fakta berkata lain, pada tahun 2015 mantan Menteri pendidikan dasar dan kebudayaan Anies Baswedan berstatemen ketika berkunjung ke Tamansiswa, sekolah yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara dan membandingkan pendidikan di Finlandia dengan Indonesia. Beliau menilai bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan Finlandia, yang lebih mengejutkan adalah buku Ki Hadjar Dewantara menjadi buku pedoman di Finlandia sebagai Negara dengan peringkat pendidikan nomer satu di dunia. Ironisnya buku pendidikan karya Ki Hadjar Dewantara bahkan tak dibaca di Indonesia. Menjadi pertanyaan besar bahwa pendidikan di Indonesia justru tidak mencerminkan ajaran Ki Hadjar Dewantara, yang notabnya adalah tokoh pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Selaras dengan itu, dalam menggali pendidikan dan kebudayaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari peranan kaum muda. Dalam sejarah Indonesia, pemuda selalu jadi pelopor dan roda penggerak perubahan bangsa. Mulai dari mometum sumpah pemuda 1928 yang menyatukan spektrum perjuangan melawan kolonialisme, hingga dalam dinamika perjalananya berhasil mendorong kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun, saat ini dalam konteks sosial politik berbeda, keterlibatan aktif pemuda semakin tidak nampak. Alam pikir liberalisme yang terus mengikis generasi muda berimpikasi pada karakter yang individualistik dan apatis terhadap lingkungan kemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan litbang Kompas bulan oktober tahun 2015 menyatakan bahwa kecenderungan orientasi kalangan muda saat ini 69,8 % pada diri sendiri (individualistik), sedangkan hanya 27,8 % yang berorientasi dan peduli pada masyarakat, selebihnya 2,4 tidak tahu. Hasil yang lain meunjukkan kiprah pemuda dalam perjuangan politik hanya 37,9 %, pengamalan Pancasila 27,5 %, dan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa hanya 36,3 %. Hasil yang cukup menonjol hanya ditunjukkan dalam peningkatan prestasi olahraga yaitu 53%.



Jika direfleksikan, realitas kondisi pemuda saat ini sangat menurun dibandingkan deretan sejarah besar dinamika republik. Hal semacam ini tentu tak lepas dari peran pendidikan itu sendiri. Watak individual dan kompetitif yang digembar-gemborkan berefek serius bagi kondisi generasi muda saat ini. Tujuan utama pendidikan sebagai tercapainya kemerdekaan lahir, batin, dan tenaga serta didapkannya ilmu pengetahuan sudah bergeser kedalam lembaga pembuat ijazah untuk mencari kerja belaka. Belum lagi berkaitan dengan paradigma pendidikan yang masih bercorak positivistik, yaitu melepaskan pendidikan dari ranah problematika sosial masyarakat.

B. GOTONG ROYONG (KOLEKTIFISME) SEBAGAI KEBUDAYAAN DASAR MASYARAKAT INDONESIA YANG MULTIKULTURAL

Di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdapat sangat banyak kelomok etnik atau suku bangsa, data BPS tahun 2010 menyebutkan terdapat 1.340 suku bangsa. Belum lagi Agama yang juga tidak homogen, memang yang mendapat pengakuan dari negara barulah enam kepercayaan, namun sejatinya masih sangat banyak aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat nusantara warisan turun temurun yang sudah eksis sejak ratusan tahun.

Dari masyarakat yang multikultural tersebut sebetulnya mengandung dua sisi perspektif yang dapat merugikan sekaligus menguatkan bangsa. Sisi kekurangannya dapat kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sering terjadinya konflik antar etnis dan golongan. Konflik tersebut sebetulnya dipicu perebutan ekonomi dan ruang hidup yang merembet menjadi konflik antar golongan yang tak jarang bahkan menelan banyak korban jiwa. Di sisi yang lain multikulturalisme justru bisa dijadikan satu perekat yang kuat dalam jahitan bhineka tunggal ika. Banyaknya ragam tradisi, bahasa, serta seni budaya menjadi kekayaan tersendiri yang patut untuk terus lestari. Karena sudah teruji, bahwa heterogenitas etnis tidak berkolerasi secara linier dengan bersatunya sebuah bangsa. Sebut saja ketegangan di Timur Tengah yang tak juga usai, yang notabennya terdiri dari latar belakang etnis yang sama.

Filosofi dasar corak kebudayaan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari sisi historis terbentuknya suatu *nation*. Pada pidato di hadapan sidang BPUPKI, Presiden Soekarno memaparkan tentang dasar negara Indonesia yaitu Pancasila yang disepakati secara mutlak oleh seluruh peserta sidang dan menjadi dasar bagi berdirinya republik hingga hari ini. Pancasila tersebut menurut Soekarno bukanlah rumusnya, melainkan nilai-nilainya memang sudah terkandung didalam masyarakat nusantara selama ratusan tahun, Soekarno hanya mengaktualisasikannya saja. Pancasila sendiri ketika diperas menjadi Tri-sila menjadi sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan. Dari Tri-sila tersebut jika diperas kembali menjadi Eka-sila yaitu gotong royong. Gotong royong mengandung makna kolektifisme, senasib-sepenanggungan, solidaritas serta kebersamaan, inilah karakter dasar budaya masyarakat Indonesia yang sudah tumbuh bertahun-tahun lamanya.

Selanjutnya pasca proklamasi kemerdekaan budaya kolektifisme tersebut juga dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya berkaitan dengan hak mendasar warga negara dalam UUPA, dalam pasal 5 UUPA disebutkan bahwa “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia ...“. Dari landasa hukum tersebut dapat ada dua klausul yang mencerminkan karakter dasar serta tujuan dari bangsa Indonesia. Pertama tentang



hukum adat, karakter masyarakat Indonesia adalah kelompok-kelompok komunal yang kemudain terintegrasi menjadi satu kesatuan bangsa yang berwatak kolektif yang memiliki cita-cita bersama. Kedua yaitu sosialisme Indonesia sebagai tujuan berbangsa dan bernegara, sosialisme adalah anti tesa dari sistem ekonomi kapitalis yang berwatak individualistik.

C. NEOLIBERALISME, PROBLEM POKOK PENGIKIS KEPERIBADIAN BUDAYA INDONESIA

Di era abad ke XXI yang tak mengenal sekat dan batas ini, tidak mengherankan jika persinggungan satu budaya dengan yang lain semakin tak terkendali. Corak masyarakat dan budaya yang berbeda-beda tiap bangsa saling berdialektika satu dengan yang lain. Memang banyak yang dalam perjalanannya mengalami sinergi dan dapat berjalan beriringan, namun tak jarang juga mengalami banyak penolakan dan benturan yang hebat antara satu dengan yang lain.

Pasca perang dunia ke dua, relatif tak ada lagi kolonialisme bersenjata dari negara satu ke negara lain. Namun, hal tersebut tidak berarti penjajahan berakhir begitu saja, justru ekspansi ini telah bertransformasi menjadi penjajahan gaya baru. Dari sini neoliberalisme hadir sebagai jalan eksploitasi gaya baru. Berangkat dari teori *dependency* bahwa negara-negara maju sengaja menciptakan ketergantungan di negara-negara berkembang/*periphery*. Sehingga negara-negara berkembang tak bisa maju karena selalu menjadi subordinat dan dikondisikan untuk selalu bergantung. Berbagai macam cara dilakukan untuk itu, seperti memberikan hutang lewat kendali IMF dan *world bank* dengan mewajibkan perjanjian-perjanjian yang sebenarnya memberatkan Indonesia, membuat struktur kendali ekonomi politik dan hukum untuk memperlancar misinya, sampai dengan taktik *divide et impera* yang selalu berhasil memecah belah kesatuan bangsa. Demikian halnya dengan kebudayaan, watak eksploitatif dan individualistik adalah ciri khas ekspansi neoliberal yang sebetulnya bertentangan dengan karakter dasar rakyat, namun terus dipaksakan di Indonesia.

Menurut Ki Hadjar Dewantara yang dimaksud “kultur” atau kebudayaan adalah buah dari keadaban manusia, oleh karena adab itu sifatnya kelahiran budi, maka buah-buah dari kelahiran budi itu lalu dinamakan budaya. Perkataan “kultur” itu sendiri berasal dari bahasa latin (*colere, cultivere*) yang berarti mengusahakan, yakni mengusahakan untuk mendapat kemajuan hidup. Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan sebagai salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan dan melekat dari keseluruhan kehidupan masyarakat. Termasuk hubungannya dengan kebudayaan, ekonomi, politik dan problematika kehidupan sosial lainnya.

Selaras dengan itu, kebudayaan erat kaitanya dengan antropologi. Di dalam esainya, *The Marxian of Rosa Luxemburg*, George Lukas (1990:27) menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara pemikiran Marx dan pemikiran borjuis bukan terletak pada pengutamaan aspek ekonomi dalam menjalankan masyarakat dan sejarahnya, tapi sudut pandang totalitasnya. Totalitas atau sudut pandang yang mengutamakan kesalingkaitan antar unsur, antar aspek, dan antar waktu dalam satu kesatuan kehidupan sosial yang senantiasa berubah secara dialektis merupakan metode utama dari Marx.

Dari titik inilah kiranya antropologi bisa meraih kembali hakikatnya sebagai ilmu tentang umat manusia setelah sekian lama dikungkung dogma sebagai ilmu fungsionalisme yang melepaskan kacamata historis dari antropologi. Mengikuti kritik Marx terhadap ahli-ahli ekonomi borjuis, dalam kasus fungsionalisme, para ahli teori ini begitu canggih menjelaskan berbagai pola kehidupan masyarakat, tetapi mereka tidak menjelaskan hubungan-hubungan sosial ini tercipta, fungsionalisme tidak bicara bagaimana ‘pergerakan



historis' melahirkan hubungan-hubungan sosial ini. Padahal lewat penelurusan asal-usul hubungan sosial inilah bisa ditemukan sumber-sumber asli cacat-cacat relasi masyarakat terutama praktek penghisapan manusia atas manusia.

Ekspansi Kebudayaan

Ada polemik dan pertanyaan besar dalam dunia filsafat dan kebudayaan berkaitan dengan lokalitas. Apa sebenarnya lokalitas dan apa itu dominasi menjadi diskursus yang mewarnai perdebatan. Banyak pemikir post moderen yang berpandangan bahwa semua kebudayaan berasal dari entitas lokal, kebudayaan yang berhasil berekspansi keluarlah yang mampu mendeterminasi dan mempengaruhi budaya yang lain sehingga menjadi buaya hegemonik.

Dalam konteks Indonesia budaya gotong royong yang menjadi karakter dasar masyarakat diekspansi oleh kebudayaan yang individual dan eksploitatif dari luar. Budaya individual ini merambah sampai ke ruang-ruang terdalam dari masyarakat Indonesia, terlebih mengikis generasi muda yang sedang dalam tahapan pembentukan karakter. Tak mengherankan jika saat ini kecenderungan kaum muda dalam aspek sosial politik semakin melemah. Karena sejatinya, individualisme ini yang menjadi akar dari tumbuh kembannya sikap apatis dan hedonis generasi muda serta ketidak pekaanya terhadap lingkungan sosial.

Ekspansi kebudayaan ini tentu tidak berjalan secara sporadis, namun linier dengan ekspansi ekonomi dan politik, terlebih selaras dengan kepentingan *Multi National Company* dan *Trans Nasional Company* yang membutuhkan pasokan sumber daya alam dari Indonesia serta pasar yang luas, seiring dengan budaya konsumeristik yang selalu terjaga.

Slavoj Zizek salah satu pemikir kontemporer menyatakan bahwa kapitalisme global dalam melakukan eksploitasi saat ini merubah bentuknya dengan wajah yang sangat humanis, sangat toleran sehingga memanipulasi kesadaran. Di titik ini pendidikan berperan sangat penting sebagai aparatus ideologis sekaligus pelanggeng hegemoni individual eksploitatif bagi kaum kapitalis.

Lebih lanjut Revrison Baswir, ekonom UGM sekaligus pakar ekonomi kerakyatan menyebutkan bahwa penyebaran budaya luar di Indonesia dimulai sejak adanya intelektual-intelektual Indonesia yang disekolakan di luar khususnya Amerika dan kembali ke Indonesia yang menudian disebut mafia *Berkeley*. Intelektual tersebut menjadi corong kepentingan asing dan mendidik generasi muda Indonesai. Segaris dengan itu, dalam aspek kebudayaan Dede Mulyanto (2011:222) dalam buku Antropologi Marx menjelaskan;

“ Di Indonesia sendiri , jurusan antropologi tumbuh berkembang di masa ‘pembangunn’. Sejak kepulangan Pofesor Koentjaraningrat dari Yale University, antropologi dikembangkan khusus untuk mengabdikan pada perjuangan pembangunan yang berpangkalan di suatu univertitas ternama di Jakkarta dalam memoderenkan bangsa Indonesia agar bisa tinggal landas menuju masyarakat adil dan makmur. Seperti bulldozer, antropologi Indonesai bergerak ke berbagai pedalaman membukakan jalur yang akan melapangkan gerak pembangunan ke mana pun kapital ingin mangalir.”

D. PENDIDIKAN SEBAGAI FILTRASI DAN PENYANGGA KEBUDAYAAN INDONESIA

Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran (*intellect*) dan tubuh anak (Ki Hadjar Dewantara,



2011: 14). Dalam mendidik anak bagian-bagian itu tidak boleh dipisah-pisahkan supaya pendidik dapat memajukan kesempurnaan hidup anak didiknya yaitu kehidupan anak-anak didik yang selaras dengan dunianya. Di samping itu melalui metode among yang mengandung pengertian bahwa para guru adalah pemimpin murid dalam proses belajar mengajar, tidak otoriter tetapi demokratis dialogis. Driyarkara dengan mengolah Serat Wedatama mengatakan bahwa orang muda harus mulad laku utama (mengikuti tingkah laku yang baik), karena mendidik adalah memanusiaikan manusia muda. Anita Lie mengatakan sebaiknya pendidikan menggunakan metode pembelajaran, peneladanan, pembiasaan pembudayaan dan perubahan (Saksono, 2008: 47-82).

Tamansiswa, perguruan yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantaa sebagai suatu sekolah nasional berdasarkan kebudayaan sendiri, bukan hanya mendidik intelektual yang menjadi pengajaran melainkan mendidik manusia pribadi yang insaf akan dirinya sebagai anggota masyarakat (Hatta, 1948: 23). Pernyataan Moh Hatta ini berarti merupakan sikap penentangan Ki Hadjar Dewantara terhadap sistem pendidikan barat yang semata-mata mementingkan intelektualisme dengan mengesampingkan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai budaya lokal. Walaupun Ki Hadjar Dewantara tidak anti budaya asing, tetapi nilai suatu budaya harus berakar dari budaya sendiri sedangkan nilai budaya asing harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya sendiri.

Pengajaran dan pendidikan adalah sarana penyebarluasan benih hidup merdeka di kalangan rakyat. Perjuangan dan pengabdian Tamansiswa kepada rakyat Indonesia selama dalam kekuasaan penjajahan (1922-1945) selalu sejalan dengan pergerakan rakyat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia.

Ali Saifulah H.A dalam bukunya yang berjudul Antara Filsafat dan Pendidikan, mengemukakan bahwa teori pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara memenag menunjukan adanya sesuatu yang dianggap penting dalam kaitannya dengan pembahasan hubungan antara filsafat dan teori pendidikan, sebagai salah satu contoh yakni definisi pendidikan nasional dari Ki Hadjar Dewantara.

“Ki Hadjar Dewantara (2011: 15) pendidikan Nasional ialah pendidikan yang berdasarkan garis-garis hidup bangsanya (kultur nasional) dan ditunjukkan untuk keperluan peri kehidupan, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, sehingga bersamaan kedudukan dan pantas bekerjasama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia disuruh dunia”.

Definisi pendidikan nasional tersebut telah disesuaikan dengan dasar-dasar filsafat pendidikan nasional dan yang dijadikan asas dasar pendidikan dalam perguruan Tamansiswa yang dibentuknya. Buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan yang di dalamnya banyak terdapat perbedaan-perbedaan dan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut tidak boleh membeda-bedakan agama, ras, elit, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonom, status sosial, dan sebagainya, serta harus di dasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi (Sugihartono dkk, 2007: 125).

Ajaran Ki Hadjar Dewantara dalam bidang pendidikan sangatlah luas, jika digolongkan terdapat delapan bab subtransi pokok pendidikan yaitu; pendidikan Nasional, politik pendidikan, pendidikan kanak-kanak, pendidikan kesenian, pendidikan keluarga, ilmu jiwa, ilmu adab dan bahasa. Jika dilihat menggunakan sistem Trisentra, pendidikan menurut (Ki Hadjar Dewantara, 2011: 70) dibagi menjadi tiga yaitu; keluarga, perguruan/sekolah, dan



pergerakan pemuda. Lebih lanjut Ki Hadjar Dewantara menitik beratkan pada asas kemerdekaan dalam mendidik generasi bangsa;

“Berilah kemerdekaan dan kebebasan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, namun yang terbatas oleh tuntutan kodrat-kodrat alam yang khas atau nyata, dan menuju ke arah Kebudayaan, yakni keluhuran dan kehalusan hidup manusia. Agar kebudayaan tadi dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat maka perlulah dipakainya dasar kebangsaan, akan tetapi jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaan.” (Sumber: Ki Hilmi Yusuf dalam buku “Ki Hadjar Dewantara dalam Pandangan Para Cantrik dan Mantrinya”, 1989: 57).

Mengembalikan Kepribadian Budaya Bangsa

Dari beberapa hal substansial diatas serta berbagai masalah yang melingkupi bangsa ini, terlebih dalam aspek kebudayaan tentu diperlukan adanya satu proteksi, sehingga kebudayaan yang masih tersisa ini tak ikut tergerus dan akhirnya hilang. Titik tekanya tentu pada generasi muda yang akan melanjutkan estafet perjuangan kedepan. Lalu dari mana semua ini akan dimulai? Jawabanya adalah dari pendidikan. Berangkan dari terori Tri-Pusat pendidikan bahwa terdapat tiga tempat pendidika yang sangat penting yaitu sekolah, keluarga dan pendidikan pemuda.

Dari ketiga tempat tersebut yang sama sekali tidak bisa dilewatkan adalah pendidikan karakter, lebih spesifk karakter gotong royong. Melihat pendidikan hari ini yang secara garis besar sudah menjadi pusat pengkaderan watak liberal individualistik perlu adanya pendidikan alternatif sebagai kontra hegemoni. Diranah sekolah semisal, sudah banyak bermnculan sekolah alam sebagai anti tesa dari sekolah di tingkatan dasar yang cenderung malah membebani siswa dengan tugas yang sangat berat.

Di level pendidikan tinggi perlu adanya konsolidasi yang massif baik bagi mahasiswa ataupun dosen. Sebagai anti tesa dari gempuraan ekspansi kebudayaan individualistik yang semakin menjalar. Selain itu filtrasi juga wajib dilakukan di ranah teori-teori yang tak berkesesuaian dengan karakter kolektifisme bangsa Indonesia. Watak atomistik dari ilmu harus diurai, karena dengan cara pandang semacam ini akan berimbas pada pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan dan melihat suatu permasalahan tidak holistik, hingga berimbas semakin jauh dari permasalahan sosial masyarakat. Bukan berarti kita harus menutup diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, namun sikap kritis harus terus dijaga agar tidak terbawa arus leberalisme.

Substansi yang sama dilonntarkan oleh Karl Marx. Bagi Marx, berteori itu politis. Praxis merupakan roh pemikiranya. Seperti halnya Marx mengguakan ekonomi-politik borjuis untuk menyusun kritik terhadap kapitalisme, begitu pula kita bisa menjadikan antropologi sebagai senjata kritik terhadap tatanan sosio-kultura kapitalisme dan kritik diri atas kecenderungan ilmu sosial yang ikut melanggengkan tatanan tersebut.

Di sisi lain pendidikan juga harus menjadi penyangga bagi kebudayaan Indonesia. Degradari moral yang terus mengikis generasi muda saat ini dan melemahnya kebudayaan nasional mesti harus segera dihentikan. Pendidikan berfungsi sebagai penyangga agar kebudayaan tetap eksis dan terus mereprodksi dirinya sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Merasa bangsa sendiri lemah dengan sikap *inlander* adalah kesalahan besar, cara pandang untuk meniru resep-resep bangsa asing dengan konsep yang secara paksa diterapkan



di Indonesia harus ditinggalkan. Karena sudah teruji, resep-resep tersebut bukanya malah memperbaiki kehidupan sosial namun justru membuat Indonesia makin tergantung dan tidak berdaulat. Kepribadian sebagai satu kesatuan bangsa yang besar terombang-ambing. Sudah saatnya pendidikan berjalan sebagaimana mestinya sebagai satu sarana dan instrumen pokok untuk mengembalikan lagi kepribadian budaya Indonesia.

REFERENSI

- David Harvey. 2009. *“Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis”* Yogyakarta: Resist Book
- Ki Hadjar Dewantara. 2011. *Kebudayaan*. Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa.
- _____. 2011. *Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Persatuan Tamansiswa.
- Ki B. Boentarsono, dkk. 2012. *Tamansiswa, Badan Perjuangan Kebudayaan & Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Perguruan Tamansiswa Yogyakarta.
- Ki Suwarjono Woro Sujono. 2015. *Pendidikan dan Pengajaran Nasional, Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Multi Presindo.
- Mansour Fakhri, Rahardjo, Roem Topatimasang, Toto., 2007. *Pendidikan Populer*. Sleman: INSISTPress.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ngalim Purwanto. 1984. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Remaja Karya.
- Newman Michael (2006): *“Sosialisme Abad 21”*. Yogyakarta: Resist Book
- Nurani Soyomukti. 2015. *Teori-Teori Pendidikan: Dari Tradisional, (Neo)Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmoderen*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Paulo Freire. 1985. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2007. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: REaD & Pustaka Pelajar.
- Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- Sri-Edi Swasono & Sudartomo Macaryus. 2013. *Kebudayaan Mendesain Masa Depan*. Yogyakarta: UST-Press.
- _____. 2015. *Pendidikan dan Kebudayaan: Ketamansiswaan, Pancasila, Keindonesiaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Toto Raharjo, dkk. 2007. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Isisit Pers.



RELIGIUSITAS SEBAGAI MEKANISME KONTROL PERILAKU DELINKUENSI REMAJA

Syarifan Nurjan¹ dan Adang Darmawan Achmad²

¹ Program Doctor of Islamic Educational Psychology
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: syarifan_flo @ yahoo.com

² Program Doctor of Islamic Educational Psychology
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: achmad 1711@gmail.com

ABSTRAK

Masa remaja melibatkan suatu proses yang menjangkau periode penting dalam kehidupan seseorang, menghadirkan begitu banyak tantangan, berupa perubahan-perubahan mulai dari perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial, yang menuntut remaja mampu menghadapi dan mengatasi tantangan perubahan dengan berbagai konsekuensi psikologis, emosional, dan behavioral. Selama masa remaja, remaja cenderung tidak lagi terlalu bergantung pada perlindungan keluarga dan melangkah memasuki situasi yang belum pernah mereka temui. Berbagai lingkungan tempat bergerak menghadirkan situasi dan peristiwa baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai religiusitas di Lembaga Pendidikan Islam Kabupaten Ponorogo sebagai mekanisme kontrol kecenderungan perilaku delinkuensi remaja. Analisis ini diambil dari model keterkaitan faktor-faktor yang berpengaruh pada kecenderungan perilaku delinkuensi remaja dengan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)*.

Berdasarkan temuan penelitian tentang religiusitas dan delinkuensi remaja, bahwa religiusitas sebagai faktor yang paling berperan menyebabkan timbulnya delinkuensi remaja. Dengan kata lain, remaja, lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media yang tingkat religiusitas tinggi, maka perilakunya cenderung sesuai dengan nilai dan norma-norma di masyarakat, lebih berhati-hati dalam berfikir, berucap, dan berperilaku, serta terhindar dari bahaya delinkuensi atau kecenderungannya.

Kata Kunci: Religiusitas; Mekanisme Kontrol; Perilaku Delinkuensi Remaja

A. PENDAHULUAN

Masa remaja melibatkan suatu proses yang menjangkau periode penting dalam kehidupan seseorang, menghadirkan begitu banyak tantangan, berupa perubahan-perubahan mulai dari perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial, yang menuntut remaja mampu menghadapi dan mengatasi tantangan perubahan dengan berbagai konsekuensi psikologis, emosional, dan behavioral (Herien P., 2009: 4, R..A. Webster, dkk, 1994: 647-657).

Masa remaja adalah masa perubahan, masa ketika remaja menghadapi berbagai pengalaman baru. Pada tahap kanak-kanak, kebanyakan remaja tinggal dalam suatu lingkungan yang terlindungi dan tertata di mana orang tua atau orang dewasa yang memberi perhatian adalah pihak yang memegang kendali. Selama tahap remaja, remaja cenderung



tidak lagi terlalu bergantung pada perlindungan keluarga dan melangkah memasuki situasi yang belum pernah mereka temui. Berbagai lingkungan tempat bergerak menghadirkan situasi dan peristiwa baru (D. Baumrind dalam P.A Cowan & E.M. Hetherington, 1991: 219-244, N. Grossman dan K.N. Rowat, 1995: 249-261, SS. Robin dan Johnson, 1996: 69-99)

Permasalahan umum remaja di sekolah berdasarkan informasi dengan teknik wawancara dan *focus group discussion* oleh Herien Puspitawati (2009: 19) dari berbagai sumber kepala sekolah atau pembina didapatkan gambaran delinkuensi remaja meliputi kurangnya disiplin siswa yang tercermin dari sering terlambatnya siswa masuk sekolah, ketidakrapian siswa dalam berpakaian seragam sekolah, melanggar tata tertib sekolah seperti merokok di lingkungan atau di luar sekolah dan sering ‘nongkrong’ di luar pagar sekolah sehingga terlambat masuk kelas. Kurangnya motivasi siswa untuk belajar yang dicerminkan dari jarangnyanya siswa membaca literatur, ketidakamanan siswa pada saat pulang dan pergi sekolah, dan kesulitan siswa untuk mendapatkan angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah.

Menurut para ahli psikologi perkembangan yaitu Papalia et al. (2004), Jhon W. Santrock (2007), Messina & Messina (2003), Gilliom et al. (dalam Santrock, 2007), ada beberapa alasan yang menyebabkan remaja melakukan perilaku delinkuensi, antara lain: (1) kepribadian yang belum matang (*immature personality*), (2) keturunan (*genetis*), (3) kondisi kehidupan keluarga yang tidak stabil (tidak harmonis).

Gejala-gejala delinkuensi seperti yang telah dikemukakan di atas itu hampir sulit dijumpai pada lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam dalam hal ini adalah pesantren, lembaga pendidikan di bawah organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama’ dan ormas lainnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan kesimpulan Nata (2001) yang menyatakan, para remaja yang tinggal di lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren lebih dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama dengan baik. Selain itu para remaja yang tinggal di pesantren dapat membaca Al-Qur’an dengan baik, memahami, dan mampu melaksanakan ajaran ibadah dengan baik, menghayati nilai-nilai agama serta berakhlak mulia.

Tetapi dalam kenyataannya, sebagaimana ungkapan Aan Fauzi Rifa’i (2009) dalam penelitiannya bahwa kehidupan di pesantren didapatkan pelanggaran santri seperti merokok, kencan atau pacaran, menginap di luar asrama, pencurian, dan penelitian Renti Yasmar (2009) bahwa kenakalan santri berupa membolos, terlambat datang ke sekolah, merokok, berkelahi, serta hasil wawancara (bersama ust Syamsul Hadi Untung, 2015) di Pondok Modern Gontor Ponorogo menggambarkan berbagai pelanggaran disiplin, yaitu tahun 2011 berupa pelanggaran ringan 34.111, sedang 351, dan berat 22, tahun 2012 berupa pelanggaran ringan 43.157, sedang 1138 dan berat 41, dan tahun 2013 berupa pelanggaran ringan 39.100, sedang 450, dan berat 52.

Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa kriteria lembaga pendidikan Islam setingkat SLTP dan SLTA, yang diantaranya dikelola oleh organisasi Muhammadiyah sebanyak 24 lembaga, Nahdhatul Ulama’ sebanyak 13 lembaga, dan yang berupa pesantren; dengan kriteria pesantren modern (*‘ashriyah*) sebanyak 18 lembaga, tradisional (*salafi*) sebanyak 9 lembaga, dan kombinasi antara modern dan tradisional sebanyak 33 lembaga (Data Statistik Kementerian Agama Kab. Ponorogo, 2015).

Dengan demikian, kehidupan remaja tidak lepas dari kehidupan masyarakat disekitarnya. Di Lembaga Pendidikan Islam melakukan berbagai kontrol psikososial remaja yang berupa pendekatan disiplin, pendekatan bimbingan dan konseling, pembinaan akhlak



santri (S.N. Erna. R, 2009), pengembangan pola interaksi sosial kyai dan santri (Andi W, 2009), pola komunikasi santri (Rina J.P, 2013) dan sebagaimana teori kontrol diri dari Hirschi pada perilaku delinkuensi remaja disebabkan aktivitas yang rutin Houghton dkk (2008: 205-223).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai religiusitas di Lembaga Pendidikan Islam Kabupaten Ponorogo sebagai mekanisme kontrol kecenderungan perilaku delinkuensi remaja. Analisis ini diambil dari model keterkaitan faktor-faktor yang berpengaruh pada kecenderungan perilaku delinkuensi remaja dengan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)*.

B. LANDASAN TEORI

1. Meta Analisis Perilaku Delinkuensi Remaja

Sampel penelitian yang dikaji dalam studi meta analisis didasarkan pada pendapat logis ahli psikologi dan hasil penelitian sejumlah 89 jurnal yang memiliki karakteristik; 1) penelitian delinkuensi remaja, faktor internal dan faktor lingkungan remaja sejumlah 41 jurnal, 2) penelitian delinkuensi remaja dan kontrol psikososial sejumlah 21 jurnal, dan 3) penelitian religiusitas pesantren/*boarding school* sejumlah 27 jurnal.

Dari hasil meta analisis memberitahukan bahwa perilaku delinkuensi remaja dalam beberapa penelitian di jurnal lebih mengarah pada perilaku delinkuensi yang disebabkan kriminalitas, karena kurangnya perhatian lingkungan keluarga dan sekolah serta dipengaruhi berbagai faktor-faktor internal remaja yang menjadi budaya komunitas masyarakat remaja.

Adapun rencana penelitian ini berasumsi bahwa remaja dengan lingkungan pesantren dan lembaga pendidikan Islam bisa meminimalisir kecenderungan perilaku delinkuensi remaja, yang dalam perkembangan, mereka mengalami masa transisi/perubahan yang konteks dengan lingkungannya, sebagaimana diungkapkan oleh Hill dalam teori psikososial.

2. Religiusitas

a. Pengertian Relegiusitas

Religiusitas dari kata asal *Religi* yang berasal dari bahasa *Latin*, yaitu *Relegere* yang berarti mengumpulkan, membaca, dan juga berasal dari kata *religare* yang bermakna mengikat. Atau dalam bahasa Indonesia sama dengan pengertian Agama yakni memuat aturan-aturan dan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dipahami dan mempunyai sifat mengikat kepada manusia, karena agama mengikat manusia dengan Tuhan. Kata dasar agama mempunyai beberapa arti baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah.

Menurut Jalaluddin mendefinisikan *religiusitas* merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Religiusitas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash.

Selanjutnya *Skinner* menjelaskan sikap religius sebagai ungkapan bagaimana manusia dengan pengkondisian peran belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh hukum ganjaran dan hukuman. Perasaan *religius* ialah perasaan berkaitan dengan Tuhan atau Yang Maha Kuasa, antara lain takjub, kagum, percaya, yakin keimanan, tawakal, pasrah diri, rendah hati ketergantungan pada Ilahi, merasa diri sangat kecil, kesadaran akan dosa dan lain-lain.



Definisi lain diungkap, Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman) yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali diidentikan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan. Seberapa kokoh keyakinan. Sedangkan Ahyadi mendefinisikan sikap *religiusitas* sebagai tanggapan pengamatan, pemikiran, perasaan dan sikap ketaatan yang diwarnai oleh rasa keagamaan.

b. Dimensi Relegiusitas

Keberagamaan atau *religiusitas* diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktifitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supra natural. Bukan hanya berkaitan dengan aktifitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang, karena itu keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai dimensi. Adapun dimensi-dimensi dalam keberagamaan atau religiusitas menurut Glock dan Stark sebagai berikut:

- a. Dimensi keyakinan. Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan muslim terhadap kebenaran ajaran-ajaran agama terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat fundamental dan dokmatik.
- b. Dimensi praktek agama, ini mencakup perilaku pemujaan komitmen ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek agama (peribadatan) ini disejajarkan dengan syari'ah.
- c. Dimensi Pengalaman. Dimensi ini berkenaan dengan seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan pengalaman religiusitas.
- d. Dimensi pengetahuan, ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman muslim terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya, sebagaimana termuat dalam kitab sucinya.
- e. Dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat muslim berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran.

3. Perilaku Delinkuensi Remaja

a. Pengertian Remaja

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, di mana tubuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif (H. Agustiani, 2009: 76, Steinberg and Belsky, 1991: 131, Kimmel, D.C and Weiner, I.B 1995: 87)

Masa remaja dikenal sebagai salah satu periode dalam rentang kehidupan manusia yang memiliki beberapa keunikan tersendiri. Keunikan tersebut bersumber dari kedudukan masa remaja sebagai periode transisional antara masa kanak-kanak dan masa dewasa (Lerner, Richard. M lerner & Hultsch David F., 1983: 94, Elizabeth Hurlock, 2006: 86), dengan perubahan fisik, perubahan emosional, perubahan kognitif (Piaget dalam Hurlock, 2006: 35-39),

Erikson (dalam Hurlock, 2006) mengatakan bahwa masa remaja adalah seseorang yang dari sisi usia kronologis berada pada rentang usia 12-21 tahun, yang sedang mengalami



transisi biologis, kognitif dan sosial, serta sedang mengalami perkembangan psikososial berupa *identity*, *autonomy*, *intimacy*, *sexuality*, dan *achievement*.

b. Teori Perilaku Remaja

Perilaku sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks pada remaja tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh individu yang bersangkutan baik stimulus eksternal maupun internal. Karakteristik reaksi perilaku remaja yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maksudnya, satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respons yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respons yang sama (Azwar, 2009: 17) model hubungan perilaku yang mengatakan bahwa perilaku (B) adalah fungsi karakteristik individu (P) dan lingkungan (E), yaitu $B = f(P, E)$ (Kurt Lewin dalam Azwar, 2009: 23).

Behaviorisme Skinner menekankan studi ilmiah mengenai respons perilaku yang teramati serta diterminan-determinan lingkungan. Dalam perilaku menurut B.F. Skinner (1969), pikiran, kesadaran atau ketidaksadaran, tidak dibutuhkan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Teori Kognitif Sosial (*social cognitive theory*) menyatakan bahwa perilaku, lingkungan dan kognisi merupakan faktor-faktor penting dalam perkembangan. Albert Bandura (1986) adalah arsitek dari versi kontemporer teori kognisi sosial, yang awalnya oleh Mischel (dalam Santrock, 2007) dinamai teori pembelajaran sosial kognitif (*cognitive social learning theory*).

Bandura menyatakan bahwa faktor perilaku, lingkungan, dan pribadi /kognitif, seperti keyakinan, perencanaan, dan berpikir, dapat berinteraksi secara timbal balik. Dengan demikian, dalam pandangan Bandura, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang (sesuai dengan pandangan Skinner), yang meliputi *self efficacy*, *self identity*, dan *self control*.

c. Teori Delinkuensi Remaja

Remaja disebut dengan istilah *Juvenile* dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* dari bahasa latin "*delinquere*" yang berarti mengabaikan, yang diperluas menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana dan lain sebagainya (Kartini K, 2006).

Istilah *Juvenile delinquency* atau perilaku jahat merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang (Hurlock, 2006, Conger & Dusek dalam Hurlock, 2006, Sarwono, 2008, Santrock, 2007).

Faktor-faktor kenakalan remaja menurut Santrock (2007) yaitu: identitas, kontrol diri, usia (McCord dalam Kartono, 2006), jenis kelamin, harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah (Chang dan Thao N. Lee dalam Kartono, 2006), proses keluarga (Gerald Patterson dan rekan-rekannya dalam Santrock), pengaruh teman sebaya (Santrock, 2007), kelas sosial ekonomi, dan kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal.

4. Teori Kontrol Psikososial

a. Ikatan Sosial Sebagai Faktor Perilaku Delinkuensi

Indonesia dikenal dengan masyarakat transisi atau *modernizing society*. Masyarakat seperti ini berbeda dari *tradition oriented society* (masyarakat tradisional) dan *modern society* (masyarakat modern). Keadaan masyarakat transisi oleh Emile Durkheim (1951)



dikatakan akan membawa individu anggota masyarakat kepada keadaan *anomie* adalah *normalesness*, yaitu suatu sistem sosial berupa tidak ada petunjuk atau pedoman untuk tingkah laku. Kondisi anomie atau yang *ambivalent* (tidak jelas nilai yang dianutnya) dan *ambiguous* (tidak jelas bentuk kelakuannya) (Sarlito, 2008), ini tentu saja tidak hanya berlaku terhadap anggota masyarakat dewasa, tetapi juga terhadap para remaja.

Perlunya ikatan sosial sebagaimana lingkungan sekolah yang dikelola oleh organisasi keagamaan, berupa pesantren, *boarding school* atau bentuk lainnya, sehingga semakin kuat ikatan sosial di lingkungan remaja, semakin mengurangi bentuk-bentuk delinkuensi, dengan berbagai norma-norma, aturan, dan kepribadian yang Islami.

b. Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirchi.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat yang sama, yakni menjadi “baik” atau “jahat”. Baik-jahatnya seseorang sepenuhnya bergantung pada ikatan sosial yang kuat dengan masyarakatnya (Paulus H.S. 2008). Dengan demikian, menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasannya ialah ketaatan pada norma, dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Hirschi (2006) klasifikasi unsur-unsur ikatan sosial itu menjadi empat, yaitu (a) *attachment*, (b) *commitment*, (c) *involvement*, (d) *beliefs*.

C. METODE

Penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian yang menggunakan uji analisis *Structural Equation Model (SEM)* (Program LISREL) (Imam Ghazali, 2008: 89), yaitu suatu model yang juga disebut *A Covariance Structure Model* untuk menguji model-model empiris dalam menjelaskan varian dan korelasi antara suatu set variabel-variabel yang diobservasikan (*observed*) dalam suatu sistem kausal (sebab akibat) dari faktor-faktor yang tidak diobservasi (*unobserved*) dan untuk mengetahui pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung variabel-variabel laten baik *endogenous* maupun *exogenous*.

Beberapa variabel yaitu variabel independen berupa internal remaja, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, dan media, variabel mediator berupa kontrol psikososial dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, media, dan variabel dependen berupa perilaku delinkuensi remaja.

Populasi dalam penelitian ini sejumlah 1354 siswa dari kelas 1 dan kelas 2 dari sekolah SMA Muhammadiyah, MA Ma'arif, MA Pesantren Modern dan MA Pesantren tradisional (Dinas Pendidikan, 2005). Dengan demikian jumlah sampel keseluruhan dari populasi penelitian adalah 225 siswa atau 15 % dari populasi.

D. PEMBAHASAN

1. Multikolinearitas dan singularitas

Multikolinearitas dan Singularitas dapat diuji dan dideteksi dari nilai determinan matriks kovarians. Pada tabel *sample covariances* nilai *determinant of sampel covariance matrix* = 0.000. Dari nilai tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi masalah Multikolinearitas dan Singularitas pada data yang dianalisis. Meskipun menunjukkan nilai nol, nilai masih bersifat positif sehingga model ini masih dianggap baik (Imam Ghazali, 2008: 97).



2. Uji kesesuaian model *goodness of fit*

Hasil pengujian sebagaimana pada tabel 2 berikut ini: Pengujian kesesuaian model penelitian digunakan untuk menguji seberapa baik tingkat *goodness of fit* dari model penelitian. Berdasarkan hasil pengujian yang telah tersaji di atas, diketahui dari 12 kriteria yang ada, 11 diantaranya yang berada pada kondisi baik dan 1 masih dalam tidak fit. Dengan hasil ini maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa model penelitian memiliki tingkat *goodness of fit* yang baik.

3. Hasil Analisis

Analisis selanjutnya adalah analisis *Structural Equation Model* (SEM) secara *Full Model* yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam *Structural Equation Model* dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi.

a. Analisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung

1) Analisis pengaruh langsung

Hasil analisis pengaruh langsung dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Besarnya pengaruh langsung lingkungan remaja terhadap kontrol psikososial sebesar 0.802 (80%). dan besarnya pengaruh langsung internal remaja terhadap kontrol psikososial sebesar 0.168 (16.8%).
- b) Besarnya pengaruh kontrol psikososial terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi sebesar 0.267 (26.7%), sedangkan lingkungan remaja memberikan kontribusi terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi remaja sebesar 0.191 (19.1%) dan internal remaja terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi sebesar 0.179 (17.9%) memberikan pengaruh negatif.

2) Analisis pengaruh tidak langsung

Hasil analisis pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Besarnya pengaruh tidak langsung lingkungan remaja terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi karena adanya kontrol psikososial sebesar 0.214 (21.4%)
- b) Besarnya pengaruh tidak langsung internal remaja terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi karena adanya kontrol psikososial sebesar 0.045 (4.5%)

4. Pembahasan

- a. Kecenderungan perilaku delinkuensi remaja disebabkan karena bahwa masa remaja adalah masa transisi dari perubahan-perubahan mulai dari perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial, yang menuntut remaja mampu menghadapi dan mengatasi tantangan perubahan dengan berbagai konsekuensi psikologis, emosional, dan behavioral.
- b. Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Ponorogo berjumlah 586 lembaga, ini memberikan gambaran bahwa sebagian besar remaja ada di lembaga-lembaga Islam. Pengaruh lingkungan remaja terhadap kecenderungan delinkuensi sebesar 0.191 (19.1%) dan internal remaja sebesar 0.179 (17.9%) memberikan pengaruh negatif. Besarnya pengaruh tidak langsung lingkungan remaja terhadap kecenderungan



perilaku delinkuensi yang dimediasi oleh kontrol psikososial sebesar 0.214 (21.4%) Dan besarnya pengaruh tidak langsung internal remaja terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi karena adanya kontrol psikososial sebesar 0.045 (4.5%).

Ini memberikan informasi bahwa lingkungan remaja yang religius memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan delinkuensi remaja daripada faktor internal remaja. Dan kontrol psikososial memiliki pengaruh yang kuat juga. Semakin kuat fungsi lingkungan dan diri remaja sebagai kontrol psikososial, maka semakin mengurangi kecenderungan perilaku delinkuensi dan berbagai perangai yang kurang baik pada remaja.

c. Model pendekatan kontrol psikososial dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi remaja di lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Ponorogo, yaitu:

- 1) Disiplin, beberapa cara dan pendekatan yang diterapkan dalam kerangka penegakkan disiplin di pesantren/*boarding school*, yaitu:
 - Sosialisasi sunnah disiplin
 - Mengikis pelanggaran disiplin dengan absensi malam
 - Melibatkan organisasi santri/siswa dalam penegakkan disiplin
 - Berbagai aturan main disiplin
- 2) *At-tarhib wa At-tarhib*

E. KESIMPULAN

Faktor internal dan lingkungan remaja yang religius terhadap kecenderungan perilaku delinkuensi remaja memiliki pengaruh kuat, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung yang dimediasi oleh kontrol psikososial. Semakin kuat peran kontrol psikososial maka semakin berkurang kecenderungan perilaku delinkuensi remaja. Ini menandai bahwa Lembaga Pendidikan Islam yang mengembangkan nilai-nilai religiusitas diharapkan fungsi dan perannya sebagai kontrol perkembangan remaja, khususnya kecenderungan perilaku delinkuensi, dengan harapan bisa mengantarkan remaja ke berbagai prestasi dan pengembangan bakat yang lebih baik.

REFERENSI

- Agustiani, H., (2009). *Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja)*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Andayani, B & Afiatin, T., (1996). Konsep Diri, Harga Diri, dan Kepercayaan Diri Remaja. *Jurnal Psikologi*. 23 (2). 23-30
- Arnett, J.J., (1999). *Adolescent Storm and Stress, Reconsidered*. American Psychological Assosication, Inc., Vol. 54, No. 5, 317-326.
- Barnes, G. M., at. Al., (2007), Adolescents' Time Use: Effects on Substance Use, Delinquency and Sexual Activity, *Original Paper*, J Youth Adolescence 36: 697-710.
- Burke, P. J. & Stets, J.E. (2009), *Identity Theory*, Oxford: Oxford University Press.
- Carr, M. B., Lutjemeier, J.A., (2005), The Relation of Facial Affect Recognition and Empathy to Delinquency in Youth Offenders, *Adolescence*, Vol. 40, No. 159.
- Cole, L. (1963). *Psychology of Adolescence*. Edisi ke-5 New York: Holt, Rinehard and Winston Inc.



- Griffin, A.M., (2008). *the First Look of Communication, Building Communication Theories*, Newyork, Harpers Row.
- Hirschi, T., (1969), *Causes of Delinquency*, Univercity of California Press, Berkeley.
- Hurlock, E. B., (1973), *Adolescent Development*, McGraw-Hill Inc.
- Joreskog. K.G.S.D., (1999) *LISREAL '8: New Statistical Features*, Chicago, Illinois: Scientific Software International.
- Kennedy, A.C., (2008), An Ecological Approach to Examining Cumulative Violence Exposure Among Urban, African American Adolescents, *Child Adolesc Soc Work J*, 25: 25-41
- Kimmel, D.C and Weiner, I.B. (1995). *Adolescence. A Developmental Transition*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Petts, R.J., (2009), Family and Religious Characteristics' Influence on Delinquency Trajectories from Adolescence to Young Adulthood, *American Sociological Review*, Vol 74. P. 465-483.
- Puspitawati, H., (2009), *Kenakalan Pelajar Dipengaruhi Oleh Sistem Sekolah dan Keluarga*, IPB Press, Bogor.
- Rice, F.P. (1999). *The Adolescent, Development, Relationship, and Culture*. Edisi ke-9. Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Santrock, Jhon W. (2007) *Adolescence*, (Alih Bahasa: Shinto B. Adeler & Sherly Saragih), Erlangga, Jakarta.
- Sarwono, S. W. (2008). *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sprinthall, N.A and Collins, W.A. (1997), *Adolescent Psychology*. A Developmental View. St. Louis; McGraw-Hill, Inc.
- Steinberg, L. (2000), *Adolescence*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Taylor, L. D., et al., (2007). Self-Esteem, Academic Self-Concept, and Aggression at School, *Journal of Aggressive Behavior*, Vol. 33, 130-136

